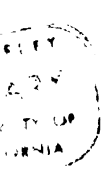


UC-NRLF



QB 640 770



1563



**DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN**



**BUKU PETUNDJUK  
ADMINISTRASI UMUM  
DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN**

**TJETAHAN PERTAMA  
TAHUN 1970**

---

Disahkan dengan Surat Keputusan MENHANKAM/PANGAB  
No. KEP/B/716/XII/1970, Tanggal 26 Desember 1970.











INDONESIA.

1 DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN



**BUKU PETUNDJUK  
ADMINISTRASI UMUM  
DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN**

**TJETAKAN PERTAMA  
TAHUN 1970**

---

**Disahkan dengan Surat Keputusan MENHANKAM/PANGAB  
No. KEP/B/716/XII/1970, Tanggal 26 Desember 1970.**



UB 113  
I5A441  
1970

**DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN**

---



**SURAT - KEPUTUSAN**

Nomor : KEP/B/716/XII/1970

tentang

**PENJEMPURNAAN BUKU PETUNDJUK ADMINISTRASI UMUM  
DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN**

**MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/PANGLIMA  
ANGKATAN BERSENDJATA**

- Menimbang :**
1. Bahwa Buku Petundjuk Administrasi Umum Departemen Pertahanan-Keamanan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan **MENHANKAM/PANGAB** No. KEP/B/523/1968 disusun berlandaskan Keputusan Presiden R.I. No. 132 tahun - 1967 ;
  2. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden R.I. No. 79 tahun 1969 sebagai penjempurnaan Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967, maka dianggap perlu untuk menjempurnakan Buku Petundjuk Administrasi Umum Departemen Pertahanan-Keamanan, dengan menambah pedoman-pedoman baru untuk dapat memenuhi kebutuhan didalam tata-tjara penyelenggaraan Administrasi Umum dilingkungan Departemen Pertahanan-Keamanan.
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden R.I. No. 79 tahun 1969 tentang Penjempurnaan Keputusan Presiden R.I. No. 132 tahun 1967;
  2. Surat Keputusan **MENHANKAM/PANGAB** No. KEP/B/523/1968 tentang Pengesahan Buku Petundjuk Administrasi Umum Departemen Pertahanan-Keamanan.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Penjempurnaan Buku Petundjuk Administrasi Umum Departemen Pertahanan-Kemanan dengan penambahan ketentuan-ketentuan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

Daftar Distribusi "A" dan "B".

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 26 Desember 1970.

A.n. MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA  
W A P A N G A B




*[Signature]*  
PANGGABEAN  
PANGKENDAL TNI.



Handwritten signature: *Edgar Allan Poe*

LIBRARY  
OF THE  
CITY OF BOSTON

RECEIVED  
JAN 10 1871



## PENGANTAR

*Dalam rangka merealisasikan Surat Perintah Wakil Panglima Angkatan Bersendjata No. PRIN/E/205/VII/1970 tentang penyelenggaraan Kursus Pembinaan Administrasi Umum Departemen Pertahanan-Keamanan, dipandang perlu untuk menjempurnakan Buku Petunjuk Administrasi Umum Departemen Pertahanan-Keamanan yang telah pernah disahkan berlakunya dengan Surat Keputusan MENHANKAM/PANGAB No. KEP/B/523/1968, mengingat penjunjunnja masih didasarkan atas Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967.*

*Langkah penjempurnaan tersebut perlu ditempuh, pada prinsipnja adalah untuk menyesuaikan Buku Petunjuk Administrasi Umum Departemen Pertahanan-Keamanan dengan perkembangan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Departemen Pertahanan-Keamanan berdasarkan atas Keputusan Presiden No. 79 tahun 1969, serta guna melengkapi pedoman-pedoman baru sesuai dengan kebutuhan dalam bidang Administrasi Umum.*

*Hasil yang ditjapai dalam penjunjutan Buku Petunjuk Administrasi Umum ini belum lengkap dan sempurna, karena itu masih dibutuhkan pengembangan dan penjempurnaan selanjutnja. Dalam hal ini sangat diharapkan agar dari hasil pengetrapan pedoman-pedoman Buku Petunjuk Administrasi Umum ini, akan dapat didjumpai penemuan-penemuan baru untuk dapat dijadikan saran dan pertimbangan guna penjempurnaan.*

*Segala usaha kearah penjempurnaan tersebut merupakan bahan yang berguna sekali dalam rangka melengkapi Buku Petunjuk Administrasi Umum Departemen Pertahanan-Keamanan, dan dengan demikian merupakan sumbangan yang besar kearah tertjapainja tudjuan integrasi ABRI dibidang Administrasi Umum.*

*Buku Petunjuk Administrasi Umum ini telah disahkan berlakunya dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan/PANGAB Nomor KEP/B/716/XII/1970 tanggal 26 Desember 1970.*

*/ Hendaknja . . . . .*



*Hendaknja Buku Petunjuk Administrasi Umum Departemen Pertahanan-Keamanan ini digunakan sebagai pedoman khususnja bagi para Pejabat Administrasi Umum dilingkungan Departemen Pertahanan-Keamanan dalam menunaikan tugasnja masing-masing, agar dapat tertjapai dasar pengertian dan tata-tjara pelaksanaan jang sama sehingga pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dibidang Administrasi Umum dapat terselenggara dengan sebaik-baiknja.*

*Selandjutnja agar Buku Petunjuk Administrasi Umum Departemen Pertahanan-Keamanan ini dapat memenuhi tudjuan sesuai jang diharapkan.*

*Djakarta, 30 Desember 1970.*

**KEPALA STAF DEPARTEMENTAL HANKAM**



*Alu* —

**SALEH BASARAH**  
**LAKSAMANA MADYA UDARA**





## DAFTAR — ISI

	Hal.
<b>BAGIAN PERTAMA : PENDAHULUAN</b>	
BAB — I : U M U M .....	1
II : PENGERTIAN-PENGERTIAN .....	4
III : MAKSUD & TUDJUAN DAN RUANG LINGKUP .....	8
IV : DASAR- <sup>2</sup> SISTIM PENGGOLONGAN ADMINIS- TRASI .....	8
V : DASAR- <sup>2</sup> SISTIM PENJELENGGARAAN ADMINIS- TRASI .....	10
VI : P E N A T A N .....	12
<b>BAGIAN KEDUA : TULISAN-<sup>2</sup> DINAS</b>	
BAB — I : U M U M .....	15
II : PENGGOLONGAN TULISAN- <sup>2</sup> DINAS .....	15
III : TULISAN- <sup>2</sup> DINAS JANG BERSIFAT MEN- GATUR .....	16
IV : TULISAN- <sup>2</sup> DINAS JANG BERSIFAT NAS- KAH/SURAT .....	24
V : TULISAN- <sup>2</sup> DINAS JANG MERUPAKAN PRODUK- <sup>2</sup> JUDIKATIF, POLISIONIL DAN PERBENDAHARAAN .....	31
VI : PEROBAHAN, PENTJABUTAN, PEMBA- TALAN DAN RALAT .....	32
VII : BENTUK-BENTUK .....	32
VIII : SUSUNAN DAN PENULISAN .....	33
IX : TJARA- <sup>2</sup> MENJUSUN DAN MENGETIK TULISAN- <sup>2</sup> DINAS .....	35
<b>BAGIAN KETIGA : SURAT MENJURAT DINAS</b>	
BAB — I : U M U M .....	49
II : KLASIFIKASI DAN DERADJAT .....	49
III : SURAT MASUK .....	51
IV : SURAT KELUAR .....	52
V : PEMBUKUAN SURAT- <sup>2</sup> MASUK DAN KE- LUAR .....	54
VI : SURAT MENJURAT .....	65
<b>BAGIAN KEEMPAT : SISTIM TATA NASKAH</b>	
BAB — I : U M U M .....	69
II : PELAKSANAAN .....	70



**BAGIAN KELIMA : PENJAMPAIAN BERITA**

BAB —	I	: U M U M .....	85
	II	: STRUKTUR, AREA DAN MEDIA .....	85
	III	: ALAT/MEDIA PENJAMPAIAN BERITA .....	86
	IV	: KETENTUAN- <sup>a</sup> CHUSUS .....	97
	V	: PERTANGGUNGAN DJAWAB .....	100
	VI	: A L A M A T .....	100

**BAGIAN KEENAM : SINGKATAN**

BAB —	I	: U M U M .....	103
	II	: TATA — TJARA .....	103
	III	: LAIN-LAIN .....	107

**BAGIAN KETUDJUH : PENGURUSAN ARSIP**

BAB —	I	: U M U M .....	109
	II	: PENERIMAAN, PENJIMPANAN DAN PEME- LIHARAAN .....	110
	III	: PENILAIAN DAN PENENTUAN DJANGKA WAKTU .....	110
	IV	: TINGKAT DAN PENJALURAN ARSIP .....	112
	V	: PEMUSNAHAN .....	114
	VI	: PENJIMPANAN ARSIP DENGAN SISTIM 3M MICROFILM .....	114
	VII	: LAIN-LAIN .....	115

**BAGIAN KEDELAPAN : FORMULIR**

BAB —	I	: U M U M .....	117
	II	: PELAKSANAAN .....	118

**BAGIAN KESEMBILAN: TJAP-DJABATAN DAN PAPAN-NAMA**

BAB —	I	: U M U M .....	123
	II	: TJAP-DJABATAN .....	123
	III	: PAPAN-NAMA .....	133

**BAGIAN KESEPULUH : STATISTIK DAN SISTIM PENGOLAHAN  
DATA OTOMATIS (SPEDO)**

BAB —	I	: U M U M .....	137
	II	: STATISTIK .....	137
	III	: PELAPORAN DATA .....	140
	IV	: TABEL DAN GRAFIK .....	141
	V	: SISTIM PENGOLAHAN DATA OTOMATIS (SPEDO) .....	150
	VI	: PENUTUP .....	152



## BAGIAN PERTAMA

### PENDAHULUAN

#### BAB I

#### U M U M

##### 1. Dasar Pokok-<sup>2</sup> Organisasi dan Prosedur DEPHANKAM.

- a. Ketetapan MPRS. Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tanggal 5 Djuli 1966 tentang kebidjaksanaan dalam bidang Pertahanan-Keamanan antara lain telah menetapkan :
  - 1) Penindjauan kembali semua Ketetapan/Keputusan dan Resolusi MPRS jang menjangkut bidang Pertahanan-Keamanan, pelaksanaan mana diserahkan pada kebidjaksanaan Pimpinan MPRS.
  - 2) Membuat U.U. Pokok Pertahanan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja, pelaksanaan mana ditugaskan pada Pemerintah dan DPRGR atas dasar kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh MPRS.
- b. Perkembangan mengenai Pokok-<sup>2</sup> Organisasi dan Prosedur DEPHANKAM tertjantrum pada :
  - 1) *Keputusan Presiden No. 132/tahun 1967.* Dalam rangka pelaksanaan U.U. Dasar 1945, sebagai langkah pertama menudju pada realisasi Ketetapan MPRS tersebut, berdasarkan Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan perobahan-<sup>2</sup> Pokok-<sup>2</sup> Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan-Keamanan.
  - 2) *Keputusan Presiden No. 79 tahun 1969.* Kemudian atas dasar pengalaman-pengalaman jang positif dibidang integrasi fungsi-<sup>2</sup> Pertahanan-Keamanan baik dalam segi Pokok-<sup>2</sup> Organisasi maupun dalam segi prosedur kerdjanja, maka dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 tahun 1969 tanggal 4 Oktober 1969 sebagai penjempurnaan Keputusan No. 132 tahun 1967, dengan maksud dan tudjuan agar :
    - a) Dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penentuan kebidjaksanaan, perentjanaaan, penjusunan organisasi, pengendalian kegiatan dan pengambilan tindakan dalam Pertahanan-Keamanan/

/ Angkatan ..... ..



Angkatan Bersendjata Republik Indonesia sehingga tertjapai pelaksanaan jang tegas dari Doktrin HANKAMNAS dan Doktrin Perdjjuangan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia serta penjelenggaraan Administrasi setjara tertib dan teratur.

- b) Dapat memenuhi kebutuhan organisasi modern dengan memperhatikan keseimbangan antara faktor-<sup>2</sup> manusia, fisik materiil dan tugas.
- c. Adapun isi Keputusan Presiden No. 79 tahun 1969 jang penting antara lain adalah sebagai berikut :

1) *Tudjuan HANKAMNAS.* Dalam rangka pemerintahan Umum Negara Republik Indonesia, fungsi Pertahanan-Keamanan Nasional (HANKAMNAS), merupakan salah satu fungsi utama Pemerintahan Negara jang khusus ditudjuikan kepada tertjapainja keamanan Bangsa dan Negara serta keamanan perdjjuangan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional berlandaskan Pantja Sila, baik dalam aspek Nasional maupun Internasional.

2) *Tugas pokok Departemen Pertahanan-Keamanan.*

- a) Untuk mentjapai tudjuan HANKAMNAS, maka fungsi Pertahanan-Keamanan pada dasarnya diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan-Keamanan, jang bertugas pokok menjelenggarakan tuntunan kebidjaksanaan dan pembinaan kegiatan-<sup>2</sup> HANKAMNAS dan Kekaryaan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.
- b) Tuntunan kebidjaksanaan dan pembinaan kegiatan-<sup>2</sup> HANKAMNAS dan Kekaryaan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia tersebut diatas, diselenggarakan setjara koordinatif fungsionil terhadap semua kegiatan-<sup>2</sup> Negara dan Masjarakat untuk mengamankan perdjjuangan, mempertahankan Negara, serta melindungi Rakjat pada umumnya dan setjara integratif struktural terhadap Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan Badan-<sup>2</sup> HANKAM lainnya.

3) *Fungsi-fungsi Departemen Pertahanan-Keamanan.* Untuk menjelenggarakan tugas Pokok tersebut, Departemen Pertahanan-Keamanan mempunyai dan menjelenggarakan fungsi-<sup>2</sup> Utama, fungsi-<sup>2</sup> Organik, fungsi-<sup>2</sup> Teknis, fungsi Kekaryaan dan fungsi Khusus.

a) *Fungsi-<sup>2</sup> Utama.*

- (1) Pembentukan suatu kekuatan HANKAMNAS jang terdiri dari potensi ABRI sebagai inti dan potensi-<sup>2</sup> Nasional lainnya.
- (2) Pemeliharaan dan peningkatan Ketahanan Nasional disegala bidang, berdasarkan kesadaran tjara pendekatan keamanan.

/ (3) Integrasi .....

- (3) Integrasi intra ABRI dan integrasi antara ABRI dengan Rakjat dalam rangka sistim Pertahanan-Keselamatan Rakjat Semesta.
- (4) Ikut serta dalam perjuangannya Nasional guna mentjapai Tujuan Nasional.
- (5) Ikut serta dalam penyelenggaraan Hubungan Internasional dibi-  
dang HANKAM dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban  
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ke-  
adilan sosial.
- b) *Fungsi-fungsi Organik*. Fungsi-fungsi Organik adalah fungsi yang bersifat menentukan bagi kelangsungan hidup organisasi.
  - (1) Fungsi-fungsi Organik meliputi :
    - (a) Operasi dalam arti luas.
    - (b) Administrasi dalam arti luas.
    - (c) Penelitian dan Pengembangan.
  - (2) Fungsi-fungsi Organik tersebut ditujukan kepada :
    - (a) Pembinaan ABRI.
    - (b) Pembinaan potensi<sup>3</sup> HANKAM lainnya.
    - (c) Pembinaan sistim HANKAMRATA yang integral.
- c) *Fungsi<sup>3</sup> Teknis* meliputi :
  - (1) Pembinaan kekuatan ABRI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan<sup>3</sup> HANKAM lainnya, termasuk Badan<sup>3</sup> Pelajaran Teknis dan Administratif HANKAM.
  - (2) Pembinaan kekuatan Perlawanan dan Keselamatan Rakjat.
  - (3) Bantuan Teknis pembinaan serta pengawasan Pertahanan Sipil.
  - (4) Pembinaan Satuan<sup>2</sup> Operasional HANKAM yang disusun ber-  
dasarkan kewilayahan dan fungsi.
- d) *Fungsi Kekaryaan*. Fungsi Kekaryaan adalah fungsi pembinaan Ke-  
karyaan dan Karyawan ABRI sebagai kekuatan sosial dalam rangka ikut  
serta menyelesaikan Perjuangan Nasional mentjapai tujuannya.
- e) *Fungsi Khusus*. Fungsi Khusus adalah fungsi<sup>3</sup> lainnya dalam rangka  
HANKAMNAS, yang tidak termasuk dalam fungsi<sup>2</sup> utama, fungsi<sup>3</sup>  
organik, fungsi<sup>2</sup> teknis dan fungsi kekaryaan.

## 2. Integrasi.

- a. Usaha<sup>3</sup> realisasi. Mengingat bahwa administrasi sebagai salah satu fungsi organik memegang peranan yang penting disamping fungsi<sup>3</sup> Departemen Pertahanan Keselamatan lainnya, maka sedjak dikeluarkan Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 telah diambil langkah sebagai pangkal haluan untuk men-  
nudju, kepada integrasi dibidang Administrasi Umum dalam lingkungan

/ Departemen .....

Departemen Pertahan-Keamanan, ialah dengan disahkannya Buku Petunjuk Administrasi Umum Departemen Pertahanan-Keamanan dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/PANGAB No. KEP/B/523/1968 tanggal 28 Desember 1968.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 79 tahun 1969 sebagai penjemputan Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967, maka dianggap perlu untuk menjempurnakan Buku Petunjuk Administrasi Umum Departemen Pertahanan-Keamanan tersebut untuk disesuaikan dengan jiwa Keputusan Presiden No. 79 tahun 1969.

- b. Dengan demikian Buku Petunjuk Administrasi Umum ini tidak merupakan hal yang baru, melainkan sebagai penjemputan Buku Petunjuk Administrasi Umum Departemen Pertahanan-Keamanan yang telah berlaku berdasarkan Keputusan MENHANKAM/PANGAB No. KEP/B/523/1968 dengan pengarahannya integrasi dibidang Administrasi Umum sesuai dengan jiwa Keputusan Presiden No. 79 tahun 1969.

Materi sebagai hasil integrasi dibidang Administrasi Umum yang disajikan dalam Buku Petunjuk Administrasi Umum ini, hanya merupakan suatu bagian saja daripada ruang lingkup administrasi yang luas, dan masih akan memerlukan penjemputan<sup>2</sup>, sesuai dengan perkembangan organisasi dan prosedur Departemen Pertahanan-Keamanan dalam waktu<sup>3</sup> yang akan datang.

Selanjutnya apabila mengenai sesuatu hal belum terdapat ketentuan didalam Buku Petunjuk Administrasi Umum ini maka digunakan Peraturan lama yang telah berlaku dan disesuaikan dengan jiwa Keputusan Presiden No. 79 tahun 1969.

## BAB II

### PENGERTIAN - PENGERTIAN

#### 3. Organisasi.

- a. Organisasi timbul karena adanya tujuan. Untuk mentjapai tujuan tersebut maka harus dilakukannya kegiatan<sup>2</sup>, usaha<sup>2</sup> dan tugas<sup>2</sup> oleh tenaga dengan menggunakan benda, uang dan sebagainya.

Faktor<sup>2</sup> yang perlu diperhatikan mengenai masalah organisasi adalah meliputi a.l. :

- 1) *Tugas Pokok (mission)* : Adalah suatu pembebanan tugas yang diletakkan kepada organisasi seluruhnya, untuk menghidupkan dan memelihara penyelenggaraan fungsi<sup>2</sup>, sehingga dengan demikian tujuan organisasi dapat ditjapai. (KEP. MENHANKAM/PANGAB No. KEP/B/482/IX/1970).

/ 2) Fungsi<sup>2</sup> .....

- 2) Fungsi-<sup>1</sup> Utama : Adalah fungsi-<sup>1</sup> dalam suatu organisasi yang menjadi pokok untuk menentukan batas-<sup>2</sup> ruang lingkup dari organisasi itu. (KEPPRES 79/1969).
  - 3) Fungsi-<sup>1</sup> : Adalah sekelompok pekerjaan, kegiatan-<sup>1</sup> dan usaha-<sup>1</sup> yang satu sama lain ada hubungannya yang erat, untuk melaksanakan segi-<sup>2</sup> tugas pokok, (KEPPRES 79/1969).
- b. Setjara umum dapat dikatakan, bahwa organisasi itu merupakan suatu sistem hubungan antar manusia (a system of human relationships), menjelma dalam kegiatan-<sup>2</sup> yang "interdependent". Dengan perkataan lain, suatu organisasi adalah "pengaturan dari personil yang membantu pentjapaian tugas pokok dengan tjara pembagian fungsi-<sup>2</sup> dan tanggung-djawab.
  - c. Dengan demikian dapat diartikan bahwa organisasi adalah merupakan alat untuk mentjapai sesuatu tudjuan. Alat ini harus memenuhi sjarat-<sup>1</sup> yang ditentukan oleh kondisi ruang, waktu dan lingkungan. Bilamana kondisi, ruang waktu dan lingkungan ini berubah, maka alat tersebut harus dirobah/disesuaikan pula. Dengan demikian djelas, bahwa organisasi itu tidak statis, melainkan djustru harus berkembang atau dengan perkataan lain, organisasi itu dari waktu ke waktu harus disesuaikan/dirobah/diperbaiki/disempurnakan. Namun demikian, perubahan-<sup>1</sup> yang terlalu sering diadakan, akan djustru menimbulkan kekatauan dan kekaburan dalam organisasi itu sendiri.  
Perubahan-<sup>1</sup> baru dapat dilakukan, bilamana organisasi itu telah berdjalan selama djangka waktu tertentu, dan setelah melalui pengalaman, observasi, analisa dan penjelidikan yang harus dilakukan terus-menerus, maka akan kelihatanlah bidang-<sup>1</sup> mana memerlukan perbaikan/penjempurnaan, bahkan kadang-<sup>1</sup> perubahan.
  - d. Organisasi tidak disusun menurut keinginan setiap orang/anggauta yang berada didalamnya karena pandangan manusia satu sama lainnya berbeda terutama ditentukan oleh pengetahuan dan pengalamannya. Apabila keinginan dan pandangan setiap orang dalam organisasi itu diikuti, maka tidak akan pernah organisasi itu terwujud, dan tidak akan pernah pula tudjuan tertjapai. Oleh karena itu pelaksanaan organisasi terutama sekali ditentukan oleh Pimpinan yang dipertjajikan untuk memimpin organisasi itu menudju kepada pentjapaian tudjuan yang telah ditentukan.
  - e. Dalam masjarakat modern dan kompleks dewasa ini, organisasi merupakan sesuatu yang kompleks pula, penuh dengan lapisan-<sup>1</sup> yang tersusun menurut suatu sistematik tertentu (layers), unsur-<sup>1</sup> yang semakin berkembang dan djaringan hubungan-<sup>1</sup> timbal-balik (inter-relationships) yang pelik.  
Semakin tinggi dan luas tanggung-djawab organisasi itu, semakin kompleks dan rumit pula susunannya. Oleh karena itu diperlukan spesialisasi, baik dalam hubungan pekerjaan perseorangan, maupun dalam hubungan kelompok-<sup>1</sup>

/ kerdja .....

kerdja. Dengan mengetjilnja tanggung-djawab perseorangan dalam "total effort" jang diperlukan untuk mentjapai tudjuan organisasi, sebagai akibat dari semakin mendalamnja skill/spesialisasi/kemahiran jang diperlukan dalam organisasi, semakin lebih tergantung pula dari organisasi untuk menghubungkan dan mengkaitkan kegiatan-<sup>2</sup>nja dengan kegiatan petugas-<sup>2</sup> lain.

#### 4. Pembinaan.

- a. Pembinaan adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan jang berhubungan dengan perentjanaan, penjusunan, pembangunan, pengerahan penggunaan serta pengendalian segala sesuatu setjara berdaja-guna dan berhasil-guna, pembinaan ini meliputi kegiatan-<sup>2</sup> melaksanakan atau menjelenggarakan pengaturan sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerdjakan dengan baik, tertib, teratur, rapih dan seksama menurut rentjana program pelaksanaan (dengan ketentuan, petunjuk, norma, sjarat, sistim dan metode) setjara efektif dan efficient mentjapai tudjuan dan memperoleh hasil jang diharapkan semaksimal mungkin. (KEP-PRES 79/1969).
- b. Pembinaan ABRI (military management) mentjakup fungsi-<sup>2</sup>, jang merupakan serangkaian pelaksanaan suatu tugas setjara lengkap, serta dengan azas-<sup>2</sup> pokok sebagai berikut :
  - 1) Fungsi-<sup>2</sup> pembinaan ABRI :
    - a) Perentjanaan.
    - b) Penjusunan.
    - c) Pengomandoan.
    - d) Koordinasi dan
    - e) Pengawasan.
  - 2) Azas-<sup>2</sup> pokok pembinaan ABRI :
    - a) Tingkat Komando (command level).
    - b) Garis Komando (command channel),
    - c) Rantai Komando (command chain),
    - d) Lapangan kekuasaan teknis (technical authority field) dan
    - e) Pertanggung jawaban komando (command responsibility).

#### 5. Administrasi.

- a. Setjara umum, administrasi adalah segala usaha dan pekerdjaan jang meliputi :
  - 1) Penetapan tudjuan (the determination of objective) organisasi, termasuk perumusan rentjana-<sup>2</sup> dan program-<sup>2</sup>.
  - 2) Penetapan tjara-<sup>2</sup> penjelenggaraan pembinaan, termasuk penetapan kebijaksanaan-<sup>2</sup> (the establishment of policies).
- b. Administrasi dapat dibagi dalam :
  - 1) Arti luas, jang meliputi pengendalian organisasi jang telah hidup, djadi organisasi jang telah diarahkan kepada maksud dan tudjuan jang hendak ditjapai.

/ 2) Arti .....



- 2) Arti terbatas, yang meliputi semua penataan dan penertiban setjara tertulis, teratur dan berketentuan jaitu usaha<sup>3</sup> yang lazim disebut "tata usaha/redactiewerk/clerical-work".

c. Pengertian Administrasi dalam lingkungan DEPHANKAM:

- 1) Administrasi dalam arti luas adalah semua pekerdjaan, kegiatan dan usaha dalam lapangan pembinaan HANKAMNAS yang tidak termasuk bidang strategi, operasi dan taktik, serta kekaryaan, tetapi langsung atau tidak langsung mempengaruhi operasi HANKAMNAS (KEPPRES 79/1969).
- 2) Administrasi dalam arti terbatas, ialah yang meliputi hanja sebagian dari pekerdjaan, kegiatan dan usaha tersebut ad 1), yakni yang ditudjukan kepada pengurusan personil, materiil dan keuangan (KEP MENHANKAM/PANGAB No. KEP/B/523/1968).
- 3) Administrasi Umum (MINU) ialah semua pekerdjaan, kegiatan dan tata-tjara tulis-menulis dalam lingkungan DEPHANKAM yang dilakukan setjara teratur dan terarah untuk mentjapai tudjuan (KEP MENHANKAM/PANGAB No. KEP/B/482/IX/1970).

- d. Unsur manusia dalam administrasi. Dalam rangka kita mentrapkan sistim dan tjara menjusun organisasi kita harus ingat bahwa sistim dan tjara yang bagaimanapun sempurnanja, tidak ada gunanja bila personil didalam organisasi tersebut tidak atau kurang mampu menjelenggarakanja. Dengan demikian djangan dilupakan bahwa unsur manusia lebih menentukan daripada sistim organisasi yang akan dipilihja.

6. Hubungan antara Organisasi, Pembinaan dan Administrasi.

- a. Organisasi dapat kita umpamakan sebagai suatu mesin yang terdiri dari ber-matjam-matjam onderdil. Tiap<sup>3</sup> onderdil itu sudah ditentukan pula kerdjanja. Penempatan dan hubungan (susunan) antara onderdil yang satu dengan onderdil-nderdil yang lainpun harus setjara tertentu dan teratur pula. Dalam pengertian organisasi, semuanya itu ditentukan setjara statis sadja, djadi dapat dikatakan mesin dalam keadaan berhenti.
- b. Penjelenggaraan usaha<sup>3</sup> dan pekerdjaan<sup>3</sup> agar mesin itu berdjalan dan pemeliharaan agar mesin itu tetap berdjalan dengan diarahkan dan dikendalikan terhadap TUDJUAN-nja, termasuk lapangan *pembinaan organisasi*.
- c. Dalam hal ini perlu ditetapkan lebih dulu apa yang harus dihasilkan oleh mesin itu dengan djumlahnja, matjamnja, djangka waktunja, serta bagaimana tjara-nja mesin itu berdjalan (dengan setengah kekuatan atau dengan seluruh kekuatan, tjepat atau perlahan dan sebagainja). Hal<sup>3</sup> ini termasuk Administrasi.

### **BAB III**

#### **MAKSUD & TUDJUAN DAN RUANG LINGKUP**

##### **7. Maksud dan Tujuan.**

Buku Petunjuk Administrasi Umum ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para pejabat Administrasi Umum dilingkungan DEPHANKAM, agar dalam menunaikan tugasnya masing-masing dapat ditjapai adanya dasar pengertian dan tata-tjara pelaksanaan yang sama sehingga pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dibidang Administrasi Umum HANKAM dapat terselenggara dengan baik.

##### **8. Ruang Lingkup.**

Sesuai dengan maksud dan tujuan daripada Buku Petunjuk ini dan mengingat kebutuhan pengetahuan dibidang administrasi umum yang diperlukan oleh para pejabat (Administrasi Umum) dilingkungan DEPHANKAM, ruang lingkup (scope) Buku Petunjuk ini disusun meliputi bidang<sup>3</sup> :

- a. Dasar<sup>3</sup> integrasi administrasi didalam lingkungan DEPHANKAM.
- b. Tulisan<sup>3</sup> Dinas.
- c. Surat-menjurat Dinas.
- d. Sistim Tata-Naskah.
- e. Penjampaian Berita.
- f. Singkatan.
- g. Pengurusan Arsip.
- h. Formulir.
- j. Tjap Djabatan dan Papan Nama.
- k. Statistik dan Sistim Pengolahan Data Otomatis (SPEDO).

### **BAB IV**

#### **DASAR<sup>3</sup> SISTIM PENGGOLONGAN ADMINISTRASI**

##### **9. Sistim Penggolongan Administrasi.** Didalam menjelenggarakan administrasi untuk mentjapai suatu tudjuan, perlu diketahui pula dasar<sup>3</sup> sistim dan prosedurnya. Dasar<sup>3</sup> sistim dan prosedur dapat kita bagi dalam 5 penggolongan, jaitu :

- a. Tjataan.
- b. Laporan.
- c. Perentjanaan/program.
- d. Keputusan (decision).
- e. Surat-menjurat.

##### **10. Tjataan :**

- a. Untuk dapat mengetahui fakta<sup>3</sup> yang berhubungan dengan tindakan<sup>3</sup> dibidang

/ Administrasi .....

Administrasi Umum pada waktu yang lalu, maka hal<sup>2</sup> tersebut perlu ditjatat, agar djangan sampai berlalu begitu sadja, tanpa diketahui adanja kemungkinan melihat atau mempeladjadi kembali.

- b. Pentjataan demikian tidak mungkin diingat atau disimpan dalam otak manusia, sehingga perlu diadakan pentjataan setjara teratur.
- c. Pentjataan (record) ini banjak tjara dan ragamnja.

#### 11. Laporan.

- a. Tjataan<sup>2</sup> itu kemudian dimasak untuk didjadikan bahan perentjanaan atau penindakan.
- b. Untuk itu, tjataan<sup>2</sup> tadi harus diberi penilaian dan kita sebut laporan (report). Laporan tersebut ber-matjam<sup>2</sup> pula wujudnja : laporan tahunan, laporan pemeriksaan, berita atjara, hasil rapat, kesimpulan, telaahan staf, perkiraan (estimate) dan sebagainya.
- c. Djadi laporan ialah tjataan<sup>2</sup> yang telah diolah dan telah dimasukkan penilaian setjara subjektif.

#### 12. Perentjanaan/Program.

- a. Dari bahan yang telah dimasukkan dalam matjam<sup>2</sup> laporan itu disusun rentjana dan program.
- b. Disini dibedakan antara perentjanaan, rentjana dan program.
  - 1) Perentjanaan adalah pekerdjaan<sup>2</sup>, kegiatan<sup>2</sup> dan usaha<sup>2</sup> untuk menghubungkan pengetahuan<sup>2</sup> dan pengalaman<sup>2</sup> yang telah lalu dengan keadaan<sup>2</sup> yang sedang berdjalan, sehingga hasilnja dapat digunakan sebagai dasar dan tuntunan untuk penindakan yang akan datang.
  - 2) Sebagai landjutan dari perentjanaan timbullah rentjana sebagai hasil perentjanaan.
  - 3) Suatu rentjana yang telah diolah dengan memperhitungkan faktor<sup>2</sup> ruang dan waktu serta urut<sup>2</sup>an penjelenggaraannja setjara tegas dan teratur, kita namakan program.
- c. Untuk djelasnja sekali lagi ditekankan bahwa dalam suatu perentjanaan belum dimasukkan faktor waktu dan djangka waktu yang tegas, sedangkan dalam suatu program faktor waktu dan djangka waktu ini telah ditetapkan.

#### 13. Keputusan Komandan.

- a. Keputusan Komandan adalah suatu pernjjataan seorang komandan setjara *tegas*, untuk melaksanakan tugas pokok.
- b. Keputusan<sup>2</sup> Komandan ini bisa ber-matjam<sup>2</sup> bentuknja. Ada keputusan<sup>2</sup> yang bersifat penetapan, ada yang bersifat Komando, Perintah (Perintah operasi, Perintah administrasi) dan sebagainya.

/ c. Djadi .....

- c. Djadi keputusan tersebut adalah sudah masak untuk ditindakan.
14. Surat menjurat.
- Antara pentjataan-laporan perentjanaan/program dan keputusan, selalu timbul kemungkinan permintaan pendjelasan, penambahan kekurangan-<sup>2</sup> atau perubahan-<sup>2</sup>.
  - Hal-<sup>2</sup> tersebut menimbulkan adanja surat-menjurat.
15. Kesimpulan. Kelima soal diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :
- Pentjataan dari kedjadian-<sup>2</sup> jang lalu merupakan TJATATAN jang bersifat objektif.
  - Tjataan jang objektif diberi penilaian subjektif disebut LAPORAN.
  - Laporan bisa mengakibatkan PERENTJANAAN-RENTJANA-PROGRAM.
  - Rentjana dan program bisa mengakibatkan diambilnja KEPUTUSAN.
  - Keempat hal diatas bisa mengakibatkan SURAT-MENJURAT.
16. Penjenggaraan Administrasi.
- Didalam tiap-<sup>2</sup> organisasi bagaimanapun ketjilnja, selalu diselenggarakan pekerdjaan administrasi.
  - Djadi didalam organisasi-<sup>2</sup> DEPHANKAM djuga diselenggarakan pula pekerdjaan administrasi, baik administrasi umum maupun administrasi personil ataupun dalam arti pembinaan Personil, jang tentu sadja tidak sama objeknja.
  - Untuk pengaturan dan tata tertib serta penataannja diperlakukan beberapa keharusan, jang akan dibahas dalam fasal-<sup>2</sup> jang berikut.

## BAB V

### DASAR-<sup>2</sup> SISTIM PENJELANGGARAAN ADMINISTRASI

17. Keharusan-<sup>2</sup>.
- Dari dasar-<sup>2</sup> sistim penjenggaraan administrasi, timbul 6 (enam) keharusan jang harus kita perhatikan mengingat faktor-<sup>2</sup> daja-guna dan ekonomi.
  - Keharusan-<sup>2</sup> itu ialah :
    - 1) Penentuan kesatuan administrasi pangkal.
    - 2) Saluran administrasi.
    - 3) Periode penjimpanan.
    - 4) Penentuan sifat.
    - 5) Pemusnahan.
    - 6) Waktu.
18. Kesatuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL).
- Kesatuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) adalah kesatuan terketjil dimana diselenggarakan kegiatan-<sup>2</sup> administrasi dalam arti terbatas (dalam lingkungan DEPHANKAM.

/ b. Harus .....

- b. Harus ditentukan lebih dahulu organisasi terendah manakah yang harus menjelenggarakan administrasi atau SATMINKAL.
- c. Kalau ini sudah ditentukan, maka ini akan membantu efisiensi karena kita mengetahui mulai organisasi tingkat manakah yang menjelenggarakan administrasi. Berarti bahwa organisasi yang lebih rendah, tidak perlu menjelenggarakan administrasi lagi.
- d. Tetapi suatu kesatuan berdiri sendiri atau detasemen yang terpecah sehingga tidak ada hubungan keluar, perlu dinjatakan sebagai SATMINKAL pula.
- e. Unsur-<sup>3</sup> untuk dinjatakan sebagai SATMINKAL ialah :
  - 1) Adanja pendjabat pengurusan personil.
  - 2) Adanja pendjabat administrasi umum.
  - 3) Adanja pendjabat pengurusan keuangan.
  - 4) Adanja pendjabat yang mengurus keperluan logistik.

Bilamana salah satu unsur tidak ada, maka badan demikian tidak dapat dinjatakan sebagai suatu SATMINKAL, tetapi harus digabungkan dengan badan yang memenuhi keempat unsur itu.

#### 19. Saluran Administrasi.

- a. Setelah kita ketahui apa SATMINKAL itu, maka perlu ditentukan tingkat-<sup>2</sup> yang harus dilalui mulai dari SATMINKAL tersebut.
- b. Saluran administrasi tidak perlu selalu mengikuti bierarchie atau selalu mengikuti garis komando.
- c. Saluran administrasi atau tingkat-<sup>2</sup> administrasi ini, harus pula ada ketentuan-<sup>2</sup>nja

#### 20. Periode Penjimpanan.

- a. Untuk organisasi ABRI hal ini sangat diperlukan, jaitu untuk mendjaga agar kesatuan-<sup>2</sup> tidak terganggu dalam gerakan taktisnja oleh beban akibat administrasi.
- b. Periode penjimpanan ini sangat erat hubungannja dengan urusan arsip dan mempunjai ketentuan-<sup>2</sup> yang akan dibahas lebih lanjut bila kita sampai pada persoalan ARSIP (BAGIAN KETUDJUJH).

#### 21. Penentuan Sifat. Tentang penentuan sifat ini akan kita bahas, bila kita membitjarakan tentang SURAT-MENJURAT DINAS (BAGIAN KETIGA).

#### 22. Pemusnahan.

- a. Bila arsip pada suatu waktu tidak dimusnahkan, maka arsip itu akan merupakan kertas yang ber-ton-<sup>2</sup> beratnja serta memakan tempat yang sangat luas, sedang gunanja untuk hari depan tidak begitu besar, atau mungkin tidak ada sama sekali.
- b. Hal inipun akan dibahas lebih lanjut bila kita sampai persoalan ARSIP (BAGIAN KETUDJUJH).

/ 23. Waktu.

23. W a k t u.

- a. Faktor waktu pengiriman, penerimaan dan penjemputan pada tingkat-<sup>3</sup> yang akan menerima bahan-<sup>3</sup> administrasi besar artinya bagi yang akan menggunakan bahan itu.
- b. Dalam pengiriman bahan-<sup>3</sup> administrasi harus dijamin adanya kelangsungan. Dengan demikian, maka waktu pengiriman dan tingkat-<sup>3</sup> yang akan menerima untuk setiap macam bahan administrasi itu perlu ditentukan.
- c. Faktor waktu pengiriman penting sekali, karena apabila bahan-<sup>3</sup> administrasi diterima terlambat, akan menghambat penyelesaian mengenai masalah yang berhubungan dengan bahan administrasi tersebut.

## BAB VI

### P E N A T A A N

24. Tiga tingkat Penindakan.

- a. Dalam menjelenggarakan administrasi, terdapat 3 tingkatan penindakan, yaitu :
  - 1) Penerimaan dan pengumpulan.
  - 2) Penataan.
  - 3) Distribusi.
- b. Soal penataan adalah merupakan bagian yang tersulit dan terpenting dari pada kedua bagian yang harus ia hubungkan.
- c. Penataan dapat diartikan yaitu menempatkan dalam suatu daftar dari semua surat-<sup>3</sup>, laporan-<sup>3</sup> dan sebagainya yang tidak tentu urutan waktunya dan tidak sama bentuknya.
- d. Daftar ini harus memenuhi syarat, sehingga kita setiap waktu dapat memeriksa-nya kembali untuk pentjotjokan atau lain-<sup>2</sup>nya.

25. Normalisasi.

- a. Administrasi sekarang sudah berkembang sebagai tehnik.
- b. Seperti dilapangan-<sup>3</sup> tehnik lainnya, juga administrasi harus memenuhi syarat modern : "Normalisasi".
- c. Ir. J.A. Teyinek dalam bukunya "Normalisasi" memberi pengertian sebagai berikut : "Normalisasi bertujuan mengadakan penghematan dengan jalan membatasi keaneka warnaan yang tidak perlu".
- d. Normalisasi membawa penataan, dan penataan berarti penghematan karena sesuatu yang tidak teratur akan membesarkan ongkos-<sup>3</sup>, tenaga dan waktu.

26. Faktor-<sup>3</sup> Normalisasi.

- a. Normalisasi harus dapat memenuhi faktor-<sup>3</sup> berikut yang merupakan dasar pokok dari setiap normalisasi, yaitu :

/ 1) Memungkinkan .....

- 1) Memungkinkan pengawasan. Untuk itu maka semua pekerjaan harus dilakukan menurut aturan<sup>3</sup> yang tetap.
  - 2) Memungkinkan penggantian personil dengan mudah, ini berarti bahwa tjara<sup>3</sup> yang dipakai harus mempunyai keseragaman.
  - 3) Penjederhanaan dalam mendidik personil. Inilah yang menjabarkan di-anutnja tjara<sup>2</sup> bekerdja yang telah distandardisasikan.
- b. Normalisasi tidak akan memenuhi tudjuannja, bila tidak memenuhi ketiga faktor tersebut.
- c. Sistim<sup>3</sup> penataan bukanlah se-mata<sup>2</sup> untuk kepentingan sistim itu sendiri, akan tetapi merupakan alat untuk mentjapai daja guna dan hasil guna yang se-besar<sup>2</sup>-nja. Dengan demikian maka normalisasi yang ber-lebih<sup>3</sup>an itu akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar daripada keuntungan yang didapat.
-





## BAGIAN KEDUA

### TULISAN-<sup>2</sup> DINAS

#### BAB I

#### U M U M

##### 1. Pendahuluan.

- a. Suatu hal yang tidak dapat diabaikan dalam mewujudkan integrasi dan kekompakan ABRI serta keseragaman di bidang administrasi umum dilingkungan Departemen Pertahanan-Kelangkaan, adalah tulisan-<sup>2</sup> dinas yang merupakan suatu urat nadi bagi kelantjaran jalannya administrasi umum.
  - b. Atas dasar pertimbangan yang diuraikan diatas, maka oleh Departemen Pertahanan-Kelangkaan dianggap perlu adanya suatu pedoman tentang tulisan-<sup>2</sup> dinas yang dapat dipakai sebagai pedoman dilingkungan Departemen Pertahanan-Kelangkaan.
2. Tudjuan. Tudjuan pedoman tentang tulisan-<sup>2</sup> dinas ini pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepada setiap pendjabat yang berwenang dilingkungan Departemen Pertahanan-Kelangkaan, dasar-<sup>2</sup> yang sama sebagai pedoman agar dengan ini akan tertjapai kesamaan (uniformiteit) dalam pengertian dan tjara-<sup>2</sup> pembuatan, pengolahan dan pengawasan tulisan-<sup>2</sup> dinas.
3. Pengertian. Tulisan-<sup>2</sup> dinas adalah semua tulisan-<sup>2</sup> dinas yang dikeluarkan oleh pendjabat yang berwenang dilingkungan Departemen Pertahanan-Kelangkaan dalam rangka melaksanakan tugas-<sup>2</sup>/kegiatan-<sup>2</sup> dalam bidangnya masing-<sup>2</sup>.

#### BAB II

### PENGGOLONGAN TULISAN-<sup>2</sup> DINAS

4. Penggolongan. Tulisan dinas dilingkungan Departemen Pertahanan-Kelangkaan dibagi dalam 5 golongan, ialah :
- a. Yang bersifat mengatur (peraturan/legislatif).
  - b. Yang bersifat Naskah/Surat.
  - c. Yang merupakan Produk-<sup>2</sup> Judikatif.
  - d. Yang merupakan Produk-<sup>2</sup> Polisionil.
  - e. Yang merupakan Produk-<sup>2</sup> Perbendaharaan.
5. Djenis-<sup>2</sup> Tulisan Dinas. Tiap-<sup>2</sup> golongan tulisan dinas terdiri dari djenis-<sup>2</sup> tulisan dinas dan terperintji sebagai berikut :
- a. Yang bersifat mengatur (peraturan/legislatif) :
    - 1) Penetapan/Keputusan.
    - 2) Instruksi.

/ 3) Tabel

- 3) Tabel Organisasi dan Peralatan.
- 4) Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan.
- 5) Buku Petunjuk.
- 6) Surat Keputusan.
- 7) Perintah/Surat Perintah.
- 8) Perintah Operasi.
- 9) Perintah Administrasi.
- 10) Perintah Tetap.
- 11) Perintah Harian.
- 12) Prosedur Tetap.
- 13) Tata-tjara tetap, Petunjuk Pelaksanaan.
- 14) Maklumat.

b. Jang bersifat Naskah/Surat :

- 1) Laporan.
- 2) Surat.
- 3) Nota Dinas.
- 4) Surat Edaran.
- 5) Pengumuman.
- 6) Buku Harian.
- 7) Lembaran Kerdja.
- 8) Tilgram.
- 9) Surat Tilgram/Berita Pos.
- 10) Surat Pengantar.
- 11) Naskah Dinas.

- c. Djenis<sup>3</sup> tulisan dinas jang merupakan produk<sup>3</sup> Judikatif, Polisionil dan Perbendaharaan tidak diatur/diterangkan dalam Buku Petunjuk Administrasi Umum DEPHANKAM. Untuk ini kita ikuti ketentuan<sup>3</sup> jang berlaku pada Badan<sup>3</sup> Judikatif, Polisionil dan Perbendaharaan.

### BAB III

#### TULISAN<sup>3</sup> DINAS JANG BERSIFAT MENGATUR

6. Penetapan/Keputusan (TAP/KEP).

- a. *Pengertian.* Pada hakekatnja Penetapan/Keputusan memuat sesuatu kebijaksanaan pokok atau "basic policy". Sifatnja umum dan berlaku/ditaati bagi/oleh seluruh atau sebagian anggauta/badan dalam lingkungan Departemen Pertahanan-Keamanaan. Ia merupakan pangkal bagi tulisan<sup>3</sup> lainnja jang mengenai persoalan jang sama dan merupakan landjutan kebijaksanaan pokok dalam pelaksanaannja.

/ b. Wewenang . . . .

b. Wewenang pembuatan/pengeluaran.

- 1) Dibuat/dikeluarkan oleh DEPHANKAM, penanda-tanganan oleh MENHANKAM/PANGAB atau WAPANGAB.
- 2) Dibuat/dikeluarkan oleh Markas Besar Angkatan/POLRI, penanda-tanganan oleh Kepala Staf Angkatan/KAPOLRI.

c. Otentikasi. Suatu Penetapan/Keputusan yang sudah resmi (tidak merupakan konsep lagi), perlu mendapatkan otentikasi dari pejabat yang disertai tugas dibidang administrasi umum.

Sebagai tjontoh :

- 1) Penetapan/Keputusan dari MENHANKAM/PANGAB — Tanda-tangan otentikasi oleh KASET/WAKASET HANKAM.
- 2) Penetapan/Keputusan dari KAS Angkatan/KAPOLRI. — Tanda-tangan otentikasi diatur oleh masing-masing KAS Angkatan/KAPOLRI.

d. Distribusi.

- 1) Yang dimaksud distribusi, ialah alamat pejabat<sup>3</sup> yang akan ditudju.
- 2) Karena banyak sekali alamat<sup>3</sup> tertentu yang ditudju, maka diadakan kode<sup>3</sup> distribusi tertentu untuk menghindari tiap kali menjabutkan setjara lengkap semua alamat itu.
- 3) Kode<sup>3</sup> distribusi ini dibuat/ditentukan oleh masing-masing pejabat yang disertai tugas bidang administrasi umum (Kepala Sekretariat/Sekretaris).
- 4) Distribusi serta memperbanyak TAP/KEP dilakukan oleh penanda-tanganan otentikasi dan atau pejabat yang disertai tugas bidang administrasi umum.

e. Bentuk.

- 1) Bentuk suatu Penetapan (TAP) dapat dibagi dalam 4 bagian, jaitu :
  - a) Kepala.
  - b) Isi.
  - c) Tanda-tangan.
  - d) Otentikasi dan Distribusi.
 Tjontoh, lihat pada lampiran A.
- 2) Bentuk suatu Keputusan (KEP) dapat dibagi dalam 5 bagian, jaitu :
  - a) Kepala.
  - b) Konsiderans.
  - c) Diktum.
  - d) Penutup.
  - e) Distribusi.
 Tjontoh, lihat pada lampiran B.

/ 7. Instruksi (INS).

## 7. Instruksi (INS).

- a. Pengertian. Instruksi berisi tjara pelaksanaan dari suatu penetapan/Keputusan, jang banjak memuat unsur-<sup>2</sup> tehnik sampai soal-<sup>2</sup> jang ketjil. Djadi Instruksi adalah "anak" Penetapan/Keputusan. Artinja suatu Instruksi harus berpangkal pada/berdasarkan sesuatu Penetapan/Keputusan. Dengan demikian, maka suatu Instruksi tidak dapat berdiri sendiri.
- b. Wewenang pembuatan/pengeluaran. Suatu Instruksi dapat dikeluarkan :
  - 1) Atas dasar Penetapan/Keputusan MENHANKAM/PANGAB, Instruksi dapat dikeluarkan oleh MENHANKAM/PANGAB (WAPANGAB) atau oleh KAS Angkatan/KAPOLRI, PANGKOTAMA OPERASIONAL, dan dan GUB/DAN/KA Eselon Pelaksana Pusat DEPHANKAM (wewenang ini harus ditegaskan dalam Penetapan/Keputusan jang bersangkutan).
  - 2) Atas dasar Penetapan/Keputusan KAS Angkatan/KAPOLRI, selanjutnja diatur oleh masing-<sup>2</sup> KAS Angkatan/KAPOLRI.
- c. Otentikasi.
  - 1) Instruksi jang dikeluarkan atas dasar Penetapan/Keputusan MENHANKAM/PANGAB, maka tanda tangan otentikasi oleh Kepala Sekretariat/ Sekretaris dari pendjabat jang mengeluarkan instruksi tersebut.
  - 2) Instruksi jang dikeluarkan atas dasar Penetapan/Keputusan KAS Angkatan/KAPOLRI diatur oleh masing-<sup>2</sup> KAS Angkatan/KAPOLRI.
- d. Distribusi. Sama dengan TAP/KEP, lihat fasal 6 sub-fasal d.
- e. Bentuk. Bentuk suatu Instruksi, lihat tjontoh pada lampiran C.

## 8. Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP).

- a. Pengertian. Tabel Organisasi dan Peralatan merupakan daftar susunan perorangan dan peralatan sesuatu kesatuan atau komando, jang bersifat patokan (distandardisasikan), guna didjadikan dasar-<sup>2</sup> hubungan dalam perentjaan dan pembuatan program-<sup>2</sup> serta persiapan perintah-<sup>2</sup>. TOP hanya berubah, bilamana doktrin berubah.
- b. Wewenang pembuatan/pengeluaran. Sama dengan TAP/KEP lihat fasal 6 sub-fasal b sub-sub-fasal 1) dan 2).
- c. Otentikasi. Sama dengan TAP/KEP, lihat fasal 6 sub-fasal c, hanya istilah Penetapan/Keputusan diganti Tabel Organisasi dan Peralatan.
- d. Distribusi. Sama dengan TAP/KEP, lihat fasal 6 sub-fasal d.
- e. Bentuk. Bentuk suatu Tabel Organisasi dan Peralatan lihat tjontoh pada lampiran D.

## 9. Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan (DAF).

- a. Pengertian. Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan adalah suatu daftar susunan perorangan dan peralatan suatu Organisasi, jang tidak dibuat setjara patokan (tidak distandardisasikan), dengan maksud untuk didjadikan pegangan

/ guna .....

guna penjelenggaraan pemeliharaan administrasi (termasuk logistik). Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan ditentukan dan diroboh setjara periodik menurut kebutuhan.

- b. Wewenang pembuatan/pengeluaran. Sama dengan TAP/KEP., lihat fasal 6 sub-fasal d sub-sub-fasal 1) dan 2).
  - c. Otentikasi. Sama dengan TAP/KEP., lihat fasal 6 sub-fasal c, hanja istilah Penetapan/Keputusan diganti Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan.
  - d. Distribusi. Sama dengan TAP/KEP., lihat fasal 6 sub-fasal d.
  - e. Bentuk. Bentuk suatu Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan, lihat tjontoh pada lampiran D.
10. Buku Petundjuk (Buku DJUK).
- a. Pengertian. Buku Petundjuk adalah buku jang memuat petundjuk<sup>3</sup> setjara tehnik detail, apa jang harus dilakukan apa jang harus diperhatikan dan memberi tuntunan dalam tiap<sup>3</sup> phase penindakan.
  - b. Wewenang pembuatan/pengeluaran. Sama dengan TAP, lihat fasal 6 sub-fasal b sub-sub-fasal 1) dan 2).
  - c. Otentikasi. Sama dengan TAP/KEP., lihat fasal 6 sub-fasal c, hanja istilah Penetapan/Keputusan diganti Buku Petundjuk.
  - d. Distribusi. Sama dengan TAP/KEP., lihat fasal 6 sub-fasal d.
  - e. Bentuk. Bentuk suatu Buku Petundjuk, lihat tjontoh pada lampiran E.
11. Surat Keputusan (SKEP).
- a. Pengertian. Surat Keputusan adalah suatu surat jang dikeluarkan untuk :
    - 1) Menetapkan atau mengubah status seseorang anggauta/materiil.
    - 2) Mensahkan berlakunja dan atau tidak berlakunja suatu tulisan<sup>3</sup> dinas.
    - 3) Membentuk, mengubah status dan atau membubarkan suatu kesatuan, instansi atau panitia dalam lingkungan Departemen HANKAM.
    - 4) Penjerahan wewenang<sup>3</sup> tertentu kepada seorang pendjabat (pendelegasian wewenang).
  - b. Wewenang pembuatan/pengeluaran.
    - 1) Surat Keputusan dibuat/dikeluarkan oleh pendjabat teras (dan atau jang disamakan) dalam lingkungan Departemen HANKAM.  
Penentuan mengenai pendjabat *teras* (dan atau jang disamakan) untuk tingkat DEPHANKAM diatur oleh MENHANKAM/PANGAB dan untuk tingkat Angkatan/POLRI diatur oleh masing<sup>3</sup> para Kepala Staf Angkatan/KAPOLRI.
    - 2) Wewenang pembentukan, perubahan dan pembubaran organisasi dalam lingkungan Departemen HANKAM hanja ada pada Kepala Staf Angkatan/Kepala Kepolisian R.I. keatas dan atau jang disamakan dengan djabatan<sup>3</sup> tersebut oleh MENHANKAM/PANGAB.

/ 3) Bila .....

- 3) Bila dalam hal tersebut sub-sub-fasal 2) diatas ini akan diadakan pen-delegasian wewenang, harus diatur dengan Surat Keputusan dan menyebutkan dasar-dasarnya, untuk menjaga kekuatan hukum, dari tindakan<sup>2</sup> yang akan dilakukan oleh yang menerima penyerahan wewenang.

c. Penomoran.

- 1) Penomoran dilakukan dengan sistim nomor urut, yang dimulai pada tanggal 1 Djanuari dan ditutup pada tanggal 31 Desember dari tiap tahunnya.
- 2) Tjara penomoran Surat Keputusan setjara lengkap adalah sebagai berikut :
 

<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kode/Singkatan Surat Keputusan</li> <li>b) Nomor urut,</li> <li>c) Angka bulan (dengan angka Romawi)</li> <li>d) Angka tahun.</li> </ol>	}	Dari kode/singkatan surat Keputusan sampai dengan angka tahun dipisahkan dengan garis miring (/).
--	---	--

*Sebagai tjontoh :*

Surat Keputusan dikeluarkan pada bulan Pebruari (bulan II tahun 1970) dengan nomor urut pengeluaran nomor 3. nomor tersebut penulisannya menjadi berikut : SKEP/3/II/1970.

d. Distribusi.

- 1) Bagi Surat Keputusan, distribusinya dijelaskan dalam alamat<sup>2</sup>, baik dalam alamat „Kepada“, alamat „Tembusan“, alamat „Salinan“, maupun alamat „Petikan“.
- 2) Apabila ternyata alamat<sup>2</sup> tersebut banyak sekali yang harus disebutkan, dapat pula disebutkan seperti halnya pendistribusian TAP/KEP misalnya : Distribusi "A", atau dapat dituliskan : Kepada yang berkepentingan. Tetapi perlu diingat bahwa untuk alamat disampul harus ditulis nama/djabatan lengkap yang ditudju.

e. Bentuk. Bentuk Surat Keputusan (SKEP), lihat tjontoh pada lampiran F1 dan F.2.

Pada hakekatnya sama dengan bentuk Keputusan (KEP), jaitu dapat dibagi dalam 5 bagian (lihat fasal 6 sub-fasal e sub-sub-fasal 2) ).

f. Petikan.

- 1) Untuk Surat Keputusan mengenai personil, maka yang bersangkutan diberi Petikan.
- 2) Bentuk Petikan Surat Keputusan agak beda dengan Surat Keputusan yang asli, lihat tjontoh pada lampiran F.3.

12. Perintah/Surat Perintah (PRIN/SPRIN).

a. Pengertian.

- 1) Perintah adalah suatu pernyataan kehendak seseorang DAN/KA setjara tegas disampaikan dengan lisan atau tertulis dalam bentuk tertentu.

/ Perintah .....

Perintah yang disampaikan setjara lisan dan yang mempunyai akibat suatu pertanggungan-djawab administrasi, harus segera diikuti dengan perintah tertulis.

- 2) Surat Perintah memuat perintah yang ditujukan kepada seseorang, beberapa orang atau kesatuan, untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dan atau melaksanakan suatu ketentuan yang harus diikuti.
- 3) Pada umumnya Surat Perintah berlaku sementara. Artinya Surat Perintah tersebut tidak berlaku lagi pada saat tugas yang termuat didalamnya telah terlaksana.

Tetapi Surat Perintah untuk melaksanakan suatu ketentuan<sup>2</sup> yang harus diikuti dapat berlaku dalam waktu yang relatif tidak terbatas. Sebagai misal suatu perintah untuk melaksanakan suatu peraturan Baris Berbaris Gaja-Baru. Hal ini dapat berlaku mulai dari berlakunya peraturan tersebut sampai akhir atau digantinya peraturan itu.

- 4) Dapat digolongkan Surat Perintah ialah Surat Perintah Perdjalananan Dinas (SPRINDJAL), Surat Perintah Pemindahan (SPRINDAH) dan Surat Perintah Pelaksanaan (SPRINLAK) dsb.nja.

- b. Wewenang pembuatan/pengeluaran. Perintah/Surat Perintah dibuat/dikeluarkan oleh setiap DAN/KA dari sesuatu kesatuan kepada anggaota bawahannya.
- c. Penomoran. Tjara penomoran Perintah/Surat Perintah sama dengan Surat Keputusan lihat fasal 11 sub c, hanya kode/singkatan SKEP diganti dengan PRIN/SPRIN.

*Tjontoh nomor Perintah dan Surat Perintah.*

PRIN/5/I/1969	{	PRIN, SPRIN	= Kode/singkatan Perintah/Surat Perintah.
SPRIN/6/IV/1970		5, 6	= nomor surat.
		I, IV	= angka bulan
		1969, 1970	= angka tahun.

- d. Distribusi. Distribusi Surat Perintah sama dengan Surat Keputusan, lihat fasal 11 sub-fasal d.
- e. Bentuk. Bentuk Perintah dan Surat Perintah, lihat tjontoh pada lampiran G.1 dan G.2.

### 13. Perintah Operasi (PRINOP).

Pengertian. Perintah Operasi adalah suatu perintah yang dikeluarkan oleh seorang Komandan kepada Komandan bawahannya untuk menjalankan tugas yang perlu guna mentjapai tudjuan operasi.

Kadang<sup>2</sup> perintah operasi disampaikan dengan lisan dimedan (lapangan), tetapi bila mempunyai tjukup waktu, maka harus disampaikan tertulis.

Tjatatatan : Mengenai Perintah Operasi ini tidak dibahas lebih landjut dalam buku ini, karena telah diatur tersendiri dalam peladjaran bidang operasi. Djadi

/ baik .....

baik bentuknja maupun tata-tjara pembuatan dlsb.kita ikuti sesuai dengan pelajaran bidang Operasi.

14. Perintah Administrasi (PRINMIN).

- a. Pengertian. Perintah Administrasi memuat ketentuan<sup>3</sup> dan petunjuk<sup>3</sup> untuk kesatuan<sup>3</sup>, djawatan<sup>3</sup> dan dinas<sup>3</sup> dalam bidang administrasi, baik jang menjangkut soal keuangan maupun logistik.  
Dengan demikian maka Perintah mengenai logistik (PRINLOG) termasuk digolongkan dalam PRINMIN.
- b. Wewenang/pembuatan/pengeluaran. PRINMIN dibuat/dikeluarkan oleh DAN/KA dari sesuatu Kesatuan atau Dinas jang mempunyai/mendapatkan kekuasaan tugas dalam pengeluaran atau pengaturan bidang keuangan, logistik maupun materiil lainnja untuk sesuatu Badan ataupun Perorangan.
- c. Penomoran. Tjara penomoran PRINMIN sama dengan penomoran Surat Keputusan, lihat fasal 11 sub-fasal c, hanja mengenai kode/singkatan SKEP diganti dengan PRINMIN.
- d. Distribusi. Distribusi PRINMIN sama dengan Surat Keputusan, lihat fasal 11 sub-fasal d.
- e. Bentuk. Bentuk PRINMIN, lihat tjontoh pada lampiran H.

15. Perintah Tetap (PRINTAP).

- a. Pengertian. Perintah Tetap adalah perintah jang bersifat relatif tetap dan tujuannja adalah mengatur pkerdjaan<sup>3</sup>, kegiatan<sup>3</sup> dan usaha<sup>3</sup> dalam sesuatu lingkungan setjara tetap, agar tidak perlu setiap waktu mengeluarkan perintah<sup>3</sup> jang sama.
- b. Wewenang pembuatan/pengeluaran. Setiap DAN/KA berhak membuat/mengeluarkan PRINTAP untuk lingkungannja.
- c. Penomoran. Tjara penomoran PRINTAP sama dengan penomoran Surat Keputusan, lihat fasal 11 sub-fasal c, hanja mengenai kode/singkatan SKEP diganti dengan PRINTAP.
- d. Distribusi. Distribusi PRINTAP sama dengan Surat-Keputusan, lihat fasal 11 sub-fasal d.
- e. Bentuk. Bentuk PRINTAP, lihat tjontoh pada lampiran J.

16. Perintah Harian (PRINHAR).

- a. Pengertian. Perintah Harian adalah suatu tulisan jang berisi pesan<sup>3</sup> pribadi seorang Panglima/Komandan, pada waktu memperingati sesuatu kedjadian jang penting.
- b. Penomoran. Tjara penomoran PRINHAR setjara lengkap adalah sebagai berikut :
 

1) Kode/singkatan Perintah Harian	) Kode/singkatan PRINHAR s/d
2) Nomor urut	) angka tahun dipisahkan dengan

/ 3) Singkatan .....



- 3) Singkatan jabatan dari ) garis miring (/).  
 Pendjabat jang mengeluarkan )

*Tjontoh nomor PRINHAR* : PRINHAR/7/KASAD/1970.

- PRINHAR = Kode/Singkatan Perintah Harian.  
 — Aneka 7 = Nomor urut.  
 — KASAD = Singkatan jabatan Pendjabat jang mengeluarkan.  
 — 1970 = Angka Tahun.

c. Distribusi. Distribusi PRINHAR adalah meliputi semua Anggota.

d. Bentuk. Bentuk PRINHAR. lihat tjontoh pada lampiran K.

#### 17. Prosedur Tetap (PROTAP).

a. Pengertian. Prosedur Tetap adalah suatu rangkaian instruksi<sup>2</sup> jang memberikan tjara<sup>2</sup> jang harus diikuti oleh kesatuan<sup>2</sup> tersebut, guna melaksanakan garis<sup>2</sup> besar operasi taktis maupun administratif, jang diinginkan oleh seorang DAN/KA untuk dijadikan routine, dengan tudjuan :

- 1) Menjederhanakan, memudahkan serta memperpendek perintah<sup>2</sup> operasi, mempertjepat penjempaian sesuatu perintah (tidak perlu mengeluarkan perintah<sup>2</sup> baru mengenai hal jang sama) dan djuga memudahkan pengertian atas perintah jang disampaikan.
- 2) Memudahkan pendidikan (dengan telah adanya satu aturan jang tetap).
- 3) Memadijukan saling pengertian dan kerdja-sama antara DAN, Staf dan Kesatuan.
- 4) Mempermudah dan mempertjepat djalannja operasi dan menghindarkan kebingungan atau salah mengerti.

b. Wewenang pembuatan/pengeluaran. Setiap DAN/KA berhak membuat/mengeluarkan PROTAP untuk lingkungannya.

c. Penomoran. Tjara penomoran PROTAP adalah sama dengan penomoran Surat Keputusan, lihat fasal 11 sub-fasal c, hanya Kode/Singkatan SKEP diganti dengan PROTAP.

d. Distribusi. Distribusi PROTAP sama dengan Surat Keputusan, lihat fasal 11 sub-fasal d.

e. Bentuk. Bentuk PROTAP, lihat tjontoh pada lampiran L.

#### 18. Tata-tjara Tetap & Petundjuk Pelaksanaan (TARATAP & DJUKLAK).

a. Pengertian.

- 1) TARATAP adalah tatatjara jang berlaku untuk sesuatu djangka waktu tertentu dan bermaksud mengatur setjara tetap perihal tjara serta urutan penindakan untuk sesuatu kegiatan.
- 2) DJUKLAK adalah memuat petundjuk<sup>2</sup>/tatatjara<sup>2</sup> setjara tehnik dalam persoalan atau kalangan terbatas (tertentu) dan bermaksud mengatur urutan penindakan untuk sesuatu kegiatan.

/ b. Wewenang . . . .

- b. Wewenang pembuatan/pengeluaran. TARATAP & DJUKLAK dibuat/dikeluarkan oleh DAN/KA dari Kesatuan/Djawatan/Dinas yang mempunyai wewenang Lapangan Kekuasaan Tehnis (technical authority field) dalam persoalan yang bersangkutan.

*Tjontob :*

DJUKLAK mengenai sesuatu kegiatan kepangkatan, maka DJUKLAK ini dibuat oleh ASISTEN PERSONIL.

TARATAP mengenai prosedur administrasi umum, maka TARATAP ini dibuat oleh DAN/KA Bidang ADMINISTRASI.

- c. Penomoran. Tjara penomoran TARATAP & DJUKLAK sama dengan penomoran Surat Keputusan, lihat fasal 11 sub-fasal c, hanya Kode/Singkatan SKEP diganti dengan TARATAP atau DJUKLAK.
- d. Distribusi. Distribusi TARATAP & DJUKLAK sama dengan Surat Keputusan, lihat fasal 11 sub-fasal d.
- e. Bentuk. Bentuk TARATAP & DJUKLAK, lihat tjontoh pada lampiran M.1., M.2. dan M.3.
19. Maklumat (MAK).

- a. Pengertian. MAKLUMAT adalah suatu pemberitahuan mengenai berlakunya peraturan<sup>3</sup>, yang didalamnya dapat memuat sanksi<sup>3</sup> menurut hukum yang berlaku bagi mereka yang tidak menjalankan/mentaati apa yang dimaksud dalam peraturan itu.

- b. Wewenang pembuatan/pengeluaran. MAK dibuat/dikeluarkan oleh DAN/KA (Pendjabat) yang disertai tugas memegang suatu Komando (kekuasaan) didaerah tertentu untuk daerahnya.

Sebagai tjontoh :

- MAK DAN GARNIZUN berlaku untuk daerah Garnizun jbs.
- MAK PANGDAM berlaku untuk daerah KODAM jbs.

- c. Penomoran. Tjara penomoran Maklumat sama dengan penomoran Surat Keputusan, lihat fasal 11 sub-fasal c, hanya kode/singkatan SKEP diganti dengan MAK.
- d. Distribusi. Distribusi suatu Maklumat mempunyai lapangan sangat luas, sehingga perlu disebarkan melalui daftar distribusi yang terbesar, sesuai dengan tudjuan pembuatan Maklumat.
- e. Bentuk. Bentuk Maklumat, lihat tjontoh pada lampiran N.

## B A B IV

### TULISAN<sup>3</sup> DINAS JANG BERSIFAT NASKAH/SURAT

20. Laporan.

/ a. Pengertian .....

- a. Pengertian. Laporan adalah pertanggung-djawab seorang pendjabat sebagai hasil pengolahan/penilaian setjara subjektif data-<sup>3</sup> kejadian/kegiatan jang sehubungan dengan fungsi dan tugasnja. Sesuatu laporan harus dapat memberikan bahan-<sup>3</sup> setjara tepat pada waktunja dan teratur, sehingga dapat digunakan dalam penjelenggaraan pimpinan jang efektif, baik untuk tindakan-<sup>3</sup> taktis maupun administratif.
- b. Pembuatan. Laporan dibuat oleh setiap pendjabat jang disertai tugas-djabatan baik suatu tugas routine maupun tugas-<sup>3</sup> khusus ataupun kegiatan-<sup>3</sup> lainnja jang berhubungan dengan kedinasan.
- c. Distribusi. Selain kepada atasannja langsung, laporan dapat dikirim sebagai tembusan kepada pendjabat lain jang ada hubungannja dengan isi laporan tersebut.
- d. Laporan terbagi dalam 2 (dua) matjam :
  - 1) Laporan berkala, terdiri dari :
    - a) Tahunan.
    - b) Setengah tahunan.
    - c) Triwulan.
    - d) Bulanan.
  - 2) Laporan khusus, terdiri dari :
    - a) Setjara insidentil.
    - b) Menurut kebutuhan.
- e. Penjusunan. Susunan laporan pada garis besarnja dibuat sebagai berikut :
  - 1) Pendahuluan.
  - 2) U m u m.
  - 3) Kegiatan jang dilakukan.
  - 4) Kesimpulan.
  - 5) Saran-<sup>3</sup>.

Tjontoh bentuk laporan lihat lampiran O.

## 21. S u r a t.

- a. Pengertian. Surat adalah salah satu alat penjangpaian berita setjara tertulis jang berisi pemberitahuan, pernjjataan, permintaan dll. kepada fihak lain.
- b. Penomoran. Tjara penomoran surat (surat keluar) pada garis besarnja disusun sebagai berikut :
  - 1) Surat jang *tidak* ditata-naskahkan :
    - a) Singkatan Klasifikasi surat (SR, R, K, B).
    - b) Nomor surat
    - c) Angka bulan (dengan angka Romawi).
    - d) Angka tahun.

/ Tjontoh : . . . . .

*Tjontoh* : R/15/II/1970.

R = Singkatan klasifikasi (Rahasia).

15 = Nomor surat.

II = Angka bulan.

1970 = Angka tahun.

- 2) Surat yang ditata-naskahkan, mengikuti nomor tata naskah yang bersangkutan.
- c. Distribusi. Daftar pengiriman surat sesuai dengan alamat yang ditjantumkan, baik alamat Kepada maupun alamat Tembusan.
- d. Penjusunan.

1) Susunan surat dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a) Kepala : — Nama Instansi.  
— Tempat, kedudukan, tanggal bulan dan tahun.  
— Nomor.  
— Sifat.  
— Lampiran.  
— Perihal.  
— Alamat (pada ukuran folio).  
— U.p. (apabila diperlukan).
- b) Isi surat : — Pendahuluan.  
— Uraian.  
— Maksud.  
— Kata Penutup.
- c) Penutup : — Nama jabatan.  
— Tanda tangan.  
— Nama pendjabat.  
— Pangkat, Corps dan NRP. (PAMEN keba-  
wah sebutkan Corps dan NRP).  
— Tjap jabatan dinas.  
— Tembusan (dan alamat bagi surat yang ber-  
ukuran  $\frac{1}{2}$  folio).

2) Tjontoh bentuk surat lihat tjontoh pada lampiran P.1 dan P.2.

3) Tjontoh bentuk surat pribadi menggunakan blanco kertas tersendiri tanpa bintang, tjontoh lihat lampiran Q.

## 22. Nota Dinas.

- a. Pengertian. Nota dinas adalah salah satu alat penjampaian berita setjara ter-  
tulis yang berisi pemberitahuan, pernjjataan, permintaan dll. kepada fihak  
lain, yang hanya dapat dipergunakan dalam suatu lingkungan terbatas (misalnja  
dalam suatu lingkungan atau intern staf).

/ b. Penomoran .....

- b. Penomoran. Tjara penomoran Nota Dinas sama dengan penomoran Surat lihat fasal 21 sub-fasal b hanja susunan nomor ditambah dengan "Nota". Nomor Nota Dinas adalah sama dengan surat biasa, djadi berarti masuk pada buku agenda keluar (verbaal).
- c. Distribusi. Sama dengan surat, lihat fasal 21 sub-fasal c.
- d. Bentuk. Bentuk nota dinas pada dasarnya sama dengan bentuk surat hanja lebih disederhanakan, lihat tjontoh pada lampiran R.

### 23. Surat Edaran.

- a. Pengertian. Surat Edaran adalah suatu pemberitahuan jang ditujukan kepada pendjabat<sup>3</sup> tertentu dengan tidak memuat suatu kebidjaksanaan pokok, melainkan hanja menjelaskan/memberi djalan tentang tjara pelaksanaan suatu peraturan jang ada dengan tidak mengandung sanksi.
- b. Penomoran. Tjara Penomoran Surat Edaran sama dengan penomoran Surat-Keputusan, lihat fasal 11 sub fasal c, hanja istilah SKEP diganti dengan SE.
- c. Distribusi. Pendistribusian Surat Edaran ditjantumkan dalam alamat, baik alamat „Kepada” maupun alamat „Tembusan”.
- d. Penjusunan.

1) Susunan surat-edaran dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian jaitu :

- a) Kepala : — Nama Instansi.  
— Nama Surat Edaran.  
— Nomor.  
— Perihal (tentang).
- b) Isi Surat Edaran.
- c) Penutup : — Tempat dan Tanggal dikeluarkan  
— Nama djabatan  
— Tanda tangan  
— Nama pendjabat  
— Pangkat, Corps dan NRP. (PAMEN kebawah sebutkan Corps dan NRP).  
— Tjap djabatan dinas  
— Alamat dan Tembusan

2) Tjontoh bentuk Surat Edaran lihat lampiran S.

### 24. Pengumuman.

- a. Pengertian. Pengumuman adalah suatu pemberitahuan jang ditujukan kepada umum atau sesuatu golongan dan tidak memuat soal<sup>3</sup> tjara pelaksanaan tehnis menurut suatu peraturan.
- b. Penomoran. Tjara penomoran Pengumuman sama dengan penomoran Surat-Keputusan, lihat fasal 11 sub fasal c, hanja istilah SKEP diganti dengan PENG.

/ c. Distribusi .....

- c. Distribusi. Biasanja Pengumuman tidak mentjantumkan alamat, ketjuali apa-bila pengumuman tersebut hanja kepada sesuatu golongan tertentu. Dengan demikian, maka tjatatan pendistribusian pengumuman terletak pada buku ekspedisi.
- d. Penjusunan. Pengumuman susunannja seperti Surat Edaran, hanja mengenai alamat dan tembusan biasanja tidak ditjantumkan, ketjuali bila pengumuman tersebut hanja ditudjukan kepada sesuatu golongan tertentu.

Tjontoh bentuk, lihat lampiran T.

25. Buku Harian.

- a. Pengertian. Buku Harian adalah suatu buku jang dipakai untuk mentjatat setjara singkat, pendek, bersifat tetap, resmi dan kronologis segala kedjadian sebagai bahan jang dipandang perlu untuk diketahui dalam hubungan pelaksanaan tugas organisasi/kesatuan.
- b. Pembuatan. Mengenai ketentuan tingkat pendjabat mana jang harus membuat/memiliki Buku Harian, diatur sesuai dengan ketentuan<sup>3</sup> jang berlaku dilingkungan masing-masing<sup>3</sup> menurut tugas dan kebutuhan.
- c. Bentuk. Bentuk Buku Harian, lihat tjontoh pada lampiran U.

26. Lembaran Kerdja.

- a. Pengertian. Lembaran Kerdja adalah lembaran<sup>3</sup> jang berisi tjatatan<sup>3</sup> mengenai suatu persoalan/masalah jang bersumber dari buku harian dan jang memuat tindakan penjeleasaannya.
- b. Pembuatan. Mengenai ketentuan jang harus membuat/memiliki Lembaran-Kerdja sama dengan ketentuan Buku Harian lihat fasal 25 sub fasal b.
- c. Bentuk. Bentuk Lembaran Kerdja, lihat tjontoh pada lampiran W.

27. Tilgram/Radiogram.

- a. Pengertian. Tilgram adalah berita jang membutuhkan penjelesaian segera jang disampaikan kepada/diterima dari fihak lain melalui radio/telegrafi.
- b. Penomoran. Tjara penomoran Tilgram disusun sbb. :
  - 1) Singkatan Tilgram dan klasifikasi (TSR = Tilgram Sangat Rahasia; TR = Tilgram Rahasia; TK = Tilgram Konfidensiil; T = Tilgram Biasa).
  - 2) Nomor tilgram
  - 3) Angka tahun

Tjontoh. Nomor : TSR/70/1970

TSR = Singkatan tilgram dan klasifikasi (Tilgram Sangat Rahasia)

70 = Nomor Tilgram

1970 = Angka tahun

- c. Tanggal/Waktu pembuatan. Tjara menuliskan tanggal/waktu pembuatan berbeda dengan tulisan<sup>3</sup> dinas jang lain, ialah dibuat sematjam singkatan.

/ Sebagai .....

Sebagai *tjontoh* :

Tilgram/Radiogram dibuat pada tanggal 13 September 1969 djam 10.30, maka tjara penulisanja sbb. :

0913.10.30 artinja :

- 09 (dua angka terdepan) = menundjukkan angka bulan
- 13 (dua angka kedua) = menundjukkan angka tanggal
- 10.30 (empat angka berikuttja) = menundjukkan waktu/djam.

d. Penanda-tanganan.

- 1) Dalam formulir tilgram/radiogram (Formulir Berita) terdapat dua nama djabatan penanda-tangan, ialah :
  - a) Nama djabatan dari pendjabat jang menentukan apa/bagaimana maksud atau isi tilgram jang bersangkutan.
  - b) Nama djabatan pengirim tilgram/radiogram, ialah pendjabat jang mempunjai kartu legitimasi untuk HUB (biasanja KASET/SES).
- 2) Tersebut ad a) diatas ditjantumkan pada ruang "DARI" dan sebagai PENUTUP daripada isi tilgram/radiogram.  
 Bila sesuatu tilgram/radiogram ditanda-tangani dengan menggunakan A.n., A.p., atau U.b., maka jang ditjantumkan pada ruang "DARI", tetap nama djabatan untuk siapa pengirim menanda-tangani. Sedang pada penutup daripada isi tilgram/radiogram dituliskan nama djabatan jang menanda-tangani lengkap dengan menuliskan (A.n./A.p./U.b.) untuk siapa pengirim menanda-tanganinja.

*Tjontoh* :

Tilgram/radiogram ditanda-tangani WAPANGAB An MENHANKAM/PANGAB, maka harus ditulis sebagai berikut :

Pada ruang "DARI" ditulis = MENHANKAM/PANGAB

Sedang pada penutup daripada isi tilgram/radiogram ditulis = AN MENHANKAM/PANGAB — WAPANGAB KIRIM (X).

- 3) Pendjabat jang menentukan apa/bagaimana maksud tilgram/radiogram, harus menanda-tangani pada lembar tilgram/radiogram jang dijadikan arsip pengirim sebagai bukti pertanggungan-djawab isi/maksud dari tilgram tersebut.

Adapun lembar tilgram/radiogram jang dikirim (ke HUB), tjukup ditanda-tangani oleh pendjabat jang mempunjai kartu legitimasi untuk HUB (biasanja KASET/SEKRETARIS) dlsb.

- e. Distribusi. Distribusi tilgram sesuai dengan alamat jang ditjantumkan, baik dalam alamat Kepada/Untuk maupun dalam alamat Tembusan.
- f. Bentuk. Bentuk tilgram/radiogram, lihat tjontoh pada lampiran Y.1.

/ 28. Surat .....

28. Surat Tilgram/Berita Pos.

- a. Pengertian. Surat Tilgram/Berita Pos adalah surat yang disusun menurut gaya tilgram.

Pengiriman Surat Tilgram/Berita Pos tidak menggunakan saluran HUB, melainkan dilakukan melalui POSMIL Angkatan/POLRI atau tjarak.

- b. Penomoran. Tjara penomoran Surat Tilgram sama dengan penomoran Tilgram, hanya singkatan TSR, TR, TK dan T, diganti dengan STSR, STR, STK dan ST.

- c. Tanggal Pembuatan. Tanggal pembuatan ditulis lengkap, lihat tjontoh pada lampiran Y.2.

- d. Penanda-tanganan.

- 1) Dalam bentuk Surat Tilgram hanya terdapat satu nama jabatan penanda-tangan, ialah : Nama jabatan dari pendjabat yang menentukan apa/ bagaimana maksud atau isi Surat Tilgram.
- 2) Nama jabatan tersebut diatas ditjantumkan pada ruang "DARI" dan sebagai PENUTUP dari isi Surat Tilgram dengan dituliskan setjara lengkap dan merupakan tadjuk tanda-tangan.

Bila Surat Tilgram ditanda-tangani dengan menggunakan A.n., A.p. atau U.b., maka yang ditjantumkan pada ruang "DARI" : tetap nama jabatan untuk siapa pengirim menanda-tangani. Sedang pada penutup daripada isi Surat Tilgram dituliskan nama jabatan yang menanda-tangani lengkap dengan menuliskan A.n., A.p. atau U.b. untuk siapa pengirim menanda-tanganinja.

*Tjontoh :*

Surat Tilgram ditanda-tangani WAPANGAB A.n. MENHANKAM/PANGAB, maka harus ditulis sebagai berikut :

Pada ruang "DARI" ditulis = MENHANKAM/PANGAB

Pada penutup daripada isi Surat Tilgram dituliskan =

AN MENHANKAM/PANGAB  
WAPANGAB

M. PANGGABEAN  
DJENDERAL TNI

/ e. Distribusi .....



- e. Distribusi. Pendistribusian Surat Tilgram sesuai dengan alamat yang ditjantumkan, baik dalam alamat Kepada maupun dalam alamat Tembusan.
  - f. Bentuk. Bentuk Surat Tilgram, lihat tjontoh pada lampiran Y.2.
29. Surat Pengantar.
- a. Pengertian. Surat Pengantar adalah surat yang berbentuk daftar yang digunakan untuk mengantar sesuatu yang perlu dikirimkan.
  - b. Penomoran. Tjara penomoran Surat Pengantar mengikuti nomor urut Surat keluar biasa, vide fasal 21 sub fasal b.
  - c. Distribusi. Pendistribusian Surat Pengantar sesuai dengan alamat yang ditjantumkan, baik dalam alamat Kepada maupun dalam alamat Tembusan. Djuga dapat disebutkan misalnja :  
Distribusi "A".
  - d. Bentuk. Bentuk Surat Pengantar, lihat tjontoh pada lampiran Z.

## B A B V

### TULISAN-<sup>2</sup> DINAS JANG MERUPAKAN PRODUK-<sup>3</sup> JUDIKATIF POLISIONIL DAN PERBENDAHARAAN

30. Tulisan-<sup>2</sup> Dinas jang merupakan Produk-<sup>3</sup> Judikatif. Produk yang bersifat judikatif adalah tulisan-<sup>2</sup> dinas yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Kehakiman dilingkungan Departemen Pertahanan Keamanan yang isinja adalah mengenai atau berhubungan dengan pengusutan, penuntutan, pendjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman terhadap pelanggar KUHP/KUHPT, KUHDT dan PDT.
31. Tulisan-<sup>2</sup> Dinas jang merupakan produk-<sup>3</sup> Polisionil. Produk yang bersifat polisionil adalah tulisan-<sup>2</sup> dinas yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Kepolisian dilingkungan Departemen Pertahanan-K keamanan yang isinja mengenai atau berhubungan dengan penjidikan, pengusutan dan penertiban pelanggaran KUHP/KUHPT, KUHDT dan PDT.
32. Tulisan-<sup>2</sup> Dinas jang merupakan Produk-<sup>3</sup> Perbendaharaan. Produk-<sup>3</sup> yang bersifat perbendaharaan adalah tulisan-<sup>2</sup> dinas yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan-<sup>2</sup> Keuangan, Mateciil, dll. yang sedjenis dengan itu dilingkungan Departemen Pertahanan Keamanan atau oleh Badan-<sup>2</sup> tersebut bersama-sama dengan instansi-instansi diluar Departemen Pertahanan-K keamanan yang isinja mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Undang-<sup>2</sup> Perbendaharaan Negara (ICW), Undang-<sup>2</sup> Perusahaan (IBW) dan Undang-<sup>2</sup> Hukum Perdata (BW).

/ Pendjelasan .....

*Pendjelasan.*

Tulisan<sup>3</sup> Dinas yang merupakan Produk<sup>3</sup> Judikatif, Polisionil dan Perbendaharaan seperti tsb. pada fasal 30, 31 dan 32 tidak dibahas lebih lanjut dalam Buku Petunjuk Administrasi Umum DEPHANKAM ini, karena telah mempunyai bentuk<sup>3</sup> tersendiri sesuai dengan bidang dan undang<sup>3</sup> yang bersangkutan.

**B A B VI****PEROBAHAN, PENTJABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT**

33. *Perubahan.* Perubahan adalah, merubah sebahagian dari sesuatu tulisan dinas. Hendaknja dalam hal ini dapat dibedakan mengenai merubah kekeliruan ketjil (salah mengetik), untuk itu kita namakan RALAT.
34. *Pentjabutan.* Pentjabutan adalah, pernjjataan tidak berlakunja lagi sesuatu tulisan dinas terhitung mulai saat ditentukan dalam pentjabutan tersebut.
35. *Pembatalan.* Pembatalan adalah, suatu pernjjataan yang menjatakan bahwa suatu tulisan harus dianggap tidak pernah dikeluarkan.
36. *Tata-Tjara.* Tata-tjara untuk merubah, mentjabut dan membatalkan tulisan<sup>3</sup> dinas diatur sebagai berikut :
  - a. Tulisan dinas yang bersifat mengatur, dirobah, ditjabut atau dibatalkan dengan tulisan dinas yang sama.
  - b. Tulisan dinas yang bersifat naskah/surat, dapat dirobah, ditjabut atau dibatalkan dengan surat biasa (tidak perlu sama djenisnja).
  - c. Tulisan dinas yang menentukan perubahan, pentjabutan atau pembatalan dikeluarkan oleh pendjabat yang semula mengeluarkan tulisan dinas tersebut atau oleh pendjabat atasannya yang lebih tinggi kedudukannya.
  - d. Merubah yang sifatnja kekeliruan ketjil (salah mengetik) dapat diralat oleh Kepala Sekretariat/Sekretaris.

**B A B VII****BENTUK-BENTUK**

37. *Ukuran kertas.* Ukuran kertas yang dipergunakan untuk tulisan<sup>3</sup> dinas dilingkungan Departemen Pertahanan-Keamanaan (bukan lampiranja) adalah sebagai berikut :
 

a. Kertas folio	— berukuran 33 × 21,5 cm.
b. Kertas setengah folio	— berukuran 16,5 × 21,5 cm.
c. Kertas kwarto	— berukuran 28 × 21,5 cm.
38. *Bentuk.* Bentuk tulisan<sup>3</sup> dinas dilingkungan Departemen Pertahanan-Keamanaan diatur seperti tjontoh<sup>3</sup> pada lampiran Buku Petunjuk Administrasi Umum Departemen Pertahanan-Keamanaan.

**/ BAB VIII**

## B A B VIII

### SUSUNAN DAN PENULISAN

39. Pembagian suatu Tulisan Dinas.

a. Suatu tulisan dinas dapat dibagi dalam :

- 1) Fasal-<sup>2</sup> dibawah suatu Kepala tengah atau Kepala samping (apabila diperlukan).
- 2) Kepala-<sup>2</sup> samping (apabila diperlukan) dibawah suatu Kepala tengah.
- 3) Kepala-<sup>2</sup> tengah dibawah suatu Djudul Bab.
- 4) Bab-<sup>2</sup> dalam Bagian-<sup>2</sup>.

b. Tidak setiap dinas memerlukan pembagian seperti tersebut diatas, beberapa diantaranya boleh dihilangkan, tetapi jika dipakai, maka harus menurut urutan seperti tertera dalam fasal 39 sub fasal a diatas.

40. Urutan penomoran. Suatu naskah dalam garis besarnya diberi nomor sebagai berikut :

a. Bagian-<sup>2</sup> diberi sebutan nomor berturut-turut meliputi seluruh naskah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bagian beserta sebutan nomor bagian, kesemuanya ditulis dengan huruf besar dan diberi garis bawah.
- 2) Sebutan nomor bagian dimulai dengan BAGIAN PERTAMA, BAGIAN KEDUA dan selanjutnya.

b. Bab-<sup>2</sup> diberi nomor berturut-turut meliputi seluruh bagian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bab ditulis dengan huruf besar dan diberi garis bawah.
- 2) Nomor untuk Bab dipergunakan angka Romawi (juga diberi garis bawah).

c. Fasal-<sup>2</sup> diberi nomor berturut-turut meliputi seluruh bagian dengan memberi nomor satu pada fasal pertama dari tiap-<sup>2</sup> bagian. Nomor untuk fasal dipergunakan angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya).

41. Matjam Kepala Naskah. Ada 4 (empat) kepala jang dapat dipakai dalam susunan menulis suatu naskah dinas, jaitu :

- a. Kepala tengah, jang terdiri dari/dan mengatur Kepala-<sup>2</sup> samping, fasal dan sub fasal.
- b. Kepala samping, jang terdiri dari/dan mengatur Kepala-<sup>2</sup> fasal dan sub fasal.
- c. Kepala fasal, jang terdiri dari/dan mengatur kepala sub fasal.
- d. Kepala sub fasal, jang terdiri dari/dan mengatur sub fasalnya itu sendiri.

/ 42. Penggunaan .....

42. Penggunaan Nomor. Tjara penggunaan/pemberian nomor adalah sebagai berikut :

- a. Bagian. Penggunaan/pemberian nomor untuk Bagian dituliskan setjara lengkap sesuai dengan edjaannja dan ditulis dengan huruf besar.  
Tjontoh : BAGIAN PERTAMA, BAGIAN KEDUA, BAGIAN KETIGA dst.
- b. Bab. Penggunaan/pemberian nomor untuk Bab, dipakai angka Romawi dan bab ditulis dengan huruf besar.  
Tjontoh : BAB I, BAB II, BAB III dst.
- c. Fasal. Angka Arab digunakan untuk memberi nomor fasal-fasal, umpamanya : 1, 2, 3 dst.
- d. Sub Fasal. Huruf<sup>2</sup> ketjil digunakan untuk memberi nomor sub fasal, ketjuali huruf i, v, x. Misalnja : a, b, c dst.
- e. Sub-sub Fasal. Angka<sup>3</sup> Arab dengan kurung tutup digunakan untuk memberi nomor sub-sub fasal misalnja : 1), 2), 3) dst.
- f. Sub-sub-sub Fasal. Huruf<sup>3</sup> ketjil dengan kurung tutup digunakan untuk memberi nomor sub-sub-sub fasal ketjuali huruf i, v dan x, misalnja : a), b), c) dst.
- g. Sub-sub-sub-sub Fasal. Angka<sup>3</sup> Arab dalam kurung digunakan untuk memberi nomor sub-sub-sub-sub fasal, misalnja : (1), (2), (3), (4). dst.
- h. Sub-sub-sub-sub-sub Fasal. Huruf<sup>3</sup> ketjil dalam kurung digunakan untuk memberi nomor sub-sub-sub-sub-sub fasal ketjuali huruf i, v dan x. Misalnja : (a), (b), (c), (d) dst.
- j. Nomor Halaman. Kalau suatu tulisan dinas terdiri lebih dari satu halaman, maka halaman kedua dan berikutnya harus diberi nomor dengan angka Arab.

43. Kata Penjambung (Catchword). Apabila sesuatu tulisan dinas terdiri lebih dari satu halaman, maka pada tiap halaman dituliskan kata pertama dari halaman berikutnya dan ditempatkan/ditjantumkan disudut bawah sebelah kanan dan diberi tanda „/” kemudian suku kata pada halaman berikutnya dan dibelakang kata tersebut diberi tanda titik<sup>2</sup>. Apabila kata pertama dari halaman berikutnya memakai garis bawah, maka kata penjambung tersebut djuga diberi garis bawah.

44. Tanggal, Distribusi dan Garis-bawah.

- a. Tanggal. Tiap<sup>2</sup> tulisan dinas harus diberi tanggal. Dalam memberi tanggal atau mengutip sesuatu tanggal, dapat ditulis dengan lengkap atau disingkatkan. Pada naskah<sup>2</sup> hal ini ditulis dengan lengkap. Tanggal selamanya mendahului bulan, ketjuali ada ketentuan khusus.
- b. Distribusi. Sesuatu tulisan dinas biasanja mentjantumkan petundjuk distribusinja, baik jang merupakan alamat „Kepada” dan „Tembusan” maupun jang merupakan „Daftar Distribusi”.

/ Untuk .....

Untuk naskah tidak menggunakan sebutan tembusan seperti halnja dengan surat, akan tetapi dengan sebutan "Distribusi" dan ditempatkan disudut bawah sebelah kiri. (Lihat tjontoh<sup>3</sup> dalam lampiran Buku Petunjuk Administrasi Umum DEPHANKAM ini). Pengumuman, Buku-Harian, Lembaran-Kerdja, biasanja tanpa alamat/distribusi, sedang alamat jang ditudju hanja ditjantumkan pada sampulnja sadja.

- c. Garis bawah. Djika hendak memberikan tekanan pada suatu kata dalam kalimat, maka kata tersebut dapat diberi garis dibawahnja. Perlu ditjatat, bahwa penggunaan garis bawah jang terlalu sering, djustru akan mengurangi maksudnja.

## B A B IX

### TJARA<sup>3</sup> MENJUSUN DAN MENGETIK TULISAN<sup>3</sup> DINAS

#### 45. Pendahuluan.

- a. Keceragaman hanja dapat ditjapai, apabila kita mentaati suatu kumpulan pedoman tertentu. Termasuk dalam hal ini ialah, pedoman mengenai tjara<sup>4</sup> menulis Bahasa Indonesia setjara baik, disamping kemampuan menjusun dan menulis/mengetik menurut pedoman<sup>2</sup> mengenai pembagian dalam fasal<sup>3</sup>, kepala<sup>3</sup>, nomor<sup>3</sup>, singkatan<sup>3</sup>, lampiran<sup>3</sup> serta mempersiapkan dan menjampaiakan naskah<sup>3</sup> dinas seperti bahan<sup>3</sup> keterangan, instruksi<sup>3</sup> dan laporan<sup>3</sup>.
- b. Pembagian dalam fasal<sup>3</sup> jang tepat, pemberian kepala<sup>3</sup> jang baik dan suatu sistim jang mantik dalam pemberian nomor<sup>3</sup> adalah diperlukan dalam menulis suatu naskah dinas dengan alasan<sup>3</sup> sebagai berikut :
  - 1) Guna dapat menundjukkan susunan jang mantik dari naskah dinas itu dan menerangkan alasan-alasannya dengan djelas.
  - 2) Guna memudahkan penundjukan ketiap bagian dari naskah tersebut.

#### 46. Penulisan Kepala<sup>3</sup>.

- a. Pemberian Garis Bawah. Semua kepala diberi garis bawah (ketjuali jang telah diatur menurut tjontoh dalam lampiran), kepala fasal dan kepala sub fasal tjukup dengan memberi garis bawah beberapa perkataan dari teks sadja. Suatu fasal atau sub fasal harus berdiri sendiri, sesuai dengan tata-bahasa jang mengandung pikiran lengkap, tanpa bantuan dari kepala samping, fasal/sub lain.
- b. Kepala Tengah. Kepala tengah diketik dengan huruf<sup>3</sup> besar, diberi garis bawah, diketik ditengah-tengah ruang dan tidak diberi nomor. Ini dipakai untuk menjatakan "Kepala Karangan" dari tulisan dinas jang bersangkutan dan kalau perlu untuk pembagian dari persoalan jang dikupas dalam tulisan dinas itu.

/ . Bila .....

Bila suatu kepala dipakai sebagai judul, maka segala sesuatu yang ada dalam tulisan dinas itu, harus bersangkutan dengan kepala itu, jadi kepala yang dipilih harus cukup luas, sehingga dapat meliputi segala suatu aspek dari tulisan dinas itu. Kepala tengah tidak diakhiri dengan titik.

- c. Kepala Samping. Apabila diperlukan dapat dipergunakan Kepala samping dan diketik diatas suatu baris tersendiri dan dimulai dari tepi sebelah kiri. Huruf-<sup>3</sup> besar dipakai pada permulaan kata-<sup>3</sup> yang penting dan seluruh kepala diberi garis bawah. Ini dipakai untuk mengontrol/menguasai, baik suatu fasal tunggal maupun suatu kumpulan fasal dan ini akan meliputi seluruh teks berikutnya sampai kepala tengah atau kepala samping yang mungkin menjusul. Kepala samping tidak diakhiri dengan titik.
  - d. Kepala Fasal. Kepala fasal diketik pada baris yang sama dengan nomor fasal diantara nomor fasal dan kata pertama dari teks (hal ini apabila tidak langsung dengan pembagian sub fasal). Huruf-<sup>2</sup> besar dipakai untuk permulaan kata-<sup>2</sup> yang penting dan seluruh kepala fasal diberi garis bawah. Kepala fasal ini hanya mengontrol/menguasai fasal itu sendiri, beberapa sub fasal dan bila ada sub-sub fasal. Kepala fasal diakhiri dengan titik.
  - e. Kepala Sub Fasal. Kepala sub fasal diketik pada baris yang sama dengan huruf (nomor sub fasal), diantara huruf ini dan huruf pertama dari teks (hal ini apabila tidak langsung dengan pembagian sub-sub fasal). Huruf-<sup>2</sup> besar dipakai untuk permulaan kata-<sup>2</sup> yang penting dan seluruh kepala sub fasal diberi garis bawah. Kepala sub fasal ini hanya mengontrol/menguasai fasal itu sendiri dan beberapa sub-sub fasal yang menjusul. Kepala sub fasal diakhiri dengan titik.
47. Tjara penulisan dalam pemberian nomor pada fasal-<sup>3</sup> adalah sebagai berikut :
- a. Fasal-<sup>3</sup>. Angka-<sup>3</sup> Arab dipakai untuk memberi nomor fasal umpamanya : 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Angka-<sup>3</sup> ini ditutup dengan sebuah titik.
  - b. Sub-Fasal. Huruf ketjil (abjad) dipakai untuk memberi nomor sub fasal, umpamanya : a, b, c, d dan seterusnya, ketjuali huruf-<sup>3</sup> i, v dan x, karena huruf-<sup>3</sup> tersebut dipakai untuk nomor dari sub-sub-sub-sub fasal. Huruf-<sup>3</sup> ketjil (yang dipakai sebagai nomor sub-fasal) ditutup dengan sebuah titik.
  - c. Sub-sub Fasal. Angka-<sup>3</sup> Arab dengan diikuti kurung tutup dipakai untuk memberi nomor sub-sub-fasal, umpamanya : 1), 2), 3) dan seterusnya. Nomor-<sup>3</sup> ini tidak ditutup dengan sebuah titik.
  - d. Sub-Sub-Sub-Fasal. Huruf ketjil (abjad) dengan diikuti kurung tutup dipakai untuk memberi nomor sub-sub-sub fasal, umpamanya : a), b), c) dan seterusnya, ketjuali huruf-<sup>3</sup> i, v dan x. Nomor ini tidak ditutup dengan titik.

/ e. Sub .....

e. Sub-sub-sub-sub Fasal. Angka<sup>2</sup> Arab dalam kurung dipakai untuk memberi nomor sub-sub-sub-sub-fasal, umpamanja (1), (2), (3) dan seterusnya. Nomor ini tidak ditutup dengan titik.

f. Sub-sub-sub-sub Fasal. Huruf ketjil (abdjad) dalam kurung dipakai untuk memberi nomor sub-sub-sub-sub-fasal, umpamanja : (a), (b), (c) dan seterusnya, ketjuali huruf i, v dan x. Nomor ini tidak ditutup dengan sebuah titik.

Apabila sangat diperlukan sub dari sub-sub-sub-sub-fasal diberi nomor dengan menggunakan angka Romawi ketjil dalam kurung umpamanja : (i), (ii), (iii) dan seterusnya. Djuga angka ini tidak ditutup dengan sebuah titik.

48. Ruang Tepi. Ada 4 ruang tepi pada setiap kertas, baik kertas jang berukuran folio, ½ folio maupun kwarto, ialah :

- a. Ruang tepi sebelah atas, minimal 2 kait dari pinggir atas kertas. Tulisan jang paling atas biasanja adalah nama instansi, nomor halaman atau klasifikasi (Sangat Rahasia, Rahasia dan Terbatas).
- b. Ruang tepi sebelah bawah, minimal 2 kait dari pinggir kertas sebelah bawah. Tulisan jang terachir pada tiap halaman adalah kata penjambung (catchword) atau klasifikasi (Sangat Rahasia, Rahasia dan Terbatas).
- c. Ruang tepi sebelah kiri, minimal 15 ketukan. Djika dipakai bolak-balik, maka untuk halaman nomor genap, berlaku ketentuan sebaliknya, ialah 5 ketukan (perforator kertas).
- d. Ruang tepi sebelah kanan, minimal 5 ketukan. Djika dipakai bolak-balik, maka berlaku ketentuan sebaliknya, ialah 15 ketukan.

49. Spasi Horizontal (Ketukan).

- a. Fasal tanpa Kepala. Kalau suatu fasal tidak mempunjai kepala, angka Arab jang dipakai untuk nomor fasal ini diketik pada ruang tepi, selandjutnja urutannja adalah sebagai berikut : angka pada ketukan pertama, disusul dengan sebuah titik (.) pada ketukan kedua dan huruf pertama dari teks dimulai pada ketukan ke-enam. Kalau nomor fasal lebih dari satu angka (nomor 10 ke-atas), huruf pertama dari teks tetap pada ketukan ke-enam, selandjutnja huruf pertama dari baris kedua dan baris<sup>2</sup> berikutnya dari fasal itu ditempatkan pada ketukan ke-enam, jaitu dibawah huruf pertama dari teks.
- b. Fasal dengan Kepala. Kalau suatu fasal mempunjai kepala, angka Arab jang dipakai untuk nomor fasal ini diketik pada ruang tepi, selandjutnja urutannja adalah sebagai berikut : angka pada ketukan pertama, disusul dengan sebuah titik pada ketukan kedua dan huruf pertama dari Kepala fasal dimulai pada ketukan ke-enam.

Huruf fasal pertama dari teks dimulai pada ketukan ke-empat sesudah titik dari kepala, fasal selandjutnja huruf pertama dari baris kedua dan baris<sup>2</sup> berikutnya dari fasal itu ditempatkan pada ketukan ke-enam, jaitu dibawah huruf pertama kepala fasal.

/ c. Sub .....

- c. Sub Fasal tanpa Kepala. Kalau suatu sub fasal tidak mempunyai kepala, urutannya adalah sebagai berikut : huruf pertama (nomor sub fasal) pada ketukan ke-enam dari ruang tepi, disusul dengan sebuah titik selanjutnya huruf pertama dari teks ditempatkan pada ketukan ke-empat sesudah titik itu. Huruf<sup>2</sup> pertama dari baris ke-dua dan baris<sup>3</sup> selanjutnya dari sub fasal itu ditempatkan dibawah huruf pertama dari teks.
- d. Sub Fasal dengan Kepala. Kalau suatu sub fasal mempunyai kepala, urutannya adalah sebagai berikut : huruf pertama (nomor sub fasal) pada ketukan ke-enam dari ruang tepi, disusul dengan sebuah titik, kemudian huruf pertama dari kepala sub fasal ditempatkan pada ketukan ke-empat sesudah titik itu. Huruf pertama teks ditempatkan pada ketukan ke-empat sesudah titik dari kepala sub fasal, selanjutnya huruf pertama dari baris ke-dua dan berikutnya ditempatkan dibawah huruf pertama dari kepala sub fasal.
- e. Sub-sub Fasal. Angka Arab untuk nomor sub-sub fasal ditempatkan tepat dibawah huruf pertama teks/kepala sub fasal, disusul dengan angka Arab dan kurung tutup. Huruf pertama untuk teks sub-sub fasal ditempatkan pada ketukan ke-empat sesudah kurung tutup. Huruf pertama dari baris ke-dua dan berikutnya ditempatkan dibawah huruf pertama dari teks sub-sub fasal.
- f. Sub-sub-sub Fasal. Huruf pertama (nomor sub-sub-sub-fasal) ditempatkan dibawah huruf pertama dari teks sub-sub fasal disusul dengan kurung tutup. Huruf pertama untuk teks sub-sub-sub fasal ditempatkan pada ketukan ke-empat sesudah kurung tutup. Huruf pertama dari baris kedua dan berikutnya ditempatkan dibawah huruf pertama dari teks sub-sub fasal.
- g. Sub-sub-sub-sub Fasal. Kurung buka untuk nomor sub-sub-sub-sub fasal ditempatkan tepat dibawah huruf pertama dari teks sub-sub-sub fasal, disusul dengan angka Arab dan kurung tutup. Huruf pertama untuk teks<sup>2</sup> sub-sub-sub-sub fasal ditempatkan pada ketukan ketiga sesudah kurung tutup. Huruf pertama dari baris kedua dan berikutnya ditempatkan dibawah huruf pertama dari teks sub-sub-sub-sub fasal.
- h. Sub-sub-sub-sub-sub Fasal. Kurung buka untuk nomor sub-sub-sub-sub-sub fasal ditempatkan tepat dibawah huruf pertama sub-sub-sub-sub fasal, disusul dengan huruf ketjil (abdjad) dan kurung tutup, ketjuali huruf i, v, dan x. Huruf pertama untuk teks sub-sub-sub-sub-sub fasal ditempatkan pada ketukan ketiga sesudah kurung tutup. Huruf pertama dari baris kedua dan berikutnya ditempatkan dibawah huruf pertama dari teks sub-sub-sub-sub-sub fasal. Apabila sangat diperlukan sub dari sub-sub-sub-sub-sub fasal diberi nomor dengan menggunakan angka Romawi ketjil dalam kurung umpamanya (i), (ii), (iii) dan seterusnya, dengan tjara pengetikan jang sama seperti diatas.

/ j. Chusus .....



j. Khusus bagi pengetikan tulisan dinas yang tidak menggunakan nomor-<sup>3</sup> fasal, maka huruf pertama dari teks dimulai pada ketukan ke-enam dari ruang tepi, selanjutnya huruf pertama dari baris ke-dua dan berikutnya ditempatkan di ruang tepi, sampai uraian tersebut selesai dalam tiap-<sup>2</sup> alinea. Selanjutnya huruf pertama dari alinea ke-dua dimulai pada ketukan ke-enam dari ruang tepi dan untuk baris kedua berikutnya berlaku seperti pada alinea yang pertama.

k. Spasi sebelum/sesudah Tanda-<sup>3</sup>. Ketentuan untuk memberikan spasi sebelum/sesudah tanda-<sup>2</sup> adalah sebagai berikut :

- 1) *Satu ketukan* diadakan sebelum titik-dua, sesudah koma, sesudah garis-miring untuk kata penjangbung (catchword).
- 2) *Dua ketukan* diadakan sesudah titik koma dan sesudah titik dua.
- 3) *Tiga ketukan* diadakan sesudah titik.

50. Spasi Vertikal (Kait/Baris). Pemberian spasi vertikal dalam suatu tulisan dinas ditentukan sebagai berikut :

a. Satu kait. Teks sesuatu tulisan dinas yang telah selesai dibuat dengan satu kait, ini adalah berlainan dengan bentuk tulisan dinas yang masih merupakan suatu konsep.

b. Dua kait. Dua kait dipakai :

- 1) Antara fasal dengan fasal.
- 2) Antara fasal dengan sub fasal/sub-sub fasal.
- 3) Antara sub fasal dengan sub-sub fasal.
- 4) Antara kepala samping dengan teks berikutnya.
- 5) Pada kelompok referensi dan lampiran sesuatu naskah dinas.
- 6) Antara sebutan "Dengan hormat" dan teks surat, apabila sebutan ini diperlukan. Pada umumnya surat<sup>2</sup> yang ditujukan kepada instansi sipil/swasta, sebutan "Dengan hormat" digunakan dan tanpa diakhiri dengan titik/koma.
- 7) Antara U.p. dan teks surat.
- 8) Konsep-<sup>3</sup> surat/naskah untuk memudahkan diadakan perubahan-<sup>3</sup> dan pembatjaan.
- 9) Antara kelompok alamat „Kepada” dengan kelompok alamat „Tembusan”

c. Tiga kait. Tiga kait dipakai :

- 1) Antara tingkat keamanan dan tepi atas kertas.
- 2) Antara nomor halaman dan tepi atas kertas, jika ada tingkat keamanan, antara tingkat keamanan dan nomor halaman.

/ 3) Antara .....

- 3) Antara nomor naskah (tjontoh nomor TAP/DAF) dan tepi atas kertas, djika ada tingkat keamanan, antara tingkat keamanan dan nomor naskah.
- 4) Antara nama instansi dan tepi atas kertas, djika ada tingkat keamanan, antara tingkat keamanan dan nama instansi.
- 5) Antara nomor halaman dan teks dibawahnja (pengisian pertama tiap halaman).
- 6) Antara penundjukan lampiran dan teks naskah dinas.
- 7) Antara baris terachir dan kepala sampng.
- 8) Antara baris terachir dengan kepala tengah jang baru.
- 9) Antara baris terachir dengan catchword.
- 10) Antara catchword dan tepi bawah kertas, djika ada tingkat keamanan, antara catchword dan tingkat keamanan.
- 11) Antara tingkat keamanan dan tepi bawah kertas.
- 12) Antara baris terachir tulisan dan kelompok tanda tangan.

Pedoman tentang bentuk-<sup>2</sup> tulisan dinas lihat tjontoh lampiran AA.

51. Petjahan dalam Suku-Kata.

- a. Petjahan Suku-Kata. Ruang tepi sebelah kanan sedapat mungkin sama pandjang. Untuk mentjapai ini kata-<sup>2</sup> jang pandjang dapat dipetjah (diputuskan). Petjahan kata-<sup>2</sup> ini hendaknja dilakukan menurut ketentuan bahasa jang digunakan.

Sebagai tjontoh : "dengan" hanja dapat dipetjah mendjadi : *de-* dan *ngan*, tidak *deng* dan *an* dan djuga tidak *den* dan *gan*.

- b. Larangan Pemietjahan Suku-Kata. Nama-<sup>2</sup> orang djanganlah dipetjah. Untuk menulis pangkat seseorang lebih baik pada satu baris dan untuk nama lengkapnja dapat pada baris berikunja. Nama seseorang dalam tulisan dinas ketjuali huruf pertama supaja diketik dengan huruf ketjil semua dan tidak boleh diketik antara dua ketukan (spasi doble), ketjuali untuk tanda tangan.

52. Penulisan Kata-<sup>2</sup> Ulang. Kata-<sup>2</sup> jang diulangi ditulis setjara lengkap antara strip dan atau disingkat dengan diberi angka Arab 2 sesudah strip, umpamanja "Sebaik-2nja" (Angka Arab 2 sesudah strip dipergunakan untuk kata-<sup>2</sup> ulangan jang disingkat).

53. Pemberian Nomor Halaman. Kalau suatu naskah terdiri lebih dari satu halaman, maka halaman kedua dan berikunja harus diberi nomor. Demikian pula untuk halaman-<sup>2</sup> pada lampiran dan lampiran dari suatu lampiran, tetapi nomornja harus lepas dari nomor halaman naskah induk. Pada halaman pertama tidak perlu diberi nomor halaman dan nomor-<sup>2</sup> halaman dipakai dari Angka Arab, tidak perlu diapit oleh sesuatu strip (lihat tjontoh pada buku ini).

54. Kata Penjambung (catchword). Dalam satu halaman atau satu fasal, djanganlah diachiri dengan suatu petjahan kata. Supaja diusahakan sampai diachiri dengan kata penuh. Kata-<sup>2</sup> pertama dari halaman berikunja harus diketik disudut bawah

/ sebelah .....

sebelah kanan pada halaman sebelumnya dan harus ditempatkan pada kait (spasi vertikal) ketiga dibawah baris terakhir dari teks. Jika kata pertama pada halaman berikutnya memakai garis bawah, maka suku kata yang akan dipindahkan (catchword) juga dengan garis bawah dan jika tidak memakai garis bawah maka "catchword" itupun tidak diberi garis bawah. Untuk kepala karangan (judul), kepala-<sup>3</sup> samping, fasal dan sub fasal jangan berdiri sendiri sedapat mungkin diusahakan diketik dihalaman selanjutnya.

55. Konsep-<sup>1</sup> Tulisan Dinas. Semua konsep tulisan dinas harus diketik dengan dua kait (spasi dubel). Konsep-<sup>2</sup> yang ditulis dengan tangan sedapat mungkin ditulis dengan tinta. Dalam tulisan tangan, semua nama, harus ditulis dengan huruf besar agar dapat dibatja dengan terang.

56. Pemakaian Angka-<sup>2</sup> Arab.

a. Ketentuan Pemakaian Angka-<sup>3</sup> Arab. Ketjuali dalam memberi nomor pada sub fasal, sub-sub-sub-fasal dan sub-sub-sub-sub-sub- fasal (lihat fasal 47), semua pemberian nomor pada tulisan dinas harus dikerdjakan dengan angka-<sup>2</sup> Arab. Maksudnya untuk menghindarkan salah pengertian seperti pentjampuradukan angka Romawi II dan angka Arab 11.

b. Penulisan Tanggal dengan Angka Arab. Tulisan-<sup>2</sup> dinas harus diberi tanggal.

Dalam memberi tanggal atau mengutip suatu tanggal dalam teks dapat ditulis dengan lengkap atau disingkatkan. Pada naskah-<sup>3</sup> dinas, hal ini ditulis dengan lengkap. Tanggal selamanya mendahului bulan dan biasanja ditulis dengan lengkap sebagai berikut : 17 Agustus 1962. Kalau disingkat angka tanggal, angka bulan dan kedua angka yang terakhir dari tahun itu, harus ditulis demikian : 17-8-62, atau angka tanggal, tiga huruf pertama dari bulan dan dua angka terakhir dari tahun ditulis, umpamanya : 17 Agu 62, ketjuali bulan Djuni dan Djuli (empat huruf pertama dari bulan) ditulis : 17 Djun 66 dan 17 Djul 67.

57. Penempatan Tingkat Keamanan. Kalau tulisan dinas (ketjuali yang telah diatur dalam tjontoh-<sup>2</sup> dalam lampiran) mempunjai tingkat keamanan, maka pedomannya sebagai berikut :

- a. Tingkat keamanan harus ditempatkan di-tengah-<sup>3</sup> pada bagian atas dan bawah tiap halaman.
- b. Tingkat keamanan pada halaman pertama harus ditjap dan pada halaman berikutnya tjukup diketik dengan huruf besar dan diberi garis bawah.

58. Nomor Lembaran (Copy number). Semua tulisan dinas (ketjuali yang telah diatur dalam tjontoh-<sup>3</sup> dalam lampiran) yang diklasifikasikan, harus memuat nomor lembaran pada halaman pertama. Dengan sebutan nomor lembaran ini dapat disimpulkan bahwa jumlah lembaran harus terbatas dan dapat diawasi.

Beberapa ketentuan mengenai penggunaan nomor lembaran ialah sebagai berikut :

/ a. Naskah-<sup>2</sup> . . . .

- a. Naskah-<sup>3</sup> penilaian, Perintah-<sup>2</sup> Operasi dan jang sederajat diberi nomor Lembaran pada halaman pertama.
- b. Tilgram/radiogram jang diklasifikasikan tidak diberi nomor lembaran.
- c. Djumlah lembaran jang sebenarnya atau lembaran satu-satunya (kalau hanya ada satu lembaran) harus ditjantumkan/ditulisikan. Kalau memang hanya ada satu lembaran agar ditulis ("Lembaran tunggal").
- d. Halaman pertama sebuah lampiran memuat nomor lembaran jang sama seperti induknya (tulisan dinas jang bersangkutan).
- e. Sebutan Lembaran No. tidak diberi garis bawah.

59. Djudul Karangan.

- a. Penentuan Djudul Karangan. Tiap tulisan dinas harus mempunyai djudul. Ini harus dipilih dengan sangat seksama dan djuga harus mempunyai arti jang tjukup luas, sehingga meliputi segala aspek dari persoalan jang diperbintjangkan didalamnya. Kalau sebuah tulisan sudah dirobah, sebaiknya meneliti sekali lagi djudulnya serta mengubahnya kalau dianggap perlu, agar sesuai dengan teks jang telah dirubah itu.
- b. Penulisan Djudul Karangan. Djudul tulisan harus diketik dengan huruf besar dan diberi garis bawah. Ini harus ditempatkan di-tengah-<sup>2</sup> ruang halaman pertama, tiga kait dibawah tiap baris jang diketik sebelumnya, umpamanya : Lembaran No. atau REFERENSI. Kalau pandjang djudul memerlukan lebih dari satu baris, baris kedua dan berikutnya diketik setjara rapih (simetris) dibawah baris pertama dengan satu kait seperti :

RISALAH DARI SUATU RAPAT KERDJA DIADAKAN DI-  
RUANG RAPAT DEPHANKAM PADA TANGGAL .....  
DJANUARI 1966 UNTUK MEMBITJARAKAN ....

60. Penundjukan Kepada suatu Naskah atau Peta.

- a. Penundjukan Referensi. Adalah mendjadi kebiasaan untuk memperlihatkan penundjukan kepada suatu naskah atau peta jang bersangkutan diatas suatu tulisan dinas. Seandainja referensi ini berupa peta, maka penundjukan edisi jang telah diresmikan dari peta tersebut jang berisikan nama seri, termasuk djudul, lembaran dan sekalanja dalam urutan tersebut tadi ditjantumkan. Djika suatu sketsa peta atau peta jang telah diberikan tanda-<sup>2</sup> dilampirkan pada suatu naskah, maka ini dimasukkan dalam kelompok lampiran dan tidak dalam kelompok referensi.
- b. Tjara Penulisan Referensi. Perkataan "Referensi" ditulis dalam huruf besar dan diberi garis bawah dan disusul titik dua. Djadi ditulis sebagai berikut : "REFERENSI" : Perkataan ini diketik tiga kait dibawah baris terakhir dari djudul, dimulai dari ruang tepi sebelah kiri. Huruf-<sup>2</sup> pertama setiap perkataan

/ dari

dari judul penundjukan referensi diketik dengan huruf besar, sedang huruf<sup>1</sup> lainnja dengan huruf ketjil. Djudul penundjukan ini ditjantumkan sebaris dengan perkataan "REFERENSI" :

Djika djudul penundjukan terdiri lebih dari satu, maka pengetikan penundjukan referensi kedua, ketiga dan selandjutnja adalah dua kait dibawah baris terachir dari djudul penundjukan pertama dan seterusnya. Urutan tjara pengetikan sama dengan untuk lampiran sebagaimana tertera dalam tjontoh (Lampiran "BB"). Pada tiap djudul penundjukan referensi diberi nomor (Huruf pengenal) misalnja : „A“, „B“, „C“ dan seterusnya.

#### 61. Penulisan Lampiran.

- a. Pada Kepala suatu Naskah tulisan dinas, kata "LAMPIRAN" hendaknja diketik dalam huruf<sup>3</sup> besar dan diberi garis bawah serta disusul dengan titik dua. Kemudian disusul dengan daftar dari lampiran<sup>3</sup> dalam urutan seperti tertera dalam tjontoh (Lampiran "BB") Penulisan matjam lampiran sedjadar dengan kata "LAMPIRAN" : Djika terdiri lebih dari satu lampiran maka penulisan lampiran kedua, ketiga dan selandjutnja adalah dua kait dibawah baris terachir dari lampiran pertama dan seterusnya.
- b. Lampiran<sup>3</sup> itu merupakan tambahan pada surat<sup>3</sup> diatas dan pada lampiran<sup>3</sup> tersebut djuga diberi nomor (huruf pengenal) sesuai dengan banjaknja lampiran jang disebut dalam induk naskah tersebut (umpamanja : „A“, „B“, „C“, „D“ dan seterusnya) ketjuali kalau hanja ada satu lampiran. Tiap lampiran hendaknja diberi satu djudul jang tepat ditengah-tengah, sesuai dengan isi. Lampiran apa, nomor TAKAH-nja serta tanggal dari naskah/surat induk hendaknja diketik dalam huruf besar, diberi garis bawah dan diketik 3 (tiga) baris kebawah jang sama pandjangnja, ditempatkan diatas sudut sebelah kanan pada halaman pertama dari lampiran itu, umpamanja :

LAMPIRAN "A" DARI

NO : S/0107/1/1/SEK

TANGGAL 27 DJUNI 1966

- c. Penentuan Tingkat Keamanan. Lampiran<sup>3</sup> boleh mempunyai tingkat keamanan jang lebih rendah, tetapi tidak boleh tingkat keamanan tersebut lebih tinggi dari pada induk naskah/tulisan dinas jang bersangkutan. Sketsa<sup>2</sup> peta dan peta<sup>2</sup> jang telah diberi tanda<sup>2</sup> jang dilampirkan dan karenanja harus dimasukkan dalam "LAMPIRAN".

#### 62. Lampiran<sup>3</sup> Tambahan.

- a. Sub Lampiran. Sering dipandang perlu untuk menambahkan sesuatu lampiran pada lampiran. Lampiran<sup>3</sup> tambahan ini dinamakan "Sub Lampiran", dan diberi nomor angka<sup>2</sup> Romawi (umpamanja : „I“, „II“, „III“ dst.). Apabila hanja ada satu sub lampiran, maka pemberian nomor pada sub lampiran diiadakan. Tjontoh dari pengetikan sub lampiran adalah sebagai berikut :

/ SUB .....

SUB LAMPIRAN „I“, LAMPIRAN „A“  
DARI NO. S/0107/1/1/SEK  
TANGGAL 11 FEBRUARI 1967

- b. Sub-Sub Lampiran. Sub lampiran kadang<sup>2</sup> djuga mempunjai beberapa lampiran. Lampiran-lampiran tambahan ini dinamakan „Sub-Sub lampiran“ dan diberi nomor dengan angka Arab (umpamanja : „1“, „2“, „3“ dst.). Apabila hanja ada satu sub-sub lampiran, maka pemberian nomor pada sub-sub lampiran ditiadakan. Tjontoh dari pengetikan sub-sub lampiran adalah sebagai berikut :

SUB-SUB LAMPIRAN „1“, SUB LAMPIRAN „I“  
LAMPIRAN „A“ DARI NO. S/0107/1/1/SEK  
TANGGAL 11 FEBRUARI 1967.

63. Daftar Distribusi.

- a. Daftar Distribusi. Biasanja suatu „Daftar Distribusi“ dibuat pada tiap<sup>3</sup> tulisan dinas jang dalam pembuatannja belum termasuk suatu petundjuk tentang distribusi. Pada tulisan<sup>2</sup> dinas jang berbentuk surat, tidak memerlukan suatu daftar distribusi tersendiri, karena petundjuk distribusinja telah ditjantumkan dalam surat itu, ialah pada „Alamat Kepada“ dan „Alamat Tembusan“.
- b. Urutan Distribusi. Hendaknja daftar distribusi diberi nomor urut. Urutan jang harus diperhatikan untuk mentjantumkan alamat dalam tulisan dinas adalah sebagai berikut :
- a. Pendjabat<sup>3</sup> dibawah komando jang mendistribusi dan harus mengambıl tindakan.
  - b. Distribusi „kedalam“, dalam urutan pangkat.
  - c. Pendjabat<sup>3</sup> dibawah komando tadi, tetapi hanja untuk informasi sadja.
  - d. Pendjabat<sup>3</sup> tidak dibawah komando dari formasi jang mendistribusi.
  - e. Pendjabat<sup>3</sup> dari Angkatan/POLRI lain, menurut prioritas.
  - f. Pembesar<sup>3</sup> Sipil (djika perlu).
  - g. Lembaran untuk tata naskah (hanja naskah<sup>3</sup> jang diberi nomor).
- Urutan distribusi ini hendaknja dipandang sebagai petundjuk setjara umum sadja. Surat<sup>3</sup>/naskah<sup>3</sup> dari suatu djenis tertentu memerlukan tjara distribusi lain.
- c. Tjara Mendistribusikan. Hanja ada tiga matjam tjara untuk mendistribusikan jaitu dengan :
- a. Pos (Umum/Militer).
  - b. Tjaraka.
  - c. Tangan (disampaikan langsung).

/ 64. Pembatasan .....

64. Pembatasan Pemakaian Titik. Pada garis besarnya pemakaian titik-<sup>2</sup> adalah soal biasa, tetapi ada beberapa tjara untuk membatasi pemakaiannya yang chas dalam naskah-<sup>2</sup> dinas. Dipandang perlu untuk membatasi pemakaian titik sampai sedikit mungkin. Berdasarkan ini maka kalimat-<sup>2</sup> yang berdiri sendiri seperti judul, kepala tengah, kepala samping, referensi dan deradjat keamanan tidak disusul dengan titik.
65. Tanda Titik Dua. Tanda titik dua (:) biasanja dipakai untuk menggambarkan/memperlihatkan permulaan suatu daftar/perumpamaan, seperti LAMPIRAN : Umpamanja : (Satu ketukan sebelum titik dua dan dua ketukan sesudah titik dua).
66. Pemakaian Huruf-<sup>2</sup> Besar.
- a. Pemakaian Huruf Besar.
    - 1) Suatu kebiasaan harus ditjegah dalam menulis sebuah naskah dinas, ialah terlampau banjak dipakainya huruf-<sup>2</sup> besar pada permulaan kata.
    - 2) Disamping pemakaiannya setjara biasa, huruf-<sup>2</sup> besar setjara lazim dipakai pula :
      - a) Dalam membuat kepala karangan, judul, kepala tengah, referensi, lampiran dan tingkat keamanan.
      - b) Sebagai huruf pertama dari kata-<sup>2</sup> yang penting, umpamanja „Pemakaian Huruf-<sup>2</sup> Besar”.
      - c) Sebagai huruf pertama suatu kepala samping, kepala fasal dan kepala sub fasal
      - d) Dipergunakan untuk menundjukkan singkatan umpamanja : KASAD, KAPOLRI dsb.
  - b. Pemakaian Huruf Besar pada Kelompok Tanda-tangan. Dalam kelompok tanda-tangan pada semua tulisan dinas, harus diketik seluruhnya dengan huruf besar.
67. Pemakaian Garis Bawah. Djika hendak memberikan tekanan pada suatu kata dalam kalimat, maka kata tersebut dapat diberi garis bawah. Perlu ditjatat, bahwa penggunaan garis bawah yang terlalu sering, justru mengurangi maksudnja. Selain yang telah diuraikan diatas tentang garis bawah maka kata-<sup>2</sup> yang perlu diberi garis bawah antara lain :
- a. Kata-<sup>2</sup> yang perlu mendapat tekanan.
  - b. Kata „Tembusan” dalam Tulisan Dinas.
  - c. Kata-<sup>2</sup> dari daftar distribusi, seperti Distribusi, Lembaran No. dan Tjara.

68. Tanda-tangan.

- a. Penanda Tangan. Semua naskah/tulisan dinas memuat tanda tangan dari pembuat atau seseorang yang menandatangani atas nama pejabat lain.
- b. Penanda-Tangan Atas Namanya Sendiri. Jika seseorang menanda-tangani naskah/tulisan dinas atas namanya sendiri, penanda-tanganan itu biasanya terdiri dari :
  - 1) Nama jabatan (ditulis dengan huruf besar).
  - 2) Tanda-tangan.
  - 3) Nama (ditulis dengan huruf besar dan diberi garis bawah).
  - 4) Pangkat (ditulis dengan huruf besar dan bagi PAMEN dibawah disebutkan Corps dan NRP-nja).
  - 5) Tjap jabatan/dinas.
- c. Penulisan Pangkat. Jika pangkat lebih panjang dari nama, maka garis dibawah nama disamakan dengan panjang pangkat.
- d. Tjontoh-<sup>2</sup> penanda-tanganan atas namanya sendiri seperti dibawah ini :

- 1)
 

MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
 PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA

.....

( tanda tangan )

S O E H A R T O  
 DJENDERAL TNI

- 2)
 

WAKIL PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA

.....

( tanda tangan )

M. PANGGABEAN  
 DJENDERAL TNI

/ c. Penanda





g. Pemakaian Singkatan.<sup>2</sup> „A.n.“, „A.p.“, „U.b.“

- 1) „A.n.“ (*Atas nama*). Dipergunakan djika jang menanda-tangani surat (tulisan dinas) telah diberi kuasa oleh jang bertanggung djawab. Dalam hal ini, maka jang menanda-tangani dapat dipertanggung-djawabkan tentang isi surat (tulisan dinas) oleh jang bertanggung djawab. Pada azasnja pertanggungungan djawab tetap ditangan jang memberi kuasa.
- 2) „A.p.“ (*Atas perintah*). Dipergunakan djika jang bertanggung djawab mengetahui akan isi surat (tulisan dinas) dan memerintahkan kepada pen-djabat jang bersangkutan menanda-tangani surat (tulisan dinas) termaksud.
- 3) „U.b.“ (*Untuk beliau*). Dipergunakan djika jang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada seorang bawahannja. Djadi „U.b.“ digunakan setelah ada „A.n.“

Tjatanan :

Mengenai matjam bentuk konsiderans pada tulisan dinas dapat disusun setjara bebas menurut ketentuan, misalnja : konsiderans „Pertimbangan“, „Membatja“ „Mengingat“, „Dasar“ dsb.-nja. Hal mana jang diperlukan ditulis/ditjantumkan dalam konsiderans tulisan dinas jang bersangkutan sedang djika tidak perlu maka tidak ditjantumkan.

---

## BAGIAN KETIGA

### SURAT - MENJURAT DINAS

#### B A B I

#### U M U M

##### 1. Pendahuluan.

- a. Salah satu kegiatan yang penting dalam penjelenggaraan administrasi adalah surat-menjurat dinas.
- b. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pedoman tentang surat-menjurat dinas.

##### 2. Tudjuan.

- a. Dengan adanya pedoman surat-menjurat dinas ini, diharapkan agar tertjipta satu pengertian dan satu tata-tjara pengendalian yang seragam dalam menje-lenggarakan surat-menjurat dilingkungan DEPHANKAM.
- b. Keseragaman kerdja ini, selain menundjukkan integrasi antar Angkatan/ POLRI djuga dapat membantu terlaksananya suatu pembinaan Angkatan/ POLRI yang baik dan merupakan faktor yang penting dalam memperlantjar hubungan antar instansi<sup>3</sup> dalam lingkungan DEPHANKAM.

##### 3. Pengertian.

- a. Surat-menjurat dinas adalah kegiatan<sup>3</sup> pengendalian arus berita<sup>3</sup> baik tertulis maupun lisan yang timbul dari adanya pentjataan, laporan, perentjanaaan atau program dan keputusan, yang memungkinkan adanya permintaan pendjelasan penambahan kekurangan<sup>3</sup> atau perobahan<sup>3</sup>.
- b. Dengan pengendalian arus berita dimaksud, pengarahan atau pendjurusan semua kegiatan setjara efisien untuk mentjapai satu sasaran atau tudjuan jaitu :
  - 1) *Terhadap berita<sup>3</sup> masuk.* Agar dalam waktu setjepat mungkin dapat diambil suatu keputusan kebidjaksanaan yang tepat.
  - 2) *Terhadap berita<sup>3</sup> keluar.* Selain dalam pembuatannya dipenubi ketentu-an-ketentuan ataupun sjarat<sup>3</sup> yang telah ditetapkan, agar semua berita disampaikan kepada yang berkepentingan dalam waktu<sup>3</sup> sesuai dengau tingkat ketjepatan (deradjat).

#### B A B II

### KLASIFIKASI DAN DERADJAT

4. Umum. Sebelum meningkat kepada uraian tentang pengendalian :rus berita, perlu adanya pendjelasan mengenai soal penentuan *Klasifikasi* dan *Deradjat*, oleh karena pengertian-pengertiannya mempengaruhi setjara langsung surat-menjurat dinas.

/ 5. Klasifikasi.

## 5. Klasifikasi.

- a. Jang dimaksud dengan klasifikasi dalam surat-menjurat dinas ini adalah tingkat keamanan daripada isi berita.
- b. Mengenai penentuan surat-<sup>2</sup>, naskah-<sup>2</sup> dan dokumen-<sup>2</sup> apa jang digolongkan dalam tingkat-<sup>2</sup> klasifikasi, berlaku ketentuan-<sup>2</sup> jang ada dilingkungan Departemen Pertahanan-Keamanan (lihat halaman 61 s/d 65).
- c. Tingkat Klasifikasi.

1) *Klasifikasi berita terdiri dari 4 tingkat :*

- a) SANGAT RAHASIA
- b) RAHASIA
- c) RAHASIA DJABATAN/KONFIDENSIL/TERBATAS
- d) BIASA.

2) Tiap-<sup>2</sup> tingkat mempunyai sifat dan tjara penyelesaian tersendiri.

### d. Keterangan Penggolongan Tingkat Klasifikasi.

- 1) SANGAT RAHASIA. Ketentuan-<sup>2</sup> dan dokumen-<sup>2</sup> jang sangat erat hubungannya dengan keamanan negara, jang bila disiarkan setjara tidak sah dan atau djatuh pada tangan jang tidak berhak, dapat membahayakan keamanan negara, harus dianggap sebagai keterangan jang harus diamankan, dan dimasukkan kedalam klasifikasi „SANGAT RAHASIA”
- 2) RAHASIA. Keterangan-<sup>2</sup> dan dokumen-<sup>2</sup> jang djika disiarkan setjara tidak sah dan atau djatuh pada tangan jang tidak berhak, dapat membahayakan keamanan negara, menjebakkan kerugian besar bagi kepentingan dan gengsi negara, atau jang akan sangat menguntungkan bagi sesuatu negara asing, harus dimasukkan kedalam klasifikasi „RAHASIA”.
- 3) RAHASIA DJABATAN/KONFIDENSIL/TERBATAS adalah :
  - a) Keterangan-<sup>2</sup> dan dokumen-<sup>2</sup> jang kalau disiarkan setjara tidak sah atau djatuh pada tangan jang tidak berhak, dapat merugikan keamanan nasional, merugikan kepentingan dan gengsi negara, atau memberi keuntungan bagi sesuatu negara asing.
  - b) Keterangan-<sup>2</sup> dan dokumen-<sup>2</sup> jang memerlukan perlindungan guna kepentingan keamanan nasional.
- 4) BIASA. Semua keterangan dan dokumen jang tidak tergolong klasifikasi jang dimaksud dalam fasal 5 sub-fasal d sub-sub-fasal 1), 2) dan 3) diatas, dimasukkan kedalam klasifikasi „BIASA”.

## 6. Deradjat.

- a. Jang dimaksud dengan deradjat dalam surat-menjurat dinas ini adalah tingkat ketjepatan penyelesaian/penjampaian sesuatu berita.

/ b. Tingkat .....

b. Tingkat Deradjat.

- 1) Deradjat berita terdiri atas 4 tingkat :
  - a) KILAT.
  - b) SANGAT SEGERA.
  - c) SEGERA.
  - d) BIASA.
- 2) Deradjat ditentukan oleh jang berhak menanda-tangani surat dan bila tidak ditentukan, ditetapkan oleh Kepala Sekretariat/Sekretaris.
- 3) Dalam hal ketjepatan pengiriman berita-<sup>2</sup> tilgram, diatur oleh bagian Perhubungan jang bersangkutan dengan mempertimbangkan deradjat jang ditentukan oleh sipengirim berita.
- 4) Penjelesaian sesuatu berita disesuaikan dengan deradjat jang telah ditentukan.

c. Pengertian tingkat-<sup>3</sup> Deradjat :

- 1) **KILAT.** Mengandung arti, bahwa berita itu harus dikirim seketika, dan atau harus disampaikan seketika kepada pendjabat jang berkepentingan.
- 2) **SANGAT SEGERA.** Mengandung arti, bahwa berita itu harus dikirim pada hari itu djuga, pada waktu-<sup>2</sup> jang telah ditentukan atau harus disampaikan pada hari itu djuga kepada pendjabat jang berkepentingan.
- 3) **SEGERA.** Mengandung arti, bahwa berita itu harus dikirim dalam waktu 24 djam atau harus disampaikan dalam waktu 24 djam kepada pendjabat jang berkepentingan.
- 4) **BIASA.** Mengandung arti, bahwa berita itu dikirim menurut urutan diterimanja dibagian ekspedisi dan dikirim menurut djadwal perdjalanan kurir dan atau disampaikan menurut urutan diterimanja dibagian ekspedisi kepada pendjabat jang berkepentingan.

### B A B III

## SURAT MASUK

7. U m u m.

- a. Jang dimaksud dengan surat-<sup>2</sup> masuk ialah semua tulisan-<sup>2</sup> dinas atau berita-<sup>1</sup> jang diterima dari instansi/fihak lain.
- b. Penerimaan surat-<sup>2</sup> masuk dipusatkan di Sekretariat atau bagian lain jang diberi wewenang untuk tugas itu.

8. Kegiatan Penerimaan.

- a. Penjortiran surat-<sup>2</sup> masuk didasarkan kepada deradjat.
- b. Surat-<sup>2</sup> masuk jang berklasifikasi Sangat Rahasia, Rahasia dan Rahasia Djabatan/Dinas diteruskan dalam keadaan sampul masih tertutup kepada Kepala Sekretariat/Sekretaris atau kepada pendjabat lain jang diberi wewenang untuk itu, guna membuka sampul-<sup>2</sup> tersebut.
- c. Surat-<sup>2</sup> masuk jang bersifat „PRIBADI” diteruskan dalam keadaan sampul masih tertutup kepada Kepala Sekretariat/Sekretaris atau kepada pendjabat jang ditundjuknja dan selandjutnja diserahkan langsung kepada pendjabat jang berkepentingan.

/ d. Surat<sup>2</sup> .....

- d. Surat<sup>3</sup> masuk yang berklasifikasi „BIASA” segera dibuka sampulnja dan diteruskan kepada bagian pentjataan.

9. Pentjataan, Penilaian, Distribusi dan Penjimpanan.

a. Kegiatan Pentjataan.

- 1) Semua berita masuk diadakan pentjataan sesuai dengan sifat masing<sup>2</sup> didalam :
  - a) *Buku agenda umum.* Untuk mentjatat berita<sup>3</sup> masuk yang berklasifikasi biasa.
  - b) *Buku agenda rahasia.* Untuk mentjatat berita<sup>3</sup> masuk yang berklasifikasi sangat rahasia/rahasia/rahasia djabatankonfidensiil/terbatas.

b. Penilaian. Penilaian serta penjelesaian selandjutnja adalah disesuaikan dengan ketentuan<sup>3</sup> sebagai berikut :

- 1) Jang tidak memerlukan pengolahan lebih landjut, mengikuti ketentuan-sistim Pengurusan Arsip.
- 2) Jang memerlukan pengolahan lebih landjut, mengikuti ketentuan<sup>3</sup> sistim Tata-Naskah.

c. Distribusi. Penentuan distribusi adalah sebagai berikut :

- 1) Distribusi atau peredaran berita<sup>3</sup> masuk yang tidak memerlukan pengolahan lebih landjut diteruskan kepada yang berkepentingan atau urusan arsip.
- 2) Distribusi atau peredaran berita<sup>3</sup> masuk yang memerlukan pengolahan lebih landjut disesuaikan dengan ketentuan<sup>3</sup> jang terdapat dalam pedoman sistim Tata-Naskah.

d. Penjimpanan. Penjimpanan surat<sup>3</sup> masuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pedoman tentang kearsipan.

*Tjataan.* Bagan Urutan Kegiatan penjelesaian surat masuk adalah sesuai dengan Bagan, lihat lampiran BB. 1.

## B A B IV

### SURAT KELUAR

10. U m u m.

- a. Jang dimaksud dengan surat<sup>3</sup> keluar ialah semua tulisan<sup>3</sup> dinas jang dikirimkan atau disampaikan kepada instansi<sup>2</sup>/fihak lain.
- b. Setiap konsep jang akan diajukan kepada pimpinan, wadjib disalurkan melalui Kepala Sekretariat/Sekretaris atau pendjabat jang diberi wewenang guna diteliti :
  - 1) Isinja sesuai dengan kebidaksanaan (policy) jang digariskan pimpinan dan setjara juridis formil dapat dipertanggung-djawabkan.
  - 2) Redaksinja sesuai dengan tarabahasa jang baik.

/ 3) Bentuknja .....

- 3) Bentuknja sesuai dengan ketentuan<sup>3</sup> dalam pedoman tentang tulisan<sup>3</sup> dinas.
- c. Bila ada hal<sup>3</sup> yang menjimpang dari hal tersebut diatas, Kepala Sekretariat/ Sekretaris atau pendjabat yang diberi wewenang diwajibkan mengadakan konsultasi dengan bagian yang bersangkutan untuk mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinja.

#### 11. Konsep.

a. Semua konsep dapat dibuat :

- 1) Atas dasar policy pimpinan.
- 2) Sebagai reaksi atas sesuatu aksi.
- 3) Sebagai konsepsi baru.

b. Pembuatan konsep dilakukan oleh pendjabat<sup>3</sup> yang bersangkutan sesuai dengan prosedur kerdja yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.

c. Penyelesaian selandjutnja dilakukan sesuai dengan ketentuan<sup>3</sup> tersebut dalam pedoman sistim tulisan dinas.

#### 12. Pentjataan, Penilaian, Distribusi dan Penjimpanan.

a. Pentjataan dan penilaian surat keluar disamping mengikuti ketentuan<sup>3</sup> tersebut dalam pedoman Tulisan Dinas, menjesuaikan djuga dengan ketentuan<sup>3</sup> seperti tersebut dalam sub fasal berikut ini.

b. Kegiatan pentjataan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Semua surat keluar diadakan pentjataan sesuai dengan sifat masing<sup>3</sup> didalam :

- a) *Buku verbaal umum.* Untuk mentjatat surat<sup>3</sup> keluar yang berklasi-fikasi biasa.
- b) *Buku verbaal rahasia.* Untuk mentjatat surat<sup>3</sup> keluar yang berklasi-fikasi sangat rahasia/rahasia/rahasia djabatan/konfidensiil/terbatas.

2) Selain buku verbaal tersebut diatas, dapat pula mengadakan buku<sup>3</sup> pen-tjataan lainnja sesuai dengan kebutuhan.

c. Tanda-tangan dan tjap djabatan. Penanda-tanganan surat<sup>3</sup> keluar berlaku ketentuan-ketentuan yang tertjantum dalam pedoman Tulisan Dinas, sedang penggunaan tjap djabatan disesuaikan menurut ketentuan/tata-tjara yang telah diresmikan.

d. Distribusi. Pengiriman surat<sup>3</sup> keluar diatur sebagai berikut :

- 1) Surat<sup>3</sup> keluar yang sudah ditjatat dimasukkan kedalam sampul.
- 2) Pada sampul surat<sup>3</sup> keluar yang berklasifikasi biasa ditjantumkan alamat lengkap, nomor surat dan tjap yang berlaku dilingkungan masing<sup>3</sup> dan tjap deradjat.

/ 3) Pada .....

- 3) Pada sampul surat-<sup>2</sup> keluar yang berklasifikasi sangat rahasia/rahasia/rahasia jabatan//konfidensiil/terbatas disamping penulisan pada sub-sub pasal 2) diatas, dibubuhi tjap klasifikasi daripada surat tersebut. Sampul itu dilak dan dibubuhi stempel lak dan kemudian dimasukkan lagi dalam sampul kedua.
  - 4) Pada sampul kedua hanja ditulis alamat lengkap, nomor surat, tjap yang berlaku dilingkungan masing-<sup>2</sup> dan tjap deradjat.
  - 5) Semua surat keluar yang sudah lengkap untuk dikirimkan, ditjatat dalam buku ekspedisi.
  - 6) Pelaksanaan pengiriman surat-<sup>2</sup> keluar dapat dilakukan oleh tjarak, melalui PN POSTEL dan POSMIL Angkatan/POLRI, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pedoman tentang Penjampaian Berita.
  - 7) Pelaksanaan pengiriman surat-<sup>2</sup> keluar dapat pula dilakukan dengan perantaraan seorang Tjaraka khusus untuk dalam hal-<sup>2</sup> yang khusus.
- e. Penjimpanan. Semua arsip surat keluar harus disimpan dengan baik dan rapih, dimasukkan kedalam berkas yang sudah ditentukan, menurut ketentuan-<sup>2</sup> yang berlaku dalam pedoman sistim tulisan-<sup>2</sup> dinas dan pedoman tentang kearsipan.
- Tjataan* : Bagan urutan kegiatan penyelesaian surat-<sup>2</sup> keluar adalah sesuai dengan Bagan, lihat lampiran BB. 1.

## B A B V

### PEMBUKUAN SURAT-<sup>2</sup> MASUK DAN KELUAR

13. Khusus untuk surat-<sup>2</sup> masuk yang kemudian dimasukkan dalam Tata Naskah atau dibuka Tata Naskah baru selanjutnja mengikuti tata tjara pentjataan menurut ketentuan-<sup>2</sup> dalam sistim Tata Naskah.
14. Bentuk-<sup>2</sup> yang digunakan. Dalam kita membukukan surat-<sup>2</sup> masuk dan keluar, kita dapat menggunakan bentuk-<sup>2</sup> seperti berikut :
  - a. Untuk surat-<sup>2</sup> masuk :
    - 1) Buku Agenda (4 matjam : SR, R, K/T, B).
    - 2) Daftar Pembesar.
    - 3) Daftar Perihal.
    - 4) Klapper.
    - 5) Lembar Disposisi.
    - 6) Kontrol Agenda.
    - 7) Daftar Lichter Agenda.
    - 8) Buku-<sup>2</sup> Ekspedisi.
    - 9) Bon Agenda.

/ b. Untuk .....



b. Untuk surat<sup>2</sup> keluar :

- 1) Buku Verbaal untuk Tulisan<sup>2</sup> Dinas jang bersifat mengatur/surat<sup>2</sup> (4 matjam : SR, R, K/T, B).
- 2) Buku Verbaal untuk Tilgram<sup>2</sup> (djuga 4 matjam).
- 3) Buku Verbaal untuk Surat Tilgram (djuga 4 matjam).
- 4) Daftar Pembesar.
- 5) Daftar Perihal.
- 6) Klapper
- 7) Kontrol Verbaal.
- 8) Daftar Lichter Verbaal.
- 9) Bon Verbaal.
- 10) Buku<sup>2</sup> Ekspedisi.
- 11) Buku<sup>2</sup> tersendiri untuk Tulisan<sup>2</sup> Dinas jang bersifat mengatur (masing<sup>2</sup> mempunjai buku sendiri<sup>2</sup> djika diperlukan).

15. Buku Agenda.

a. Buku Agenda sekurang-kurangnya harus memuat tjatatan<sup>2</sup> mengenai :

- 1) Tanggal.
- 2) Nomor Agenda.
- 3) Nomor dan tanggal surat masuk.
- 4) Lampiran.
- 5) Alamat pengirim (terima dari).
- 6) Perihal surat masuk (isi).
- 7) Keterangan.

b. Apabila ruang tjatatan<sup>2</sup> tersebut diaras dianggap kurang, maka dapat ditambah. Misalnja :

- 1) Petundjuk pada nomor jang lalu.
- 2) Petundjuk pada nomor jang berikunja.

c. Seperti telah diterangkan diatas, maka untuk tiap tingkat klasifikasi, kita gunakan satu buku, ialah :

- 1) Buku Agenda Sangat Rahasia (SR).
- 2) " " Rahasia (R).
- 3) " " Konfidensiil/Terbatas (K/T).
- 4) " " Biasa (B).

16. Buku Verbaal.

a. Buku Verbaal sekurang-kurangnya harus memuat tjatatan<sup>2</sup> mengenai :

- 1) Tanggal.
- 2) Nomor surat keluar.

/ 3) Lampiran.

- 3) Lampiran.
  - 4) Alamat kepada.
  - 5) Perihal surat keluar.
  - 6) Keterangan.
- b. Apabila ruang tjetatan-<sup>3</sup> tersebut diatas dianggap kurang, maka dapat ditambah umpamanja ruang : "Petundjuk pada nomor jang lalu" dan lain sebagainya.
- c. Seperti diterangkan diatas, sedapat mungkin diusahakan agar setiap klasifikasi tulisan-<sup>3</sup> dinas, disediakan buku tersendiri. Pemisahan buku-<sup>2</sup> verbaal ini, didasarkan atas besar-ketjilnja frekwensi/volume surat-<sup>2</sup> keluar ditiap-tiap badan/instansi.

#### 17. Daftar Pembesar Agenda dan Verbaal.

- a. Daftar ini ialah merupakan Buku Pembantu untuk memudahkan bila kita harus mentjari kembali sesuatu surat. Karena kita tidak menggolongkan surat-keluar ataupun masuk menurut SIAPA pengirimnja, atau djuga tidak menurut APA PERSOALANNJA, djadi harus ada Buku-<sup>3</sup> Pembantu untuk itu.
- b. Daftar ini merupakan penolong bagi kita, bila kita mengetahui dari siapa surat itu datang (Agenda) atau kepada siapa surat itu (verbaal).
- c. Masing-<sup>2</sup> pengirim atau alamat mempunjai Daftar Pembesarnja sendiri-<sup>3</sup> Beberapa tjontoh, ialah : Untuk Agenda dari PANGKOWILHAN I/SUMATERA dan untuk Verbaal ke PANGKOWILHAN I/SUMATERA.
- d. Daftar Pembesar ini disusun seperti berikut : Diatas ditulis dulu untuk siapa Daftar-Pembesar itu digunakan, dan setelah itu baru terdapat kolom-<sup>2</sup> pengisian.

Tjontoh : Dari PANGKOWILHAN I/SUMATERA (Agenda).  
 Pro PANGKOWILHAN I/SUMATERA (Verbaal).

Setelah itu baru kolom-<sup>2</sup> jang terdiri dari :

Untuk Agenda :

- 1) Tanggal masuk.
- 2) Nomor Agenda.
- 3) Tanggal dan nomor surat masuk dan
- 4) Isi surat.

Untuk Verbaal :

- 1) Tanggal Verbaal.
  - 2) Nomor Verbaal, dan
  - 3) Isi surat.
- e. Pengisian kolom-<sup>2</sup> tentu sadja disesuaikan dengan kolom-<sup>2</sup> jang sama jang terdapat pada Buku Agenda atau Buku Verbaal jang bersangkutan.
- f. Konsekwensi daripada Daftar-Pembesar-Verbaal ini, ialah bahwa sesuatu surat jang ditudjukan kepada beberapa alamat, harus dibukukan dalam Daftar-<sup>2</sup> Pembesar jang bersangkutan.

/ 18. Daftar .....

18. Daftar Perihal Agenda dan Verbaal.

- a. Kalau Daftar-Pembesar merupakan pentjataan khusus mengenai Pendjabat pengirim, atau penerima, maka Daftar Perihal mentjatat PERSOALANNJA
- b. Bisa digambarkan bahwa ini tentu akan lebih sulit dan lebih menghendaki kesabaran daripada Daftar-Pembesar, karena didalam satu persoalan bisa terdiri dari beberapa segi. Dalam kita mengingat kembali soal : „Kebakaran gudang peralatan Kiaratjondong” umpamanja kita tentu bertanya pada diri sendiri, apakah jang harus dimasukkan dalam persoalan :
  - 1) Kebakaran-kah, atau
  - 2) Gudang-kah.
- c. Mengingat ini semua, maka soal seperti itu, agar ada manfaatnja, kita tjanrumkan dalam Daftar-Perihal, baik dalam pokok soal „Kebakaran” maupun dalam pokok persoalan „Gudang”.
- d. Isi Daftar-Perihal untuk Agenda memuat sebagai Kepala „Persoalan” jang akan didaftar, kemudian dibagi dalam kolom-<sup>3</sup> :
  - 1) Tanggal diterima.
  - 2) Nomor Agenda.
  - 3) Tanggal surat masuk.
  - 4) Nomor surat masuk.
  - 5) Pengirim, dan
  - 6) Isi surat.
- e. „Daftar-Perihal” untuk Verbaal djuga berkepala „Persoalannja”, kemudian dibagi dalam kolom-<sup>3</sup> jang berisi :
  - 1) Tanggal surat keluar.
  - 2) Nomor Verbaal.
  - 3) Alamat, dan
  - 4) Isi surat.
- f. Sebaiknja untuk keperluan „Daftar-Perihal” disusun suatu Daftar jang berlaku baik untuk Agenda maupun untuk Verbaal dengan mengadakan pokok perihal dan tjabang-<sup>3</sup>nja.
- g. Daftar itu bisa disusun sbb. :
 

Tjontoh : A. Personil :

  1. Lamaran/recruting/panggilan.
  2. Pengangkatan.
  3. Pemberhentian.
  4. Gadji (kenaikan, penurunan, penundaan kenaikan).
  5. Pemberhentian, (meninggal, dengan hormat, tidak dengan hormat, gugur).
  6. Daftar kekuatan.

/ B. Logistik :

**B. Logistik :**

1. Angkutan.

2. Peralatan.

3. Gudang.

4. Pemeliharaan/perawatan.

5. dst.

**C. Keamanan :**

1. Gerombolan.

2. Gangguan ketertiban umum.

3. Gerakan-<sup>3</sup> illegal.

4. Perampokan, penggarongan.

5. dst.

h. Pokoknya supaya disusun sebegitu rupa sehingga akan memudahkan pentjarian kembali.

**19. Klapper.**

a. Disamping kedua Daftar tersebut, sebaiknya kita pelihara juga suatu Buku Klapper, yang disusun setjara abjad (alphabetis), dimana tiap huruf merupakan permulaan persoalan.

b. Seperti halnya pada daftar perihal untuk satu soal, kita masukkan dalam Klapper-<sup>2</sup> yang kira-<sup>2</sup> kita ingat. Dalam soal tjontoh pada fasal 18 sub fasal b jaitu : „Kebakaran Gudang Kiaratjondong”; kita masukkan „K” dua kali jaitu untuk „Kebakaran” dan „Kiaratjondong” dan „G” untuk Gudang.

c. Tjontoh Klapper :

<b>K</b>	<b>Kebakaran Gudang Kiaratjondong Verbaal</b>  nomor : .....	<b>G</b>	<b>Gudang kebakaran Kiaratjondong Verbaal</b>  nomor : .....
	<b>Kiaratjondong kebakaran gudang Verbaal</b>  nomor : .....		

d. Dalam menyusun Klapper, baik ditjontoh menyusunja abjad dalam suatu Succes-Agenda :

<b>A</b>	
<b>B</b>	
<b>C</b>	
<b>D</b>	
<b>E</b>	
<b>F</b>	
<b>G</b>	

dimana tiap abjad mempunjai beberapa lembar untuk diisi.

20. Buku Kontrol Agenda.

- a. Kontrol Agenda mengawasi surat<sup>2</sup> masuk yang harus diteruskan, yang diterima kembali untuk diteruskan ke lain pihak atau disimpan.
- b. Buku Kontrol Agenda hanya mempunyai dua kolom, yaitu :
  - 1) Nomor; dan
  - 2) Keterangan.

Kolom nomor diisi nomor-urut mulai nomor 1 s/d nomor terakhir dari setahun. Pada kolom keterangan, diisi kemana surat itu diteruskan dengan tanggal diserahkan.

21. Kontrol Verbaal.

- a. Meskipun pada pokoknya kontrol yang dilakukan disini sama, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang lebih lengkap dari Kontrol-Agenda, yaitu harus diperiksa apakah surat yang akan dikirim itu telah lengkap tentang :
  - 1) Nomor.
  - 2) Tanggal.
  - 3) Alamat.
  - 4) Sifat.
  - 5) Tanda-tangan.
  - 6) Tjap Djabatan.
  - 7) Lampiran.
  - 8) Jumlah telah sesuai dengan alamat(-2) serta tembusan (-2) dan
  - 9) Retour's akte harus terlampir semua.
- b. Kontrol-Verbaal memuat kolom<sup>3</sup> sebagai berikut :
  - 1) Tanggal.
  - 2) Nomor Verbaal.
  - 3) Kepada.
  - 4) Lampiran.
  - 5) Tembusan; dan
  - 6) Keterangan.
- c. Pada kolom „Kepada“ harus diisi semua alamat, begitu pula pada kolom „Tembusan“, ketjuali kalau disebut daftar distribusinja.  
 Bila terdapat beberapa alamat, maka biasanja pada Verbaal hanya ditulis alamat atau tembusan pertama, kemudian dibubuhi cs.  
 Pada Kontrol-Verbaal, harus ditulis seluruhnya, karena untuk pentjotjokan dengan Buku Ekspedisi.

22. Lichter-Agenda dan Verbaal.

- a. Pada Daftar-Lichter-Agenda atau Verbaal, harus ditjatat semua nomor, mulai nomor 1 sampai dengan nomor penghabisan pada achir tahun.
- b. Daftar-Lichter, hanja memuat dua kolom :
  - 1) Nomor; dan
  - 2) Keterangan.
- c. Dalam kolom keterangan ditjatat :
  - 1) Untuk jang disimpan : dep tanggal .....
  - 2) Jang dipindjam : di ..... tanggal .....

23. Bon Agenda/Verbaal.

- a. Untuk tiap nomor jang tidak ada pada Lichter harus ada Bon Pindjam Agenda/Verbaal :
    - 1) Untuk penjelesaian.
    - 2) Untuk digabungkan (dalam hal ini, harus ditulis pada Bon, pada tempat jang diperuntukkan untuk itu, akan digabungkan pada Agenda atau Verbaal nomor berapa).
  - b. Djadi tiap kali sesuatu surat masuk atau keluar, diambil (dilichter), baik untuk dipindjam ataupun digabungkan, maka harus dibuatkan Bon oleh Lichter-Agenda atau Lichter-Verbaal.
  - c. Bon ini merupakan pertanggungan-djawabnja, terhadap tiap surat jang tidak ada padanja, karena alasan apapun.
24. Penundjukan. Baik pada Agenda maupun pada Verbaal, kita harus mengadakan tjatatan tentang :

- a. Penundjukan pada jang lalu.
- b. Penundjukan pada jang berikunja.

Apabila dalam buku Agenda/Verbaal tidak dibuat kolom itu, maka penundjukan dapat dituliskan dalam kolom keterangan.

25. Lembar Disposisi.

- a. Untuk mendjaga agar pada surat<sup>3</sup> jang diterima tidak terdapat tjatatan<sup>3</sup> serta disposisi<sup>3</sup> sehingga dapat menutup tulisan<sup>3</sup> surat atau membuatnja kotor, maka digunakan Lembar Disposisi.
- b. Lembar-Disposition hanja digunakan bagi surat/naskah jang tidak ditata-naskahkan, sedang surat/naskah jang ditata-naskahkan mempergunakan Lembaran Tjatatan, mengikuti ketentuan<sup>2</sup> sistim tata naskah.

/ 26. Ekspedisi. .....

## 26. Ekspedisi.

- a. Pada buku-<sup>2</sup> ekspedisi ditjatar semua surat jang dikirim dalam kota dan surat-<sup>1</sup> jang dikirim via Tjaraka (melalui Tjaraka atau Pos Militer Angkatan/POLRI/Pos Udara).
- b. Pengawasan tentang waktu dan tjara pengiriman harus dilakukan dengan teliti dan terus menerus :
  - 1) Apakah disampaikan pada waktunja (Periksalah djam berangkat dan djam datang kembali. Perhitungan waktu jang wadjar dibutuhkan untuk itu).
  - 2) Apakah diterima oleh jang semestinja menerimanja (Periksa tanda-tangan/parap, tanggal, djam, nama terang, djabatan dan pangkatnja).
- c. Untuk tertibnja supaya diadakan route-<sup>2</sup> tertentu dengan tabel waktunja.

## P E N D J E L A S A N

### TENTANG

### PENENTUAN KLASIFIKASI

#### Penentuan Klasifikasi

Mengenai penentuan tingkat klasifikasi untuk tulisan-<sup>2</sup> dinas dapat diuraikan di bawah ini :

27. Sangat Rahasia. Beberapa tjontoh mengenai klasifikasi sangat rahasia adalah sebagai berikut :
  - a. Klasifikasi „Sangat Rahasia” disediakan untuk keterangan-<sup>2</sup> jang berhubungan erat sekali dengan keamanan negara, jang bila disiarkan dengan tidak sah, dapat mengakibatkan salah satu dari hal-<sup>2</sup> dibawah ini :
    - 1) Pernjataan perang terhadap negara oleh suatu negara asing, sebagai tindakan pembalasan terhadap rentjana-<sup>2</sup> atau maksud-<sup>2</sup> jang terdapat dalam keterangan-<sup>2</sup> jang botjor tadi.
    - 2) Gagalnja sesuatu rentjana perang, djika rentjana itu didjalankan.
    - 3) Hilangnja suatu keuntungan tehnik jang mempunjai nilai militer sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi djalannja atau hasilnja sesuatu peperangan atau operasi jang besar.
  - b. Hal-<sup>2</sup> tersebut dibawah ini adalah beberapa tjontoh dari soal-<sup>2</sup> jang erat hubungannja dengan keamanan negara, jang sangat tergantung dari kebidjaksanaan dan sjarat-<sup>2</sup> tersebut diatas, dan jang dianggap sebagai keterangan-<sup>2</sup> „Sangat Rahasia” :

/ 1) Rentjana

- 1) Rentjana perang dan rentjana operasi militer, dan semua keterangan-<sup>3</sup> mengenai penempatan pasukan-<sup>3</sup> kita, yang erat hubungannya dengan operasi-<sup>3</sup> tersebut.
- 2) Dokumen-<sup>3</sup> intelidjen dan surat-<sup>3</sup> lainnya yang memuat sesuatu intelidjen negara.
- 3) Keterangan-<sup>3</sup> penting mengenai perlengkapan-<sup>3</sup>, dan alat-<sup>3</sup> perang yang baru dan penting.
- 4) Keterangan-<sup>3</sup> yang mempengaruhi keamanan negara, meskipun tidak khusus mengenai soal-<sup>3</sup> militer, misalnja soal politik dan ekonomi.

28. Rahasia. Beberapa tjontoh mengenai klasifikasi rahasia adalah sebagai berikut :

- a. Segala keterangan-<sup>3</sup> tentang operasi yang sedang berdjalan.
- b. Rentjana atau keterangan-<sup>3</sup> tentang operasi militer, rentjana-<sup>3</sup> perang dengan laporan-<sup>3</sup>nja, yang tidak termasuk klasifikasi „Sangat Rahasia”.
- c. Petunjuk-<sup>3</sup> tentang pemakaian alat-<sup>3</sup> perang baru, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan tehnik.
- d. Perbaikan-<sup>3</sup> yang penting terhadap alat-<sup>3</sup> perang yang ada, termasuk perkembangan tehnik dan setjara ilmu pengetahuan.
- e. Keterangan yang berhubungan dengan alat perang yang baru.
- f. Keterangan mengenai djumlah-<sup>3</sup> persediaan alat-<sup>3</sup> perang.
- g. Perkembangan-<sup>3</sup> usaha-<sup>3</sup> baru.
- h. Keterangan tentang keadaan alat-<sup>3</sup> perang musuh, tjara-<sup>3</sup> bekerdjanja penempatan-penempatan pasukannya; nilai daripada keterangan-<sup>3</sup> ini terletak pada tidak tahunja musuh, bahwa keterangan-<sup>3</sup> tersebut telah ada pada pihak kita.
- j. Laporan-<sup>3</sup> operasi yang memuat keterangan yang penting sekali bagi musuh.
- k. Keterangan-<sup>3</sup> mengenai pertahanan-<sup>3</sup> yang penting.
- l. Laporan-<sup>3</sup> mengenai moril, yang mempengaruhi operasi-<sup>3</sup> besar.
- m. Keterangan-<sup>3</sup> mengenai intelidjen perhubungan dan alat-<sup>3</sup> penting untuk melindungi perhubungan.
- n. Keterangan-<sup>3</sup> yang memuat kekuatan pasukan sendiri, kekuatan dilaut dan diudara, nama serta susunan Kesatuan-<sup>3</sup>, atau djumlah alat-<sup>3</sup> perlengkapan yang ada pada pasukan-<sup>3</sup> tersebut dalam daerah-<sup>3</sup> operasi.
- o. Penambahan tenaga pada kesatuan-<sup>3</sup> yang akan didjalankan.
- p. Keterangan-<sup>3</sup> mengenai „slagorde” pasukan sendiri, serta penempatan-<sup>3</sup> dan gerakan-<sup>3</sup> yang mempengaruhi „slagorde” pasukan-<sup>3</sup> yang sedang bertempur dengan musuh.
- q. Tehnik atau tjara-<sup>3</sup> yang baru dan spesialis, yang akan digunakan dalam operasi-operasi dikemudian hari. Nama serta susunan pasukan-<sup>3</sup>, dimana sadja tempatnja, yang khusus diperuntukkan dalam penggunaan tehnik-<sup>3</sup> dan tjara-<sup>3</sup> yang dimaksud itu.
- r. Potret-<sup>3</sup>, negatif-<sup>3</sup>, photostat-<sup>3</sup>, diagram atau model dari bahan-<sup>3</sup> yang termasuk klasifikasi „Rahasia”.

/ s. Sekumpulan .....



- s. Sekumpulan keterangan-<sup>2</sup> atau barang-<sup>2</sup>, jang setjara tersendiri dimasukkan klasifikasi „Konfidensiil” atau klasifikasi jang rendah, tetapi jang kalau diambil keseluruhannja memerlukan klasifikasi jang lebih tinggi, yakni „Rahasia”.
  - t. Peta-<sup>2</sup> militer dan potret-<sup>2</sup> udara jang tersebut dibawah ini :
    - (1) Peta-<sup>2</sup> tentang bangunan-<sup>2</sup> atau tempat-<sup>2</sup> didalam wilayah R.I.
    - (2) Potret udara dan peta, jang memerlukan keterangan atau dokumen serta benda-<sup>2</sup> dalam klasifikasi „Rahasia”.
    - (3) Potret udara dari daerah-<sup>2</sup> penting jang berada dibawah kekuasaan R.I. dan jang pengawasan pemotretannja dapat dilakukan dengan baik.
    - (4) Potret udara dan peta dari wilayah negara asing, djika negara tersebut menginginkan pemasukkannja kedalam klasifikasi „Rahasia”.
    - (5) Klasifikasi dari potret-<sup>2</sup> udara harus ditentukan menurut isinja, atau sesuai dengan jang tersebut dalam sub fasal t sub-sub fasal 3) dan 4).
  - u. Keterangan-<sup>2</sup> rahasia, jang diperoleh sedemikian rupa, sehingga sumbernja harus dirahasiakan dan dilindungi.
29. Rahasia Djabatan/Konfidensiil/Terbatas. Beberapa tjontoh mengenai klasifikasi Rahasia Djabatan/Konfidensiil/Terbatas adalah sebagai berikut :
- a. Penjelidikan-<sup>2</sup> dan hal-<sup>2</sup> lain jang kalau tersiar dapat mengakibatkan apa jang tersebut dalam kalimat pertama dari fasal ini.
  - b. Laporan-<sup>2</sup> operasi dan pertempuran jang bersifat routine, jang memuat keterangan jang berharga bagi musuh, tetapi jang tidak mempunyai nilai jang tinggi sekali.
  - c. Laporan-<sup>2</sup> intelidjen, laporan-<sup>2</sup> kontra-intelidjen jang bersifat routine, dan laporan-<sup>2</sup> penjelidikan kontra-intelidjen, termasuk laporan-<sup>2</sup> jang tidak mengandung keterangan-<sup>2</sup> jang merugikan.
  - d. Penentuan frekwensi radio-<sup>2</sup> militer jang mempunyai arti khusus, atau penentuan-penentuan demikian itu jang sering diubah berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan keamanan.
  - e. Penentuan tanda-panggil bagi radio-<sup>2</sup> militer jang mempunyai arti khusus, jang sering diubah berhubung dengan pertimbangan-<sup>2</sup> keamanan.
  - f. Keterangan jang menundjukkan kekuatan pasukan-<sup>2</sup> kita didarat, dilaut dan diudara, nama serta susunan kesatuan-<sup>2</sup>, atau djumlah alat-<sup>2</sup> perlengkapan jang ada pada pasukan-<sup>2</sup> tersebut, bagi daerah-<sup>2</sup> jang berada didekat daerah operasi.
  - g. Dokumen-<sup>2</sup> dan buku-<sup>2</sup> penuntun tehnik, seperti jang dimuat dalam kalimat pertama fasal ini, jang digunakan dalam latihan, pemeliharaan dan pemeriksaan alat-<sup>2</sup> perang jang penting dan baru.
  - h. Peladjaran-<sup>2</sup> taktis umum, jang diperolehnja sebagai hasil dari operasi-<sup>2</sup> dan jang baiknja tidak diketahui oleh negara asing.
  - j. Keterangan-<sup>2</sup> mengenai rentjana pembuatan dan kemadjuan dalam alat-<sup>2</sup> sebagai dimuat dalam kalimat pertama fasal ini.

... k. Keterangan .....

- k. Keterangan mengenai intelidjen perhubungan, Peraturan<sup>3</sup> mengenai sekuriti, alat<sup>3</sup> pengamanan, dan barang<sup>3</sup> lain seperti yang tersebut dalam kalimat pertama fasal ini.
- l. Keterangan<sup>3</sup> tehnik dan ilmu pengetahuan seperti tersebut dalam kalimat pertama fasal ini, misalnja mengenai pertjobaan<sup>3</sup> atau proses<sup>3</sup> pembuatan yang merupakan semata-mata suatu keuntungan dalam lapangan militer, dan bukan sesuatu yang umum diketahui.
- m. Keterangan<sup>3</sup> dan tulisan serta tjatatan<sup>3</sup>, yang telah dikumpulkan atas permintaan sesuatu instansi dari DEPHANKAM untuk keperluan memobilisasikan badan<sup>3</sup> industri untuk kebutuhan masa perang.
- n. Keterangan<sup>3</sup> seperti yang tersebut dalam kalimat pertama fasal ini, yang bersangkutan dengan djumlah persediaan perang.
- o. Potret<sup>3</sup>, negatif<sup>3</sup>, photostat<sup>3</sup>, diagram<sup>3</sup> atau model<sup>3</sup> dari keterangan<sup>3</sup> atau barang<sup>3</sup> yang masuk klasifikasi „Konfidensiil“.
- p. Sekumpulan keterangan<sup>3</sup> atau barang<sup>3</sup>, yang setjara tersendiri dapat masuk klasifikasi „Terbatas“ atau masuk golongan „Keterangan bukan rahasia“, tetapi djika diambil keseluruhannja, memerlukan klasifikasi yang lebih tinggi, ja'ni „Konfidensiil“.
- q. Peraturan<sup>3</sup> yang memuat keterangan tersebut dalam kalimat pertama fasal ini, yang mengatur tindakan bersama dari Angkatan Darat, Laut, Udara dan POLRI.
- r. Peta<sup>3</sup> militer dan photo<sup>3</sup> udara :
  - 1) Peta daerah negara asing, yang memuat bagian<sup>3</sup> bangunan atau menunjukkan dengan tepat letaknja bangunan itu; bangunan<sup>3</sup> itu penting sekali untuk pertahanan negara atau pertahanan daerah yang berada dibawah kekuasaan negara sendiri.
  - 2) Photo<sup>3</sup> udara dan peta<sup>3</sup> yang memuat keterangan<sup>3</sup> atau benda<sup>3</sup> dalam klasifikasi „Konfidensiil“.
  - 3) Photo<sup>3</sup> udara dan peta<sup>3</sup> dari daerah negara asing, yang didapat dengan djalan rahasia, atau djika harus dirahasiakan, bahwa photo<sup>3</sup> dan peta<sup>3</sup> sedemikian itu berada dalam tangan sendiri; ataupun, djika negara yang bersangkutan menghendaki dimasukkannja photo<sup>3</sup> dan peta<sup>3</sup> itu dalam klasifikasi „Konfidensiil“.
  - 4) Peta<sup>3</sup> „Terreinmodellen“, dan photomaps yang dibuat dari potret<sup>3</sup> udara atau negatif<sup>3</sup>, biasanja harus diberi klasifikasi sesuai dengan apa yang terdapat didalamnya, dan tidak perlu sesuai dengan klasifikasi yang diberikan kepada potret<sup>3</sup> atau negatif<sup>3</sup> yang digunakan. Klasifikasi dari potret<sup>3</sup> udara ditentukan oleh isinja, atau disesuaikan dengan tersebut sub-sub fasal 3) diatas.
- s. Keterangan<sup>3</sup> mengenai kekuatan pasukan kita didarat, laut dan udara, nama dan susunan kesatuan<sup>3</sup>, jaitu djumlah semua alat<sup>3</sup> perlengkapan pada kesatuan<sup>3</sup> itu, yang berada didaerah-daerah yang djauh dari daerah operasi.

/ t. Kekuatan-2 .....

- t. Kekuatan<sup>3</sup> sebenarnya dari resimen<sup>3</sup> atau kesatuan<sup>3</sup> yang setingkat atau kesatuan<sup>3</sup> yang lebih tinggi, ketjuali dalam fase<sup>3</sup> pertempuran, untuk waktu mana berlaku sub fasal s tersebut diatas.
  - u. Dokumen<sup>3</sup> tehnik dan dokumen<sup>3</sup> latihan, yang karena isinja memerlukan pengamanan.
  - w. Potret<sup>3</sup>, negatif<sup>3</sup>, photostat<sup>3</sup>, diagram<sup>3</sup> dan model<sup>3</sup> dari keterangan atau barang-barang dalam klasifikasi „Terbatas”.
  - y. Bagian<sup>3</sup> dari rentjana<sup>3</sup> dan peraturan<sup>3</sup> mobilisasi, sesuai dengan apa yang tersebut dalam kalimat pertama fasal ini.
  - z. Dokumen<sup>3</sup> yang mengenai rentjana pembuatan dan kemadjuan dari alat perlengkapan atau lain<sup>3</sup> alat yang sesuai dengan apa yang disebut dalam kalimat pertama fasal ini.
    - 1) Rentjana<sup>3</sup> pengerahan tenaga dan alat<sup>3</sup>, seperti yang disebut dalam kalimat pertama fasal ini.
    - 2) Alat<sup>3</sup> pengamanan perhubungan seperti yang diuraikan dalam kalimat pertama fasal ini.
    - 3) Sekumpulan keterangan<sup>3</sup> dan bahan<sup>3</sup> yang setjara tersendiri tidak perlu digolongkan kedalam golongan „Keterangan Rahasia”, tetapi yang setjara sekumpulan harus diberi penggolongan kedalam golongan tersebut, diberi klasifikasi „Terbatas”.
    - 4) Peta<sup>3</sup> militer dan potret<sup>3</sup> udara seperti tersebut dibawah ini :
      - a) Potret<sup>3</sup> udara dan peta<sup>3</sup> yang inemuat keterangan-keterangan atau barang<sup>3</sup> dalam klasifikasi „Terbatas”.
      - b) Peta<sup>3</sup> dan potret<sup>3</sup> udara dari suatu daerah negara asing, jika negara tersebut menghendaki pemasukannya kedalam klasifikasi „Terbatas”.
      - c) Peta<sup>3</sup>, „Terreinmodellen”, dan photomaps yang dibuat dari potret<sup>3</sup> udara atau negatif<sup>3</sup>, pada umumnya diberi klasifikasi yang sesuai dengan isinja, dan tidak perlu sama klasifikasinya dengan potret<sup>3</sup> atau negatif<sup>3</sup> yang digunakan.
30. Biasa. Yang tidak termasuk dalam fasal 27 s/d 29 tersebut diatas.

## B A B VI

### SURAT - MENJURAT

#### Pendahuluan.

31. Tudjuan. Tudjuan umum surat-menjurat dinas ialah untuk mendajukan supaja tindakan yang dikehendaki tertjapai dengan tepat dan tjepat. Adapun tudjuan khusus surat-menjurat dinas ialah :

/ a Memberitahukan .....

- a. Memberitahukan.
  - b. Menjatakan kehendak.
  - c. Menjampaikan perintah<sup>3</sup> dan instruksi<sup>3</sup>.
  - d. Mejakinkan seseorang dengan alasan<sup>3</sup> yang masuk akal.
  - e. Mentjatat diskusi<sup>3</sup> dan menjusun keputusan<sup>3</sup>.
32. Sifat. Surat<sup>3</sup> dinas mempunyai beberapa sifat jaitu :
- a. Sifat Umum. Mengikuti segala peraturan dan kebiasaan yang berlaku dalam tata-bahasa yang digunakan.
  - b. Sifat Khusus. Yang menondjolkan :
    - 1) Kesederhanaan, djelas dan teliti dalam menjusun kalimat<sup>3</sup>.
    - 2) Dapat mejakinkan seseorang.
    - 3) Langsung mengenai pokok persoalannya.
    - 4) Harus lebih berdasarkan kenyataan dari pada angan<sup>3</sup>.
    - 5) Tidak boleh ragu<sup>3</sup> (tegas).
33. Bentuk. Sesuai dengan tudjuannya yang khusus, dalam surat-menjurat dinas perlu diadakan kesamaan bentuk atau standardisasi. Selain dari itu, maksud dan kepada siapa surat itu ditujukan, sebagaimana berlaku dalam surat-menjurat pada umumnya, sifat<sup>3</sup> khusus surat<sup>3</sup> dinas harus ditondjolkan.
34. Bahasa. Seseorang penulis yang tjakap adalah seorang yang dapat menjatakan fikirannya diatas kertas dengan djelas dan mejakinkan. Untuk itu ia memerlukan pengetahuan yang tjukup luas tentang bahasa Indonesia, artinya ia harus mempunyai perbendaharaan kata<sup>3</sup> yang tjukup kaya, dapat memilih kata<sup>3</sup> yang tepat dan tahu menjusun kalimat<sup>3</sup> yang baik menurut tata-bahasa yang benar. Berhubung dengan sifat<sup>3</sup>nya yang khusus itu, maka dalam surat<sup>3</sup> dinas penggunaan kalimat<sup>3</sup> yang pendek dengan bahasa yang sederhana lebih baik daripada kalimat<sup>3</sup> yang pandjang dan berbelit-belit. Bahasanya tak perlu indah, kata-katanya tak perlu muluk<sup>3</sup>.

#### Pedoman.

35. Lima Kaidah Kentjana. Dalam surat<sup>3</sup> dinas ada lima sjarat pokok yang dapat disebut „5 Kaidah Kentjana“. Tiap<sup>3</sup> kaidah yang termasuk dalam 5 kaidah kentjana itu satu dengan lainja bertalian e-at. Adapun 5 kaidah kentjana itu, ialah :
- a. Teliti.
  - b. Terang dan djelas.
  - c. Singkat padat.
  - d. Mantik dan mejakinkan.
  - e. Standardisasi.
36. Teliti. Ketelitian adalah sjarat utama dalam surat<sup>3</sup> dinas. Ketelitian memberikan kepastian atau menghindarkan keragu-raguan. Sebelum sesuatu hal dinjatakan perlu diselidiki kebenarannya tentang hal tersebut, djika ragu<sup>3</sup> mitalah keterangan seorang ahli yang berwenang dalam hal itu atau kepada seseorang yang tjukup dapat dipertjaja mengenai keachliannya dalam sesuatu bidang. Surat<sup>3</sup> dinas tidak ditulis berdasarkan chajalan tetapi berdasarkan fakta atau kenyataan.

/ Agar .....

Agar sipembatja dapat menarik kesimpulan yang benar dari isi surat, maka surat tersebut harus ditulis dengan teliti.

37. Terang dan djelas. Dalam menjiapkan suatu surat dinas sipenulis harus dapat menempatkan diri dalam alam fikiran sipembatja. Dengan demikian penafsiran<sup>1</sup> lain yang tidak dimaksudkan dalam suratnja itu dapat dihindarkan. Ia harus mendjaga akan berbagai kemungkinan yang dapat membingungkan sipembatja, misalnja ia harus menjusun suratnja dengan peraturan<sup>2</sup> surat dinas yang berlaku, ia harus menguraikan pokok soalnya dengan djelas. Untuk itu adjukan fakta-faktanja dengan terang, berikan alasan yang masuk akal. Achirnja susunlah kesemuanya itu dalam urutan yang mantik.
38. Singkat padat. Fikiran yang lengkap harus dapat ditulis dalam beberapa patah kata sadja sehingga walaupun kalimat<sup>3</sup>nja singkat tapi isinja padat. Menulis surat setjara singkat tapi padat adalah suatu ketjaksanaan. Ini memerlukan pengetahuan yang tjukup luas dan perbendaharaan kata yang tjukup kaya, serta latihan yang terus-menerus. Keberanian untuk memadatkan pengertian maupun untuk menjingkatkan kalimat diperlukan dalam menjiapkan surat dinas ABRI yang sifatnja harus tegas, misalnja :
  - a. „Dengan perantaraan” dapat disingkat dengan : Melalui.
  - b. „Berdasarkan ketentuan<sup>3</sup> tersebut dalam carrier planning ADRI” dapat disingkat dengan : Sesuai dengan carrier planning A.D.
  - c. „Mengadakan serangan pemboman” dapat disingkat : Membom.
39. Mantik dan meyakinkan. Mantik berarti tidak hanya tiap<sup>3</sup> persoalan yang dinjatakan itu dapat difahami, tetapi djuga urutan, susunan dan hubungan persoalan satu dengan lainnja bersesuaian, tidak bertentangan, sehingga pernyataan itu dalam keseluruhannya masuk akal. Apabila pernyataan itu ditulis dengan teliti, terang dan djelas, singkat padat, kemudian dari mula sampai achir disusun dalam urutan sambung-menjambung dan bersesuaian dengan lainnja hingga masuk akal maka pernyataan demikian itu dapat meyakinkan seseorang. Bila pernyataan itu sudah dapat meyakinkan seseorang hal itu berarti bahwa salah satu tudjuan yang dikehendaki sudah tertjapai.
40. Standardisasi. Lebih daripada organisasi<sup>2</sup> lainnja, maka sifat utama organisasi DEPHANKAM ialah keseragaman. Keseragaman berarti, bahwa setiap tindakan dilaksanakan dalam matjam dan bentuk yang sama. Ini berarti adanya kesatuan sistim, dan untuk Standardisasi selain memberikan sifat formil kepada suatu surat, djuga membantu salah satu tudjuan yang dikehendaki dalam surat-menjurat dinas yakni tjepat dan tepat. Selain itu keseragaman akan menghasilkan pula kerapihan.



## BAGIAN KEEMPAT

### SISTIM TATA NASKAH

#### B A B I

#### U M U M

##### 1. Pendahuluan.

- a. Dalam rangka usaha untuk mewujudkan/mentjapai hasil konkrit dalam pelaksanaan tugas pokok ABRI dalam bidang administrasi umum, suatu segi kegiatan yang tidak dapat diabaikan diantaranya adalah kegiatan pelaksanaan sistim tata-naskah.
- b. Pelaksanaan sistim tata-naskah merupakan suatu kegiatan yang bersifat memperlantjar, bahkan dalam hal-hal tertentu dapat merupakan salah satu urat nadi bagi kelanjutan djalannya administrasi umum.
- c. Atas dasar pertimbangan<sup>3</sup> sebagaimana diutarakan diatas, maka oleh Departemen Pertahanan-Keamanan dianggap perlu untuk mengeluarkan/menetapkan pedoman pelaksanaan sistim tata-naskah, yang dapat dipakai sebagai pedoman dilingkungan Departemen Pertahanan-Keamanan.

##### 2. Tudjuan. Tudjuan sistim tata-naskah adalah untuk memudahkan penjadjian, pengolahan, pengawasan dan pentjarian kembali segi<sup>3</sup> tertentu dari sesuatu persoalan pokok yang masih diperlukan.

##### 3. Pengertian. Tata-naskah (selanjutnja disingkat „TAKAH”) adalah suatu kegiatan administrasi didalam memelihara dan menjusun data<sup>3</sup> dari semua tulisan<sup>3</sup> mengenai segi<sup>3</sup> tertentu dari sesuatu persoalan pokok setjara kronologis dalam sebuah berkas.

##### 4. Matjam TAKAH. Dikenal dua matjam TAKAH, jaitu :

- a. TAKAH induk atau kebidjaksanaan (policy-file), hanja memuat tulisan<sup>3</sup> yang menjangkut kebidjaksanaan mengenai suatu pokok masalah dan menentukan haluan yang harus ditempuh dalam pemetjahan pengurusan persoalan<sup>3</sup> pada keseluruhannja. Oleh karena sifatnja itu TAKAH kebidjaksanaan tidak boleh memuat hal<sup>3</sup> yang hanja mempersoalkan suatu aspek tertentu dari suatu masalah. Segala tulis-menulis mengenai soal kebidjaksanaan dapat dimasukkan dalam TAKAH kebidjaksanaan.
- b. TAKAH pelaksanaan (sub-file), yang menjangkut pelaksanaan daripada kebidjaksanaan itu, yakni tindakan<sup>3</sup> setjara terperintji tidak boleh disertakan. Tindakan<sup>3</sup> seperti itu yang timbul dari kebidjaksanaan tadi harus dipisahkan dalam masing<sup>3</sup> TAKAH pelaksanaan yang menjangkut aspek tertentu dari TAKAH induk. TAKAH pelaksanaan adalah yang berisi korespondensi mengenai segala pelaksanaan suatu segi yang tertentu dari suatu soal pokok dalam TAKAH kebidjaksanaan. Karena itu TAKAH pelaksanaan harus berkenaan dengan suatu segi sadja dari suatu pokok persoalan dalam TAKAH kebidjaksanaan.

##### / 5. Klasifikasi

### 5. Klasifikasi.

- a. Suatu TAKAH dibagi-bagi menurut tingkat atau deradjar klasifikasi :
  - 1) Sangat Rahasia.
  - 2) Rahasia.
  - 3) Terbatas.
  - 4) Biasa.
- b. TAKAH<sup>3</sup> yang berklasifikasi Sangat Rahasia, Rahasia dan Terbatas diberi tjap pada bagian atas dari sampul TAKAH (halaman muka). Peredaran TAKAH<sup>3</sup> tersebut diteruskan dengan sampul yang dibubuhi tjap „RAHASIA“ pada luar sampul dan pada waktu mengedarkan harus dimasukkan lagi dalam stofmap (map khusus) supaya tidak tampak bahwa hal tersebut adalah TAKAH rahasia dan disimpan pada tempat yang terkuntji apabila tidak dipergunakan.

## B A B   I I

## P E L A K S A N A A N

### 6. Penomoran Takah

- a. Djika hendak membuka sebuah TAKAH mengenai sesuatu hal, hendaknja TAKAH diberi nomor, sesuai dengan nomor<sup>3</sup> yang diberikan oleh Kepala Sekretariat. Bagi setiap KAS/IR/KE-G/AS/ dan sebagainya disediakan nomor<sup>3</sup> tertentu (Block Numbers). Sistim pembagian nomor<sup>3</sup> ini di STAF HANKAM, ANGKATAN<sup>3</sup>/POLRI, Komando<sup>3</sup> Utama OPS, Badan<sup>2</sup> Pelaksana Pusat dan pada Kesatuan/tingkatan yang lebih rendah adalah sama.
- b. Apabila KAS/IR/KE-G/AS dan sebagainya telah memakai semua nomor blok yang diberikan kepadanya, maka KAS/IR/KE-G/AS tersebut harus minta lagi pembagian nomor<sup>3</sup> selanjutnja kepada Kepala Sekretariat. KAS/IR/KE-G/AS sekali-kali tidak dibenarkan menentukan sendiri nomor<sup>3</sup> bloknja, hanya tjara pembagian blok<sup>3</sup> nomor yang telah ada itu dapat dibagikan menurut kebutuhan kepada bagian<sup>2</sup> dalam lingkungannya.
- c. Nomor TAKAH yang umum terdiri dari :
  - 1) Huruf Pengenal.
  - 2) Nomor Pokok Persoalan (dari nomor blok).
  - 3) Nomor Anak Persoalan.
  - 4) Nomor Perihal.
  - 5) Singkatan Djawatan.
 dan yang khusus dapat ditetapkan oleh masing<sup>3</sup> Angkatan/POLRI, Komando<sup>3</sup> Utama Operasionil Staf atau Badan<sup>2</sup> lainnja, sesuai kebutuhan.

/ d. TAKAH ..... ..



- d. TAKAH kebidjaksanaan harus diberi nomor pokok dari blok dimana TAKAH ini disusun dan selanjutnya dibubuhi huruf<sup>2</sup> pengenal dari KAS/IR/KE-G/AS asal TAKAH tadi. Huruf<sup>2</sup> tersebut ditulis pada bagian muka dari setiap nomor, misalnja :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1) HANKAM/0001/MEN | — TAKAH kebidjaksanaan dari MEN-HANKAM/PANGAB.      |
| 2) MABAD/0101/KAS  | — TAKAH kebidjaksanaan dari Kepala Staf A.D.        |
| 3) MABAL/0201/DE   | — TAKAH kebidjaksanaan dari Deputy Kepala Staf A.L. |
| 4) MBAU/0301/DE    | — TAKAH kebidjaksanaan dari Deputy Kepala Staf A.U. |
| 5) MABAK/0401/KA   | — TAKAH kebidjaksanaan dari KA-POLRI.               |

- e. TAKAH pelaksanaan juga diberi nomor seperti nomor dalam TAKAH kebidjaksanaan disertai garis<sup>2</sup> miring dan nomor<sup>2</sup> seri yang dimulai pada nomor 1. misalnja :

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1) HANKAM/0351/1/1/SET   | — TAKAH pelaksanaan dari KEPALA SEKRETARIAT HANKAM.                      |
| 2) MABAD/0200/3/1/AS-3   | — TAKAH pelaksanaan dari ASISTEN-3 KASAD.                                |
| 3) DITHUK/0100/1/2/BPU/  | — TAKAH pelaksanaan dari BIRO PERUNDANG-UNDANGAN DIREKTORAT HUKUM MABAL. |
| 4) MBAU/1550/14/15/HUMAS | — TAKAH pelaksanaan dari PUSAT HUBUNGAN MASJARAKAT MBAU.                 |
| 5) MABAK/0300/1/2/LOG    | — TAKAH pelaksanaan dari ASISTEN LOGISTIK MABAK.                         |

### 7. Penataan Naskah.

- a. Empat Kategori Naskah. „Naskah<sup>2</sup> Masuk” dibagi dalam empat kategori :

- 1) Naskah lanjut ialah Naskah<sup>2</sup> yang sudah ada TAKAH-nja (Existing file papers).
- 2) Naskah baru ialah Naskah<sup>2</sup> yang memerlukan TAKAH baru (New file papers).
- 3) Naskah khusus ialah Naskah yang harus ditentukan dulu TAKAH-nja (Trace papers).
- 4) Naskah langsung ialah Naskah<sup>2</sup> yang harus diteruskan ke pendjabat yang mempunyai wewenang dalam penjelesaian isi surat tersebut.

/ b. Naskah .....

- b. Naskah landjut dimasukkan dalam TAKAH-<sup>2</sup> yang telah tersedia urut surat-<sup>2</sup> itu. Kemudian diberi nomor urut dalam TAKAH dan selanjutnya diteruskan kepada yang berkepentingan untuk dibahas. Apabila TAKAH itu sedang tidak ada di bagian registrasi, maka harus diminta kembali dulu dan surat-<sup>3</sup> itu dibukukan dalam TAKAH dan diberi nomor urut naskah. TAKAH itu kemudian harus diteruskan kepada pendjabat yang berkepentingan untuk dibahas.
- c. Naskah baru harus diteruskan oleh bagian registrasi kepada pendjabat yang bersangkutan dengan suatu slip „Permintaan Alokasi” untuk judul TAKAH baru. Apabila judul TAKAH baru telah diterima, bagian registrasi membuka TAKAH baru dan meneruskan kepada pendjabat yang bersangkutan sehingga surat dimaksud dapat dimasukkan dalam TAKAH dan diambil tindakan selanjutnya.
- d. Naskah khusus Petugas-<sup>2</sup> di bagian registrasi harus segera berusaha untuk mengenal trace papers dan setelah diketahui maka surat-<sup>3</sup> ini harus diperlakukan sebagai naskah landjut atau sebagai naskah baru.
- e. Naskah langsung harus diteruskan ke-pendjabat yang mempunyai wewenang dalam penyelesaian isi surat tersebut. Oleh pendjabat ini akan dibuka TAKAH tersendiri untuk surat tersebut dan diselesaikan menurut sistim TAKAH selanjutnya (djelasnja dalam hal ini Kepala Sekretariat tidak membuat TAKAH untuk surat ini).

#### 8. Naskah-<sup>3</sup> Dalam TAKAH.

- a. Pemberian Nomor. Segala matjam naskah, dalam bentuk surat atau kumpulan surat, nota dinas, brosur dan lain-lainnya yang perlu dihimpun untuk meriwajatkan persoalan TAKAH disebut naskah. Adalah menjadi kewadajiban dari pendjabat yang mengambil tindakan atas TAKAH, untuk menempatkan naskah-<sup>3</sup> itu pada sebelah kanan dari sampul TAKAH dan memberinja nomor urut, yakni mulai dengan (N-1), (N-2), (N-3) dan seterusnya, ditulis pada sudut kanan atas.
- b. Apabila dua surat atau lebih merupakan satu naskah, masing-<sup>3</sup> harus mempunyai nomor yang sama ditambah dengan huruf A, B, C dan seterusnya untuk menandai masing-<sup>3</sup> surat. Huruf A digunakan untuk surat yang pertama dan ini sekaligus menundjukkan, bahwa masih ada surat-<sup>2</sup> lainnya dibawahnja yang bertalian erat dengan surat pertama. Huruf B dipakai untuk brosur atau surat yang kedua dan seterusnya misalnja, djika sebuah brosur atau surat lain diterima nomor (N-1A), sedangkan brosur atau surat lain itu diberi tanda (N-1B).
- c. Tjara kerdja yang sama ini dipakai pula untuk surat/naskah yang mempunyai lampiran-<sup>3</sup>. Naskah yang kemudian, bilamana merupakan naskah tunggal (tanpa lampiran-<sup>3</sup>) hanya diberi nomor (N-2), bukan (N-2A). Djikalau sebuah naskah terdiri atas beberapa halaman yang pertamalah yang diberi nomor naskah.
- d. Apabila sebuah naskah perlu ditempatkan antara dua naskah yang telah terhimpun (sudah bernomor), maka naskah tersebut yang merupakan naskah sisipan harus diberi nomor dari naskah yang terdahulu, ditambah dengan angka

/ romawi .....

romawi ketjil (i). Umpamanja sebuah naskah baru harus ditempatkan diantara naskah-<sup>3</sup> nomor (N-6) dan (N-7), maka naskah baru itu diberi nomor [N-6 (i)], atau djika naskah baru itu terdiri atas dua surat, masing-<sup>3</sup> surat itu diberi nomor [N 6 (i)A] dan [N 6 (i)B]. Dengan tjara demikian akan dihindarkan perlunja pemberian nomor-<sup>3</sup> baru bagi naskah-<sup>3</sup> jang telah terhimpun.

- e. Bila lampiran mempunjai nomor (N-2B), maka nomor-<sup>3</sup> untuk „Sub Lampiran” adalah [N-2B (a)] dan untuk „Sub-Sub Lampiran” adalah [N-2B (a)(i)].
  - f. Konsep Surat. Konsep-<sup>3</sup> surat jang dikirimkan kepada atasan untuk diminta persetudjuannya harus dimasukkan dalam TAKAH dan diberi nomor seperlunja. Konsep surat (dokumen) tersebut harus tetap disimpan dalam TAKAH untuk keperluan rekaman, apabila surat aslinja harus dihadapkan kembali untuk penanda-tanganan.
  - g. Isi TAKAH harus benar-<sup>3</sup> hanja meliputi hal-<sup>3</sup> jang sesuai dengan djudul daripada TAKAH. Penjimpangan dari djudul jang semula baik dalam bentuk lampiran atau tjatatan harus dipindahkan kedalam sebuah TAKAH jang baru dan suatu penundjukan silang jang tepat harus dibuat.
  - h. Djumlah naskah jang dihimpun dalam sebuah sampul naskah tergantung pada kebidjaksanaan masing-<sup>3</sup> bagian, akan tetapi TAKAH biasanja tidak boleh mendjadi terlalu tebal, 200 helai merupakan batas jang dapat diterima. Bagian-<sup>3</sup> selandjutnja dari TAKAH jang sama harus dihimpun dalam sampul TAKAH baru oleh bagian registrasi, djikalau sampul pertama tidak dapat memuat surat-<sup>3</sup> tambahan dengan baik, bagian-<sup>3</sup> ini harus diberi nomor urut landjutan. TAKAH jang terbagi dalam beberapa sampul TAKAH harus diberi djuga nomor urut dengan menuliskan angka romawi dalam kurung disebelah kanan atas sampul TAKAH.
9. Pemberian Nomor kepada Naskah-<sup>3</sup> Keluar. Semua naskah-<sup>3</sup> keluar harus diberi nomor sesuai dengan TAKAH jang bersangkutan ketjuali tulisan-<sup>3</sup> resmi dan kawat.
10. Lembaran tjatatan.
- a. Sebuah lembaran tjatatan adalah tjara jang biasa dipergunakan untuk mendjalankan diskusi, memberitahukan suatu instruksi, meneruskan pendapat dan merekam pembitjaraan-<sup>3</sup> perihal penjelesaian suatu persoalan. Dalam TAKAH tjatatan-<sup>3</sup> pendek mengenai tindakan jang diambil, usul-<sup>3</sup> serta keputusan-<sup>3</sup> atasan dimuat pada lembaran tjatatan, ketjuali apabila tjatatan itu berbentuk nota dinas jang sudah seharusnya ditempatkan disebelah kanan dari TAKAH.
  - b. Lembaran-<sup>3</sup> tjatatan adalah lembaran-<sup>3</sup> kertas jang harus ditempatkan pada sebelah kiri dari sampul TAKAH. Ketjuali dalam keadaan darurat, hendaknja dipergunakan lembaran-<sup>3</sup> jang khusus, lembaran tjatatan-<sup>3</sup> jang tersusun rapih akan merupakan tjatatan-<sup>3</sup> jang berharga mengenai penjelesaian persoalan dalam TAKAH dan akan memudahkan karena adanja suatu kontinuitas dalam pembahasan persoalan. Tjatatan harus ditulis setjara kronologis, dan harus diberi nomor urut dengan mempergunakan angka Latin dan dibubuhi huruf

/ besar .....

besar T (untuk tjatatan) didepan. Nomor urut ini ditulis ditengah atas setiap tjatatan baru dan diberi garis dibawahnja. Setiap Lembaran harus diberi nomor lembaran dan nomor TAKAH

- e. Bentuk. Bentuk daripada lembaran tjatatan dapat dilihat dalam lampiran DD.

Hal-hal tersebut dibawah ini perlu mendapat perhatian :

- 1) Pada sudut kiri atas setiap lembaran harus ditjatat nomor **TAKAH** dan nomor lembaran. Derajat klasifikasi sesuai dengan derajat yang diberikan kepada TAKAH setjara keseluruhan dan harus ditulis atau ditjap ditengah-tengah dari bagian atas dan bawah setiap halaman.
- 2) Halaman-<sup>3</sup> dari lembaran tjatatan harus diatur sedemikian rupa sehingga halaman yang terachir selalu berada diatas.
- 3) Djabatan, menurut singkatan resmi, dari seseorang kepada siapa sebuah tjatatan ditudjukan (jadi bukan namanja) harus ditulis dibawah kolom „Kepada” sedjadar garis pertama dari tjatatan.
- 4) Setiap tjatatan harus diachiri dengan sebutan djabatan, tanda-tangan, nama dan pangkat dari sipengirim serta tanggal menurut peraturan surat-menjurat militer yang berlaku, akan tetapi disini diperbolehkan mempergunakan singkatan-<sup>2</sup> resmi.

11. Nota Tindakan. Bilamana seorang pendjabat telah melaksanakan suatu tindakan berdasarkan perintah yang diterimanja, maka tindakan tersebut perlu pula direkam dalam lembar tjatatan oleh pendjabat yang bersangkutan. Rekaman ini dibuat seperti halnja tjatatan biasa dengan kepala tengah „NT” (Nota Tindakan) dengan nomor urut tersendiri pada lembaran tjatatan. Dalam penyelesaian proses persoalan yang diteruskan dan/atau diterima dalam bentuk berita lisan, berita tersebut perlu direkam. Apabila dianggap perlu hendaknja dimintakan pendjelasan kembali untuk selandjutnja direkam dalam lembaran tjatatan.

12. Pembukaan TAKAH.

- a. Untuk mendjamin pentjatatan yang tepat dan terkoordinir dari semua TAKAH, TAKAH-<sup>2</sup> harus dibuka dibawah pengawasan sentral oleh bagian registrasi. Djika bagian registrasi menganggap bahwa sebuah TAKAH baru tidaklah perlu, bagian registrasi harus memberikan keterangan yang sedjelas-djelasnja kepada yang ingin membuka TAKAH. Keputusan terachir ada pada si-peminta. Duplikasi dari TAKAH dalam suatu djawatan yang menggunakan suatu kumpulan TAKAH yang sama dapat dihindarkan dengan pertukaran keterangan setjara bebas antara biro-<sup>3</sup>, seksi-<sup>3</sup> dalam djawatan tersebut, dengan menundjukkan silang dengan pemeriksaan yang teliti daripada djudul-<sup>2</sup> TAKAH dalam bagian registrasi.
- b. Tjontoh dari tjara membuka „TAKAH Kebidjaksanaan” dan „TAKAH Pelaksanaan” adalah sebagai berikut :
  - 1) MENHANKAM/PANGAB mengirim sebuah Nota (lepas) kepada Kepala Staf Departemental (KASDEP) dengan permintaan agar KASDEP

/ menjusun .....

menjusun sebuah konsep prosedur mengenai : „Tjara-<sup>1</sup> pengusulan pemberian tanda djasa berupa bintang untuk suatu tindakan keberanian”.

- 2) Karena ini mengenai pokok persoalan „Personil”, maka KASDEP lebih dulu merundingkan hal ini dengan ASBINMAN, sesudah perundingan maka ASBINMAN membuka sebuah TAKAH, umpamanja dengan nomor : HANKAM/1000/MAN.

Artinja :

HANKAM/1000/MAN — TAKAH kebidaksanaan dari ASBINMAN.  
/1000/ — Pokok persoalan, umpamanja  
„Tanda Djasa Keberanian”.

- 3) Nota dari MENHANKAM/PANGAB tadi adalah naskah No. 1 dari TAKAH tersebut dan dilekatkan pada halaman kanan. Sesudah ASBINMAN membuat suatu konsep, maka konsep ini mendjadi naskah No. 2. Dengan sebuah tjatatan No. 1 (T-1) diatas lembaran tjatatan, ASBINMAN mengirinkan TAKAH tersebut kepada MENHANKAM/PANGAB dan seterusnya, sampai konsep tadi mendjelma mendjadi sebuah Keputusan MENHANKAM/PANGAB.
- 4) Sesudah ada Keputusan MENHANKAM/PANGAB, dapatlah diharapkan oleh ASBINMAN bahwa segera akan diterima usul-<sup>1</sup> mengenai hal tersebut.
- 5) ASBINMAN lalu menetapkan beberapa nomor untuk „Anak Persoalan” Tanda Djasa Keberanian tadi, misalnja :
- a) HANKAM/1000/1/ — Anggauta Angkatan Darat
  - b) HANKAM/1000/2/ — Anggauta Angkatan Laut
  - c) HANKAM/1000/3/ — Anggauta Angkatan Udara
  - d) HANKAM/1000/4/ — Anggauta Kepolisian R.I.
  - e) HANKAM/1000/5/ — Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat Umum.
- 6) Djika kelak untuk pertama kalinja ASBINMAN menerima sebuah surat usul mengenai tindakan keberanian dari beberapa anggauta RPKAD, maka ia sudah siap dengan membuka TAKAH pelaksanaan dengan nomor HANKAM/1000/1/1/MAN, djadi TAKAH pelaksanaan HANKAM/1000/1/1/MAN adalah TAKAH pelaksanaan dari ASBINMAN mengenai usul pemberian tanda djasa kepada anggauta Angkatan Darat (RPKAD).
- 7) TAKAH No. HANKAM/1000/5/3/MAN adalah TAKAH pelaksanaan dari ASBINMAN mengenai usul pemberian tanda djasa keberanian kepada beberapa pegawai Pamong Pradja jang diusulkan dalam satu surat sebagai surat pengantar (seandainya suratnja diberi No. (N-3A), maka daftar usul tadi mendjadi lampiran dari Naskah No. (N-3A) dengan diberi nomor (N-3B).

/ 13. TAKAH .....

13. TAKAH yang tidak diedarkan (Non Active File).

- a. Ada beberapa matjam naskah yang tidak perlu diedarkan keluar dari djawatan-nja, a.l. :
  - 1) Pengumuman<sup>-2</sup>, Keputusan<sup>-2</sup>, Instruksi<sup>-2</sup> dan sebagainya.
  - 2) Surat<sup>-2</sup> tembusan.
- b. Untuk masing<sup>-2</sup> djudul tersebut diatas Fasal 13 sub-fasal a sub-sub-fasal 1), dibuka TAKAH tersendiri dimana *naskah<sup>-2</sup> sedjenis* dikumpulkan dalam satu TAKAH, hal ini berlainan dengan ketentuan tentang pembukaan TAKAH, dimana untuk masing<sup>-2</sup> perihal dibuka satu TAKAH tersendiri.
- c. Surat<sup>-2</sup> Tembusan setelah diketahui oleh pendjabat yang bersangkutan supaja dimasukkan dalam TAKAH tersendiri (misalnja TAKAH „AURI“, TAKAH „LEMHANNAS“, TAKAH „DEPARTEMEN SIPIL“ atau TAKAH<sup>-2</sup> lain yang kita sebut dengan TAKAH „Non Active“).
- d. Djika seorang pendjabat ingin mengambil tindakan terhadap isi surat tembusan tersebut, maka sebelum itu Kepala Sekretariat harus menanjakan terlebih dahulu kepada pendjabat yang menerima surat asli mengenai penyelesaian surat tersebut (dalam hal pendjabat tersebut berada dalam lingkungan kesatuannja). Atas djawaban pendjabat ini terserah kepada pendjabat pertama untuk tindakan yang dipandang perlu olehnja. Djika perlu untuk mentakahkan surat tembusan tadi dan memperlakukannja sebagai naskah biasa.
- e. Djika pendjabat yang menerima surat asli (menurut alamat asli) berada diluar lingkungan kesatuan/angkatan, maka terserah kepada pendjabat yang menerima surat tembusan untuk men-„takah“-kan atau men-„non aktifkan“ surat tembusan tersebut.

14. Pemindahan dari Lembaran Tjataan<sup>-2</sup>/Naskah<sup>-2</sup>.

- a. Apabila isi daripada sebuah TAKAH, termasuk djuga lembaran<sup>-2</sup> tjatattannja harus dipindahkan ke-TAKAH lainnja, maka sampul yang kosong itu harus diberi lembaran tjataan yang baru dan dikembalikan ke bagian registrasi dengan disertai sebuah tjataan mengenai tindakan yang telah diambil dan menjebut nomor dan djudul TAKAH kemana isi tersebut dipindahkan. Sebuah tjataan harus pula dibuat dalam TAKAH yang menerima isi tersebut.
- b. Apabila hanja beberapa naskah ataupun tjataan dipindahkan dari sebuah TAKAH ke TAKAH lainnja tjataan<sup>-2</sup> yang seperlunja harus dimuat dalam TAKAH, dimana tindakan tersebut harus diterangkan dengan menjebut nomor<sup>-2</sup> TAKAH dan nomor<sup>-2</sup> naskah/tjataan yang telah dipindahkan. Selandjutnja bilamana sebuah naskah telah dikeluarkan dari TAKAH, tempatnja harus diganti dengan sehelai kertas putih yang diberi nomor naskah seperti pada aslinja dan diberikan tjataan tentang apa yang dilakukan dengan naskah yang telah dikeluarkan itu misalnja : (N-12) dimusnahkan atas perintah ..... atau (N-12) dipindahkan ke TAKAH No. .... sebagai (N .....)

/ 15. Penundjukan .....

15. Penundjukan Silang antar TAKAH dan Naskah.

- a. Penundjukan silang dari sebuah TAKAH kepada TAKAH lainnja termasuk bagian<sup>2</sup> dari TAKAH yang terhimpun dalam sampul lain, (djikalau TAKAH terbagi dalam beberapa sampul) harus dibuat dalam ladjur yang tersedia pada sampul TAKAH.
- b. Penundjukan silang dari sebuah naskah kepada naskah lainnja didalam TAKAH yang sama, dilakukan dengan menjebut nomor naskah, akan tetapi apabila itu menjangkut sebuah naskah dari TAKAH lain, maka nomor TAKAH itu harus pula ditulis, seperti dalam tjontoh berikut :
- Menarik surat Panglima No. R-/007/8/1967 tanggal 17-7-1967 dengan ini diberitahukan, bahwa MENHANKAM/PANGAB akan menghadiri upatjara peresmian pembentukan Qin Operasionil 061 di DIVISI LINUD I di .....  
 ..... Disamping ini pada naskah yang ditundjuk harus pula ada penundjukan ke Naskah penundjuk. Ini ditulis dibawah nomor Naskah setjara ber-turut<sup>3</sup>. Penundjukan sematjam ini merupakan tanggung-djawab dari masing<sup>3</sup> bagian dan kepada pendjabat yang bersangkutan diperi-ngatkan agar djangan sekali-kali menjadjakan sebuah TAKAH (meneruskan surat dalam TAKAH) kepada atasannja tanpa lebih dulu membuat penun-djukan<sup>2</sup> silang yang diperlukan.

16. Peredaran TAKAH dan Tjara Mentjatnja.

- a. Peredaran sebuah TAKAH dari satu kelain bagian lazimnja dilakukan melalui bagian registrasi, dimana semua peredaran TAKAH ditjatat pada Kartu<sup>3</sup> Pemer-iksaan Peredaran TAKAH. Dengan tjara ini sebuah TAKAH dapat diusut setiap waktu kemana perginja. Akan tetapi ada kalanja bahwa sebuah TAKAH harus segera dan langsung diteruskan kepada lain bagian dan apabila demikian halnja, maka bagian registrasi harus diberitahukan tentang pengiriman langsung tersebut, agar oleh bagian registrasi dapat dibuat tjatatan seperlunja.
- b. Tjara yang tepat untuk mentjatat peredaran TAKAH dalam ladjur „Edaran” pada sampul TAKAH adalah sebagai berikut :

Edaran			
Kepada	N/T	Tanggal	Pengirim
WAPANGAB	N-2/T-1	17 Djun	Parap

- c. Pendjabat kepada siapa TAKAH itu ditudjukan harus menarik garis atas pengisi-an terachir sebelum ia mengembalikan TAKAH kepada bagian registrasi atau me-neruskannja kelain bagian. Apabila sebuah naskah atau tjatatan dalam TAKAH harus dibatja oleh beberapa orang, maka ladjur „Edaran” pada Sampul TAKAH harus diisi oleh pendjabat yang memulai peredaran tersebut sebagai berikut :

Edaran			
Kepada	N/T	Tanggal	Pengirim
KASUM	N-2/T-2	18 Djun	Djamin
KASDEP	N-2/T-2		Djamin
KASKAR	N-2/T-2		Djamin

- d. Dengan demikian setelah TAKAH dilihat oleh KASUM dan dimisalkan beliau

/ tak .....

tak menambah apa-<sup>3</sup> dalam TAKAH, maka TAKAH itu diteruskan dengan menjoret ladjur jang memuat namanja dan membubuhi tanggal pada kolom tanggal, hal ini berikutnja seperti tjontoh dibawah ini. Apabila tidak dilaksanakan, dapat dilakukan oleh pendjabat jang berwenang dalam bidang ini, dengan pengertian bahwa pendjabat jang bersangkutan telah memberikan disposisi.

Edaran			
Kepada	N/T	Tanggal	Pengirim
KASUM	N-2/T-2	19 Djun	Djamin
KASDEP	N-2/T-2	19 Djun	Djamin
KASKAR	N-2/T-2		Djamin

- e. Tata-tjara seperti didjelaskan diatas ini berlaku bagi penerima TAKAH berikutnya. Apabila KASUM ini sebagai pembatja pertama telah membuat tjatatan jang ditudjukan kepada KASDEP, beliau harus membuat tjatatannja (T-3) dalam TAKAH dan pada sampul TAKAH dalam ladjur baru menjatakan sebagai berikut :

Edaran			
Kepada	N/T	Tanggal	Pengirim
KASUM	N-2/T-2	19 Djun	Djamin
KASDEP	N-2/T-2	19 Djun	Djamin
KASKAR	N-2/T-2		Djamin
KASDEP	T-3	19 Djun	Ario

17. TAKAH jang Menunggu Penjelesaian.

- a. Diminta perhatian pada pendjabat jang menggunakan TAKAH, agar djangan menahan TAKAH, karena ia mengharapkan djawaban atas suatu surat atau penjelesaian lain dalam waktu beberapa hari lagi. Apabila ia menghendaki dikembalikannja TAKAH tersebut pada tanggal tertentu, kehendaknja dapat dilajani oleh bagian registrasi dengan tjara mengisi ladjur „Adjukan Kembali” pada sampul TAKAH :

Adjukan kembali			
Kepada	N/T	Tanggal	Peminta
ASRENUM	N-15	19 Agu	Sumitra

Pendjabat jang bersangkutan sendiri (dalam tjontoh ASRENUM) dan bukan bagian registrasi jang menentukan tanggal diperlukannja TAKAH kembali. Dalam tjontoh ASRENUM menghendaki TAKAH tersebut, terutama (N-15), diadjukan kembali pada tanggal 19 Agustus.

- b. Untuk dapat melajani permintaan diatas dengan tepat, bagian registrasi membuat tjatatan seperlunja pada „Kartu Adjukan Kembali”. Sedjumlah 31 Kartu-<sup>3</sup> Adjukan Kembali jang diberi nomor 1 s/d 31 jang merupakan djumlah hari terbanjak dalam satu bulan (tanggal) adalah tjukup untuk pentjatatan selama 1 (satu) tahun. Kartu-kartu itu dapat diperbaharui apabila perlu.

/ c. Tiap .....



- c. Tiap hari bagian registrasi memeriksa kartu untuk hari (tanggal) yang bersangkutan untuk mengetahui apakah pada hari tersebut ada TAKAH yang perlu diajukan kembali. Sebelum mengirim TAKAH yang diminta (kalau ada), maka tjtatan untuk itu pada „Kartu Adjukan Kembali” harus ditjoret (dimatikan).
- d. Apabila TAKAH yang diminta itu tidak berada dibagian registrasi, maka bagian yang meminta harus diberitahukan atau diusahakan oleh bagian registrasi untuk mendapatkan kembali. Bila TAKAH yang ditjari masih dibutuhkan oleh bagian lain, maka bagian yang diminta dapat diberitahukan oleh bagian registrasi untuk mengajukan TAKAH tersebut pada tanggal lain.
- e. Setelah TAKAH yang diajukan kembali selesai digunakan, maka pengisian dalam ladjur „Adjukan Kembali” harus ditjoret.

18. Penelitian TAKAH.

- a. Semua TAKAH yang persoalannya dapat dianggap selesai, sebelum disimpan sementara harus diteliti oleh bagian registrasi.
- b. Hendaknya setiap hari diadakan penelitian terhadap suatu djumlah TAKAH tertentu untuk mejakinkan bahwa :
  - 1) TAKAH-<sup>2</sup> tersebut disimpan dalam urutan yang sewadjarnya.
  - 2) Tidak ada surat-<sup>2</sup> dalam TAKAH yang masih menunggu pengiriman/penjelsaiannya.
  - 3) Pentjtatan pada sampul TAKAH semuanya telah terlaksana.
  - 4) Surat-<sup>2</sup> dan tjtatan-<sup>2</sup> yang tertera pada sampul TAKAH sudah ditanda-rangani oleh pendjabat yang bersangkutan.
  - 5) Semua TAKAH yang ada dalam peredaran telah ditjtat dalam kartu-<sup>3</sup> pemeriksaan peredaran TAKAH.
- c. Setiap pagi TAKAH yang harus di-„Adjukan Kembali” untuk tanggal itu harus disampaikan kepada pendjabat yang memerlukanja pada hari itu juga. Selanjutnja bagian registrasi mentjoret pentjtatan pada kartu tersebut.
- d. Apabila suatu TAKAH yang ada tjtatannya pada ruang „Adjukan Kembali” pada hari yang ditentukan tidak terdapat pada bagian registrasi, maka bagian registrasi harus segera memberitahukan kepada pendjabat yang membutuhkan TAKAH tersebut, tentang dimana adanya TAKAH dimaksud. Tjontoh pemberitahuan dari bagian registrasi adalah sebagai berikut :
 

KAS/IR/KE-G/AS : .....  
 TAKAH No. .... yang seharusnya diajukan kembali  
 pada hari ini, sedang ada di KAS/IR/KE-G/AS : .....  
 Tanggal : ..... Paraf : ..... Sekretaris.
- e. Sesudah itu, maka adalah mendjadi tanggungan pendjabat yang meminta „Adjukan Kembali” untuk mendapatkan TAKAH tersebut, atau meminta kepada Sekretariat dengan tjara tertulis supaya TAKAH tersebut diajukan kembali kepadanya pada tanggal lain.

/ f. Buku .....

- f. Buku Harian TAKAH dipergunakan untuk mentjatat tiap-tiap hari semua TAKAH yang dibuka dan diedarkan oleh pembuka TAKAH serta tanggal kembalinja.
- g. Tudjuannya adalah untuk mengetahui TAKAH mana yang telah melampaui batas waktu penjelesaiannya guna dibuatkan nota edaran TAKAH.
- h. Kegunaan Nota Edaran Tata-Naskah (NET) adalah sebagai berikut :
  - 1) Guna menambah kelantjaran dan keseragaman dari pelaksanaan sistim TAKAH pada umumnja dan pengawasan peredaran TAKAH pada khususnya, maka tindakan pengawasan terhadap peredaran TAKAH, digunakan „Nota Edaran Tata Naskah”.
  - 2) NET dipergunakan untuk meminta keterangan dan menanjakan tentang penjelesaian mengenai suatu TAKAH yang sedang dalam peredaran atau sedang dipindjam oleh seorang pendjabat.
  - 3) NET dikirim, djika sebuah TAKAH selama 7 a 10 hari belum kembali kepada pengirim, dengan memperhatikan „pentingnja”-nja isi TAKAH tadi. Hal ini dapat dilihat dalam „Buku Harian TAKAH”.
  - 4) Sedikit/banjaknja penggunaan NET menundjukkan lantjar atau tidaknja penjelesaian suatu persoalan. Maka diminta perhatian agar dihindarkan penahanan terlalu lama TAKAH yang diedarkan oleh lain pendjabat dengan tjara sebagai berikut :
    - a) Djika suatu TAKAH yang persoalannya disebabkan sesuatu hal belum dapat diselesaikan seketika itu, maka TAKAH ini harus dikembalikan dulu kepada pendjabat yang menerimanya dengan tjatatan untuk diadjukan kembali pada tanggal : .....
    - b) Djika suatu TAKAH dari suatu pendjabat perlu diteruskan kepada pendjabat lain maka agar hal ini diberitahukan dengan perantaraan telepon atau tertulis kepada pendjabat pengirim (jang membuka TAKAH).
    - c) Djika suatu TAKAH dari pendjabat pengirim perlu ditahan lebih dari 7 (tudjuh) hari untuk sesuatu keperluan (misalnja untuk dipeladjar atau untuk bahan rapat dan sebagainya), maka kepada pendjabat yang bersangkutan harus diberitahukan dengan perantaraan telepon atau tertulis agar mereka tetap mengikuti peredaran TAKAH-nja.

#### 19. Menutup TAKAH.

- a. Djikalau tindakan<sup>3</sup> lebih landjut atas persoalan dalam sebuah TAKAH sudah tidak diperlukan lagi, maka urusan persoalan tersebut harus dikembalikan lagi kebagian registrasi guna disimpan untuk suatu waktu tertentu sebelum dihapus. Untuk menutup TAKAH, ladjur „Simpan” harus diisi oleh pendjabat yang bertanggung djawab dari bagian yang membuka TAKAH tersebut. Sebelum penutupan ketertiban dalam TAKAH adalah tanggung-djawab bagian yang membukanya, bukan bagian registrasi.

/ b. Diandiurkan .....

- b. Diandjurkan kepada bagian yang bersangkutan, agar djangan tergesa-gesa menutup TAKAH karena kemungkinan masih diperlukannya kembali TAKAH tersebut. Dalam hal persoalan itu masih diragukan, sebaiknya TAKAH diminta adjukan kembali sebulan kemudian untuk memeriksa yang lebih teliti, lalu keputusan dapat diambil untuk menutup TAKAH itu. Penutupan TAKAH diperlukan untuk memperketijl djumlah TAKAH yang harus dipelihara dengan seksama.

20. Pembukaan kembali TAKAH. Apabila diterima sebuah naskah yang ada sangkut-pautnja dengan suatu TAKAH yang telah ditutup atau bilamana persoalan dalam TAKAH itu perlu diperbintjangkan lagi, maka bagian registrasi harus menanjakan kepada bagian yang berkepentingan apakah perlu TAKAH dibuka kembali ataukah TAKAH „baru” harus dibuka.

Dalam hal pembukaan „baru”, maka TAKAH yang sudah ditutup harus disertakan dengan TAKAH baru. Boleh atau tidaknja TAKAH dibuka kembali ditentukan pula oleh lamanja penutupan. Sebagai pedoman TAKAH yang sudah ditutup misalnya 2 tahun, tak boleh dibuka lagi dan menunggu penghapusannya.

21. Pemeliharaan TAKAH.

- a. TAKAH beserta isinja harus diperlakukan dengan radjin dan hati-<sup>2</sup>. Lembaran-<sup>2</sup> naskah yang dimasukkan dalam TAKAH setjara tjeroboh akan lekas rusak dan kotor dan sebuah TAKAH yang sedjak dibukanya sudah tidak teratur rapih, achirnja akan mendjadi kurang sempurna dan tidak lengkap. Wadjah sebuah TAKAH djuga mentjerminkan djiwa dari mereka yang mempergunakannya. Oleh karena itu, apabila terdjadi ketjerobohan dalam perlakuan TAKAH, maka yang berwenang harus segera mengambil tindakan seperlunya untuk perbaikan.

- b. Penggantian Sampul TAKAH. Djika oleh karena sesuatu hal sampul TAKAH mendjadi rusak/sobek/kotor, agar segera diganti dengan sampul baru dan menmpelkan halaman edaran sampul TAKAH yang lama dibagian dalam sampul TAKAH baru.

Lain-lain

22. Perlengkapan-<sup>2</sup> Sistim TAKAH.

- a. Buku-<sup>2</sup>/Kartu-<sup>2</sup> yang dipergunakan dalam sistim TAKAH adalah sebagai berikut :
- 1) Buku Registrasi Keluar.
  - 2) Buku Registrasi Masuk.
  - 3) Buku Indeks Persoalan.
  - 4) Buku TAKAH.
  - 5) Kartu Pemeriksaan Peredaran TAKAH.
  - 6) Kartu Adjukan Kembali.
  - 7) Sampul TAKAH.
  - 8) Lembaran Tjatatatan.
  - 9) Sampul Rahasia untuk TAKAH-<sup>2</sup> Rahasia.
  - 10) Sampul Rahasia untuk Surat-<sup>2</sup> Rahasia.
  - 11) Buku pengiriman.

/b. Pendjelasan .....

b. Pendjelasan mengenai perlengkapan-<sup>3</sup> sistim tata-naskah jang dimaksud dalam fasal 22 sub-fasal a adalah sebagai berikut :

- 1) *Buku Registrasi Keluar*, jang dibagi dalam 4 matjam buku jaitu :
  - a) Untuk surat-<sup>3</sup> biasa.
  - b) Untuk surat-<sup>3</sup> Sangat Rahasia, Rahasia dan Terbatas.
  - c) Untuk kawat-<sup>3</sup> biasa.
  - d) Untuk kawat-<sup>3</sup> Sangat Rahasia, Rahasia dan Terbatas.
- 2) *Buku Registrasi Masuk*.
  - a) Pendjelasan seperti diatas.
  - b) Nomor urut dalam buku registrasi masuk ditjatat disudut atas kanan pada naskah.
- 3) *Buku Indeks Persoalan*.
  - a) Harus disusun sendiri oleh pendjabat jang bersangkutan.
  - b) Berisi lembaran-<sup>3</sup> jang terbagi dalam kolom-<sup>3</sup> jang menjatakan :
    - 1) Nomor pokok persoalan.
    - 2) Nama pokok persoalan.
    - 3) Nomor dan anak persoalan.
- 4) *Buku TAKAH*.
  - a) Harus disusun tersendiri.
  - b) Berisi lembaran-<sup>3</sup> menurut nomor anak persoalan dimana dapat diisikan nomor-<sup>3</sup> perihal.
  - c) Djelasnja dalam buku TAKAH dapat dilihat banjarknja TAKAH jang dibuka dan pula banjarknja surat-<sup>3</sup> jang ada dalam tiap-<sup>3</sup> TAKAH.
- 5) *Kartu Pemeriksaan Peredaran TAKAH*.
  - a) Dibagi-bagi bersama-sama dengan sampul takah.
  - b) Pentjataan harus dilakukan dengan sangat teliti untuk mendjaga hilangnja/tertahannja suatu TAKAH atau guna menjusulkan surat-<sup>3</sup> jang baru diterima dan harus dimasukkan dalam suatu TAKAH jang sedang beredar.
- 6) *Kartu Adjukan Kembali*.
  - a) Pentjataan diatas kartu ini dilakukan setiap kali ada seorang pendjabat minta diajukan kembali suatu TAKAH tertentu pada suatu waktu jang tertentu.
  - b) *Tiap hari* harus diperiksa kartu jang bertanggal hari itu, sehingga tidak akan ada kelalaian dalam mengadakan kembali suatu naskah.
- 7) *Sampul TAKAH*.
  - a) Perlu ditjatat, bahwa dihalaman muka suatu sampul TAKAH, ruang „Dikirim kepada“, jang memberi paraf adalah „Si Pengirim“.

/b. Djika .....

- b) Djika persediaan sampul TAKAH sudah tipis agar segera meminta kepada Sekretaris Umum dan djangan menunggu sampai habis sama sekali.
- 8) *Lembaran tjatatan periksa fasal 10.*
- 9) *Sampul Rahasia untuk Peredaran TAKAH Rahasia.*
- Sampul rahasia* ini dimaksudkan sebagai sampul pertama (dalam waktu pengedaran, maka sampul rahasia ini dimasukkan lagi dalam „Stofmap“ sebagai sampul kedua (luar), sehingga kata „RAHASIA“ tidak terlihat dari luar.
  - Tali dibelakang sampul agar ditempel dengan kertas perekat (plak-band) atau transparent tape.
  - Hanja boleh dibuka oleh pendjabat jang berkepentingan atau anggauta jang olehnja diberi wewenang untuk penjelesaian *naskah<sup>2</sup> rahasia*.
  - Agar diatas sampul rahasia ini dibubuhi „Nama Pendjabat“ pembuka TAKAH, guna mendjaga hilangnya/tersangkutnja sampul tersebut.
- 10) *Sampul Rahasia untuk Pengiriman Naskah<sup>2</sup> Rahasia.*
- Dipergunakan untuk pengiriman *naskah<sup>2</sup> rahasia* jang harus dimasukkan dalam suatu TAKAH jang sedang beredar atau untuk mengirim *naskah<sup>2</sup> rahasia* kepada lain pendjabat.
  - Pemakaian sampul ini adalah sama dengan pemakaian sampul rahasia untuk peredaran TAKAH rahasia.
- 11) *Buku<sup>2</sup> Pengiriman.*
- Keperluannya sudah djelas dan dapat dipakai buku<sup>2</sup> pengiriman jang dulu dipergunakan sebelum adanya sistim TAKAH.
  - Tentang matjam dan djumlah terserah kepada para pendjabat masing<sup>2</sup> mengingat banjarknja lalu-lintas surat-menjurat.
- 12) *Buku Harian TAKAH.*
- Dipergunakan untuk mentjatat tiap<sup>2</sup> hari semua TAKAH jang dibuka dan diedarkan oleh pembuka TAKAH serta tanggal kembalinja.
  - Tudjuannya adalah untuk mengetahui TAKAH<sup>2</sup> mana jang telah melampaui batas waktu penjelesaiannya guna dibuatkan nota edaran TAKAH.
- 13) *Kotak<sup>2</sup> Kartu.* Untuk Kartu<sup>2</sup> seperti tersebut dalam fasal 22 sub fasal b sub-sub fasal 5) dan 6) diadakan kotak<sup>2</sup> kartu jang tepat untuk keperluan tersebut.

**Tjatanan :**

Guna melengkapi pedoman pelaksanaan sistim tata-naskah ini dilampirkan djuga bagan sistimatika pemakaian/penjelesaian *naskah<sup>2</sup>/surat<sup>2</sup>* masuk dan keluar, lihat lampiran CC.

Keterangan : Tanda kurung buka tutup (N-1), [N-1A(a)] dsb. sebetulnja adalah gambar bulatan.

T j o n t o h : (N-1), (N-1A(a))



## BAGIAN KELIMA

### PENJAMPAIAN BERITA

#### B A B I

#### U M U M

##### 1. Pendahuluan.

- a. Salah satu kegiatan yang penting dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum, adalah penjampanian berita.
- b. Wujud atau bentuk dari „penjampanian berita” dapat merupakan suatu perintah, permohonan, pertanjan atau tata-tjara lainnja yang diformulasikan dalam bentuk tulisan dinas maupun dalam bentuk lain.
- c. Oleh karena itu, perlu adanja suatu pedoman tentang penjampanian berita.

##### 2. Maksud dan Tudjuan.

- a. Maksud dari pedoman ini, adalah untuk memberikan pendjelaskan mengenai alat-<sup>2</sup> yang dipergunakan untuk penjampanian berita dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum.
- b. Tudjuan dari pedoman ini adalah untuk dapat mempergunakan alat/media setjara tepat serta mentjiptakan kerdja sama yang timbal-balik antara pendjabat yang satu dengan yang lain dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum.

##### 3. Pengertian.

- a. Penjampanian berita dalam istilah sehari-hari mempunjai arti sebagai komunikasi terbatas.
- b. Komunikasi dalam arti yang terbatas ini, merupakan suatu tjabang kegiatan dari komunikasi dalam arti yang luas yang disebut dengan istilah perhubungan.
- c. Ditindjau dari segi administrasi umum, komunikasi dalam arti terbatas, hanja mentjakup kegiatan-<sup>2</sup> khusus mengenai penggunaan alat-<sup>2</sup> untuk penjampanian berita beserta penjusunan sebelumnja dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum, sedangkan penyelenggaraan fungsi-<sup>2</sup> Staf Umum dibidang komunikasi dan elektronika termasuk tanggung djawab G-6/KOMLEK HAN-KAM.

#### B A B II

### STRUKTUR, AREA DAN MEDIA

##### 4. Struktur Penjampanian Berita. Sesuai dengan maksud dan tudjuan, struktur penjampanian berita mentjakup :

- a. Penjampanian berita setjara vertikal, jaitu arus penjampanian berita dari atas kebawah atau sebaliknja.

/ b. Penjampanian .....

- b. Penjampaian berita setjara horizontal, jaitu arus penjampaian berita dari pendjabat jang satu kepada pendjabat jang lain pada tingkat jang sama.
- 5. Area. Sjarat jang harus ditempuh pada proses penjampaian berita pada garis besarnja dapat dibagi dalam tiga area :
  - a. Lokal. Penjampaian berita dalam area lokal meliputi :
    - 1) Penjampaian berita *intern Kesatuan*, jaitu penjampaian berita dari pendjabat jang satu kepada pendjabat jang lain dalam satu kompleks/markas.
    - 2) Penjampaian berita *antar Kesatuan* dalam tempat jang sama.
  - b. Insuler. Penjampaian berita dalam area insuler, ialah penjampaian berita dari satu tempat ketempat jang lain, dalam satu pulau.
  - c. Interinsuler. Penjampaian berita dari satu pulau kepulau jang lain.
- 6. Fungsi dan matjam media. Berhubung adanja faktor djarak dan area, agar berita dari sipengirim dapat diterima dengan baik oleh sipenerima, perlu adanja alat/media jang berfungsi sebagai perantara dalam penjampaian berita tersebut. Di-lingkungan DEPHANKAM alat/media jang pada umumnja digunakan adalah :
  - a. Tjaraka.
  - b. Paktir.
  - c. Pos :
    - 1) Militer :
      - (a) Militer Angkatan/POLRI.
      - (b) Militer antar Angkatan/POLRI.
    - 2) Umum :
      - (a) PN Pos & Giro.
      - (b) PN Telkom & Telegrap.
  - d. Elektronika :
    - 1) Telepon.
    - 2) Telex.
    - 3) Radio Telegrap/Telepon.
  - e. Alat Audio Visual :
    - 1) Televisi.
    - 2) Slide dll.

### B A B III

#### ALAT/MEDIA PENJAMPAIAN BERITA

- 7. Efektivitas. Pada prinsipnja setiap penjampaian berita harus menempuh djalan jang efektif dengan selalu mengingat akan faktor-<sup>3</sup> :
  - a. Hemat (ekonomis).
  - b. Tjepat (waktu jang singkat).

/ c. Tepat .....



- c. Tepat (alamat tudjuan).
- d. Aman (sekuriti).

#### 8. Tjaraka.

- a. Tjaraka dalam pengertian luas pada azasnja adalah seorang pendjabat berpangkat Perwira jang diutus untuk menjampaikan, suatu berita/instruksi atau perintah dan dokumen dengan diberikan hak untuk membitjarakan/merundingkan dengan pendjabat jang bersangkutan.
- b. Tjaraka dalam pengertian terbatas adalah anggauta kesatuan jang diangkat diatas sumpah dengan tugas menjelenggarakan penjempaian berita/instruksi/perintah dan dokumen jang mempunyai tingkat klasifikasi tertentu dari satu kelain tempat.
- c. Sesuai dengan djenis tugasnja Tjaraka dibagi dalam 2 (dua) matjam ialah :
  - 1) Tjaraka tetap : Tugasnja diatur menurut route dan waktu jang telah ditetapkan.
  - 2) Tjaraka khusus :
    - a) Tugasnja tidak tergantung pada waktu.
    - b) Dapat diberangkatkan sewaktu-waktu dalam keadaan mendadak. Menurut kebutuhan Tjaraka tetap dapat digunakan untuk mengerdjakan tugas Tjaraka khusus atau sebaliknya.

#### d. Keanggautaan tjaraka.

- 1) Dalam memilih seorang tenaga/anggauta Tjaraka, harus diingat dan dipenuhi sjarat-<sup>2</sup> seperti berikut :
  - a) Mempunyai banjak inisiatif.
  - b) Dapat dipertjaja dan tabah serta taat.
  - c) Harus mempunyai keberanian, ketjakapan dan bakat berpikir dalam melakukan tugas pekerdjaannja.
  - d) Harus mengerti dan tjepat dalam menangkap perintah-<sup>2</sup> lisan.
  - e) Harus dapat segera mengikuti perobahan-<sup>2</sup> situasi/keadaan taktis dan dapat menggunakan kompas serta membatja peta.
- 2) Mengingat akan sjarat-<sup>2</sup> ketentuan-<sup>2</sup> tersebut dalam pasal 8 sub-fasal d sub-sub-fasal 1) tersebut diatas, maka untuk mendapatkan seorang tenaga Tjaraka jang tjukup baik, perlu diadakan pendidikan-<sup>2</sup>/latihan-<sup>2</sup> jang khusus mengenai persoalan Tjaraka.
- 3) Didalam keadaan jang luar biasa, maka untuk tugas Tjaraka istimewa atau Tjaraka khusus harus dipenuhi sjarat-<sup>2</sup> seperti berikut :
  - a) Semua sjarat-<sup>2</sup> jang tersebut dalam fasal 8 sub-fasal d sub-sub-fasal 1) tersebut diatas.
  - b) Perorangannja harus ditentukan terlebih dahulu.
  - c) Harus diingat tentang Pertimbangan Keadaan Taktis (PKT).

/ d) Harus .....

- d) Harus diingat tentang urgensinja tugas dan unsur-2 waktu serta bantjaknja berita jang harus disampaikan.
- 4) Keanggautaan Tjaraka adalah anggauta organik jang merupakan suatu kelompok sebagai unsur pelajanan utama kesatuannja.
- e. Tjara bekerdja.
  - 1) Penerimaan.
    - a) Surat-<sup>3</sup> jang boleh diterima hanjalah surat-<sup>2</sup> jang telah ditentukan oleh Bagian Sekretariat masing-<sup>3</sup> dengan tanda-<sup>2</sup>/kode-<sup>3</sup> menurut klasifikasi dan/atau deradjatnja.
    - b) Surat-<sup>3</sup> jang bersifat pribadi harus ada surat kuasa dari pendjabat jang mengirimnja.
    - c) Pada waktu menerima penjerahan surat-2, sebelumnja harus diperiksa dengan teliti :
      - (1) Sjarat-<sup>3</sup> tentang surat harus telah dipenuhi.
      - (2) Alamatnja harus djelas.
      - (3) Sampulnja harus dalam keadaan baik (tidak rusak).
    - d) Bila ketentuan-<sup>3</sup> tersebut dalam fasal 8 sub-fasal e sub-sub-fasal 1) sub-sub-sub fasal c) tersebut diatas, salah satu diantaranya ada jang belum dipenuhi, maka surat-<sup>2</sup> tersebut harus ditolak dan diberi keterangan tentang kekurangan-<sup>3</sup> jang harus dipenuhi.
    - e) Surat-<sup>3</sup> jang telah memenuhi sjarat-<sup>3</sup>, selandjutnja pada sampul muka sebelah kiri bawah harus dibubuhi *nomor tjatatan* DINAS-TJARAKA dengan menggunakan potlot merah/biru dan demikian pula pada/dalam buku ekspedisi dari sipengirim, jang berisi tjatatan Surat-2 jang telah memenuhi sjarat-<sup>3</sup> itu, harus diberi nomor tjatatan jang bersamaan.
    - f. Untuk bukti penerimaan, maka dalam buku ekspedisi dari sipengirim harus diberi/dibubuhi tandatangan dan nama terang dari pendjabat Tjaraka jang menerimanja serta dibubuhi tjap-harian didalamnya.
  - 2) Tjara menjimpan dan membawa surat-<sup>2</sup> oleh Tjaraka Militer :
    - a) Tjara menjimpan surat-<sup>3</sup> harus dimasukkan didalam Tas-Tjaraka jang terkuntji dan/atau tertutup rapat, sehingga tidak mudah ditjuri dan tidak tembus air.
    - b) Dalam keadaan luar biasa, surat-<sup>2</sup> tersebut harus diselipkan didalam tempat lain jang terlebih dahulu telah ditentukan oleh Kepala atau Komandan, dengan maksud agar sewaktu-waktu bila Tjaraka tersebut mendapat ketjelakaan atau gugur, dapat mudah untuk ditjarinja.
    - c) Demi kepentingan security atau keamanan, maka Tas-Tjaraka jang berisikan surat-<sup>2</sup> tidak boleh djaruh ketangan orang lain.

/ d) Tas .....

- d) Tas-Tjaraka tidak boleh digunakan untuk tempat duduk (diduduki) atau untuk sandaran dan lain sebagainya, hal ini untuk mentjegah kerusakan, baik kerusakan Tas-Tjaraka itu sendiri maupun isinja surat-<sup>3</sup>.
  - e) Dalam keadaan luar biasa misalnja bila Tjaraka tertawan oleh musuh, sedapat mungkin surat-<sup>3</sup> tersebut harus segera dimusnahkan dengan tjara :
    - (1) Surat-<sup>3</sup> tersebut supaja dibakar dan abunja di-indjak-<sup>3</sup>.
    - (2) Djika perlu surat-<sup>2</sup> tersebut harus dikunjah-kunjah dan ditelan.
    - (3) Dengan tjara lain jang lebih sempurna dengan maksud agar musuh tidak dapat merampas surat-<sup>2</sup>/dokumen-<sup>2</sup> jang dibawanja.
- 3) Djalan jang ditempuh.
- a) Pada prinsipnja, tjarakas harus menempuh djalan jang aman dan tjepat (singkat) dalam menunaikan tugasnja. Maka dari itu harus selalu diingat akan faktor-<sup>3</sup> :
    - (1) Tjepat — (djalan jang singkat).
    - (2) Tepat — (waktunja); dan
    - (3) Selamat — (keamanan)
  - b) Tjaraka harus memberitahukan kepada Kepala/Komandan mengenai djalan-<sup>3</sup> jang akan ditempuhnja :
    - 1) Menurut peta Bumi; atau
    - 2) Menurut route jang telah ditentukan oleh Kepala/Komandan.
  - c) Djika keadaan memungkinkan, maka Tjaraka harus menempuh djalan jang bersamaan dengan djalan-<sup>3</sup> jang ditempuh oleh Tjaraka lainnja. Hal ini amat berguna, karena djika seorang Tjaraka terhalang didjalan (misalnja : mendapat ketjelakaan atau kerusakan kendaraan didalam dapat pula menjerahkan surat-<sup>3</sup> jang dibawanja kepada Tjaraka tersebut untuk diteruskan lebih landjut pengirimannja kepada alamat penerima. Dengan demikian maka kelambatan-<sup>3</sup> dapat ditjegah.
- 4) Penjerahan surat-<sup>3</sup>.
- a) Surat-<sup>3</sup> jang dibawa oleh Tjaraka hanja dapat diserahkan kepada jang berhak menerimanja. Dan untuk bukti tanda penjerahan/penerimaan surat-<sup>3</sup>, maka sipenerima diharuskan mendatangi dan membubuhi nama terang selengkapnja dengan menjebutkan pangkat, NRP, djabatan tanggal dan djam penerimaan pada surat pengantar jang diadjudkan oleh Tjaraka tersebut.
  - b) Bagi surat-<sup>3</sup> pribadi (jang penjerahannja langsung kepada pendjabat jang bersangkutan), harus diserahkan setjara pribadi pula. Artinja djika pendjabat jang bersangkutan tadi tidak ada ditempat, maka Tjaraka harus mentjarinja sampai dapat bertemu sendiri.
  - c) Djika ketentuan tersebut dalam fasal 8, sub-fasal e, sub-sub fasal 4)

/ sub-sub-sub-fasal b) ... ..

sub-sub-sub- fasal b) diatas tidak mungkin dilakukan, maka Tjaraka tersebut harus kembali ketempatnja semula dengan memberikan laporan kepada Kepala/Komandannja.

- d) Bagi surat-<sup>2</sup> tersebut dalam fasal 8, sub fasal e, sub-sub fasal 4), sub-sub-sub fasal b) diatas dapat pula diserahkan kepada wakilnja atau pendjabat Sekretariat, apabila sebelumnya/terlebih dahulu telah mendapat persetudjuan atau pemberitahuan dari pihak pendjabat jang mengirimkannya.
- e) Apabila Tjaraka akan menjampai surat-<sup>2</sup> pribadi kepada seorang pendjabat jang sedang berbitjara dengan pendjabat/orang lain, maka Tjaraka tadi dibenarkan untuk memutuskan pembijtaraan itu dengan memberikan laporan, bahwa ada „surat-penting” untuk pendjabat jang bersangkutan.

5) Selesai mendjalankan tugas.

- a) Setelah Tjaraka selesai mendjalankan tugasnja, maka Tjaraka tersebut diharuskan :
  - (1) melaporkan diri; dan
  - (2) menjerahkan kembali surat-<sup>2</sup> pengantar; kepada Kepala Kelompok Tjaraka/Bagian Sekretariat jang bersangkutan.
- b) Djika didalam mendjalankan tugas, Tjaraka mendapat halangan dan/atau terdjadi hal jang mungkin dialami (misalnja : kehilangan surat-<sup>2</sup> didalam perdjalan dan lain-<sup>2</sup> sebagainya); maka Tjaraka tersebut disamping melaksanakan ketentuan-<sup>2</sup> fasal sub fasal e sub-sub fasal 5) sub-sub-sub fasal a) (1) dan (2) diatas, ia diharuskan pula membuat laporan tertulis berupa „Berita — Atjara” guna bahan bukti pertanggungan-djawab oleh Kepala Kelompok Tjaraka kepada sipe-ngirim surat/berita dan atau kepada alamat penerima jang bersangkutan.

f. Perlengkapan.

- 1) Demi kelantjaraan tugas dan keamanan surat-2 DINAS TJARAKA harus mempunjai suatu ruangan tersendiri, jang dimukanja terdapat papan-nama „DINAS-TJARAKA”.
- 2) Tjaraka dilengkapi dengan alat-<sup>2</sup> sebagai berikut :
  - a) Tas-Tjaraka jang dapat dikuntji/ditutup rapat, tidak mudah ditjuri dan tidak tembus air.
  - b) Djamtangan.
  - c) Sepeda motor atau Jeep dan Stationwagen.
  - d) Topibadja dan katjamata.
  - e) Djaketkulit.
  - f) Perabumi.        )
  - ) Fakultatif.
  - g) Kompas         )

3) Alat-2 .....

- 3) Alat<sup>2</sup> tersebut dalam fasal 8 sub fasal f sub-sub fasal 2) diatas termasuk dalam pertanggung-djawab sebagai alat<sup>2</sup> inventaris dan harus selalu mendapat pemeliharaan/perawatan jang baik dan memuaskan. Oleh karena itu setiap tahun sekali harus dibuat suatu laporan tertulis berupa daftar inventaris alat<sup>2</sup> kelengkapan Tjaraka, selandjutnja oleh Kepala Kelompok Tjaraka laporan tersebut dikirimkan kepada KA/DAN-nja.
- 4) Untuk mendjaga kesehatan badan djasmani dari para petugas tjaraka jang setiap harinja mengendarai speda motor (motorijders), maka kepadanya disediakan dan diberikan extravoeding jang ditentukan oleh Dokter Militer (vide surat keterangan Dokter Militer). Extravoeding tersebut dapat berupa : telur-ajam, susu, katjang-hidjau dan lain<sup>2</sup>nja.

g. Administrasi.

- 1) Buku Dislokasi. Untuk memudahkan dan melantjarkan penjampaian surat<sup>2</sup> atau kiriman<sup>3</sup> lainnja, perlu diadakan *buku dislokasi* jang berisikan daftar Kesatuan<sup>3</sup> dan Instansi<sup>3</sup> Militer serta Pendjabat<sup>3</sup> penting. Setiap ada perubahan harus selalu dilakukan pentjataan. Setahun sekali buku dislokasi tersebut harus disusun kembali dan diperbaharui.
- 2) Administrasi.
  - a) Untuk keberesan pembukuan<sup>2</sup> tentang penjampaian kiriman surat<sup>2</sup>, perlu diadakan/diselenggarakan administrasi jang teratur rapih.
  - b) Buku<sup>2</sup> jang dipergunakan untuk keperluan administrasi itu, ialah buku<sup>2</sup> seperti berikut :
    - (1) Buku penerimaan surat<sup>2</sup>. Gunanja untuk mentjatat tiap<sup>2</sup> surat/berita jang dikirim (jang diterima dari Bagian Sekretariat untuk dikirimkan lebih landjut).
    - (2) Buku Agenda Surat-Pengantar. Gunanja untuk mentjatat pemberian nomor agenda pada surat pengantar.
    - (3) Surat Pengantar. Gunanja untuk tanda-bukti penjerahan surat<sup>2</sup>.
    - (4) Ichtsiar Surat. Gunanja untuk mentjatat djumlah semua surat<sup>2</sup> berita dalam tiap<sup>2</sup> bulan.
  - c) Lampiran<sup>2</sup>. Tjontoh<sup>2</sup> tentang buku<sup>2</sup> tersebut dalam fasal 8 sub fasal g, sub-sub fasal 2) sub-sub-sub fasal b) (1) s/d (4) diatas adalah seperti tertjantum dalam lampiran petundjuk pelaksanaan ini.
- 3) Laporan. Tiap<sup>2</sup> bulan Kepala Kelompok Tjaraka harus mengirimkan laporan tertulis kepada KA/DAN-nja mengenai :
  - a) Kegiatan DINAS-TJARAKA.
  - b) Personil.
  - c) Perlengkapan.
  - d) Kesulitan<sup>2</sup>.
  - e) Usul<sup>2</sup> dan
  - f) Lampiran ichtsiar surat<sup>2</sup>.

9. Paktir.

a. Paktir adalah seorang Bintara/Tamtama jang diangkat diatas sumpah dengan tugas mendjamin kelantjaran pengiriman dan pengambilan pos antara kesatuan dengan Pos Militer/PN Pos & Giro dan sebaliknya.

b. Perlengkapan Paktir. Demi kelantjaran tugas Paktir, maka Paktir harus dilengkapi sbb. :

- 1) Sebuah ruangan-kerdja dengan papan-nama „PAKTIR” jang dipasang di luar ruang tersebut.
- 2) Bis surat; jang dipasang sedemikian rupa, sehingga :
  - a) Surat-<sup>3</sup> kiriman-<sup>2</sup> pos biasa dapat dengan mudah dimasukkan ke-dalamnja.
  - b) Keamanan surat-<sup>3</sup> kiriman dapat terdjamin, djika keadaan setempat memerlukan, maka pada malam hari dapat diberikan penerangan.
  - c) Tiap-<sup>3</sup> bis surat harus :
    - (1) diberi tanda tulisan „BIS SURAT”.
    - (2) mempunjai tjelah dengan ukuran  $20 \times 4$  cm.
    - (3) dilengkapi dengan alat penutup dan dikuntji.
  - d) Djam angkat bis surat harus dinjatakan dengan angka.

Tjontoh :	ke I	djam	08.30
	ke II	djam	13.00
	ke III	djam	17.00

- 3) Buku daftar personil, buku-<sup>2</sup> pengantar dan perlengkapan alat tulis menulis.
- 4) Tas-surat.
- 5) Sepeda atau sepeda motor.
- 6) Sebuah buku tarif pos (jang dapat dibeli di PN POSTEL).
- 7) Uang pandjar untuk membeli benda-<sup>2</sup> pos untuk kebutuhan anggauta-anggauta jang memerlukan dengan harga menurut tarif pos jang ada.

c. Tjara bekerdja Paktir. Untuk melaksanakan tugas-<sup>3</sup> tersebut diatas, maka Paktir diwadjibkan :

- 1) Pengiriman kiriman-<sup>2</sup> pos.
  - a) Memeriksa kiriman-<sup>2</sup> pos satu per satu, apakah kiriman-<sup>3</sup> pos tersebut memenuhi sjarat-<sup>3</sup> jang diperlukan; kiriman-<sup>3</sup> pos jang tidak memenuhi sjarat harus dikembalikan kepada sipengirim dengan disertai pendjelasan-<sup>2</sup> seperlunja (tertulis maupun lisan).
  - b) Mengantar kiriman-<sup>2</sup> dinas untuk alamat dalam Garnizoen dengan mentjatat kiriman-<sup>2</sup> tersebut dalam buku pengantar dalam Garnizoen.
  - c) Mentjatat kiriman-<sup>2</sup> dinas untuk alamat luar Garnizoen dalam buku pengantar luar Garnizoen, dan menjerahkan kiriman-<sup>2</sup> tersebut kepada Kantor Pos Militer (KORPOS MIL).

/ 2) Penerimaan

2) **Penerimaan kiriman-<sup>3</sup> Pos :**

- a) Menjerahkan kiriman-<sup>3</sup> dinas kepada jang bersangkutan disertai surat pengantar sebagai bukti penerimaan.
- b) Kiriman-<sup>3</sup> tertjatat, terdaftar, poswesel, pospaket dan/atau surat panggilannja diserahkan langsung kepada jang berhak, dengan menggunakan buku pengantar jang khusus untuk kiriman-<sup>2</sup> tersebut.
- c) Kiriman-2 pos biasa diserahkan kepada alamat dengan djalan langsung atau melalui bagian-<sup>2</sup> dimana si alamat berada.

3) **Penjulsulan/pengiriman kembali :**

- a) Menjulsulkan, mengembalikan kiriman-<sup>2</sup> pos jang disebabkan oleh perobahan atau kurang djelasnja alamat kepada KORPOS-MIL, disertai tjatatan pada sehelai kertas jang ditempelkan dimuka alamat dan dibubuhi paraf sebagai penanggung djawab.

*Tjontoh :*

- (1) Disusulkan ke JON 324.
  - (2) Kembali sipengirim — alamat tidak djelas.
  - (3) Kembali sipengirim — alamat tersebut tidak ada
  - b) Paktir tidak diperkenankan mentjoret, merobah atau menambah alamat pada kiriman-<sup>3</sup> Pos jang akan dikembalikan/disusulkan kepada KORPOS MIL.
- 4) **Porto denda :** Pada waktu menerima kiriman-<sup>3</sup> pos dari KORPOS MIL, djika perlu Paktir membajar porto denda dari kiriman-<sup>3</sup> pos jang tidak berporto. Paktir memungut kembali sebesar porto denda itu dari si alamat dalam penjerahan kiriman-<sup>2</sup> pos tersebut.

d. *Administrasi.*1) **Buku daftar personil :**

- a) Buku daftar Personil jang berisi nama-<sup>2</sup> personil jang tergabung dalam kesatuannja bersifat sementara atau seterusnya jang disusun menurut abjad; buku daftar personil memuat kolom-<sup>2</sup> sebagai berikut :

NOMOR URUT  
NAMA  
PANGKAT  
NRP  
BAGIAN-BAGIAN  
KETERANGAN

- b) Pada kolom keterangan dipergunakan untuk mentjatat perobahan personil, misalnja : pemindahan, perbantuan tugas dilain kesatuan tjuti dirawat dirumah sakit, meninggal dan lain sebagainja, jang pada pokoknja mentjatat personil-<sup>3</sup> jang tidak ada dalam kesatuannja baik untuk waktu jang terbatas maupun jang untuk seterusnya.

2) **Buku .....**

- 2) **Buku Pengantar Dalam Garnizoen :**
  - a) Buku Pengantar Dalam Garnizoen hanya dipakai untuk menjerahkan kiriman-<sup>3</sup> kepada kesatuan-<sup>3</sup> Militer setempat.
  - b) Buku Pengantar Dalam Garnizoen memuat kolom-<sup>2</sup> : Tanggal, Nomor Urut, Nomor Surat, Kepada dan Tanda-tangan penerima (Nama terang dibawahnja).
- 3) **Buku Pengantar luar Garnizoen :**
  - a) Buku Pengantar luar Garnizoen hanya dipakai untuk menjerahkan kiriman-<sup>3</sup> pos kepada KORPOSMIL.
  - b) Buku Pengantar luar Garnizoen memuat kolom-<sup>2</sup> : Tanggal Nomor Urut, Nomor Surat, Kepada, Nomor tjabatatan KORPOSMIL, Tanda-tangan penerima (Nama terang dibawahnja).
- 4) **Buku Pengantar Kesatuan :**
  - a) Buku Pengantar Kesatuan hanya dipakai untuk menjerahkan kiriman-<sup>2</sup> kepada kesatuan.
  - b) Buku Pengantar Kesatuan memuat kolom-<sup>2</sup> seperti dalam Buku Pengantar Dalam Garnizoen.
- 5) **Buku Pengantar Tertjabat/Terdaftar :**
  - a) Buku Pengantar Tertjabat/Terdaftar hanya dipakai untuk menjerahkan kiriman-<sup>2</sup> Tertjabat/Terdaftar.
  - b) Buku Pengantar Tertjabat/Terdaftar memuat kolom-<sup>2</sup> : Tanggal Nomor Urut, Nomor Tertjabat/Terdaftar, Tanggal Alamat Pengirim, Alamat Penerima, Tanda-tangan Penerima, Pangkat, NRP dan Nama terang dibawahnja.
- 6) **Buku Pengantar Poswesel :**
  - a) Buku Pengantar Poswesel hanya dipakai untuk menjerahkan poswesel.
  - b) Buku Pengantar Poswesel memuat kolom-<sup>2</sup> : Tanggal, Nomor Urut, Nomor Poswesel/Nomor Seri, Banjaknja, Alamat Pengirim, Alamat Penerima, Tanda-tangan Penerima, Pangkat, NRP dan Nama terang dibawahnja.
- 7) **Buku Pengantar Pospaket :**
  - a) Buku Pengantar Pospaket hanya dipakai untuk menjerahkan Pospaket.
  - b) Buku Pengantar Poswesel memuat kolom-<sup>2</sup> : Tanggal, Nomor Urut, Nomor Pospaket, Nomor Seri dan Tanggal Pospaket, Alamat Pengirim, Alamat Penerima, Tandatangan Penerima, Pangkat, NRP dan Nama terang dibawahnja.
- c) **Surat Keterangan Paktir.**
  - 1) Tiap Paktir harus mempunyai surat Keterangan Paktir jang merupakan Surat Kuasa dari Komandan Kesatuannya.

/ 2) Pada .....



- 2) Pada Pengambilan kiriman<sup>1</sup> pos, Paktir harus selalu dapat memperlihatkan Surat Keterangan Paktir: kepada Pendjabat KORPOSMIL djika diperlukan.
  - 3) Surat Keterangan Paktir hanja berlaku di KORPOSMIL setempat. Pada tiap<sup>2</sup> pemindahan kelain daerah, maka Surat Keterangan tersebut harus diperbaharui di KORPOSMIL setempat/baru; Surat Keterangan Paktir harus diperbaharui sekurang<sup>3</sup>nja setahun sekali terhitung pada tanggal pengeluaran Surat Keterangan tersebut.
10. *Pos*. Pengertian alat/media Pos terbagi atas :
- a. Pos Umum, adalah kegiatan dinas pos ingg dapat digunakan dalam penjam-paian berita dilingkungan DEPHANKAM berdasarkan persetujuan (per-djandjian pos bersama/Postal agreement).
  - b. Pos Militer Angkatan/POLRI adalah untuk mendjamin kelantaran dinas pos dalam Angkatan/POLRI itu. Dalam melaksanakan tugasnja, dapat bekerdja sama dengan P.N. Pos & Giro. Dengan demikian segala ketentuan<sup>3</sup> khusus jang berlaku dalam penyelenggaraan Pos Umum harus ditaati pula oleh Pos Militer Angkatan/POLRI.
  - c. Pos Militer antar Angkatan/POLRI (Pos Militer ABRI) adalah satu badan untuk mendjamin kelantaran dinas pos dalam lingkungan DEPHANKAM.  
*Tjatakan* : Dengan tidak mengurangi arti penting media<sup>2</sup> penjam-paian berita lain<sup>3</sup>nja maka khusus bagi media *pos* disamping fungsinja sebagai salah satu alat penjam-paian berita kiriman dinas mentjakup pula aspek moril pradjurit dalam memelihara hubungan individu (perorangan).
11. *Elektronika*. Dengan alat/media elektronika dimaksud bahwa penjam-paian berita dikirimkan melalui hubungan elektro dimana sifatnja dibatasi dan bertudjuan pada segi urgensi. Dengan alat ini tertjakup didalamnja :
- a. Telepon, baik hubungan telepon jang diselenggarakan oleh P.N. POSTEL maupun hubungan telepon khusus jang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Angkatan/POLRI/HANKAM.
  - b. Telex, baik jang diselenggarakan oleh P.N. TELEPON & TELEGRAM maupun jang diselenggarakan Dinas Perhubungan Angkatan/POLRI/HANKAM.
  - c. Telegram, baik jang diselenggarakan oleh P.N. TELEPON & TELEGRAM maupun jang diselenggarakan Dinas Perhubungan Angkatan/POLRI/HANKAM.
  - d. Radio Telepon/Telegram, baik jang diselenggarakan oleh P.N. TELEPON & TELEGRAM, baik jang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Angkatan/POLRI/HANKAM.
12. *Audio Visual (A.V.)*. Dengan alat A.V. dimaksud agar penjam-paian berita disam-ping dapat didengar djuga dapat dilihat. Dalam golongan ini termasuk alat/media maupun Televisi, Slide dll.

Penggunaan alat/media tersebut harus disesuaikan dengan sifat dan tudjuan agar diketahui umum, maka penggunaan media ini dapat dipertanggung-djawabkan.

13. *Penentuan Media.* Untuk tertjapainja pelaksanaan penjampaian berita dengan mengingat kepada prinsip-<sup>2</sup> hemat, tjepat, tepat dan aman, maka didalam penentuan penggunaan media/alat harus pula disesuaikan dengan areanja :

- a. Penjampaian berita dalam area :

*Lokal.* Pada Pelaksanaan penjampaian berita dalam area lokal maka media jang setepat-tepatnja digunakan adalah :

- 1) Tjaraka, dipergunakan untuk penjampaian berita pada seluruh tingkat klasifikasi tetapi terbatas pada deradjat BIASA dan SEGERA.
- 2) Tjaraka khusus dipergunakan untuk :
  - a) Penjampaian berita pada seluruh tingkat klasifikasi tetapi dengan deradjat KILAT dan SANGAT SEGERA.
  - b) Penjampaian berita jang langsung kepada Pendjabat jang ditudju.
- 3) Paktir dipergunakan untuk menjampaikan berita dari kesatuan-<sup>2</sup> ke Pos Militer Angkatan/POLRI/Umum dan sebaliknya.
- 4) Pos Militer Angkatan/POLRI dan Pos Militer ABRI di HANKAM, dipergunakan untuk penjampaian berita pada seluruh tingkat klasifikasi.
- 5) Telepon/radio telepon dipergunakan untuk penjampaian berita setjara horizontal dan vertikal.

- b. Penjampaian berita dalam area :

*Insuler.* Dalam lingkungan area ini dengan memperhatikan tingkat klasifikasi dan deradjat, dapat dipergunakan alat-<sup>2</sup> media :

- 1) Tjaraka khusus.
- 2) Pos Militer Angkatan/POLRI atau Pos Militer ABRI.
- 3) Telepon.
- 4) Telegrap.
- 5) Telex.
- 6) Radio telepon/telegrap.

- c. Penjampaian berita dalam area :

*Interinsuler.* Dalam lingkungan ini dengan memperhatikan tingkat-tingkat klasifikasi dan deradjat dapat dipergunakan alat/media :

- 1) Tjaraka khusus.
- 2) Pos Militer Angkatan/POLRI atau Pos Militer ABRI.
- 3) Telegrap.
- 4) Telex.
- 5) Radio telepon/telegrap.

Dengan tidak meninggalkan prinsip-<sup>2</sup> ekonomi, maka penjampaian berita dalam area interinsuler dapat djuga mempergunakan :

/ 1) Tjaraka .....

- 1) Tjaraka khusus, apabila dititik-beratkan kepada faktor keamanan.
- 2) Radio telepon, apabila berita yang akan disampaikan bersifat perintah dari atasan kepada bawahan dan yang memerlukan aksi pada waktu itu juga atau berita yang berklasifikasi biasa.

## B A B IV

### KETENTUAN-<sup>2</sup> KHUSUS

14. *Dasar.* Dasar kedinasan Pos Umum pada pokoknya berlandaskan pada Undang-<sup>3</sup> Pos No. 4 tahun 1959 dan dengan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1959 (P.P. No. 26/1959) ditetapkan ketentuan-<sup>3</sup> mengenai Pos Dalam Negeri. Dasar kedinasan Pos Militer Angkatan/POLRI pada umumnya berdasarkan kepada Peraturan-<sup>3</sup> dari masing-<sup>3</sup> Angkatan/POLRI yang diserahkan kepada P.N. Pos untuk dilaksanakan/ditaati, sedangkan perumusan kearah kerdja sama yang ditetapkan dalam suatu bentuk Postal Agreement masih akan dirintis. Untuk terlaksanannya Pos Militer Angkatan/POLRI dan Pos Militer ABRI yang baik sudah sewadjarnya diikuti/ditaati ketentuan-<sup>3</sup> yang tertantum dalam Undang-<sup>3</sup> No. 4 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1959 tersebut diatas.
15. *Pengertian.* Beberapa pengertian yang tertantum didalam P.P. No. 26/1959 antara lain telah ditentukan beberapa pengertian sebagai berikut :
  - a. Surat : berita yang bersifat aktuil dan pribadi dimuat diatas kertas, perkamen atau bahan-bahan lain yang sedjenis, bersampul ataupun tidak, sedjauh tidak tergolong dalam djenis yang ditentukan dalam fasal 15 sub fasal b sampai j dan bukan pula poswesel atau kwitansi pos.
  - b. Warkatpos : surat yang memenuhi sjarat-sjarat khusus yang ditetapkan oleh Direktur Djenderal.
  - c. Kartupos : berita yang dimuat pada kartu yang tidak bersampul, sedjauh tidak tergolong dalam djenis barang tjerakan, suratkabar atau braille, serta bukan pula poswesel atau kwitansi.
  - d. Dokumen : naskah yang seluruhnya atau sebagiannya ditulis, ditik atau digambar, yang tidak bersifat surat-menjurat yang bersifat aktuil dan pribadi, dan tidak tergolong dalam djenis poswesel atau kwitansi pos, misalnja : surat terbuka dan kartupos tua yang sudah terpakai untuk tudjuannya semula atau salinannya, berita-atjara, semua akta yang dimuat oleh atau dihadapan pegawai umum, surat angkutan atau konosemen, faktur-faktur, naskah-naskah, tertentu dari maskapai asuransi, salinan atau petikan akta-akta dibawah tangan yang dibuat atas kertas bermeterai atau tidak, partitur atau lembar-lembar musik yang tertulis, naskah penerbitan atau surat-kabar yang dikirim tersendiri, pekerjaan murid-murid yang asli dan yang telah diperiksa, ketjuali yang memuat

/ sesuatu .....

sesuatu petundjuk jang tidak langsung mengenai penjelenggaraan pekerdjaan itu.

- e. Barang tjetakan : hasil pertjetakan jang berganda atas kertas, perkamen atau bahan-bahan lain jang sedjenis alat pertjetakan termasuk fotografi, dengan menetjualikan hasil jang didapat dengan djalan kalkiran, tjaptangan dengan huruf-huruf terlepas atau tidak terlepas dan dengan mesin tulis.
- f. Surat kabar : Barang tjetak jang diterbitkan paling sedikit satu kali sebulan takwin sebagai warta-harian atau madjalah, ketjualian penerbitan untuk keperluan perdagangan seperti katalogus, prospektus, daftar harga dan lain-lain sebagainja, dan ketjualian pula lembaran-lembaran iklan atau reklame jang disisipkan dalam warta-harian atau madjalah.
- g. Fonopos : piringan gramopon, pita atau kawat jang memuat rekaman berita, njanjian, musik dan lain-lain sebagainja dari orang jang mengirimnja.
- h. Braille : ulisan atau tjetakan braille termasuk berita jang bersifat aktuil dan pribadi diatas kertas, perekamen, atau bahan-2 lain jang sedjenis.
- j. Bungkus : kiriman jang dimaksudkan untuk pengiriman benda-<sup>2</sup> ketjil.
- k. Suratpos : surat, warkatpos, kartupos, dokumen, barang tjetakan, surat kabar, fonopos, braille dan bungkus.
- l. Suratpos dinas : suratpos mengenai kepentingan dinas pemerintahan atau kepentingan umum jang dibebaskan dari pembayaran porto setjara tunai.
- m. Pospaket : kiriman jang dimaksudkan untuk pengiriman barang-<sup>2</sup>.
- n. Kiriman pos : surat pos dan pospaket.
- o. Pos : nama himpunan untuk kiriman suratpos dan pospaket.
- p. Porto : biaja jang harus dibayar kepada dinas pos untuk mengangkut surat pos dan pospaket.
- q. Bea : bea jang harus dibayar kepada Dinas Pos untuk pekerdjaan-<sup>2</sup> lain.
- r. Dinas pos meliputi :
  - 1) Dinas suratpos, termasuk pentjataan, pertanggungan harga dan tebusan.
  - 2) Dinas pospaket, termasuk pertanggungan harga dan tebusan.
  - 3) Dinas poswesel.
  - 4) Dinas kwitansipos, dan
  - 5) Dinas-<sup>2</sup> lain untuk memenuhi kebutuhan masjarakat dan pemerintah jang akan diatur oleh Direktur Djenderal dengan persetudjuan Menteri.
- s. Bebas Porto. Bebas porto hanja berarti pembebasan pembayaran porto setjara tunai. Dengan disertai beberapa ketentuan dapat dikirim dengan bebas porto antara lain :
  - 1) Suratpos Dinas.
  - 2) Warkatpos Militer.
  - 3) Kartupos Militer.
  - 4) Sampul berita keluarga, dalam keadaan tertentu dapat dikirim bebas porto.

/ 16. Wewenang. ....

16. **Wewenang.** Wewenang untuk mengirim suratpos dinas dapat bersifat :
- Umum**, yaitu semua djenis suratpos diperkenankan dan dapat ditudjukan kepada semua alamat.
  - Terbatas**, yaitu tidak semua djenis suratpos dinas diperkenankan dan hanya dapat ditudjukan kepada alamat-<sup>2</sup> tertentu. **MENHANKAM/PANGAB** menundjuk pendjabat-pendjabat/badan-<sup>3</sup> yang diberikan kewenangan mengirim suratpos dinas bebas porto dan daftar pendjabat tersebut disampaikan kepada **DIR-DJEN P.N. Pos & GIRO** dengan menjebutkan sifat kewenangan itu. Dalam hal kewenangan terbatas disebut pula djenisnja suratpos dan alamat-<sup>2</sup> tertentu.
17. **Isi Suratpos dinas.** Isi Suratpos dinas mengenai kepentingan dinas pemerintahan atau kepentingan umum yang dibebaskan dari pembayaran porto setjara tunai. Sebagai dasar umum, harus dianggap bahwa para pengirim surat-<sup>2</sup> dinas harus mengambil pendirian orang swasta, sehingga tiap kiriman yang tak perlu, harus dihindarkan. Djika pengirim akan mengirim lebih dari satu surat dinas untuk alamat yang sama (kesatu alamat), maka surat-<sup>2</sup> itu harus diusahakan ditutup dalam satu sampul.
- Djadi hanya dibolehkan sebagai pengetjualian, bahwa oleh satu orang pengirim ditundjukan disuatu kantorpos sekaligus lebih dari satu surat dinas untuk seorang, dengan alamat yang sama. Ditempat-tempat yang tidak mempunyai perhubungan pos tiap hari, pengirim sedapat mungkin harus mengumpulkan surat-suratpos untuk sialamat yang sama sampai hari pengirimannya.
18. **Petundjuk Dinas dan Tjap Djabatannya.** Setiap suratpos dinas disamping diberi nomor surat dan tanggal harus dibubuhi pada bagian alamat :
- Disebelah kiri atas : petundjuk „DINAS” dan
  - Disebelah kiri bawah : teraan tjap djabatannya dari sipengirim.
- Surat dinas dan kartupos dinas yang dialamatkan kepada orang Swasta dan pengirimannya dilakukan seluruhnja atau sebagiannja untuk kepentingan sialamat, dibubuhi huruf „T” pada bagian alamat sebelah kanan atas. Suratpos dinas yang sedemikian diserahkan kepada sialamat dengan memungut porto sebesar djumlah yang harus dibayar djika suratpos dinas itu dikirim sebagai kiriman biasa. Pengirim suratpos dinas bertanggung djawab penuh atas pemakaian tjap djabatannya.
19. **Pengiriman terdaftar.** Semua suratpos dinas pada azasnja diharuskan dikirim se tjara terdaftar artinja bahwa penundjukan/pengirimannya pada kantorpos Militer/pos umum dilakukan dengan buku pengantar yang berisikan tjatatan-<sup>2</sup> tentang Pengiriman suratpos dinas tersebut.
20. **Pelanggaran-<sup>2</sup>.** Setiap Pendjabat Pos Militer dalam mendjalankan tugasnja diwajibkan memberitahukan setiap pelanggaran kepada para pendjabat yang berkuasa atau berhak.

## B A B V

### PERTANGGUNGAN DJAWAB

21. *Tjaraka*. Bertanggung jawab terhadap berita<sup>-2</sup>/surat<sup>-3</sup> dalam waktu jang terbatas, jaitu sedjak berita/surat<sup>-3</sup> tersebut diserahkan oleh sipengirim kepada Dinas Tjaraka sampai dengan saat penjerahan oleh Dinas Tjaraka kepada sialamat/pendjabat jang ditudju. Hal ini dapat diteliti dan dibuktikan dalam buku ekspedisi dari sipengirim dan dalam buku ekspedisi penjerahan dari dinas Tjaraka kepada pendjabat jang ditudju.
22. *Pakir*. Bertanggung jawab kepada Komandan Kesatuannya masing<sup>-2</sup> atas pelaksanaan tugasnja.
23. *Pos Militer Angkatan/POLRI*. Bertanggung jawab atas sampainja pengiriman<sup>-2</sup> dari Kantor Pos Militer Angkatan/POLRI jang satu ke Kantor Pos Militer Angkatan/POLRI jang lain. Semua kelambatan, kehilangan dsb. diluar itu, tidak menjadi tanggung jawab Pos Militer Angkatan/POLRI. Demikian pula kehilangan/Kerusakan<sup>-2</sup> karena akibat kahar (*overmacht*).
24. *Elektronika dan A.V.* Bertanggung jawab kepada Komandan Kesatuannya masing-masing atas pelaksanaan tugasnja.

## B A B VI

### A L A M A T

25. *Susunan*. Penggunaan singkatan<sup>-2</sup> pada alamat<sup>-3</sup> sudah sering menimbulkan kekeliruan-kekeliruan, karena banjaknja singkatan<sup>-3</sup> jang hampir bersamaan. Dengan adanya singkatan dengan suku kata, bahaya itu banjak berkurang. Tetapi kemungkinan kekeliruan tetap ada, oleh karena itu pentjantuman alamat diatas label atau sampul surat harus disusun setjara lengkap, dan bila ditulis, supaya jang terang dan supaya menggunakan huruf<sup>-2</sup> balok.
26. *Pengawasan*. Sering kali terdjadi pada kiriman pos jang ditudjukan untuk/dari anak buah sesuatu kesatuan, disebutkan nama tempat pada ruang pengirim atau alamat jang seharusnya dirahasiakan. Kewajiban Kantor Pos Militer Angkatan/POLRI-lah untuk menutup atau menghapus nama kota tersebut pada sampul, sehingga tidak dapat dibatja. Djadi pada sampul tjukup disebut nama atau nomor kesatuan sadja. Tjontoh : KI 3/JONIF 330. (Hal ini terutama penting artinya dalam keadaan adanya operasi<sup>-2</sup> ABRI dimana alamat kesatuan sangat dirahasiakan).
27. *Dislokasi*. Agar Pos Militer Angkatan/POLRI dapat melajani pengiriman pos dengan semestinja (*lantjar*), maka Pos Militer Angkatan/POLRI setiap saat

/ harus .....

harus mengetahui dislokasi Kesatuan<sup>2</sup> dan Instansi<sup>3</sup>. Ketentuan<sup>3</sup> ini sangat penting untuk daerah<sup>3</sup> operasi/tidak aman, dimana dislokasi kesatuan harus dirahasiakan, sehingga alamat hanya memuat nama cq nomor Kesatuan sadja.

Berhubung dengan itu, maka djuga pada Pos Militer ABRI cq Pos Militer Angkatan/POLRI diletakkan kewajiban untuk menjediakan Daftar Alamat Kesatuan<sup>2</sup> serta Instansi. Setiap perobahan dislokasi harus selalu diikuti dan mendjadi kewajiban bagi setiap Komandan untuk memberikan laporan<sup>3</sup> perobahan dimaksud kepada Pos Militer Angkatan/POLRI.

---





**BAGIAN KEENAM**  
**S I N G K A T A N**  
**B A B I**  
**U M U M**

1. Pendahuluan.

- a. Pemakaian kata<sup>3</sup> atau penuturan<sup>2</sup> kerap kali bertukar atau sengadja ditukar sehingga merupakan bentuk ringkas. Pada umumnya penuturan<sup>2</sup> ringkas mudah dipahami, mudah diucapkan setjara lisan dan mudah pula diingat. Bentuk penuturan yang ringkas berkuas, lebih kuat daripada bentuk yang panjang landjut.
- b. Pemendekan bentuk bahasa meluas pula pada tulisannya. Dewasa ini banyak kependekan kata<sup>3</sup> (ungkapan<sup>2</sup>, kelompok<sup>3</sup> kata dsb.), sehingga dalam pemakaiannnya sudah tak ubah lagi dengan kata. Bedanya, kata mewakili makna sedang kependekan mewakili kata (ungkapan, kelompok kata dsb.). Kependekan yang dimaksud disebut juga singkatan.

2. Tudjuan.

- a. Tudjuan daripada pedoman ini ialah untuk memperoleh pengertian dan keseragaman dalam tata-tjara pembentukan singkatan.
- b. Agar mudah memahami dan menggunakan singkatan baik dalam tulisan<sup>2</sup> dinas, surat-menjurat, tilgram dsb. maupun dalam pemitjaraan<sup>2</sup> dilingkungan DEP. HANKAM.

3. Pengertian. Yang dimaksudkan dengan singkatan ialah tulisan/utjapan kata<sup>2</sup> (istilah<sup>2</sup>, ungkapan<sup>2</sup>, kelompok<sup>3</sup> kata dsb.), yang dapat diungkap dengan tjara yang lebih tjepat atau lebih singkat daripada menulis/mengutjapkan kata<sup>2</sup> (istilah<sup>2</sup>, ungkapan<sup>2</sup>, kelompok<sup>3</sup> kata dsb.) yang sebenarnya.

**B A B II**  
**TATA-TJARA**

4. Tjara Membentuk Singkatan (memendekkan kata). Pembentukan suatu singkatan (pemendekan kata) pada umumnya dilakukan dengan meninggalkan :

- a. Huruf<sup>2</sup> awal dari suatu kata atau kelompok kata, misalnja :
 

Angkatan Udara Republik Indonesia	= AURI
Angkatan Laut Republik Indonesia	= ALRI
Staf Umum Angkatan Darat	= SUAD
Tata Usaha	= TU
dsb.	

/ b. Rangkaian .....

- b. Rangkaian huruf/huruf.<sup>2</sup> awal dan huruf/huruf.<sup>2</sup> akhir jang dapat merupakan sukukata, misalnja :

<b>Sekretariat</b>	=	SET
<b>Direktur</b>	=	DIR
<b>Detasemen</b>	=	DEN

- c. Sukukata pertama, misalnja :

<b>Organisasi</b>	=	OR
<b>Angkutan</b>	=	ANG
<b>Wakil</b>	=	WA
<b>Djenderal</b>	=	DJEN
dsb.		

- d. Sukukata pertama, ditambah dengan huruf awal dari sukukata jang berikutnya, misalnja :

<b>Keputusan</b>	=	KEP
<b>Topografi</b>	=	TOP
<b>Infanteri</b>	=	INF
<b>Pusat</b>	=	PUS

- e. Sukukata jang terakhir, misalnja :

<b>Bataljon</b>	=	JON
<b>Resimen</b>	=	MEN
<b>Komandan</b>	=	DAN
<b>Dewan</b>	=	WAN
dsb.		

- f. Sukukata tengah (atau ditambah dengan huruf awal dari suku jang berikutnya), misalnja :

<b>Pertahanan</b>	=	HAN
<b>Penetapan</b>	=	TAP
<b>Penelitian</b>	=	LIT
<b>Administrasi</b>	=	MIN

- g. Untuk membentuk singkatan jang berasal dari kelompok kata, ada jang menggunakan *satu tjara* (salah satu tjara diatas itu) atau *tjampuran dari beberapa tjara*.

Dengan satu tjara :

- 1) Angkatan (a) **Bersendjata** (a)  
 Republik (a) **Indonesia** (a) = ABRI  
 Keputusan (d) **Presiden** (d) = KEPPRES  
 Komandan (e) **Bataljon** (e) = DANJON  
 dsb.

/ (2) Dengan .....

2) Dengan tjara tjampuran :

Kepala (b) Staf (a)

Angkatan (a) Darat (a) = KASAD

Polisi (c) Militer (a) = POM

Wakil (c) Komandan (e) = WADAN

5) Tjara Menulis dan Memisahkan Singkatan.

a. Menulis Singkatan. Pada BAB I fasal 1 telah disinggung bahwa dewasa ini banjak sekali kependekan kata, sehingga kadang-kadang <sup>3</sup> dalam pemakaiannya sulit dibedakan dengan kata, terutama singkatan yang masih asing bagi pembatja. Untuk menghindarkan kesulitan ini, semua singkatan harus ditulis dengan huruf besar.

b. Memisahkan Singkatan. Dalam memisahkan singkatan harus diperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Bila tempat/kertas tidak tjukup, supaya diberi tanda garis pemisah (-).
- 2) Dalam penempatan tanda garis pemisah (-), harus diingat pula pokok singkatan dari masing-masing<sup>3</sup> perkataan itu, misalnja : INMINAD (Induk Administrasi Angkatan Darat), djika terpaksa diberi garis pemisah, supaya ditulis : INMIN — AD atau IN — MINAD.

SESKOPOL (Sekolah Staf dan Komando Kepolisian) djika terpaksa diberi garis pemisah, supaya ditulis : SESKO - POL atau SE - SKOPOL dsb.

6. Penjimpangan<sup>3</sup>.

a. Sering terdjadi penjimpangan<sup>3</sup>, karena singkatan<sup>3</sup> yang ditjiptakan menimbulkan impact psychologis.

Penjimpangan<sup>3</sup> sematjam itu dapat dianggap suatu pengetjualian.

b. Ada kemungkinan bahwa satu kata dapat menimbulkan dua singkatan atau lebih, misalnja :

Personil dapat disingkat PERS dan dapat pula SON.

Produksi dapat disingkat PROD dan dapat pula DUK.

Apabila terdjadi demikian, maka singkatan mana yang harus dipakai ditetapkan dengan Surat Keputusan MENHANKAM/PANGAB.

c. Sering terdjadi (karena terpaksa?), suatu kata menimbulkan dua singkatan. Hal ini tidak menimbulkan salah pengertian, karena kita melihat singkatan<sup>3</sup> itu dalam satu kesatuan pengertian (hubungan keseluruhan), misalnja :

Brigadir Djenderal = BRIGDJEN

Brigade Lintas Udara = BRIGLINUD.

Kesimpulan :

BRIG dapat dibatja brigadir, dapat pula dibatja brigade, bergantung kepada hubungannya dengan singkatan<sup>3</sup> lainnja yang membentuk suatu kesatuan pengertian.

/ 7. Ketentuan<sup>2</sup> .....

## 7. Ketentuan<sup>2</sup> lain.

- a. Singkatan sedapat mungkin merupakan sukukata/sukukata<sup>2</sup> sehingga dapat memudahkan komunikasi yang bersifat suara.
- b. Dalam membentuk singkatan, agar diperhatikan :
  - 1) Singkatan itu mendekati/mirip pada bunji kata aslinja yang lengkap.
  - 2) Menghindarkan terdjadinja singkatan<sup>2</sup> yang sama untuk dua pengertian atau lebih.
- c. Singkatan<sup>2</sup> yang telah lazim dipergunakan dalam masjarakat setjara tradisional (BKR, TKR, TNI, dll., dst., jad., ttg., jg., sbb., dan lain<sup>2</sup>) menjimpang dari ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada BAB II, fasal 4 sub-fasal a s/d g (tetap dipakai).
- d. Apabila sebuah singkatan dapat menimbulkan interpretasi lain (salah pengertian), maka sebaiknya singkatan yang ditulis itu untuk pertama kalinya disertai kepandangannja dalam kurung, sesudah itu barulah singkatannja sadja yang ditulis, kalau masih diperlukan.
- e. Ketentuan tersebut pada d, berlaku djuga untuk singkatan<sup>2</sup> yang hanja difahami oleh djawatan<sup>2</sup>/instansi<sup>2</sup> tertentu dan mungkin tidak diketahui diluar djawatan<sup>2</sup>/instansi<sup>2</sup> tadi.
- f. Dua buah vokal (huruf hidup) sedjenis yang berdampingan dalam singkatan dapat disatukan dengan menghilangkan salah satu vokal itu, ketjuali kalau penghilangan itu akan dapat menimbulkan perubahan arti, misalnja :  
 Komando Operasi = KOOP = KOP  
 Tjontoh, yang menimbulkan perubahan arti :  
 Perwira Angkutan = PAANG = PAANG  
 Bukan : PANG (sebab PANG khusus untuk singkatan Panglima).
- g. Kata<sup>2</sup> yang sudah singkat dan tidak dirangkaikan lagi dengan kata<sup>2</sup> lain pada umumnja tidak disingkat, misalnja :  
 Perwira Piket = PAPIKET  
 Komandan Putjuk = DANPUTJUK  
 dsb.
- h. Singkatan<sup>2</sup> yang sudah disahkan, biasanja dipakai dalam hal<sup>2</sup> berikut :
  - 1) Surat-menjurat
  - 2) Tulisan<sup>2</sup> Dinas
  - 3) Tilgram<sup>2</sup>
  - 4) Tjataan<sup>2</sup> dan lembaran<sup>2</sup> tjataan TAKAH
  - 5) Daftar dan lampiran<sup>2</sup>
  - 6) Organisasi (badan<sup>2</sup>, satuan<sup>2</sup>, dsb.).
  - 7) Pembinaan personil (pangkat<sup>2</sup>, djabatan<sup>2</sup>, dsb.).

**BAB III****L A I N - L A I N****8. Keseragaman Singkatan.**

- a. Dengan berpedoman pada tatajara pembentukan singkatan sebagaimana diuraikan pada BAB-<sup>2</sup> sebelumnya, diharapkan adanya kesamaan pengertian dan keseragaman dalam membentuk dan menggunakan singkatan dilingkungan DEPHANKAM, sehingga kesimpang-siuran penafsiran terhadap suatu singkatan dapat dihindari.
- b. Untuk mewujudkan keseragaman seperti dimaksud pada sub fasal a diatas, maka setiap Angkatan/POLRI menghimpun singkatan-<sup>3</sup> yang dipakai dalam lingkungan masing-<sup>3</sup>, kemudian diusulkan kepada MENHANKAM/PANGAB untuk disahkan sebagai singkatan-<sup>3</sup> resmi yang berlaku dalam lingkungan DEPHANKAM.

**9. Hal-hal yang belum ditentukan dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut.**

---



## BAGIAN KETUDJUJH

### PENGURUSAN ARSIP

#### B A B I

#### U M U M

##### 1. Pendabuluan.

- a. Salah satu kegiatan jang tidak kurang pentingnja daripada kegiatan<sup>2</sup> lainnja dalam penjelenggaraan administrasi umum adalah Pengurusan Arsip jang meliputi penjimpanan, pembinaan, penjaluran dan pemusnahan naskah<sup>2</sup> jang berada dibadan-badan dalam lingkungan DEPHANKAM.
- b. Berhubung dengan itu maka disusunlah pedoman tentang pengurusan arsip.

##### 2. Maksud dan Tudjuan.

- a. Pedoman tentang pengurusan arsip ini diadakan dengan maksud agar tertjipta satu pengertian dan satu tata-tjara jang seragam dalam penjelenggaraan pengurusan arsip didalam lingkungan DEPHANKAM.
- b. Tudjuan pengurusan arsip adalah :

- 1) Agar arsip dapat didjadikan bahan<sup>2</sup> bukti dan alat pengingat jang setiap saat dibutuhkan, dapat disadjikan kembali setjara mudah dan tjepat guna kepentingan pelaksanaan sesuatu tindakan administrasi.
- 2) Agar kesatuan<sup>2</sup> tidak jibebani dengan penjimpanan arsip jang tidak diperlukan lagi.

Dengan demikian dapat membantu terlaksananja suatu pembinaan jang baik terhadap seluruh badan dalam lingkungan DEPHANKAM.

- c. Untuk mentjapai tudjuan sebagaimana tertjantum dalam fasal 2 sub-fasal b diatas, dalam pengurusan arsip ini diadakan ketentuan<sup>2</sup> dan penjelenggaraan kegiatan<sup>2</sup> seperti tersebut dalam BAB<sup>2</sup> berikutnja.

##### 3. Pengertian.

- a. Arsip mengandung 2 (dua) pengertian :
  - 1) Arsip adalah kumpulan tulisan<sup>2</sup> dinas dan bahan<sup>2</sup> penolong lainnja jang timbul sebagai akibat dari adanja penjelenggaraan administrasi dan jang disimpan serta dipelihara selama diperlukan dalam djangka waktu tertentu.
  - 2) Arsip adalah apa jang dimaksud dalam sub-sub-fasal 1) diatas berikut tempat, dimana kegiatan<sup>2</sup> tersebut dilakukan.
- b. Jang dimaksud dalam Pedoman ini adalah arsip dalam pengertian tersebut dalam fasal 3 sub-fasal a sub-sub fasal 1).
4. Wewenang. Jang berwenang mengurus arsip adalah badan<sup>2</sup> jang melaksanakan tindakan administrasi umum sekurang-kurangnja surat-menjurat dinas.

/ BAB II

## B A B II

### PENERIMAAN, PENJIMPANAN DAN PEMELIHARAAN

5. Penerimaan.

- a. Setiap TAKAH atau tulisan dinas yang diterima, ditatat setjara kronologis didalam buku penerimaan dan pada tiap TAKAH atau tulisan dinas tersebut diberi tanggal dan nomor urut sesuai dengan buku penerimaannya.
- b. TAKAH<sup>2</sup> atau tulisan<sup>2</sup> dinas tersebut kemudian dikirim untuk penyelesaian lebih lanjut dengan buku ekspedisi.

6. Penjimpnan. TAKAH atau tulisan<sup>2</sup> dinas tersebut dalam fasal 5 diatas disimpan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan pokok persoalan masing<sup>2</sup>.

7. Pemeliharaan. Pemeliharaan arsip diselenggarakan setjara ilmiah kearsipan sehingga terhindar dari segala kemungkinan<sup>2</sup> yang merugikan antara lain : kerusakan, kehilangan, kebakaran dan lain sebagainya.

## B A B III

### PENILAIAN DAN PENENTUAN DJANGKA WAKTU

8. Pendabuluan. Penilaian dan penentuan jangka waktu arsip dilakukan berdasarkan suatu standar yang ditetapkan oleh MENHANKAM/PANGAB.

9. Dasar<sup>2</sup> Penilaian.

- a. Nilai sesuatu arsip didasarkan atas pandangan segi penting atau tidaknya arsip itu untuk kebidaksanaan selanjutnya atau pandangan segi sedjarah sesuatu organisasi. Penentuan untuk nilai arsip didasarkan pada tingkat daja-guna, jangka waktu penjimpnan tulisan<sup>2</sup> dinas dan bahan administrasi lainnya dengan memperhatikan pula :

- 1) Arti dan nilai administrasi sebagai bahan bukti dan alat pengingat.
- 2) Arti dan nilai isi persoalan.
- 3) Pengaruh dari tingkat klasifikasi.
- 4) Ketentuan<sup>2</sup> menurut undang<sup>2</sup>, peraturan<sup>2</sup> pemerintah dan peraturan<sup>2</sup> lainnya, terutama terhadap surat<sup>2</sup> dan bahan<sup>2</sup> bukti mengenai persoalan keuangan dan perbendaan.

- b. Djika dalam menilai sesuatu tulisan dinas mendapat keraguan, ditentukan nilai yang lebih tinggi.

10. Penentuan Jangka Waktu. Untuk dapat mengadakan penjaluran arsip pada waktu<sup>2</sup> tertentu perlu ditentukan jangka waktu penampungan arsip sebagai batas waktu penjimpnan arsip. Jangka waktu penampungan arsip ditentukan atas dasar<sup>2</sup> antara lain :

/ a. Azas



- a. Azas daya-guna dengan sedapat mungkin membebaskan badan-badan dilingkungan DEPHANKAM dari soal<sup>3</sup> menjimpan bahan administrasi.
- b. Waktu yang terpendek (rata<sup>3</sup>) dalam hal penyelesaian persoalan<sup>3</sup> dengan tidak mengurangi maksud sebagaimana tersebut dalam sub-fasal a diatas.
- c. Perhitungan waktu penilaian, pemisahan dan pengiriman.
- d. Ketentuan<sup>3</sup> menurut undang<sup>3</sup>, peraturan<sup>3</sup> pemerintah dan peraturan<sup>3</sup> lain terutama terhadap surat<sup>3</sup> dan bahan<sup>3</sup> bukti mengenai persoalan keuangan dan perbendaan.

Atas dasar<sup>3</sup> tersebut diatas ini, ditentukan jangka waktu penampungan arsip sebagai berikut :

- 1) 2 tahun
- 2) 5 tahun
- 3) 10 tahun
- 4) 10 tahun lebih.

11. Penggolongan Arsip. Hasil penilaian arsip membawa akibat adanya penggolongan arsip menjadi :

a. Arsip sementara yang meliputi antara lain :

- 1) Surat pengantar.
- 2) Surat lamaran.
- 3) Surat perintah (surat perintah jalan atau dinas yang telah dilaksanakan dan tidak ada hubungannya dengan sesuatu peristiwa yang bersedjarah, misalnja surat perintah operasi).
- 4) Surat radiogram atau tilgram.
- 5) Undangan.
- 6) Surat edaran yang sifatnya sementara dan berakhir setelah waktu dalam edaran dipenuhi.
- 7) Surat laporan atau statistik yang telah selesai dikerdjakan menurut tugas.
- 8) Surat usulan yang telah selesai persoalannya, misalnja usul kenaikan pangkat, pemindahan dan sebagainya.
- 9) Brosur<sup>3</sup> yang tidak mempunyai sifat organisasi atau kebidjaksanaan dan tidak merupakan bahan research dan telaahan.
- 10) Surat peringatan mengenai penyelesaian sesuatu perobahan.
- 11) Surat lain yang telah selesai persoalannya dan tidak ada hubungannya dengan biografi seseorang, organisasi sesuatu instansi atau peristiwa yang bersedjarah.

Jang berdasarkan penilaiannya masing<sup>3</sup> dapat diberi jangka waktu 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun.

/ b. Arsip ... ..

b. Arsip abadi (tetap) terdiri antara lain dari :

- 1) Surat yang berisi soal organisasi atau sedjarah dari sesuatu djawatan atau kesatuan.
- 2) Surat<sup>2</sup> yang berisi soal kebidjaksanaan.
- 3) Prosedur dan tatatjara kerdja dari sesuatu djawatan atau kesatuan.
- 4) Surat<sup>3</sup> yang berisikan transaksi atau kontrak yang diadakan oleh sesuatu djawatan atau kesatuan yang mempunjai akibat juridis, umum dan berlaku terus-menerus.
- 5) Usaha<sup>4</sup> sesuatu djawatan atau kesatuan dalam lapangan sosial ekonomi dan lain-lainnja.
- 6) Surat<sup>5</sup> berisi ketetapan mengenai kedudukan hukum personil, pengu-  
sutan<sup>6</sup> terhadap kedjahatan.
- 7) Surat<sup>7</sup> yang berisi doktrin<sup>8</sup> mengenai organisasi, latihan<sup>9</sup>, personil,  
materiil, yang ada kemungkinan besar untuk disempurnakan.
- 8) Surat<sup>10</sup> yang berisikan petundjuk<sup>11</sup> telaahan staf dan laporan<sup>12</sup> yang kese-  
muanja merupakan kebidjaksanaan yang langsung atau tidak langsung  
mempengaruhi soal komando.
- 9) Record set yang selalu dipakai dalam pekerdjaan sehari-hari.
- 10) Surat<sup>13</sup> yang merupakan riwayat hidup dan formasi personil.
- 11) Laporan<sup>14</sup>, surat-menjurat yang merupakan telaahan staf yang ada hu-  
bungannja dengan usaha penjempurnaan dan penambahan daja-guna  
sesuatu hal.
- 12) Surat<sup>15</sup> yang merupakan penelaahan pelaksanaan tugas sesuatu djawatan  
atau instansi.
- 13) Surat<sup>16</sup> mengenai perentjanaan organisasi dan operasi.

## B A B IV

### TINGKAT DAN PENJALURAN ARSIP

#### 12. Tingkat<sup>1</sup> Arsip.

a. Tingkat Arsip terdiri dari :

- 1) Arsip tingkat I selandjutnja disebut Arsip-I terdiri dari arsip yang ada  
pada badan, baik yang berada di Staf/Badan Pelaksana Pusat/KOTAMA  
OPS HANKAM maupun dilingkungan Angkatan/POLRI.
- 2) Arsip tingkat II selandjutnja disebut Arsip-II, merupakan arsip penam-  
pung untuk Arsip-I.
- 3) Arsip tingkat III selandjutnja disebut Arsip-III, merupakan arsip penam-  
pung untuk Arsip-II dan djuga berfungsi sementara sebagai Depo Arsip

/ ABRI.

ABRI, dengan tjetatan bahwa Arsip-III ini untuk nivo HANKAM berada pada salah satu badan di Staf HANKAM dan untuk nivo Angkatan/POLRI pada Markas Besar Angkatan/POLRI.

- 4) Arsip Nasional sebagai tingkat terachir diluar lingkungan DEPHANKAM dan merupakan tingkat negara.
- b. Penentuan tingkat arsip dan eselon<sup>3</sup> sebagai unsur pelaksana dalam nivo HANKAM diatur oleh MENHANKAM/PANGAB dan dalam nivo Angkatan/POLRI oleh Kepala Staf Angkatan/KAPOLRI.

### 13. Penjaluran Arsip.

- a. Untuk mendjaga agar badan<sup>3</sup> tidak terganggu oleh beban akibat administrasi, arsip dari badan<sup>3</sup> itu pada waktu<sup>3</sup> tertentu setelah diadakan penilaian disalurkan ketingkat arsip jang lebih atas lagi atau dimusnahkan.
- b. Arsip-I :
  - 1) Arsip-I membagi arsip jang sudah disimpan selama 2 tahun dalam dua nilai :
    - a) Arsip jang bernilai 2 tahun.
    - b) Arsip jang bernilai lebih dari 2 tahun.
  - 2) Arsip jang bernilai 2 tahun dimusnahkan, sedangkan jang bernilai lebih dari 2 tahun diteruskan kepada Arsip-II oleh panitia atau pendjabat jang diberi wewenang untuk itu.
- c. Arsip-II :
  - 1) Arsip-II menerima dan menampung arsip dengan nilai lebih dari 2 tahun dari Arsip-I.
  - 2) Arsip-II membagi arsip jang sudah disimpan selama 5 tahun, termasuk pula arsip jang diterima dari Arsip-I dan telah disimpan pada Arsip-II selama 3 tahun dalam 2 nilai :
    - a) Arsip jang bernilai 5 tahun.
    - b) Arsip jang bernilai lebih dari 5 tahun.
  - 3) Arsip jang bernilai 5 tahun dimusnahkan, sedangkan jang bernilai lebih dari 5 tahun diteruskan kepada Arsip-III oleh panitia atau pendjabat jang diberi wewenang untuk itu.
- d. Arsip-III :
  - 1) Arsip-III menerima dan menampung arsip dengan nilai lebih dari 5 tahun dari Arsip-II.
  - 2) Arsip-III membagi arsip jang sudah disimpan selama 10 tahun, termasuk pula arsip jang diterima dari Arsip-II dan telah disimpan pada Arsip-III selama 5 tahun, dalam dua nilai :
    - a) Arsip jang bernilai 10 tahun.
    - b) Arsip jang bernilai lebih dari 10 tahun.

/ 3) Arsip .....

- 3) Arsip yang bernilai 10 tahun dimusnahkan dan yang bernilai lebih dari 10 tahun :
  - a) Mendjadi arsip tetap (dokumen tetap) pada Depo Arsip ABRI.
  - b) Disalurkan kepada arsip Nasional oleh panitia atau pendjabat yang diberi wewenang untuk itu.

## B A B V

### P E M U S N A H A N

#### 14. *Pemusnahan.*

- a. Pemusnahan arsip dilakukan pada waktu<sup>2</sup> tertentu oleh suatu panitia yang dibentuk oleh MENHANKAM/PANGAB atau pendjabat<sup>3</sup> lain yang diberi wewenang untuk itu menurut tjara-tjara yang berlaku.
- b. Tiap pelaksanaan pemusnahannya dibuat berita atjara pemusnahan.
- c. Untuk lebih menjelaskan tentang penjaluran, penampungan dan pemusnahan arsip lihat lampiran EE.

## B A B VI

### PENJIMPANAN ARSIP DENGAN SISTIM 3M MICROFILM

15. Dengan bertambahnja volume pekerdjaan yang berarti makin bertambahnja tulisan<sup>2</sup> dinas/naskah<sup>3</sup> yang perlu disimpan sebagai arsip. Pada saat ini bagi negara<sup>3</sup> yang telah maju menganggap bahwa sistim konvensional untuk filing telah tiba saatnja untuk diperbaharui sesuai dengan modernisasi dalam bidang tehnik. Hal ini mengingat tjara penjimpanan arsip menurut sistim dokumentasi yang sekarang masih berlaku, dianggap kurang dapat memenuhi sjarat apabila ditindjau dari segi safety dan security.
16. Sesuai dengan kemadjuan dalam bidang tehnik, pada saat ini telah diketemukan sistim baru mengenai penjimpanan arsip ialah : sistim 3M Microfilm. Sistim 3M Microfilm sangat baik untuk penjimpanan arsip karena dalam pelaksanaannya sangat reliable dan praktis dan dalam hal ini akan banyak membantu untuk :
  - a. Penghematan biaja operasi.
  - b. Mengurangi tempat penjimpanan.
  - c. Meningkatkan efficiency kerdja.
  - d. Pengamanan dokumentasi penting.
  - e. Penghematan waktu kerdja.

/ f. Modernisasi .....

- f. Modernisasi dari filing systems.
17. Peralatan yang diperlukan untuk sistim 3M Microfilm :
- a. 3M "2000E" Processor Camera.  
Alat tersebut untuk mengambil gambar/dokumen sampai seluas 90 cm × 120 cm menjadi bentuk microfilm yang langsung tertjetak pada frame-nja.
  - b. 3M "200" Reader printer.  
Alat tersebut dipergunakan untuk melihat dan meneliti serta membuat copy yang lebih besar dari microfilm.  
Hasil copy dapat berukuran 30 cm × 45 cm atau 45 cm × 60 cm.  
Apabila diperlukan untuk dikirim kelain daerah, tjukup dikirimkan dalam bentuk microfilm. Dengan demikian dapat dihemat, waktu biaja pengiriman, tempat serta security dokumen yang dikirim.
  - c. 3M "086" UNIPRINTER.  
Apabila diinginkan copy microfilm dapat dijadikan dalam bentuk microfilm.

## B A B . VII

### L A I N - L A I N

18. Setjara administratif dan demi keamanan, arsip dibagi dalam :
- a. Arsip biasa : adalah tulisan<sup>2</sup> dinas dan bahan<sup>2</sup> administrasi lainnja yang berklasifikasi biasa.
  - b. Arsip rahasia : adalah tulisan<sup>2</sup> dinas dan bahan<sup>2</sup> administrasi lainnja yang berklasifikasi Sangat Rahasia, Rahasia, Rahasia Djabatan, Konfidensiil dan Terbatas.
19. Hal-hal yang belum ditentukan dalam pedoman ini akan diatur lebih landjut.
-



## BAGIAN KEDELAPAN

### F O R M U L I R

#### B A B I

#### U M U M

1. Pendahuluan. Jang akan diuraikan pada fasal<sup>2</sup> berikutnja adalah merupakan kebidaksanaan umum, jang meliputi ketentuan<sup>3</sup> dan persjaratan<sup>3</sup> teknis dalam hal keformuliran. Sehingga dapat didjadikan petundjuk atau pedoman bagaimana keharusan<sup>3</sup> memperlakukan formulir dalam lingkungan Departemen HANKAM Baik dalam hal pentjiptaan, penjeragaman dan penjederhanaan maupun pengendalian atas penggunaannja.
2. Maksud dan tudjuan.
  - a. Menudju kearah normalisasi sehingga dapat ditjapai standardisasi dalam bidang keformuliran. Normalisasi bertudjuan mengadakan penghematan dengan dja-lan membatasi keaneka-warnaan jang tak perlu.
  - b. Normalisasi tersebut harus bisa memenuhi 3 sjarat :
    - 1) Pengawasan jang mudah.
    - 2) Adanja keseragaman.
    - 3) Penjederhanaan pekerdjaan, ini berakibat harus dianutnja tjara<sup>3</sup> bekerdja jang sudah distandardisasikan.
  - c. Normalisasi itu didjelaskan dalam formulir<sup>3</sup> dan blanko<sup>3</sup>
3. Pengertian.
  - a. Formulir ialah sehelai kertas, jang harus diisi, dengan telah tersedia diatasnja ruangan<sup>3</sup> tempat pengisian itu, serta telah pula ada petundjuk<sup>3</sup> mengenai apa jang harus diisi dalam ruangan tadi.
  - b. Dengan adanja pengertian hal ini djelaslah kiranja, bahwa blanko surat KEP, PRIN dsb. tidak memenuhi sjarat<sup>3</sup> formulir, oleh karena itu dalam buku ini akan disebut blanko.
  - c. Perbedaan antara formulir dengan blanko adalah, djika formulir telah tersedia ruangan<sup>3</sup> untuk diisi dengan petundjuk<sup>2</sup> positif apa<sup>3</sup> jang harus diisi dan djuga telah diketahui maksud dan kegunaannja. Sedangkan pada blanko norma<sup>3</sup> bentuk dan sistimatiknja telah ditentukan, akan tetapi isi, maksud dan kegunaannja tidak ditegaskan, tergantung pada kebutuhannja.

#### / BAB II

## B A B    I I

### P E L A K S A N A A N

4. Pentjiptaan. Jang diartikan dengan pentjiptaan ialah, baik mentjiptakan sesuatu formulir baru atas pertimbangan kebutuhan jang baru ataupun sesuatu pentjiptaan jang berdasar atas matjam-<sup>2</sup> atau djumlah formulir-<sup>3</sup> jang telah ada.
5. Penindjauan dan penjederhanaan.
  - a. Ialah penelaahan, apakah sesuatu formulir itu perlu dirobah, ditiadakan, disusun kembali sehingga mendjadi sederhana, atau melakukan penjatuan dari beberapa formulir jang bertudjuan sama mendjadi satu formulir.
  - b. Bila ditelaah isinja terhadap sesuatu formulir jang bertudjuan sama, maka maknanja semua akan sama djuga, bahkan dasar hukum bersumber pada satu peraturan, tetapi bentuk dan susunannja sджа jang berlainan. Masing-<sup>3</sup> pembina mentjiptakan satu matjam formulir, sehingga begitu banjak pembina begitu banjak pula matjam formulir jang pada hakekatnja bertudjuan sama. Misalnja sджа kartu persediaan.
  - c. Oleh karena itu dipandang perlu untuk diadakan pendaftaran formulir, baik di-tiap-<sup>3</sup> Angkatan/POLRI maupun diseluruh lingkungan Departemen HANKAM. Disini nanti akan timbul perlu adanja penindjauan dan penjederhanaan formulir.
6. Pensahan.
  - a. Mengandung arti, bahwa setiap formulir jang digunakan di-tiap-<sup>3</sup> Angkatan/POLRI, ataupun dalam lingkungan Departemen HANKAM, baik formulir itu berasal dari masing-<sup>3</sup> Angkatan/POLRI sendiri, atau dari lingkungan Departemen HANKAM maupun dari luar Departemen HANKAM, harus di-registrasi dan disahkan oleh :
    - 1) KEPALA STAF ANGKATAN/KAPOLRI atau pendjabat jang ditundjuk maupun jang diberi delegasi wewenang untuk itu, terhadap formulir-<sup>3</sup> jang dipergunakan khusus di-tiap-<sup>3</sup> Angkatan/POLRI.
    - 2) MENHANKAM/PANGAB atau pendjabat jang ditundjuk maupun jang diberi delegasi wewenang untuk itu, terhadap formulir-<sup>2</sup> jang dipergunakan dilingkungan Departemen HANKAM.
  - b. Pensahan bisa berupa :
    - 1) Pensahan sebagai formulir Angkatan/POLRI atau formulir Departemen HANKAM.
    - 2) Pensahan formulir dari luar Departemen HANKAM untuk dipergunakan dalam lingkungan Departemen HANKAM.
  - c. Dengan adanja keharusan pensahan ini, maka dapatlah diketahui dengan pasti djumlah matjam-<sup>3</sup> formulir di-tiap-<sup>3</sup> Angkatan/POLRI maupun dalam lingkungan Departemen HANKAM, dan dari fakta ini dapat diikuti djumlah-<sup>3</sup> pemakaian.

/ 7. Pengendalian.



## 7. Pengendalian.

- a. Dalam pengertian pengendalian (kontrol) termaktub arti : Kegiatan<sup>3</sup> untuk menentukan hubungan antara soal<sup>3</sup> yang direntjanakan dengan hasilnja, guna mengambil tindakan<sup>3</sup> yang tepat yang diperlukan berdasarkan rentjana.
- b. Dalam hal formulir, kita mengikuti prosesnja apakah ketentuan<sup>3</sup> formulir itu diikuti, baik dalam pentjetakan dan penggunaan serta pengisiannja.
- c. Kita harus pula mengikuti melalui suatu penilaian, gunanja tiap formulir untuk sesuatu tingkat formulir, beberapa rangkap untuk tiap tingkat dsb. Sebagai tjontoh umpamanja formulir laporan personil :
  - 1) Siapa yang akan mengisi (tingkat instansi mana).
  - 2) Berapa rangkap yang harus dibuat. Diperuntukkan siapa dan instansi mana sadja.
  - 3) Kalau instansi tersebut 2) diberi laporan itu, apakah gunanja untuk masing<sup>3</sup>. Perlukah atau tidak. Dipergunakan untuk apa setiap pengisian yang diterimanja itu.
  - 4) Sudah tepatlah pertanyaan<sup>3</sup> yang tertjantum didalamnya.
  - 5) Dapatlah setiap pertanyaan itu ditangkap atau diterima dengan mudah oleh pengisi yang terendah.
  - 6) Apakah pengadaan atau pentjetakannya tidak berlebih-lebihan berarti pemborosan, karena harus selalu diingat kemungkinan<sup>3</sup> pada tahun berikutnya terdjadi perubahan atau mungkin penghapusan.

## 8. Sjarat<sup>3</sup>.

- a. Sesuatu formulir pada dasarnya harus memenuhi sjarat<sup>3</sup> efisiensi sebagai berikut :
  - 1) Kolom atau ruangan tempat pengisian harus sedemikian rupa, sehingga mempermudah pengisian formulir itu baik untuk tulisan tangan maupun dengan mesin tulis, artinja letak ruangan atau baris pengisian diatur sedemikian rupa sehingga djangan sampai posisi pengetikan perlu di-robah<sup>3</sup> sewaktu pengisian dilakukan.
  - 2) Sesuatu formulir yang telah diisi harus mudah ditelaah, artinja soal<sup>3</sup> yang bersifat „pengantar” atau „pendahuluan” didahulukan. Yang bersifat „inti” di-tengah<sup>3</sup> dan yang bersifat „penutup” „tjatan” atau „kesimpulan” ditempatkan dibelakang.
- b. Selain dari sjarat<sup>3</sup> tersebut diatas, maka masih perlu diingat faktor<sup>3</sup> dibawah ini :
  - 1) Petunjuk<sup>3</sup> untuk pengisian djanganlah bersifat pertanyaan, tetapi berbentuk „positif”, singkat dan djelas. Misalnja untuk mengetahui umur seseorang, djanganlah ditjantumkan sebagai petunjuk pengisian „Bilamana tuan dilahirkan”, tetapi tjukup dengan „tanggal lahir” sadja.

/ 2) Hendaknja .....

- 2) Hendaknja selalu diingat, bahwa apa jang harus diisi dalam masing<sup>3</sup> ruangan pengisian itu sudah djelas diketahui dari petundjuk<sup>3</sup> diruangan itu sendiri, dan djangan sampai disuatu tempat lain masih perlu diberikan petundjuk<sup>3</sup> tambahan.

9. Matjam<sup>3</sup> formulir.

- a. Pada dasarnya formulir<sup>3</sup> jang dipakai baik ditiap-tiap Angkatan/POLRI maupun dilingkungan Departemen HANKAM lainnja dapat di-bagi<sup>3</sup>; dalam beberapa golongan :
- 1) *Golongan umum*, ialah jang dipakai dalam seluruh lingkungan Departemen HANKAM dan atau dalam seluruh tiap<sup>3</sup> Angkatan/POLRI masing<sup>3</sup> Termasuk disini jang dipakai dalam semua departemen, seperti formulir Daftar penilaian ketjakapan untuk tjalon Pegawai Negeri.
  - 2) *Golongan khusus*, yakni jang hanya dipakai dalam suatu instansi di-tiap<sup>3</sup> Angkatan/POLRI dan atau instansi lainnja dilingkungan Departemen HANKAM, khusus untuk tugas-tugas dari instansi itu sendiri.
  - 3) *Golongan intern terbatas*, yakni formulir jang setjara insidentil diadakan untuk salah satu instansi atau kantor dan terbatas pula penggunaannya.
- b. Jang perlu mendapatkan perhatian dalam tulisan ini ialah formulir<sup>3</sup> jang termasuk dalam golongan 2) dan 3) diatas, karena pensahannya tergantung kepada sekian banjak Kepala/Komandan masing<sup>3</sup>, sedangkan jang dari golongan 1) pensahannya baru diadakan setelah setjara khusus formulir itu ditinjau ditiap-tiap Angkatan/POLRI atau pada tingkar jang lebih tinggi.

10. Perentjanaan formulir.

- a. Sebagai kebidjaksanaan umum perlu ditekankan bahwa sistim pengisian sesuatu formulir diambil „sistim kotak”.  
Artinja ialah, bahwa ruangan atau kolom dalam batas<sup>3</sup> ukuran formulir itu, di-bagi<sup>3</sup> dalam beberapa kotak, agar tertjapai penghematan ruangan dalam djurusan mendatar.
- b. Dimana ada kepala formulir, maka biasanja kepala itu terdiri dari nama formulir, tanggal pengisian, kepada siapa formulir itu disampaikan dan oleh Instansi mana formulir itu disampaikan. Dengan demikian masing<sup>3</sup> bagian dari kepala itu terbagi menjadi 4 buah kotak dibagian atas dari formulir.

*Tjontob :*

DAFTAR KONDUITE

1. Tanggal pengisian	2. Untuk	3. Dari

/ c. Dalam.....

- c. Dalam pembuatan kotak<sup>3</sup> dibagian isi, hendaknja selalu diperhatikan keten-  
tuan<sup>2</sup> dalam fasal 8 sub-fasal a sub-sub-fasal 1). Tulisan-tulisan jang merupa-  
kan petunjuk tentang apa jang harus diisi dalam masing<sup>2</sup> kotak hendaknja  
ditjantumkan dibagian atas dari masing<sup>2</sup> kotak dan didahului dengan suatu  
nomor jang merupakan nomor urut dari kotak<sup>2</sup> itu.

Adakalnja apa jang harus diisi itu terbatas pada beberapa kemungkinan  
sadj. Dalam hal demikian ini ada baiknja untuk diberi "check-boxs" dida-  
lam suatu kotak, dan dibelakang tiap-tiap "check-box" ditjantumkan apa jang  
dimaksud dengan di "check" nja sesuatu "check-box".

*Tjontob :*

#### KETERANGAN TETAP

4. NRP <input type="text"/>	5. Nama lengkap <input type="text"/>	6. Tempat lahir <input type="text"/>	7. Tanggal lahir <input type="text"/>
8. kelamin <input type="text"/>	9. Suku Bangsa <input type="text"/>	10. Golongan darah <input type="text"/>	
11. Agama.			
Islam <input type="text"/>	R. Kath. <input type="text"/>	Prot. <input type="text"/>	Lain <sup>3</sup> <input type="text"/>

#### 11. Penggunaan.

- Dengan adanja formulir<sup>2</sup> jang telah tersedia, maka segala tjatatan-tjatatan atau-  
pun laporan<sup>3</sup> jang perlu, bisa dibukukan dengan mudah didalam kolom<sup>3</sup> jang  
telah tersedia.
  - Dengan demikian dapatlah diperoleh manfaat, bahwa tjara bekerdja ini sa-  
ngat memudahkan para pelaksana jang harus mengisi apabila dipenuhi sjarat<sup>3</sup>  
sebagaimana tersebut dalam fasal 8 sub-fasal b.
  - Pun djuga akan memudahkan pendidikan personil, menggambarkan overzicht  
jang djelas dan menghemat waktu serta tenaga.
12. Hal-hal jang belum ditentukan dalam pedoman ini akan diatur lebih landjut.



## BAGIAN KESEMBILAN

### TJAP DJABATAN DAN PAPAN NAMA

#### B A B I

#### U M U M

1. Maksud dan Tujuan. Mengatur norma<sup>-2</sup> bentuk, isi tulisan serta ukuran tjap djabatan dan papan nama dalam lingkungan DEPHANKAM. (Surat Keputusan MENHANKAM/PANGAB No. KEP/B/523/X/1970 mengatur tentang tjap Djabatan dan Surat Keputusan MENHANKAM/PANGAB No. KEP/B/330/VI/1970 mengatur tentang Papan Nama).
2. Pengertian<sup>-3</sup>.
  - a. Tjap Djabatan, ialah suatu benda jang berbentuk serta berukuran tertentu, dibuat dari logam dan karet keras, memuat tulisan<sup>-3</sup> tentang tingkat djabatan pada suatu instansi dalam lingkungan DEPHANKAM dan dipergunakan sebagai tanda pengenal jang sah dalam surat-menjurat.
  - b. Papan Nama.
    - 1) Papan nama badan, ialah sebuah papan berbentuk dan berukuran tertentu jang memuat tulisan<sup>-3</sup> tentang nama suatu badan/organisasi dalam lingkungan DEPHANKAM.
    - 2) Papan nama djabatan, ialah sebuah papan berbentuk dan berukuran tertentu jang memuat tulisan<sup>-3</sup> tentang nama suatu djabatan dalam lingkungan DEPHANKAM.
    - 3) Papan nama pendjabat, ialah sebuah papan berbentuk dan berukuran tertentu jang memuat tulisan<sup>-3</sup> tentang nama seorang pendjabat dalam lingkungan DEPHANKAM.

#### B A B II

### TJAP DJABATAN

3. Bentuk. Tjap djabatan dalam lingkungan Departemen Pertahanan-Kemampuan terdapat 3 (tiga) matjam bentuk, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bentuk bulat/bundar. Untuk MENHANKAM/PANGAB, WAPANGAB, para Kepala Staf Angkatan/KAPOLRI dan pendjabat jang bersifat Komando Kesatuan/Pendidikan dengan ukuran seperti pada gambar dalam lampiran FF. 1.

/ b. Bentuk .....

- b. Bentuk londjong. Untuk Pendjabat<sup>-2</sup> Staf/Badan<sup>-2</sup>/Dinas<sup>-2</sup> dan Badan Staf lainnja dengan ukuran seperti pada gambar dalam lampiran FF. 1.
  - c. Bentuk persegi empat. Untuk Pendjabat<sup>-2</sup> Piket dan untuk Pos<sup>-2</sup> ABRI (seperti Pos<sup>-2</sup> Polisi Militer, Pos<sup>-2</sup> Polisi R.I., Angkutan dan sebagainya) serta untuk Urusan<sup>-2</sup> Pendaftaran<sup>-2</sup>, dengan ukuran masing<sup>-2</sup> seperti pada gambar dalam lampiran FF. 1.
4. Ketentuan pemakaian. Jang berhak memakai tjap djabatn jang berbentuk :
- a. Bulat/Bundar :
    - 1) Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata.
    - 2) Wakil Panglima Angkatan Bersendjata.
    - 3) Kepala Staf Angkatan/KAPOLRI
    - 4) Panglima/Gubernur/Komandan seperti jang dimaksud pada fasal 3 sub-fasal a.
  - b. Londjong :
    - 1) Kepala/Direktur/Inspektur/Perwira.
    - 2) Kepala Sekretariat/Sekretaris seperti jang dimaksud pada fasal 3 sub-fasal b.
  - c. Persegi empat :

PAPIKET/Pos Pelajanan/Urusan Pendaftaran seperti jang dimaksud pada fasal 3 sub-fasal c.
5. Hak mempunyai. Jang berhak mempunyai tjap djabatn ditentukan sebagai berikut :
- a. Staf HANKAM :
    - 1) Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata.
    - 2) Wakil Panglima Angkatan Bersendjata.
    - 3) Komandan Korps Markas HANKAM.
    - 4) Untuk pendjabat<sup>-2</sup> Staf HANKAM (KAS/IRDJEN/IRWASKU/ASREN-UM/KASET, dll.nja) mempergunakan tjap „STAF HANKAM”.
  - b. Badan Pelaksana Pusat HANKAM :
    - 1) Kepala Pusat Intelidjen Strategis.
    - 2) Kepala Badan Pembekalan ABRI.
    - 3) Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional.
    - 4) Komandan Djenderal Lembaga Pendidikan Staf dan Komando Gabungan/Sekolah Staf dan Komando ABRI.
    - 5) Komandan Djenderal Akademi ABRI.
    - 6) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan.

/ 7) Kepala .....

- 7) Kepala Pusat Tjadangan Nasional.
- 8) Kepala Perindustrian ABRI.
- 9) Kepala Pusat Kesehatan ABRI.
- 10) Kepala Polisi Militer ABRI.
- 11) Oditur Djenderal ABRI.
- 12) Kepala Kehakiman ABRI.
- 13) Kepala Survey dan Pemetaan ABRI.
- 14) Kepala Badan Administrasi Veteran ABRI.
- 15) Kepala Pusat Pendidikan Djasmani ABRI.
- 16) Kepala Pusat Sedjarah ABRI.
- 17) Kepala Pusat Perlawanan dan Keamanan Rakjat.
- 18) Kepala Pembinaan Mental ABRI.
- 19) Kepala Pusat Penerangan.
- 20) Kepala Dinas Perhubungan.
- 21) Kepala Sekretariat dari masing-<sup>2</sup> Badan tersebut diatas.
- 22) Komandan Detasemen dari masing-<sup>2</sup> Badan tersebut diatas.
- 23) Pendjabat-<sup>2</sup> dari Badan-<sup>2</sup>/Djawatan-<sup>2</sup>/Dinas-<sup>2</sup>/Komando-<sup>2</sup> jang dianggap perlu oleh Kepala/Gubernur/Komandan jang bersangkutan.

c. Komando Utama Operasionil HANKAM/ABRI :

- 1) Panglima Komando Strategi Nasional.
- 2) Panglima Komando Pertahanan Maritim Nasional.
- 3) Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional.
- 4) Panglima Komando Wilayah Pertahanan I/Sumatera.
- 5) Panglima Komando Wilayah Pertahanan II/Djawa dan Madura.
- 6) Panglima Komando Wilayah Pertahanan III/Kalimantan.
- 7) Panglima Komando Wilayah Pertahanan IV/Sulawesi.
- 8) Panglima Komando Wilayah Pertahanan V/Nusatenggara.
- 9) Panglima Komando Wilayah Pertahanan VI/Maluku & Irian Barat.
- 10) Kepala Sekretariat dari masing-<sup>2</sup> Komando tersebut diatas.
- 11) Komandan Detasemen dari masing-<sup>2</sup> Komando tersebut diatas.
- 12) Pendjabat-<sup>2</sup> dari Badan Pelaksana/Komando Pelaksana sampai tingkat Kompi jang dianggap perlu oleh Panglima jang bersangkutan.

d. Angkatan/POLRI :

- 1) Kepala Staf Angkatan DARAT.
- 2) Kepala Staf Angkatan LAUT.
- 3) Kepala Staf Angkatan UDARA.
- 4) Kepala Kepolisian R.I.
- 5) Kepala Sekretariat dari masing-<sup>2</sup> Angkatan/POLRI.
- 6) Komandan Detasemen dari masing-<sup>2</sup> Angkatan/POLRI.

/ 7) Pendjabat-<sup>2</sup> .....

- 7) Pendjabat-<sup>3</sup> dari Dinas/Lembaga/Badan Pelaksana Pusat dan Komando-Utama sampai tingkat Kompi yang dianggap perlu oleh Kepala Staf Angkatan/KAPOLRI.

6. Isi tulisan.

a. Staf HANKAM (Tjontoh pada lampiran FF. 2) :

- 1) Tjap djabatan untuk MENHANKAM/PANGAB berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) Gambar Lambang R.I.
  - c) PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA.
- 2) Tjap djabatan untuk Wakil Panglima Angkatan Bersendjata berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) Gambar Lambang HANKAM.
  - c) WAKIL PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA.
- 3) Tjap djabatan untuk Pendjabat-<sup>3</sup> Staf HANKAM (KAS/KASET) berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) DEPARTEMEN.
  - b) STAF HANKAM.
  - c) PERTAHANAN-KEAMANAN.
- 4) Tjap djabatan untuk DAN KORMA HANKAM berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KOMANDAN.
  - c) KORPS MARKAS.

b. Badan Pelaksana Pusat HANKAM (Tjontoh pada lampiran FF. 3) :

- 1) Tjap djabatan untuk KAPUSINTELSTRAT berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KEPALA.
  - c) PUSAT INTELIDJEN STRATEGIS.
- 2) Tjap djabatan untuk KABABEK ABRI berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN.
  - b) KEPALA.
  - c) BADAN PEMBEKALAN ABRI.
- 3) Tjap djabatan untuk Gubernur LEMHANNAS berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :

/ a) DEPARTEMEN .....



- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) GUBERNUR.
  - c) LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL.
- 4) Tjap djabatan untuk Gubernur LEMDIKSKOGAB berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) GUBERNUR.
  - c) LEMDIKSKOGAB.
- 5) Tjap djabatan untuk DANDJEN AKABRI berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KOMANDAN DJENDERAL.
  - c) AKADEMI ABRI.
- 6) Tjap djabatan untuk KAPUSLITBANG berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KEPALA.
  - c) PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.
- 7) Tjap djabatan untuk KAPUSTJADNAS berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut.
- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KEPALA.
  - c) PUSAT TJADANGAN NASIONAL.
- 8) Tjap djabatan untuk Kepala Perindustrian ABRI berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KEPALA.
  - c) PERINDUSTRIAN ABRI.
- 9) Tjap djabatan untuk Kepala Pusat Kesehatan ABRI berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KEPALA.
  - c) PUSAT KESEHATAN ABRI.
- 10) Tjap djabatan untuk Kepala Polisi Militer ABRI berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KEPALA.
  - c) POLISI MILITER ABRI.
- 11) Tjap djabatan untuk Oditur Djenderal ABRI berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :

/ a) DEPARTEMEN .....

- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) ODITUR DJENDERAL.
  - c) ODITURAT DJENDERAL ABRI.
- 12) Tjap djabatatan untuk Kepala Kehakiman ABRI berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KEPALA.
  - c) KEHAKIMAN ABRI.
- 13) Tjap djabatatan untuk Kepala Survey dan Pemetaan ABRI berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KEPALA.
  - c) SURVEY DAN PEMETAAN ABRI.
- 14) Tjap djabatatan untuk Kepala Badan Administrasi Veteran ABRI berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KEPALA.
  - c) BADAN ADMINISTRASI VETERAN ABRI.
- 15) Tjap djabatatan untuk Kepala Pusat Pendidikan Djasmani ABRI berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KEPALA.
  - c) PUSAT PENDIDIKAN DJASMANI ABRI.
- 16) Tjap djabatatan untuk Kepala Pusat Sedjarah ABRI berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KEPALA.
  - c) PUSAT SEDJARAH ABRI.
- 17) Tjap djabatatan untuk Kepala Pusat Pembinaan Mental ABRI berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KEPALA.
  - c) PUSAT PEMBINAAN MENTAL ABRI.
- 18) Tjap djabatatan untuk Kepala Pusat Perlawanan dan Keamanan Rakjat berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
- a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) KEPALA.
  - c) PUSAT PERLAWANAN & KEAMANAN RAKJAT.

/ 19) Tjap .....

- 19) Tjap djabatan untuk Kepala Pusat Penerangan berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
    - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
    - b) KEPALA.
    - c) PUSAT PENERANGAN.
  - 20) Tjap djabatan untuk Kepala Dinas Perhubungan berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
    - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
    - b) KEPALA.
    - c) DINAS PERHUBUNGAN.
  - 21) Tjap djabatan untuk Kepala-<sup>3</sup> Sekretariat dari masing-<sup>3</sup> Badan tersebut diatas berbentuk londjong sebagai tjontoh tjap djabatan Kepala Sekretariat Pusat Kesehatan ABRI, berisi tulisan sebagai berikut :
    - a) PUSAT KESEHATAN ABRI.
    - b) KEPALA.
    - c) SEKRETARIAT.
  - 22) Tjap djabatan untuk Komandan Detasemen Markas dari masing-<sup>3</sup> Badan tersebut diatas berbentuk bundar, sebagai tjontoh tjap djabatan Komandan Detasemen Markas LEMHANNAS, berisi tulisan sebagai berikut :
    - a) LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL.
    - b) KOMANDAN.
    - c) DETASEMEN MARKAS.
  - 23) Tjap djabatan untuk pendjabat-<sup>3</sup> dari Badan-<sup>3</sup>/Djawatan-<sup>3</sup>/Dinas-<sup>3</sup>/Koman-don-Komando jang berada dibawah eselonja berbentuk londjong bagi Badan-<sup>3</sup>/Djawatan-<sup>3</sup>/Dinas-<sup>3</sup> dan berbentuk bundar bagi Komando; sebagai tjontoh Tjap djabatan Gubernur AKABRI bagian Umum dan Darat ber-bentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
    - a) AKADEMI ANGKATAN BERSENDJATA R.I.
    - b) GUBERNUR.
    - c) BAGIAN UMUM & DARAT.
- c. Komando Utama Operasionil HANKAM/ABRI (Tjontoh pada lampiran FF. 4) :
- 1) Tjap djabatan untuk Panglima Komando Strategi Nasional berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
    - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
    - b) PANGLIMA.
    - c) KOMANDO STRATEGI NASIONAL.
  - 2) Tjap djabatan untuk Panglima Komando Maritim Nasional berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
    - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
    - b) PANGLIMA.
    - c) KOMANDO PERTAHANAN MARITIM NASIONAL.

/ 3) Tjap .....

- 3) Tjap djabatan untuk Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) PANGLIMA.
  - c) KOMANDO PERTAHANAN UDARA NASIONAL.
- 4) Tjap djabatan untuk Panglima Komando Wilayah Pertahanan I/Sumatera berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) PANGLIMA.
  - c) KOWILHAN I/SUMATERA.
- 5) Tjap djabatan untuk Panglima Komando Wilayah Pertahanan II/Djawa dan Madura berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) PANGLIMA.
  - c) KOWILHAN II/DJAWA & MADURA.
- 6) Tjap djabatan untuk Panglima Komando Wilayah Pertahanan III/KALIMANTAN berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) PANGLIMA.
  - c) KOWILHAN III/KALIMANTAN.
- 7) Tjap djabatan untuk Panglima Komando Wilayah Pertahanan IV/Sulawesi berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) PANGLIMA.
  - c) KOWILHAN IV/SULAWESI.
- 8) Tjap djabatan untuk Panglima Komando Wilayah Pertahanan V/Nusa-tenggara berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) PANGLIMA.
  - c) KOWILHAN V/NUSATENGGA.
- 9) Tjap djabatan untuk Panglima Komando Wilayah Pertahanan VI/Maluku Irian Barat berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
  - b) PANGLIMA.
  - c) KOWILHAN VI/MALUKU & IRIAN BARAT.
- 10) Tjap djabatan untuk Kepala Sekretariat dari masing-masing Komando tersebut diatas berbentuk londjong sebagai tjontoh tjap djabatan Kepala Sekretariat KOWILHAN I/Sumatera berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) KOWILHAN I/SUMATERA.
  - b) KEPALA.
  - c) SEKRETARIAT.

/ 11) Tjap .....

- 11) Tjap djabatatan untuk Komandan Detasemen Markas dari masing<sup>-2</sup> Komando tersebut diatas berbentuk bundar; sebagai tjontoh tjap djabatatan Komandan Detasemen Markas KOSTRANAS berisi tulisan sebagai berikut :
    - a) KOMANDO STRATEGI NASIONAL.
    - b) KOMANDAN.
    - c) DETASEMEN MARKAS.
  - 12) Tjap djabatatan untuk pendjabat<sup>-2</sup> dari Badan<sup>-2</sup>/Djawatan<sup>-2</sup>/Dinas<sup>-2</sup>/Komando-Komando jang berada dibawah eselonnja berbentuk londjong bagi Badan<sup>-2</sup>/Dinas<sup>-2</sup> dan berbentuk bundar bagi Komando<sup>-2</sup>; sebagai tjontoh :
    - a) Tjap djabatatan untuk Kepala Dinas Penerangan KOWILHAN I/ Sumatera berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
      - (1) KOWILHAN I/SUMATERA.
      - (2) KEPALA.
      - (3) PENERANGAN.
    - b) Tjap djabatatan untuk Panglima KODAM III/17 Agustus berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
      - (1) KOWILHAN I/SUMATERA.
      - (2) PANGLIMA.
      - (3) DAERAH MILITER III/17 AGUSTUS.
- d. Angkatan/POLRI (tjontoh pada lampiran FF. 5, FF. 6, FF. 7) :
- 1) Tjap djabatatan untuk Kepala Staf Angkatan Darat berbentuk bundar dan berisi tulisan dan gambar sebagai berikut :
    - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
    - b) Gambar Lambang ANGKATAN DARAT.
    - c) KEPALA STAF ANGKATAN DARAT.
  - 2) Tjap djabatatan untuk Kepala Staf Angkatan Laut berbentuk bundar dan berisi tulisan dan gambar sebagai berikut :
    - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
    - b) Gambar lambang ANGKATAN LAUT.
    - c) KEPALA STAF ANGKATAN LAUT.
  - 3) Tjap djabatatan untuk Kepala Staf Angkatan Udara berbentuk bundar dan berisi tulisan dan gambar sebagai berikut :
    - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
    - b) Gambar lambang ANGKATAN UDARA.
    - c) KEPALA STAF ANGKATAN UDARA.
  - 4) Tjap djabatatan untuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia berbentuk bundar dan berisi tulisan dan gambar sebagai berikut :
    - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
    - b) Gambar lambang Kepolisian R.I.
    - c) KEPALA KEPOLISIAN R.I

/5) Tjap .....

- 5) Tjap djabatatan Kepala Sekretariat dari masing-<sup>2</sup> Angkatan/POLRI berbentuk londjong; sebagai tjontoh tjap djabatatan Kepala Sekretariat Staf Angkatan Darat berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT.
  - b) KEPALA.
  - c) SEKRETARIAT.
- 6) Tjap djabatatan Komandan Detasemen Markas dari masing-<sup>3</sup> Angkatan/POLRI berbentuk bundar; sebagai tjontoh tjap djabatatan Komandan Detasemen Markas Staf Angkatan Laut, berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT.
  - b) KOMANDAN
  - c) DETASEMEN MARKAS.
- 7) Tjap djabatatan untuk Pendjabat-<sup>3</sup> dari Badan-<sup>2</sup>/Dinas-<sup>2</sup>/Lembaga-<sup>3</sup>/Komando-Komando dari masing-<sup>3</sup> Angkatan/POLRI berbentuk londjong bagi Badan/Dinas/Lembaga dan berbentuk bundar bagi Komando; sebagai tjontoh :
  - a) Tjap djabatatan Kepala Dinas Keuangan Angkatan Udara berbentuk londjong dan berisi tulisan sebagai berikut :
    - (1) MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA.
    - (2) KEPALA.
    - (3) DINAS KEUANGAN.
  - b) Tjap djabatatan Komandan Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan berbentuk bundar dan berisi tulisan sebagai berikut :
    - (1) MARKAS BESAR KEPOLISIAN R.I.
    - (2) KOMANDAN.
    - (3) KOMANDO PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN.
7. Hak membuat. Jang berhak membuat/menentukan Tjap Djabatatan adalah MENHANKAM/PANGAB, dengan tjatatan bahwa demi kelantjaran pembuatan tjap djabatatan, maka diberi wewenang kepada :
  - a. Kepala-<sup>3</sup> Staf Angkatan bagi Badan-<sup>2</sup>/Dinas-<sup>2</sup>/Lembaga-<sup>2</sup>/Komando-<sup>2</sup> ditingkat Angkatannja masing-<sup>3</sup> dan KAPOLRI bagi Badan-<sup>2</sup>/Dinas-<sup>2</sup>/Lembaga-<sup>3</sup>/Komando-Komando ditingkat POLRI.
  - b. Panglima-<sup>2</sup> Komando Utama Operasionil HANKAM bagi Badan/Dinas/Komando ditingkat Komandonja.
  - c. Kepala Sekretariat HANKAM bagi Staf HANKAM dan Badan-badan Pelaksana Pusat HANKAM.

dengan pengertian harus disesuaikan dengan ketentuan-<sup>3</sup> tersebut diatas, serta mengadakan tjontohnja terlebih dahulu kepada MENHANKAM/PANGAB cq WAPANGAB guna mendapatkan pensahan/persetudjuan.

/ 8. Biaja .....

8. Biaya pembuatan tjap djabatan. Biaya pembuatan tjap djabatan dibebankan kepada :
- Staf HANKAM bagi pembuatan tjap djabatan ditingkat Staf HANKAM dan Badan-<sup>2</sup> Pelaksana Pusat HANKAM.
  - Masing-<sup>2</sup> Komando Utama Operasionil HANKAM bagi pembuatan tjap djabatan ditingkat Komando Utama Operasionil HANKAM.
  - Masing-<sup>2</sup> Angkatan/POLRI bagi pembuatan tjap djabatan ditingkat Angkatan/POLRI.
9. Penjimpanan dan Pemusnahan.
- Tjap djabatan yang masih dipergunakan, penjimpanannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan kepada Kepala Sekretariat/atau Pendjabat-<sup>3</sup> yang bersangkutan.
  - Tjap djabatan yang mengandung sedjarah dan tidak dipergunakan lagi, penjimpanannya dilakukan oleh Pusat Sedjarah yang bersangkutan.
  - Tjap djabatan yang tidak berlaku karena rusak dan kesalahan administrasi dan sebagainya, dapat dimusnahkan atau disimpan oleh Pendjabat-<sup>3</sup> yang bersangkutan.

### B A B III

## PAPAN NAMA

### Papan Nama Badan.

#### 10. Ketentuan.

- B e n t u k** : Persegi empat pandjang.
- U k u r a n** : 100 × 520 cm.  
100 × 250 cm.  
40 × 80 cm.
- W a r n a** : Dasar Putih tulisan hitam.
- H u r u f** : Blok tjetak berdiri, dengan ukuran sama dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dibatja. Besarnya huruf/angka sesuai dengan ukuran Papan dan djumlah huruf/angka yang dipergunakan.
- Isi tulisan** : Isi tulisan supaya diatur sedemikian rupa sehingga tidak melebihi dari 3 (tiga) baris.
- Pemasangan** : 1) Didalam komplek ditengah-tengah halaman muka dan diletakkan diatas tiang yang kuat dan tahan lama sekurang-kurangnya setinggi 2 m dari tanah sehingga mudah terlihat (Tjontoh lampiran GG. 1).

/ 2) Khusus .....

- 2) Khusus untuk Papan Nama Instansi yang berada/tergabung menjadi satu kompleks dengan Instansi yang lebih tinggi, Papan Nama Instansi yang lebih rendah memakai Papan Nama yang berukuran 40 × 80 cm. Pemasangannya diatur menurut keadaan tempat yang mudah terlihat (Tjontoh lampiran GG. 2).

11. Ketentuan Pemakaian.

a. Berukuran 100 × 520 cm untuk :

- 1) Staf Pertahanan-Keamanan berisi tulisan sebagai berikut :  
 DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
 MARKAS BESAR ANGKATAN BERSENDJATA  
 REPUBLIK INDONESIA
- 2) Staf Angkatan Darat berisi tulisan sebagai berikut :  
 DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
 MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
- 3) Staf Angkatan Udara, berisi tulisan sebagai berikut :  
 DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
 MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
- 4) Staf Angkatan Laut, berisi tulisan sebagai berikut :  
 DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
 MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT
- 5) Staf Kepolisian R.I., berisi tulisan sebagai berikut :  
 DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
 MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
- 6) Komando-<sup>3</sup> Utama Operasionil, berisi tulisan sebagai berikut :
  - a) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
 KOMANDO STRATEGI NASIONAL
  - b) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
 KOMANDO PERTAHANAN MARITIM NASIONAL
  - c) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
 KOMANDO PERTAHANAN UDARA NASIONAL
  - d) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
 KOMANDO WILAJAH PERTAHANAN I  
 S U M A T E R A
  - e) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
 KOMANDO WILAJAH PERTAHANAN II  
 DJAWA & MADURA
  - f) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
 KOMANDO WILAJAH PERTAHANAN III  
 K A L I M A N T A N
  - g) DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
 KOMANDO WILAJAH PERTAHANAN IV  
 S U L A W E S I

/ h) DEPARTEMEN



- h) **DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
KOMANDO WILAJAH PERTAHANAN V  
N U S A T E N G G A R A**
- j) **DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
KOMANDO WILAJAH PERTAHANAN VI  
MALUKU & IRIAN BARAT**
- b. Berukuran 100 × 250 cm. untuk :
  - 1) Badan-<sup>3</sup> Eselon Staf HANKAM yang berkantor diluar Staf HANKAM antara lain sebagai berikut :
    - a) **STAF PERTAHANAN-KEAMANAN  
INSPEKTORAT DJENDERAL**
    - b) **STAF PERTAHANAN-KEAMANAN  
INSPEKTORAT PENGAWAS KEUANGAN**
  - 2) Badan-<sup>3</sup> Eselon Badan-<sup>2</sup> Pelaksana Pusat dan Komando-<sup>3</sup> Utama Operasionil antara lain sebagai berikut :
    - a) **AKADEMI ANGKATAN BERSENDJATA R.I.  
BAGIAN UMUM & DARAT**
    - b) **AKADEMI ANGKATAN BERSENDJATA R.I.  
BAGIAN LAUT**
    - c) **KOMANDO WILAJAH PERTAHANAN I/SUMATERA  
KOMANDO DAERAH MILITER III/  
17 AGUSTUS**
    - d) **KOMANDO WILAJAH PERTAHANAN II/  
DJAWA & MADURA  
DAERAH ANGKATAN LAUT IV**
    - e) **KOMANDO WILAJAH PERTAHANAN III/  
KALIMANTAN  
KOMANDO DAERAH UDARA II**
  - 3) Badan-<sup>3</sup> Eselon ANGKATAN/POLRI, antara lain sebagai berikut :
    - a) **MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT  
ODITURAT DJENDERAL**
    - b) **MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT  
KOMANDO ARMADA SAMUDRA**
    - c) **MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA  
KOMANDO LOGISTIK**
    - d) **MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
KOMANDO PENGEMBANGAN PENDIDIKAN & LATIHAN**

Papan Nama Djabatan.

12. Ketentuan.

- a. B e n t u k : Persegi empat pandjang.
- b. U k u r a n : 30 × 13 cm.
- c. W a r n a : Dasar tjoklat pelitur, tulisan putih.

/ d. Huruf .....

- d. **H u r u f** : Terdiri dari huruf-<sup>2</sup> tjetak berdiri (Blokletter) dengan ukuran sama dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dibatja (terang/djelas), sedangkan besar/ketjilnja huruf-<sup>2</sup> harus disesuaikan dengan ukuran papan jang dipergunakan dan huruf-<sup>2</sup> harus dituliskan pada papan tersebut sebelah-menjebelah (muka papan kedua-duanja).
- e. **Larangan** : Tidak diperkenankan menambah gambaran-<sup>2</sup> atau garis-garis dalam huruf/tulisan papan nama djabatan.
- f. **Pemasangan** : Dipasang diluar/pintu masuk ruangan Pendjabat jang bersangkutan dibagian atas sebelah kanan (bila dilihat dari luar). (Tjontoh lampiran GG. 3).

13. **Ketentuan Pemakaian.** Jang berhak memakai/mempergunakan Papan Nama Djabatan ialah :

- a. Para pendjabat jang berada diruangan tersendiri.
- b. Piket dan tempat-<sup>2</sup> Pendaftaran/Pelajaran.

**Papan Nama Pendjabat.**

14. Bilamana dipandang perlu dapat mempergunakan Papan Nama Pendjabat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. **B e n t u k** : Persegi empat pandjang.
- b. **U k u r a n** : 30 × 7 cm.
- c. **W a r n a** : Dasar tjoklat pelitur, tulisan putih.
- d. **H u r u f** : Idem BAB III fasal 12 sub-fasal d.
- e. **Isi tulisan** : NAMA, PANGKAT, CORPS, NRP. (djika tidak tjukup satu baris supaja disusun mendjadi dua baris sebagai berikut: baris pertama NAMA kemudian baris-<sup>2</sup> berikutnya PANGKAT, CORPS, NRP. ....).
- f. **Larangan** : Tidak diperkenankan menambah gambaran-<sup>2</sup> atau garis-<sup>2</sup> dalam huruf/tulisan papan nama pendjabat.
- g. **Pemasangan** : Digantungkan/dikaitkan dibawah Papan Nama Djabatan. (Tjontoh lampiran GG. 3).

15. **Ketentuan Pemakaian.** Jang berhak memakai/mempergunakan Papan Nama Pendjabat ialah : Pendjabat-pendjabat jang berhak memakai/mempergunakan Papan Nama Djabatan.

16. Bila didalam suatu ruangan ada dua atau lebih Pendjabat jang berhak memakai/mempergunakan Papan Nama Djabatan/Papan Nama Pendjabat, maka pada Papan Nama djabatannja ditjantumkan sekalian Nama Pendjabat tersebut dengan tetap memakai ukuran 30 × 13 cm. serta digantungkan/dikaitkan dibawah Papan Nama Djabatan jang lain. (Tjontoh lampiran GG. 4).

**BAGIAN KESEPULUH**  
**STATISTIK DAN SISTIM PENGOLAHAN DATA**  
**OTOMATIS ( SPEDO )**

**B A B I**  
**U M U M**

1. Pendahuluan. Statistik dan Sistim Pengolahan Data Otomatis (SPEDO) adalah merupakan masalah yang penting dalam bidang administrasi umum, dan terdiri dari unsur-<sup>2</sup> yang complex, sehingga dianggap perlu adanya suatu pedoman yang konkrit dilingkungan Departemen Pertahanan-Kemampuan.
2. Maksud dan tujuan. Pedoman Statistik dan SPEDO ini dibuat dengan maksud agar setiap pejabat dalam lingkungan Departemen Pertahanan-Kemampuan mempunyai kesamaan dalam pengertian dan cara bekerja, sehingga tercapainya suatu tujuan, ialah kelancaran, efisiensi dan kesempurnaan dalam bidang penjadjian data kepada Pimpinan untuk maksud-<sup>3</sup> perencanaan, pengawasan, LITBANG dan penindakan.

**B A B II**  
**S T A T I S T I K**

3. Pengertian.
  - a. Statistik adalah suatu ilmu; sedangkan ciri-<sup>3</sup> ilmu itu sendiri adalah : Sistematis akademis, berkembang. Statistik telah berkembang dari sedjak adanya NEGARA (Statistik — State — Negara). Dalam periode perkembangan ini telah hidup beberapa generasi Sardjana-<sup>3</sup> Statistik yang merumuskan/menelorkan definisinja masing-<sup>3</sup>, sehingga untuk mata pelajaran statistik telah timbul tidak kurang dari 180 buah definisi. (APF MICHEL dalam bukunya "Statistiek en Grafische Voorstelling").
  - b. Kita kutip beberapa definisi, dan kita perhatikan unsur-<sup>2</sup>nja yang penting :
    - 1) Statistik adalah pembukuan setjara teratur dari data yang dapat ditangkap setjara massal (C.A. VERRYNSTUART).
    - 2) Statistik adalah penjadjian data mengenai kenyataan sosial, dan tata negara dalam bentuk angka-angka (M.S. AMRAL).
    - 3) Statistik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan interpretasi kepada data kuantitatif, hasil dari berbagai pengukuran dan pentjarjahan (H. de JONGE).

/ c. Statistik .....

c. Statistik arti luas dan arti sempit.

- 1) Statistik arti luas adalah : ilmu dan seni tentang perkembangan dan penggunaan metode<sup>3</sup> pengumpulan dan penjurusan data kuantitatif hasil pengukuran dan pentjatjahan atas keadaan manusia/benda dan kenyataan<sup>3</sup> alam dan pengambilan kesimpulan<sup>3</sup> dan perkiraan<sup>3</sup> berdasarkan teori kemungkinan (T.A. BANCROFT dalam bukunya "Statistical Theory in research").
- 2) Statistik arti sempit adalah : data tentang sesuatu golongan atau sesuatu yang penting, yang merupakan angka<sup>3</sup> yang telah tersusun.

d. Pengertian Statistik untuk DEPHANKAM. Statistik DEPHANKAM, adalah suatu pembukuan yang teratur, data yang dinjatakan dalam bentuk angka<sup>3</sup> dari kenyataan<sup>3</sup> dilingkungan DEPHANKAM atau masyarakat, yang berguna bagi DEPHANKAM.

4. Kegunaan.

a. Statistik sebagai pernyataan data kuantitatif :

- 1) Lebih disukai, karena exact.
- 2) Semua yang salah (individual bias) dapat dihindarkan.
- 3) Dapat diperiksa oleh orang lain.
- 4) Pada waktu diambil kesimpulan, batas<sup>3</sup> kesalahannya dapat dikontrol.
- 5) Komentar yang panjang lebar dapat diganti oleh notasi<sup>3</sup> aljabar yang singkat tepat.

b. Statistik sebagai sumber data yang universal :

- 1) Menempatkan manusia pada prospektif yang tepat, sehingga berpandangan objektif.
- 2) Kemungkinan kita mengadakan perkiraan keadaan dan menjusun perencanaan.
- 3) Dapat tertjapainja keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan.
- 4) Kita mengetahui tindakan mana yang lebih dulu harus dikerdjakan (sifat ambeg parama arta).

c. Statistik sebagai kumpulan metode<sup>3</sup> analisa :

- 1) Dapat kita pakai untuk mendapatkan interpretasi seperlunya, menarik sesuatu kesimpulan dan selandjutnja merentjanakan sesuatu.
- 2) Membantu mengurangi beban pemikiran yang kuat pada waktu mengadakan penelitian<sup>3</sup>/penjelidikan.

5. Unsur<sup>3</sup> Statistik. Unsur<sup>3</sup> Statistik adalah pokok<sup>3</sup> kegiatan statistik :

- a. Pengumpulan data; ialah mengadakan pentjatjahan atau pengukuran dan pembukuan data, baik setjara sensus atau setjara registrasi biasa.
- b. Pengolahan data. Setelah data dikum<sup>3</sup>ikan, data tersebut harus diolah untuk mendapatkan data yang tersusun. Djika data sedikit, tjukup diolah dengan tangan; tetapi djika data banjak, akan lebih sempurna djika diolah dengan

/ mesin. ....

mesin. Mesin pengolah data ada yang mekanis, elektromekanis dan otomatis. (Tjontoh mesin pengolah otomatis misalnja : ADPS model IBM 1401).

- c. Penjadjian data. Setelah data itu tersusun, data kita sadjikan kepada pimpinan dalam bentuk : text (uraian), tabel atau grafik (Periksa BAB III).
- d. Analisa data. Setelah data diterima oleh pimpinan, data akan diperiksa dan dianalisa. Pimpinan dapat sadja mengambil kesimpulan setjara intuitif tetapi dapat djuga mempergunakan metode-<sup>3</sup> ilmiah. (Metode analisa ilmiah tak akan dibahas dalam buku ini, karena terlalu akademis).

6. Sasaran. Statistik DEPHANKAM dibebani 4 bidang yang luas, jaitu :

- a. Pengolahan bahan Personil. Diantara 4 bidang fungsi, maka fungsi ini adalah yang terberat, meliputi :
  - 1) Personil Militer (rekapitulasi kekuatan, daftar nominatif).
  - 2) Personil Sipil (rekapitulasi kekuatan, daftar nominatif).
  - 3) Korban-<sup>3</sup> pertempuran (gugur, luka, hilang).
  - 4) Peremadjaan Personil.
  - 5) Mutasi-<sup>3</sup> (pangkat, pindah, penghargaan, hukuman dll).
  - 6) Pengurusan dosir personil.
  - 7) Ichtsar penugasan.
  - 8) D.Ll.
- b. Pengolahan data mengenai alat-peralatan. Penjediaan (procurement) dan ke-  
butuhan (supply), meliputi :
  - 1) Laporan tentang alat-peralatan.
  - 2) Perhitungan penjediaan (stock).
  - 3) Inventarisasi kekajaan menurut kenyataan.
  - 4) Perentjanaaan barang-<sup>3</sup> yang diawasi.
  - 5) Pengawasan pembelian.
  - 6) Publikasi dan katalogus.
  - 7) Laporan tentang perpustakaan film.
  - 8) D.Ll.
- c. Pengolahan data yang mengenai keuangan. Penggunaan dan biaja-<sup>3</sup>, meliputi :
  - 1) Pembayaran dan penagihan.
  - 2) Asuransi djiwa.
  - 3) Tabungan-<sup>3</sup> ABRI.
  - 4) Perhitungan-<sup>3</sup> biaja.
  - 5) Perhitungan anggaran.
  - 6) Perhitungan perbendaharaan tentang keuangan.
  - 7) Ongkos-<sup>2</sup> pengangkutan didarat, dilaut dan diudara.
  - 8) D.Ll.
- d. Data-<sup>3</sup> lain yang tidak termasuk sub-sub fasal tersebut diatas, meliputi :
  - 1) Analisa-<sup>3</sup> pelaksanaan pekerdjaan.
  - 2) Kemadjuan-<sup>3</sup> pembangunan.

- 3) Statistik mengenai kesehatan.
- 4) Laporan mengenai penyelidikan-<sup>2</sup> ilmiah, kegiatan-<sup>2</sup> LITBANG.
- 5) Kekayaan ABRI.
- 6) Pelanggaran-<sup>2</sup> hukum (chusus untuk anggauta ABRI).
- 7) Ketjelakaan lalu-lintas anggauta ABRI.
- 8) D.l.l.

#### 7. Data.

- a. Data Statistik umumnja merupakan angka-<sup>2</sup> (kwantitatif), mempunjai unit-jang dapat dipergunakan untuk mentjatjah atau mengukur. Data ada jang discrete dan ada jang continuous. Sebelum memulai kegiatan statistik, kita harus menjusun klasifikasi data terlebih dahulu. Klasifikasi data ini ditentukan oleh dua hal : data-<sup>2</sup> apa jang akan kita susun mendjadi statistik, dan untuk keperluan apa statistik jang kita susun itu.
  - b. Sumber data statistik DEPHANKAM adalah LAPORAN. Laporan berasal dari semua Instansi-<sup>2</sup> dilingkungan DEPHANKAM dan SATMINKAL. Djadi seluruh instansi DEPHANKAM akan menentukan berguna atau tidaknja statistik DEPHANKAM. Departemen-<sup>2</sup> lain, Biro Pusat Statistik, dll., merupakan sumber-<sup>2</sup> untuk melengkapi statistik kita.
  - c. Sjarat data jang dilaporkan harus : BENAR, AKTUIL dan mempergunakan BENTUK formulir jang telah ditentukan. Mengenai BENAR-nja semua keterangan merupakan sjarat mutlak, karena dengan tiadanja kepertjajaan atas benarnja bahan, maka tidak akan berguna lagi kegunaan statistik, ketjuali kalau dapat dinjatakan prosentase penilaiannja.
8. Hubungan Statistik dan Ilmu-<sup>2</sup> lain. Didalam penghidupan jang modern ini, kita sudah tidak dapat menggambarkan kehidupan manusia tanpa statistik. Misal-nja untuk kepentingan Nasional, seperti djumlah penduduk, tambahan penduduk, penjakit, pengendalian harga, lalu lintas dsb. kesemuanja membutuhkan angka-<sup>2</sup> statistik. Dalam lapangan ekonomi, statistik djuga mengambil peranan penting; statistik menggambarkan gejala-gejala dalam sesuatu masjarakat, sedang ilmu ekonomi berkewadjiban menelaah keadaan-<sup>2</sup> itu sebagai pengatur penghidupan dalam masjarakat itu. Djadi statistik berhubungan rapat dengan hal-ihwal manusia (demografi), masjarakat (sosial) dan ekonomi. Statistik berhubungan rapat dengan data jang terpengaruh oleh faktor-<sup>2</sup> jang sukar dikontrol).

### B A B III

#### PELAPORAN DATA

9. Matjam data. Pada fasal 6 kita telah mengetahui matjam data apa jang harus dilaporkan dan diolah. Chusus dibidang personil, kita membagi adanja 2 matjam pelaporan data :
  - a. Laporan kekuatan : ialah laporan rekapitulasi kekuatan semua anggauta, baik ABRI atau Pegawai Sipil tentang djumlah anggauta baik jang organik atau non organik, jang ada disesuatu Kesatuan disusun menurut golongan pangkat.

/ b. Laporan .....

b. Laporan mutasi : adalah laporan tentang suatu tindakan resmi dalam status seseorang anggota ABRI atau Sipil yang mempengaruhi registrasi atau kekuatan DEPHANKAM . Laporan mutasi dibagi menjadi 2 (dua) golongan terdiri dari :

- 1) Mutasi golongan I : yaitu setiap perubahan status seseorang yang langsung mempengaruhi kekuatan personil (pengangkatan baru, perubahan pangkat, pindah, berhenti, meninggal dll).
- 2) Mutasi golongan II : yaitu perubahan<sup>3</sup> lainnya yang tidak langsung mempengaruhi kekuatan personil, tetapi yang menambah/merubah registrasi seseorang (perubahan keluarga, pendidikan umum/ABRI, penugasan belajar dll). Semua perubahan seseorang harus didasarkan kepada bahan<sup>3</sup> asli atau salinan daripada perubahan<sup>3</sup> itu, yang lazim disebut bahan<sup>3</sup> authentic.

Bahan<sup>3</sup> authentic terdiri atas :

- a) Surat Keputusan.
- b) Surat Perintah.
- c) Surat Keterangan Pengurangan Kekuatan (SKPK).
- d) Dan lain-lainnya.

10. Bentuk<sup>3</sup> laporan. Bentuk<sup>3</sup> blanko/formulir untuk pelaporan data personil, misalnya :

- a. Blanko formulir untuk rekapitulasi kekuatan per pangkat.
- b. Blanko formulir untuk pengangkatan anggota baru.
- c. Blanko formulir untuk mutasi.
- d. Blanko formulir untuk rekapitulasi kekuatan yang disertai daftar dislokasi (dari SATMINKAL<sup>3</sup>).
- e. Blanko Surat Keterangan Pengurangan Kekuatan (SKPK).
- f. Dll

Bentuk<sup>3</sup> blanko formulir tersebut diatas harus diintegrasikan antar Angkatan/POLRI dan distandardisasikan. Bentuk tersebut juga harus disahkan dengan suatu peraturan.

## B A B IV

### TABEL DAN GRAFIK

11. Teks, Tabel dan Grafik.

- a. Pada umumnya pengertian statistik itu didasarkan pada tiap gambaran atau pernyataan jumlah dari gejala<sup>3</sup> yang disajikan dengan angka<sup>3</sup> (tabel), lukisan<sup>3</sup> (grafik) atau uraian (teks).
- b. Statistik dengan angka<sup>3</sup> adalah lebih jelas dan lebih lengkap daripada statistik dengan lukisan, tetapi kurang memberikan gambaran yang jelas (overzicht) daripada statistik dengan lukisan.

/ c. Lagi .....

- c. Lagi pula statistik dengan lukisan adalah lebih mudah dapat diingat serta kerap kali dapat membayangkan lebih jelas dan terang perbandingannya dan hubungannya gejala-<sup>2</sup> itu satu dengan lainnya. Dalam dunia perusahaan dan perdagangan, kita seringkali mempergunakan lukisan-<sup>2</sup> grafik sebagai reklame untuk menarik perhatian masyarakat.
- d. Statistik dengan uraian (teks) tidak akan dapat memberikan pernyataan yang ringkas dan nyata seperti halnya dengan statistik dengan angka ataupun statistik dengan lukisan. Statistik dengan uraian ini tidak akan dibicarakan lebih lanjut, berhubung tjara ini jarang dipergunakan lagi.

## 12. Petunjuk pembuatan tabel.

- a. Tabel statistik dapat dianggap sebagai singkatan daripada keterangan<sup>2</sup> statistik. Jika seseorang menjelidiki persoalan-<sup>2</sup> apa saja tentang statistik, tentu selalu dibutuhkannya tabel-<sup>2</sup> itu.

*Kegunaan tabel* sebagai sesuatu bentuk dalam penjadjian data :

- 1) Tabel-<sup>2</sup> statistik menghemat ruangan dan menjingkat keterangan-<sup>2</sup>/pendjelasan-<sup>2</sup> tertulis sampai keminimum.
  - 2) Tabel itu memudahkan melihat adanya hubungan-<sup>2</sup> setjara visuul (penglihatan) serta memudahkan proses-<sup>2</sup> membanding-bandingkan.
  - 3) Data yang ditabulasikan lebih mudah di-ingat-<sup>2</sup> dari pada data yang tidak ditabulasikan.
  - 4) Penjusunan setjara tabel memudahkan pendjumlahan data-<sup>2</sup> angka yang ada dalam sel-<sup>2</sup>, serta memudahkan untuk menemukan kekeliruan-<sup>2</sup> dan kekurangan-<sup>2</sup>.
  - 5) Tabel statistik adalah dasar untuk segala matjam penghitungan-<sup>2</sup>.
- b. Tjontoh tabel. Suatu tabel disusun oleh beberapa garis lurus yang ditarik tipis atau tebal, tunggal atau kembar (dobbel), mendatar atau tegak lurus menurut keperluan, sehingga oleh karenanya tersusun baris-<sup>2</sup> atau kolom-<sup>2</sup> yang teratur baik dan terang. Berikut disadjikan suatu tjontoh tabel, dengan disebutkan nama-<sup>2</sup> bagian-<sup>2</sup> tabel yang pokok.

Djudul PENDAPATAN PER CAPITA, NEGARA-<sup>2</sup> TERTENTU, 1949

Kepala- <sup>2</sup> kolom	No. Urut	NEGARA	PENDAPATAN (Dolar Amerika)	Keterangan
Kepala- <sup>2</sup> baris	(1.)	Inggris	\$ 773	
	(2.)	Perantjis	482	
	(3.)	Uni Sovjet	308	
	(4.)	I t a l i	235	
	(5.)	Junani	128	
	(6.)	Djepang	100	
	(7.)	I r a n	85	
	(8.)	I n d i a	57	
	(9.)	Korea Selatan	35	

Sumber United Nations Bill

/ Keterangan : .....



**Keterangan :**

- 1) Djudul (titel). Tempat dimana ditjantumkan setjara ringkas tapi tjukup jelas dapat dimengerti matjam atau djenisnja statistik. Harus dapat menjawab pertanyaan : Apa, dimana, kapan.
- 2) Kepala kolom. Ruangan untuk pengisian keterangan-<sup>2</sup> dari isinja kolom-<sup>2</sup>
- 3) Kolom (ladjur). Tempat untuk pengisian deretan-<sup>2</sup> angka-<sup>2</sup> (bilangan-<sup>2</sup>) jang tersusun tegak lurus (vertikal).
- 4) Kepala baris. Tempat untuk pengisian keterangan apa jang terisi berderet, disampingnja dalam baris jang bersangkutan.
- 5) Baris. Tempat untuk diisi dengan deretan angka-<sup>2</sup> (bilangan-<sup>2</sup>) menurut garis jang mendatar (horizontal).
- 6) Sel. Tempat untuk pengisian angka atau tanda. (lihat sub-fasal d).

**c. Beberapa petundiuk dalam pembuatan tabel.**

- 1) Tabel jang memuat banjak kolom, sebaiknya diberi nomor urut, gunanja untuk memudahkan penundiukan. Untuk kepala-<sup>2</sup> baris harus djuga diberi nomor urut. Untuk djelasnja, angka-<sup>2</sup> nomor itu sedapat mungkin ditulis setjara lain, berbeda dengan angka-<sup>2</sup> jang terdapat didalam kolom-<sup>2</sup>
- 2) Tabel jang memuat banjak sekali baris-<sup>2</sup>, sehingga memerlukan berlembar-lembar kertas, maka untuk lembar kertas kedua, ketiga dan selandjutnja untuk kepala kolom tjukup dituliskan nomor urut kolomnja.
- 3) Tabel jang sangat pandjang mendatarnja, sehingga seringkali sukar di-batja, dapat dipermudah pembatjaannja dengan mengulangi tulisan jang terdapat dalam ladiur-depan, atau bila keterangan-<sup>2</sup> dalam ladjur depan itu bernomor, dituliskan lagi nomor itu, disebelah kanan dari kolom-<sup>2</sup> jang ada.
- 4) Djika tempat untuk kepala kolom terlampau ketjil dan sempit untuk dapat diisi dengan keterangannja setjara mendatar, maka keterangan itu dapat ditulis setjara vertikal.

**d. Beberapa tanda dalam tabel.**

Tanda-<sup>2</sup> jang lazim dipergunakan ialah :

. (titik) atau — (garis) *berarti* : Angka-<sup>2</sup>nja bahan tidak ada.

o (o,oo) *berarti* : angka-<sup>2</sup>nja adalah terlampau ketjil untuk dinjatakan perbandingannja dengan angka-<sup>2</sup> lain dalam tabel itu dalam suatu satuan.

\* (bintang) *berarti* : angka-<sup>2</sup>nja bersifat sementara.

**13. Pembulatan angka-<sup>2</sup>.**

- a. Kedalam tabel seringkali ditjantumkan angka-<sup>2</sup> bulatan. Dalam tjara membulatkan angka-<sup>2</sup> baik angka biasa maupun angka prosentasi harus diperhatikan tjara-<sup>2</sup> jang lazim dipakai, jaitu : djika angka-<sup>2</sup> jang akan dihapuskan itu adalah angka-<sup>2</sup> 0-1-2-3 atau 4, maka angka-<sup>2</sup> ini dibulatkan kebawah; sedangkan angka-<sup>2</sup> 5-6-7-8-dan 9 dibulatkan keatas.

/ b. Dalam .....

- b. Dalam pendjumlahan suatu deretan angka<sup>3</sup> bulatan ada kemungkinan dari angka djumlah yang diperoleh itu tidak dapat tjorjok dengan djumlah angka yang dibulatkan, tjontoh :

Angka yang diperhitungkan Dua tjara pembulatan

	(1)	(2)
306,9	307	307
535,6	535	536
35,7	36	36
12,6	13	13
<hr/> 890,8	<hr/> 891	<hr/> 892

Keterangan dari tjontoh diatas, adalah sbb. :

- 1) Mengolah angka<sup>3</sup> bulatan sedemikian rupa, sehingga djumlahnja tjorjok menjadi 891, jaitu dengan merubah angka yang terbesar (536) menjadi angka 535.
- 2) Membiarkan angka<sup>3</sup> bulatan, demikian pula dengan angka-djumlahnja (892); sebagai tjatatan dibawah daftar (noot) diterangkan bahwa angka<sup>3</sup> itu adalah angka<sup>3</sup> bulatan.
- c. Sesuai dengan keterangan yang tersebut diatas ini kita kerdjakan dengan pembulatan angka<sup>3</sup> prosentase, yang angka djumlahnja seringkali tidak tjorjok 100%.
- d. Djika dalam sesuatu tabel angka<sup>3</sup> harus dibulatkan baik mendatar (horizontal) maupun tegak lurus (vertikal), maka tjaranja :
  - 1) membulatkan angka — djumlahnja (totaal) yang terbesar.
  - 2) membulatkan angka — djumlahnja (sub-totaal).
  - 3) membulatkan angka<sup>3</sup> yang didjumlahkan (pertama).

Tjontoh :

			Djumlah
30,2	6,7	7,5	44,4
11,1	4,3	8,9	24,3
12,9	2,8	10,2	25,9
19,0	9,2	12,7	40,9
22,5	41,4	13,8	76,7
<hr/> 95,7	<hr/> 64,4	<hr/> 53,1	<hr/> 212,2

- 1) Djumlah 212,2 dibulatkan menjadi 212.
- 2) Membulatkan :
 

95,7	jadi	96
64,4	„	64
53,1	„	53

 } Djumlah besar dibiarkan 212, meskipun djumlah sub<sup>3</sup> total ada 213;
- 3) Masing<sup>3</sup> angka dibulatkan, selanjutnja mengikuti ketentuan<sup>3</sup> seperti tersebut sub fasal b diatas.

14. Matjam grafik. Pada umumnja kita dapat melihat lebih tjepat dan mudah perbandingan antara beberapa data dari lukisan<sup>3</sup> grafik dengan susunan yang sederhana dari pada tabel<sup>3</sup> atau daftar<sup>3</sup> yang berisi angka<sup>3</sup> (bilangan<sup>3</sup>). Lukisan grafik banjak matjamnja, maka untuk peladjaran ini kita ambil beberapa buah sadja diantaraja, seperti :

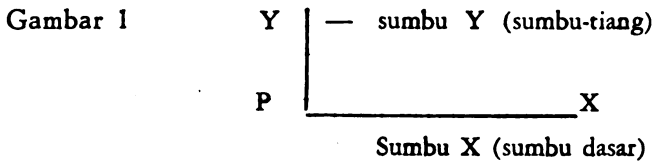
/ a. Grafik .....

- a. Grafik garis.
- b. Grafik bidang, misalnja : Diagram pias, Diagram lingkaran, Diagram gambar dan Kartogram.

15. Grafik garis.

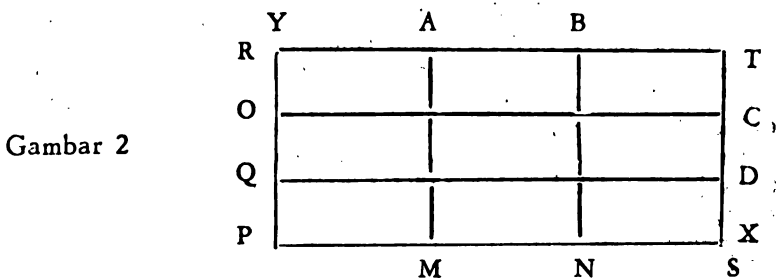
- a. Tjara melukiskan suatu keadaan dengan grafik garis.

Mula<sup>3</sup> kita menarik suatu garis lurus mendatar P X jang disebut sumbu X atau sumbu-dasar. Dari titik P (= titik pangkal) ditarik garis P Y tegak lurus diatas P X. Garis P Y disebut sumbu Y atau sumbu tiang.



- b. Djika kita menaruh suatu titik T diantara sumbu X dan sumbu Y, lalu ditarik garis TR kesumbu-tiang jang sedjadjar dengan sumbu-dasar, maka semua titik pada garis TR itu sama djaraknja dari sumbu-dasar ( $RP=AM=BN$ ) (lihat gambar 2).

Demikian pula halnja dengan garis TS jang ditarik tegak lurus pada sumbu dasar; tiap<sup>3</sup> titik pada garis itu sama djaraknja dari sumbu-tiang ( $TR=CO=DQ$ ) (lihat gambar 2).

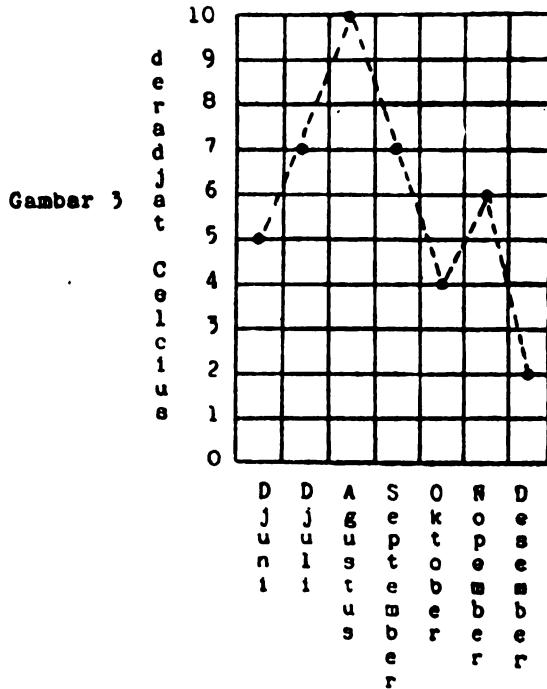


Garis TR disebut absis dan garis TS disebut ordinat dari titik T.

- c. Untuk menggambarkan sesuatu keadaan pertama-tama kita tempatkan angka<sup>3</sup> pada sumbu-dasar dan pada sumbu-tiang. Biasanja pada sumbu dasar ditaruh angka<sup>3</sup> atau ukuran<sup>3</sup> jang mempunjai kenaikan atau tingkatan jang tetap seperti angka-angka tahun, nama bulan, nama tempat, nama pangkat dsb. (skala hitung untuk independent variable). Pada sumbu-tiang ditaruh angka<sup>3</sup> atau djumlah<sup>3</sup> jang turun naik atau berubah-ubah seperti djumlah orang, djumlah uang, djumlah barang, djumlah berat dls. (dependent variable). Kemudian keadaan itu dilukiskan diantara sumbu X dan sumbu Y. Untuk djelasnja perhatikanlah tjontoh dibawah ini.

/ Rata<sup>2</sup> .....

Rata<sup>2</sup> suhu udara dikota TOKYO (bulanan) tahun 1952.



Dalam gambar 3 ini dilukiskan dengan sebuah grafik garis rata<sup>3</sup> bulanan suhu udara dikota TOKYO dalam tahun 1952 dari bulan Djuni s/d bulan Desember. Tampak djelas naik-turunnja suhu itu; dalam bulan Djuni suhu rata<sup>3</sup> adalah 5 derajat Celcius, Djuli 7 derajat Celcius, Agustus 10 derajat Celcius, September 7 derajat Celcius, Oktober 4 derajat Celcius, Nopember 6 derajat Celcius dan Desember 2 derajat Celcius.

d. Garis jang menghubungkan titik<sup>3</sup> pengukuran disebut **grafik garis**.

#### 16. Grafik bidang.

- a. **Grafik bidang** adalah sematjam diagram jang menjatakan sesuatu gejala dengan lukisan<sup>3</sup> atau gambar<sup>3</sup>. Perbandingan besarnja data dinjatakan dengan perbandingan *luas* dari bidang<sup>3</sup>. Grafik bidang ditijptakan bERMATJAM-MATJAM maksudnja untuk lebih mempermudah/mempertjepat penafsiran, sesuai dengan karakteristik daripada data.
- b. Berturut-turut diberikan tjontoh 4 matjam grafik bidang, ialah :
  - 1) Diagram — pias
  - 2) Diagram — lingkaran.
  - 3) Diagram — gambar.
  - 4) Diagram — peta.
- c. **Diagram pias :**
  - 1) Djika variable bebas (independent variable) banjak djumlahnja/matjam-nja, maka sesuatu gejala dapat dinjatakan dengan diagram pias.
  - 2) Tjontoh :

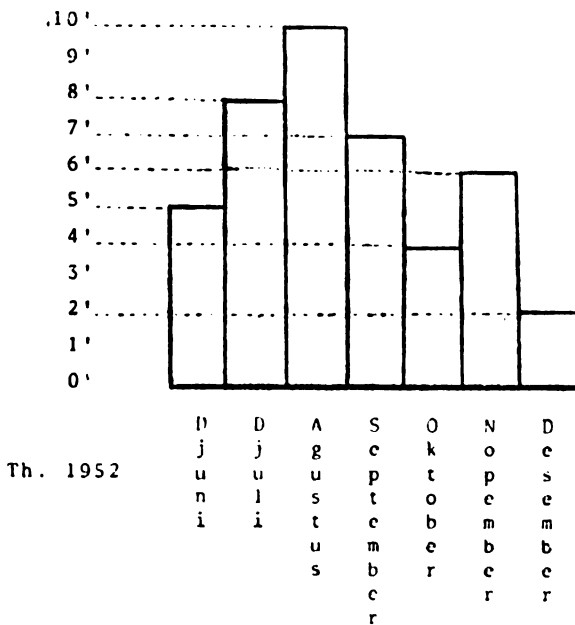
/ Pemakaian .....

Pemakaian kertas di DEPHANKAM tahun 1952.

Djuni	— 5 ton
Djuli	— 8 ton
Agustus	— 10 ton
September	— 7 ton
Oktober	— 4 ton
Nopember	— 6 ton
Desember	— 2 ton

- 3) Bila data mengenai pemakaian kertas ini akan kita wujudkan sebagai diagram pias, maka mula<sup>2</sup> kita menarik garis lurus mendatar. Garis itu selanjutnya dibagi 7 bagian yang sama pandjangnya (sesuai dengan banjaknya bulan yang akan kita gambar) dan ditarik garis<sup>2</sup> tegak lurus pada garis yang telah terbagi dalam 7 bagian tadi, yang melalui titik<sup>2</sup> pembagi, sehingga oleh karenanya terlukis 7 buah empat persegi pandjang. Lebar empat persegi pandjang itu sama, akan tetapi tingginya dibuat berbeda-beda satu sama lain, sesuai dengan perbandingan besarnya ton. Dalam hal ini perbandingan besarnya ton adalah 5 : 8 : 10 : 7 : 4 : 6 : 2.

- 4) Untuk djelasnja lihat gambar dibawah ini.  
Skala



/ Pada .....

Pada gambar tersebut, disebelah kiri lukisan ditarik garis skala untuk mempermudah pembatjaan.

d. Diagram lingkaran.

- 1) Dika variable bebas sedikit djumlahnja/matjamnja, maka sesuatu gejala dapat dinjatakan dengan diagram lingkaran (circle diagram).
- 2) *Tjontoh* : Menurut tjatatan, pendidikan umum anggauta Staf HANKAM adalah sebagai berikut :

1000 orang berpendidikan SMA  
 2000 orang berpendidikan SMP dan  
 3000 orang berpendidikan SD.

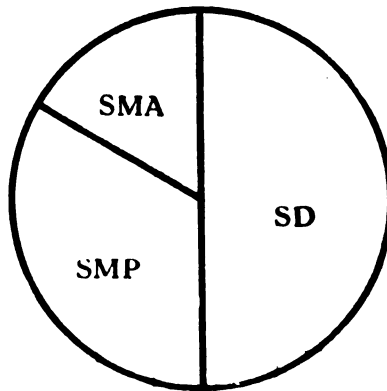
- 3) Dari tjatatan tersebut diatas, njatalah bahwa perbandingan djumlah satu dengan lainnja adalah : 1000 : 2000; 3000 = 1 : 2 : 3. Karena satu lingkaran sama dengan 360 deradjat, maka untuk 3 matjam pendidikan umum itu lingkaran kita bagi dalam 3 djuring, mendjadi :

$$\text{djuring ke-1 (SMA)} = 1/6 \times 360^\circ = 60^\circ$$

$$\text{djuring ke-2 (SMP)} = 2/6 \times 360^\circ = 120^\circ$$

$$\text{djuring ke-3 (SD)} = 3/6 \times 360^\circ = 180^\circ$$

- 4) Gambarnja adalah sebagai berikut :



- 5) Pembagian lingkaran mendjadi djuring<sup>3</sup> itu setjara mudah dapat dilakukan dengan mempergunakan busur deradjat (gradenboog).

e. Diagram gambar.

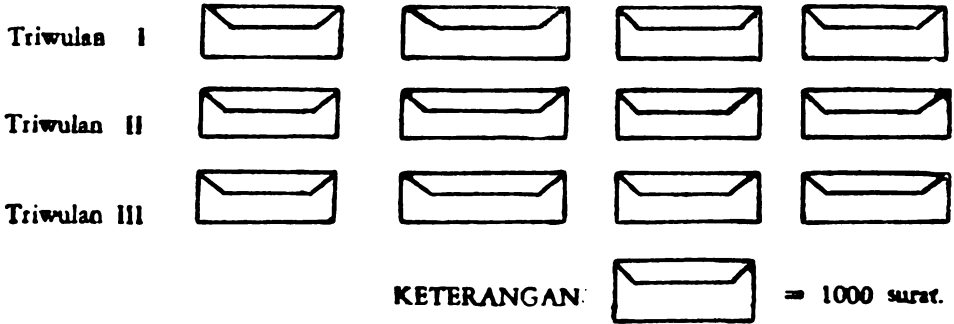
- 1) Lukisan<sup>3</sup> grafik yang populer, ialah diagram gambar, dimana gejala<sup>3</sup> dinjatakan dengan lukisan<sup>2</sup> yang biasanja disesuaikan dengan wujudnja keadaan yang sebenarnja, misalnja :

- a) Grafik mengenai djumlah banjaknja pengiriman surat<sup>3</sup> pos dilukiskan dengan gambar sampul.
- b) Grafik mengenai djumlah banjaknja orang<sup>3</sup>, dilukiskan dengan gambar orang.
- c) Grafik mengenai djumlah banjaknja kendaraan dilukiskan dengan gambar kendaraan.

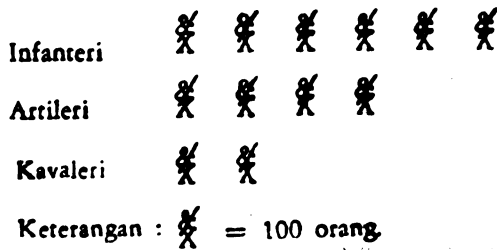
/ 2) Lihat .....

2) Lihat beberapa tjontoh dibawah ini :

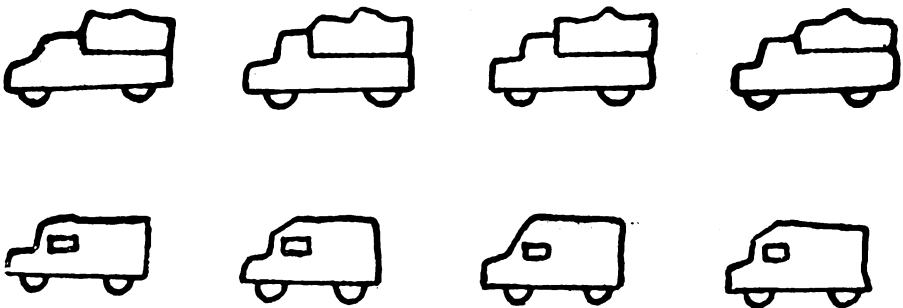
a) Pengiriman Surat<sup>2</sup> Pos :



b) Kekuatan Militer didaerah X :



c) Keadaan Kendaraan :

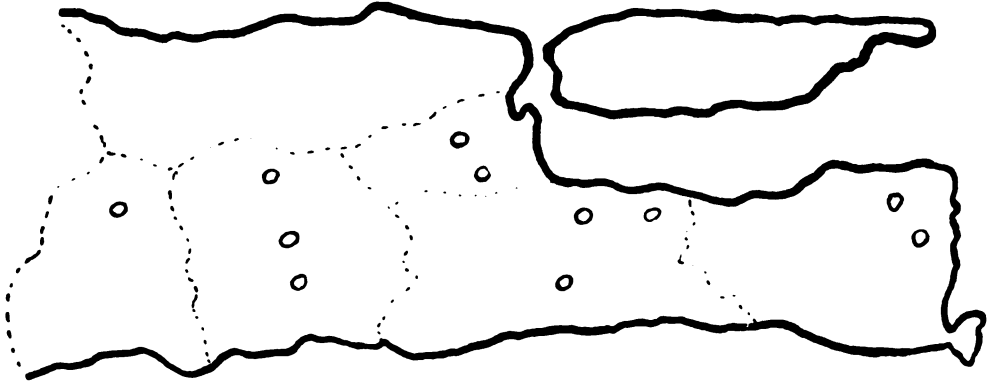


Keterangan : Tiap satu gambar kendaraan = 100 buah.

f. Diagram peta. Bulatan<sup>2</sup> (titik<sup>2</sup>) yang luasnja sama digambarkan pada peta, menunjukkan kepadatan data dalam daerah tertentu, dengan djalan menunjukkan bulatan (titik<sup>2</sup>) yang berbeda-beda banjknja sesuai data jang ada.

/ Tjontoh : ..... ..

*Tjontob* : o = Pabrik gula jang ada di Propinsi Djawa Timur.



Peta Produksi untuk Industri Gula.

## B A B V

### SISTIM PENGOLAHAN DATA OTOMATIS (SPEDO)

#### 17. Otomatisasi.

- a. Pembangunan ABRI khusus dibidang pengolahan data, menimbulkan kebutuhan jang sangat mendesak akan tjara-<sup>3</sup> jang lebih tjepat, tepat dan efisien. Penggunaan mesin-<sup>3</sup> elektronis/otomatis merupakan langkah jang sangat penting kearah perentjanaan, organisasi dan pengendalian ABRI jang efektif.

Pertanjaan-<sup>3</sup> seperti :

- 1) Bagaimanakah kita dapat menjelenggarakan registrasi dan statistik setjera efisien ?
- 2) Bagaimanakah efisiensi tersebut dapat ditjapai dengan djumlah tenaga manusia jang mengolah data dikurangi, dan ketjepatan serta ketelitian dalam pengolahan bertambah ? Perlu didjawab untuk memutuskan penggunaan salah satu sistim pengolahan data otomatis (SPEDO) jang fleksibel, efisien dan responsif. Faktor waktu memainkan peranan jang sangat penting diseluruh bidang kegiatan ABRI. Waktu berarti rupiah jang dapat dihemat, korban manusia jang dapat dihindarkan dan pertempuran jang dapat dimenangkan.
- b. Pengertian SPEDO. Sebuah SPEDO atau komputer adalah suatu "Sistim atau serangkaian mesin-<sup>3</sup> jang :
  - 1) Dapat dipergunakan untuk kegiatan-<sup>3</sup> jang mengenai : Data processing, komunikasi, proses kontrol dan persoalan-persoalan ilmiah (hitungan-<sup>3</sup>).

/ 2) Bekerdjanja .....



- 2) Bekerjanya otomatis, yaitu : berketepatan tinggi, membutuhkan intervensi manusia yang sangat minim, dan terdapat mesin yang mampu mengontrol baik kegiatannya sendiri maupun mesin<sup>3</sup> lainnya.
- 3) Dilengkapi dengan mesin<sup>3</sup> input dan output yang sangat cepat dan produktif.
- 4) Dikendalikan oleh program<sup>3</sup> yang tersimpan didalam sistem itu sendiri. Sebuah SPEDO atau komputer dengan ketepatan tinggi, dapat menerima bahan keterangan pokok dalam jumlah yang besar, mengadakan pengolahan yang berentjana terhadap bahan tersebut, mengambil keputusan<sup>3</sup> berdasarkan norma<sup>3</sup> yang telah ditentukan, melaksanakan tugas<sup>3</sup> lain yang berhubungan dengan keputusan tersebut dan pada saat itu juga melaporkan keputusannya yang terakhir kepada instansi<sup>3</sup> yang akan melaksanakannya.

c. Keuntungan<sup>3</sup> bagi DEPHANKAM dalam menggunakan komputer antara lain adalah :

- 1) Penjediaan data setjara seksama untuk keperluan pembinaan dibidang administrasi, logistik dan operasionil ABRI.
- 2) Ketepatan dan hasil guna yang besar dalam mengumpulkan, mengolah dan melaporkan keterangan<sup>3</sup> taktis, seperti kerusakan<sup>3</sup> akibat pemboman, keterangan<sup>3</sup> mengenai intelidjen, bantuan tembakan dll.
- 3) Fleksibilitas dan kesempurnaan dibidang pengolahan data, yaitu penjenggaraan fungsi<sup>3</sup> yang tak mungkin dapat diselenggarakan tanpa adanya sistem yang sangat produktif dan mampu.
- 4) Penghematan yang didasarkan atas konservasi terhadap personil, materiil dan keuangan.

18. Klasifikasi SPEDO. Komputer dapat digolongkan kedalam 2 (dua) golongan besar, yaitu :

- a. Komputer Analooq. Komputer analogi mengolah data setjara elektronis menurut analogi atau persesuaian. Tidak dapat menjadikan angka<sup>3</sup> yang pasti, melainkan angka<sup>3</sup> yang kiranya mendekati kebenaran. Banjak digunakan dalam lapangan teknik.
- b. Komputer Digital. Pengertian "digital" itu dapat dihubungkan dengan kenyataan, bahwa komputer digital untuk keperluan pembukuan dan pengolahan<sup>3</sup> data, biasanja menjatat, menghitung, dan membuat laporannya dalam "digits" atau angka<sup>3</sup> yang pasti, seperti halnya dengan mesin-hitung biasa.

Golongan digital ini terdiri dari beberapa komputer, antara lain adalah sbb. :

- 1) Special purpose Computer atau Komputer Khusus, Komputer ini khusus dibuat untuk maksud<sup>3</sup> tertentu, misalnja untuk meluntjurkan peluru<sup>3</sup> kendali, untuk menghitung luasnya daerah yang langsung terkena radio-aktif yang berasal dari suatu ledakan bom atom, dll.

/ 2) Scientific .....

- 2) Scientific Computer atau Komputer Ilmiah. Komputer yang khusus dibuat untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmiah. Komputer ilmiah menerima data dalam jumlah yang kecil, mengadakan perhitungan<sup>3</sup> dan "pemikiran<sup>2</sup>" dalam jumlah yang besar, untuk menghasilkan sebagai output — jawaban yang singkat, misalnja sebuah rumus ilmiah.
  - 3) General purpose Computer atau Komputer Umum. Komputer yang khusus dibuat untuk keperluan<sup>3</sup> umum, kebanyakan untuk melayani kepentingan perusahaan<sup>2</sup> dan logistik. Komputer umum memasukkan data sebagai input-dalam jumlah yang besar, mengadakan pengolahan yang umumnja tidak banyak, untuk menghasilkan keterangan<sup>2</sup> yang besar jumlahnya.
19. SPEDO dan Manusia. Mengingat kemampuan SPEDO yang sedemikian luasnja, maka ada yang menganggap komputer itu sebagai mesin yang mampu berfikir. Hal yang demikian itu adalah tidak benar. Mesin<sup>3</sup> elektronis tidak dapat berfikir, tidak memiliki daya timbang, dan tidak bermoral seperti halnya manusia. Mesin<sup>3</sup> tersebut hanya melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya, sedangkan perintah<sup>2</sup>nya harus diperintji sedalam-dalamnja. Mengambil suatu keputusan bukanlah termasuk kemampuan sebuah komputer, terketjuai atas perintah manusia. Mesin<sup>3</sup> elektronis itu harus mengikuti pola<sup>3</sup> kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya.
- Ini berarti bahwa komputer tidak mengurangi kedudukan manusia, bahkan menambah kekuasaannya.
- Bagi seorang Komandan akan lebih baik tenaganya dipergunakan untuk mengadakan pemikiran tentang bahan<sup>2</sup> tersebut, apa artinya, dan apa yang harus diperbuat dengan bahan<sup>3</sup> itu, dari pada terikat kepada kegiatan pengumpulan dan pengolahan data.

## B A B VI

### P E N U T U P

20. Setelah kita memahami prosedur<sup>3</sup> administrasi per-statistikan, alat<sup>3</sup> apa yang akan digunakan, maka tidak boleh dilupakan personil, yang merupakan komponen yang utama didalam sistim administrasi perstatistikan itu. Demi untuk efisiensi yang sebesar-besarnya, perlu adanya personil yang terdidik dan terlatih, yang akan menjamin bahwa baik tenaga manusia maupun tenaga mesin<sup>3</sup>, dipergunakan pada batas<sup>3</sup> maksimum.
21. Hal-hal yang belum ditentukan dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut.

15 kotukom

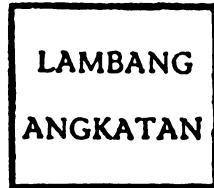
2 kalt

5 ke-  
tukam

**DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN  
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT**

**TAP 10 - 300**  
2 ketukan

2 kait



2 kalt

**PENETAPAN KASAD )**

**sebaris**

No. 10 - 300 ) 1 korit

- Djakarta, 24 Djuli 1970.

2 kait

**ORGANISASI DAN TUGAS  
PENJUSUNAN KEMBALI DAN PERKELOMPOKAN  
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT**

) 1 kait

1 2 kakt

1 kotukan

BAB	I	XXXXXXX	Fasal	Halaman
1	ketukam	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .....	1	2
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .....	2	2
		) 1 kait		
II		XXXXXXXXXXXXX		
		XXXXXXXXXXXXX .....	3	2
		XXXXXXXXXXXXX .....	4	2
		) 1 kait		
III		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
		XXXXXXXXXXXXX .....	5	2
		XXXXXXXXXXXXX .....	6	3
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .....	7	3
		) 1 kait		
		) 2 kait		
		)		

**Penetapan ini menjabut dan menggantikan Penetapan KASAD  
Nomor : TAP 10 - 300 tanggal 11 Desember 1969 tentang Organisasi  
dan Tugas Penjurusan dan Perkelompokan Markas Besar Angkatan Darat.**

2 kalt

/ **BAB I** .....  
 ) min. 2 kait  
 )

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

)

) 1 korit

)

5 ke-  
tukom

) 1 krit

) 1 kant

1 kalt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 kait

) 1 kalt

)

1 kait

) 1 kait

1 2 kalt

) 1 kait

) 2 kalt

1

) min. 2 kait

1



) 2 kait

)

3

) 2 kait

)

5 ke-  
tukan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4 ketukan ) 1 kait

a.---XXX:

4 ketukan ) 1 kait

1)---XXX

2)---XXX:

4 ketukan ) 1 kait

a)---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

b)---XXX.

2 ketukan ) 1 kait

b.---XXX.

) 1 kait

15 ke-  
tukan

6.

XXX.

) 1 kait

7.

XXX  
XXXXXXXXXXXXX.

) 2 kait

)

## KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :

(Sesuai dengan besar ketjilnja  
tanda tangan).

OTENTIKASI :  
NAMA DJABATAN :

sebaris

NAMA PENDJABAT  
PANGKAT LENGKAP

NAMA PENDJABAT  
PANGKAT LENGKAP

) 1 kait

DISTRIBUSI :

) 1 kait

"A"

(Bentuk ini, dipergunakan djuga untuk bentuk **Instruksi** jang berisi tentang tjara pelaksanaan dari TAP dengan pendjelasan bahwa, semua kalimat/tulisan : TAP/PENETAPAN/Penetapan diganti dengan kalimat/tulisan : INS/INSTRUKSI/Instruksi).





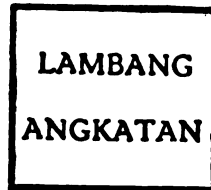
15 ketukan

) 2 kait  
)

DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

TAP 10-300  
) 1 kait  
PERUBAHAN 1

) 2 kait  
)



) 2 kait  
)

PENETAPAN KASAD )

) 1 kait  
No. 10 - 360 P1 ) — sebaris ————— Djakarta, 13 Desember 1970. 15 ketukan

) 2 kait  
)

**ORGANISASI DAN TUGAS  
PENJUSUNAN KEMBALI DAN PERKELOMPOKAN  
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT**

) 1 kait

) 2 kait  
)

6 ketukan

-----Penetapan KASAD No. : TAP 10-300 tanggal 24 Djuli 1970 tentang Organisasi dan Tugas, Penjusunan Kembali dan Perkelompokan Markas Besar Angkatan Darat, dengan ini dirubah sbb. :

) 2 kait  
)

**BAB II**

) 1 kait

**XXXXXXXXXXXXXX**

) 2 kait  
)

6 ketukan

4 ketukan

3.---XXXXXXXXXXXXXXXXX ---XXXXXXXXXXXXXXXXX ..... XXXXXXXXXXXXXXXX.

) 1 kait

4.---XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :

4 ketukan

) 1 kait

a.---XXXXXXXXXXXXXXXXX ..... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

b.---XXXXXXXXXXXXXXXXX ---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXX.

c.---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) 2 kait

/ **BAB III**

) min. 2 kait



} 2 kait

)

2

} 2 kait

)

### **BAB III**

} 1 kait

XXXXXXXXXXXXXX

} 2 kait

)

## **KEPALA STAF ANGKATAN DARAT**

menurut besar ketjilnja  
tanda tangan.

15 ke-  
tukan

OTENTIKASI :

sebaris

XXXXXXXXXXXXXX

NAMA DJABATAN

XXXXXXXXXXXXXX

5 ke-  
tukan

menurut besar ketjilnja  
tanda-tangan.

**NAMA PENDJABAT**

**PANGKAT LENGKAP**

} 1 kait

DISTRIBUSI :

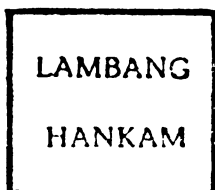
} 1 kait

"A"

### **KETERANGAN :**

1. Bentuk perubahan ini, dipergunakan djuga untuk bentuk perubahan INS, TOP, DAF dan BP, dengan pendjelasan bahwa, semua kalimat/istilah /tulisan TAP/PENETAPAN diganti dengan kalimat/istilah/tulisan nama dari pada tulisan dinas jbs. misalnja : INS, TOP, DAF dan BP.
2. Istilah PERUBAHAN (disudut kanan atas) disertai dengan angka (angka arab) jang menundjukkan angka keberapa perubahan itu. Tjontoh : Perubahan pertama dengan angka 1, kedua dengan angka 2 dst.
3. Nomor tetap memakai nomor jang lama.
4. Tanggal perubahan digunakan tanggal dibuatnja/dikeluarkannja perubahan itu.
5. Adanja perubahan ini harus selalu ditjatat dalam buku verbaal.



15 ke-  
tukan) 2 kait  
)DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN) 2 kait  
)) 2 kait  
)KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN /  
PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA

No. : KEP/ / /1970

) 2 kait  
)

tentang

) 1 kait

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

) 1 kait

) 2 kait  
)MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA) 2 kait  
)

Memperhatikan :

6 ketukan

-----XXX  
XX.) 2 kait  
)

Menimbang :

1.---Bahwa XXX  
XX.

) 1 kait

2.---XX  
XX.) 2 kait  
)

Mengingat :

1.---XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.) 2 kait  
)

/ 2.---XXXXXX

) min. 2 kait  
)

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Digitized by Google





) 2 kott

)

3

) 2 kott

)

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 16 Nopember 1970

) 1 kott

**MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGlima ANGKATAN BERSENDJATA**

Sesuai dengan besar ketjilnja  
tanda tangan

15 ke-  
tukam

**Kepada Jth :** \_\_\_\_\_ sebaris

**SOEHARTO**  
**DJENDERAL TNI**

5 ke-  
tukam

) 1 kott

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. XXXXXXXXXXXXXXX.
4. XXXXXXXXXXXXXXX.

) 2 kott

**OTENTIKASI :**  
**NAMA DJABATAN**

) 1 kott

**Tembusan :**

) 1 kott

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. XXXXXXXXXXXXXXX.
3. XXXXXXXXXXXXXXX.

**NAMA PENDJABAT**  
**PANGKAT LENGKAP**

(Apabila alamat "Kepada" menundjuk daftar distribusi, maka alamat tersebut dapat ditulis dengan : DISTRIBUSI "A", "B", "C" dlsb.nja).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN**  
**MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA**

## PERUBAHAN 1

**LAMBANG  
ANGKATAN**

5 ketukan

**KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA**

No. : KEP/10a/ /1970

2 kait

}

tentanc

1. kalt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

) 1 kait

---

) 2 kalt

)

**KEPALA STAF ANGKATAN UDARA**

2 kait

1

6 ketukan

[illegible]

6 ketukan ) 1 kait

**Memperhatikan : ----- Hasil**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
2 kont

2 Kall

**UTILIS**

**MEMUTUSKAN**

---

2 kait

**Menetapkan** : 1.---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 katt

/ **Ketentuan.....**

1 min. 2 kait

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

) 2 kait  
)  
2  
) 2 kait  
)

15 ke-  
tukam

**Ketentuan**

) 1 kait

1. XXXXXXXX ..... XXXXXXXX.

5 ke-  
tukam

) 2 kait  
)

Dikeluarkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 22 Desember 1970.

) 1 kait

**KEPALA STAF ANGKATAN UDARA**

Sesuai dengan besar  
ketjilnja tanda-tangan  
**NAMA PENJABAT**

**Kepada Jth :**

) 1 kait

1. XXXXXXXXXXXXXXXX.  
2. XXXXXXXXXXXXXXXX.  
3. XXXXXXXXXXXXXXXX.

) 1 kait

**Tembusan :**

) 1 kait

1. XXXXXXXXXXXXXXXX.  
2. XXXXXXXXXXXXXXXX

**PANGKAT LENGKAP**

**KETERANGAN :**

1. Bentuk perubahan ini, dipergunakan juga untuk bentuk perobahan SKEP, PRIN, PRIN-MIN, PRINTAP, PROTAP, TARATAP/DJUKLAK dan MAK dengan pendjelasan bahwa, sebutan/istilah KEPUTUSAN KEPALA ..... diganti dengan sebutan/istilah tulisan dinas jbs.
2. Istilah PERUBAHAN (disudut kanan atas) disertai dengan angka (angka arab) yang menunjukkan angka keberapa perubahan itu.  
Tjontoh : Perubahan pertama dengan angka 1, kedua dengan angka 2 dst.
3. Nomor tetap memakai nomor jang lama, hanja ditambah dengan huruf abdjad ketjil dibelakangnja. Huruf a untuk perubahan pertama, b perubahan kedua dst.
4. Tanggai perubahan digunakan tanggal dibuatnja/dikeluarkannja perubahan itu.
5. Adanja perubahan ini harus selalu ditjatat dalam buku verbaal.



) 2 kait  
)

2 kalt



Nomor : INS/ / /1970

tentang

1 kait

1 kalt

) 2 kalt  
)

) 2 kalt  
)

) 2 kalt  
)

) 2 kalt  
)

1 kalt

2 kett

) min. 2 krit





) 2 kait  
)

2

) 2 kait  
)

## MENG - INSTRUKSI - KAN

) 2 kait  
)

15 ke-  
tukan

5 ke-  
tukan

Kepada

6 ketukan

1.---XX.

) 1 kait

2.---XX.

) 2 kait  
)

Untuk

1.---XX  
XX.

) 1 kait

2.---XX  
XX.

) 1 kait

3.---XX  
XX.

) 1 kait

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan  
untuk dilaksanakan dengan sebaik<sup>2</sup>nja.

) 2 kait

)

Dikeluarkan di : Djakarta

Pada tanggal : 16 Nopember 1970

) 1 kait

MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA

Tembusan :

sebaris

) 1 kait

1. XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. XXXXXXXXXXXXXXXX.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI

) 2 kait

)

OTENTIKASI :  
NAMA DJABATAN

NAMA PENDJABAT  
PANGKAT LENGKAP



15 ke-  
tukan

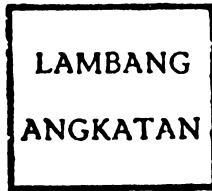
2 kapit

5 ke-  
tukan

**DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT**

TOP .....

2 kait



2 kalt

**TABEL ORGANISASI )**  
**DAN PERALATAN )**  
**No. .... - .... )**

sebaris

Djakarta, 28 Mei 1970.

2 kait

**TABEL ORGANISASI DAN PERALATAN (TOP)**

**KOMPI MORTIR BERAT (KIMORBE)**

## TAHUN 1970

) 1 kalt

) 2 kalt

1 ketukan  
Fasal Halaman

**Dasar Pertimbangan** : .....  
**Ketentuan-ketentuan** : .....  
**Saat Berlakunya** : .....

1	1
2	2
3	6

) 1 kalt

) 2 kodt  
)

**3 ketukan**

4 ketukan

**1....Dasar Pertimbangan....**Dalam rangka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

**4 ketukan**

1 kalt

[illegible]

) 2 kai!  
)

/ b.---Surat .....  
 ) min. 2 kait

) min. 2 kait  
)

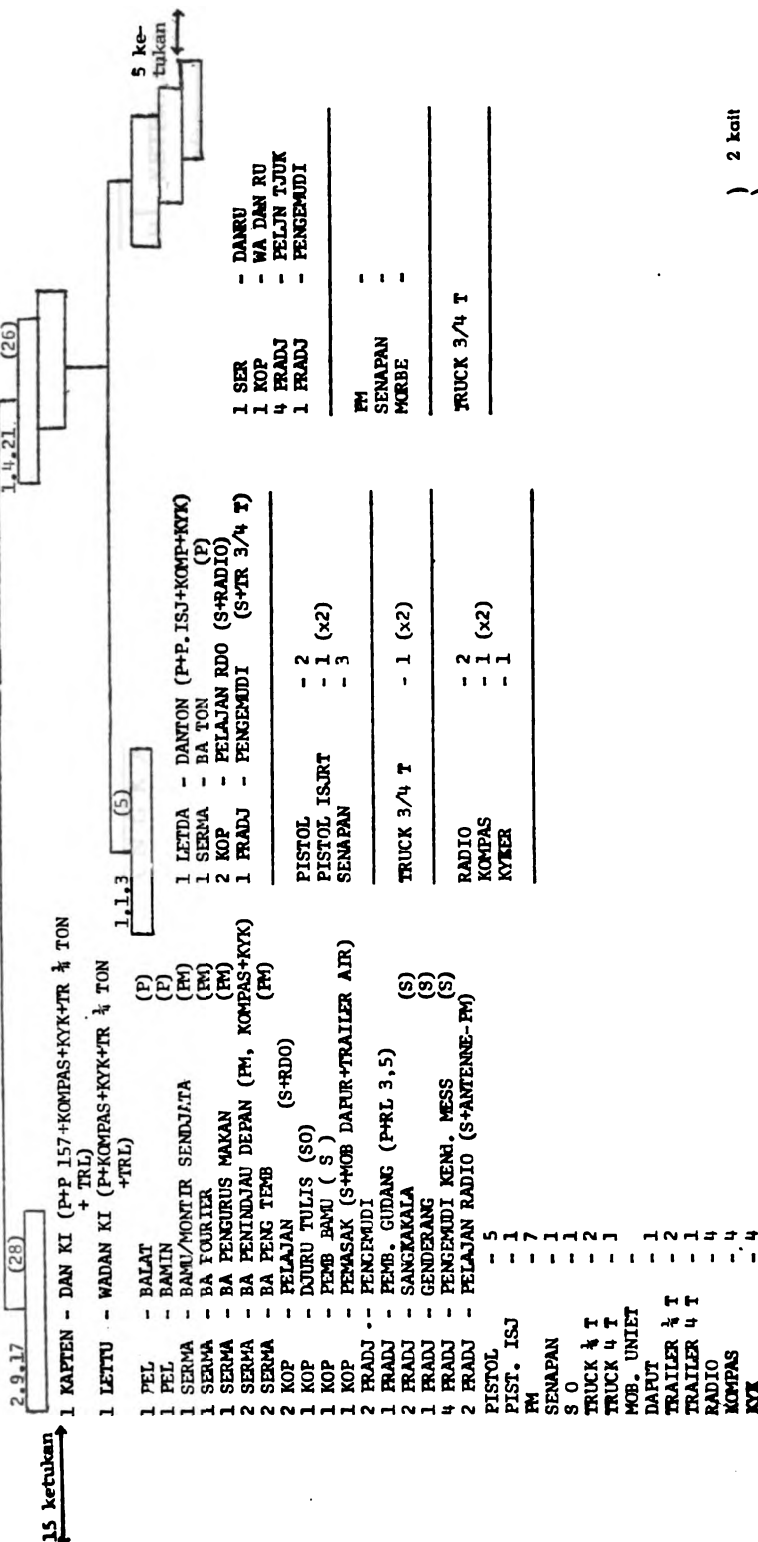






2  
↓ 2 kait  
3.  
↑ 2 kait

SCHEMA/BAGAN ORGANISASI KIMORBE 120 MM



/ REKAPITULASI

) 2 kait

) 3 kait





**REKAPITULASI KEKUATAN PERSONIL**  
**KOMPI MORTIR BERAT**

5 ke-  
tukan

15 ke-  
tukan

No. Urut	S A T U A N	P A N G K A T										DJUMLAH	KETERANGAN
		KAPTEN	LETTU	LETDA	PEL	SERMA	SERSAN	KOPRAI	PRADJURIT				
1.	POK KO KI	1	1	—	2	7	—	5	12	28			
2.	TON I	—	—	1	—	1	3	5	16	26			
3.	TON II	—	—	1	—	1	3	5	16	26			
		1	1	2	2	9	6	15	44	80			

) 2 kait

/ 3....Saat Berlakunja....  
) min. 2 kait  
)



)  
 ) 3 kait  
 )  
 5  
 ) 2 kait  
 )

5 ke-  
 tukan

REKAPITULASI KEKUATAN PERALATAN  
 KOMPI MORTIR BERAT

15 ke-  
 tukan

No.	SATUAN	SENDJATA						KENDARAAN						LAIN-2				KETERANGAN
		PISTOL	PISTOL ISJARAT	P. M.	SENAPAN	S. O.	R. L. 35	MORBE	1/2 TON	1/4 TON	4 TON	MOB. DAPUR	TRL. 1/2	TRL. Air	RADIO	KOMPAS	KYKER	
1.	POK KOKI	2	1	7	16	1	1	—	2	—	4	1	2	1	4	4	4	
2.	TON 1	2	1	3	21	—	—	3	—	3	—	—	—	—	2	1	1	
3.	TON 2	2	1	3	21	—	—	3	—	3	—	—	—	1	2	1	1	
DJUMLAH:		9	3	13	58	1	1	6	2	6	4	1	2	1	8	6	6	

) 2 kait  
 )  
 / 3. Saat Berlakunya  
 ) min. 2 kait  
 )



i

)

)

**4 ketukan**

5 ke-  
tukan

1 2 kost

i

menurut besar ketjilnja  
tanda tangan

**sebaris**

**NAMA PENDJABAT**  
**PANGKAT LENGKAP**

1 kartt

“ ”

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

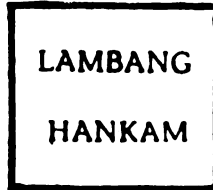
15 ke-  
tukan

) 2 kait  
)

DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN

BUKUDJUK .....

) 2 kait  
)



) 2 kait  
)

BUKU PETUNDJUK )

5 ke-  
tukan

No. ) 1 kait

sebaris

) ————— Djakarta, 26 Desember 1970

) 2 kait  
)

**BUKU PETUNDJUK**  
**ADMINISTRASI UMUM**

) 1 kait

) 2 kait  
)

**BAGIAN PERTAMA**

) 1 kait

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

) 2 kait  
)

BAB I XXXXXXXXXX Fasal Halaman

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1 3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..... ...

) 1 kait

II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

dst-nja. ....

) 2 kait  
)

/ **BAGIAN KEDUA**

) min. 2 kait  
)





15 ke-  
tukan

5 ke-  
tukan

} 2 kait  
}

2

} 2 kait  
}

## BAGIAN KEDUA

} 1 kait  
}

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

} 2 kait  
}

### BAB III XXXXXXXXXX

Fasal Halaman

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ... ..  
dst-nja. .... ..

} 2 kait  
}

## BAGIAN KETIGA

} 1 kait  
}

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

} 2 kait  
}

### IV XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ... ..  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ..... ..  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ..... ..  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ..... ..  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ..... ..  
dst. .... ..

} 1 kait  
}

### V XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX ..... ..  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ..... ..  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ..... ..  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ..... ..

} 2 kait  
}

## BAGIAN KEEMPAT

} 1 kait  
}

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

} 2 kait  
}

### VI XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ..... ..  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ..... ..  
dst. .... ..

} 2 kait  
}

/ (LAMPIRAN<sup>2</sup>: .....)

} min. 2 kait  
}



)

) 2 kait

)

) 1 kai!

) 2 kait

)

) 1 kalt

) 2 kait

)

) 2 kalt

1

) 1 kait

"C"



15 ke-  
tukan

DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN

LAMBANG  
HANKAM

**SURAT - KEPUTUSAN**

Nomor :

tentang

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA

Membatja : 1.---Surat XXX  
XX.

2.---Keputusan XXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang : XXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Mengingat : XXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

/ MEMUTUSKAN







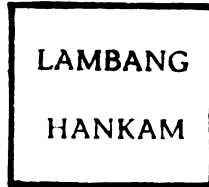


15 ke-  
tukan

) 2 kait  
)

**DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN**

) 2 kait  
)



) 2 kait  
)

**SURAT - KEPUTUSAN**

Nomor : SKEP/ / /1970

) 2 kait  
)

tentang

) 1 kait

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

) 1 kait

) 2 kait  
)

**MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA**

) 2 kait  
)

Membatja

6 ketukan

: -----XX  
XX  
:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

5 ke-  
tukan

) 2 kait  
)

Menimbang

1. XXX  
XX.
2. XXX  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) 2 kait  
)

Mengingat

- i. XXX  
XX.

) 2 kait  
)  
/ 2.---XXXXX  
) min. 2 kait  
)



) 2 kait

)

2

) 2 kait

)

6 ketukan

5 ketukan

2. ---XX  
XX.

) 1 kait

)

3. XXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

) 2 kait

)

### MEMUTUSKAN

) 2 kait

)

15 ketukan

Menetapkan :

XX  
XX  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) 2 kait

)

Dengan tjata'an :

) 1 kait

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

) 2 kait

)

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

) 1 kait

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. XXXXXXXXXXXXXXX.
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) 2 kait

)

/ PETIKAN

) min. 2 kait

)



---

) 2 kait

)

3

) 2 kait

)

**PETIKAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang <sup>5 ke-</sup>tukan  
berkepentingan untuk diketahui dan diindah-  
kan seperlunja.

) 2 kait

)

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 1 Djuli 1970

) 1 kait

MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGlima ANGKATAN BERSENDJATA

Sesuai dengan besar ketjilnja

tandatangan

**SOEHARTO**

DJENDERAL TNI

(Huruf P dari kata PETIKAN, djarak dari tepi sama dengan D dari kata  
Dengan tjatatan dan huruf S dari kata **SALINAN** pada halaman pertama).



# LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : SKEP/ / 1970.

TANGGAL: 30 Agustus 1970.

15 ke-  
tukun

5 ke-  
tukun

No. Urut	N A M A	PANGKAT	NRP	DJABATAN TETAP	DJABATAN DA-LAM SIDSIDA	TANGGAL PENGANGKATAN DALAM SIDSIDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KARMUDI	KOLONEL INF	51321	PABAN ASLIT-BANG HANKAM	KETUA	1 Djuli 1970	
2.	ANDI S.	LETKOL KKO	9987	PAMEN MABAL	ANGGAUTA	sda	
3.	JUSUF	LETKOL UDARA	11164	PAMEN MBAU	ANGGAUTA	sda	
4.	HARSAM	AKBP	4356	PAMEN MABAK	ANGGAUTA	sda	

MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGlima ANGKATAN BERSENDJATA

Disesualikan dengan besar  
ketijhoja tanda tangan

**SOEHARTO**  
DJENDERAL TNI



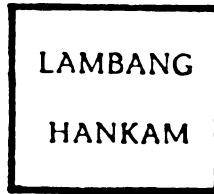


15 ke-  
tukan ) 2 kait  
)

5 ke-  
tukan

**DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN**

) 2 kait  
)



) 2 kait  
)

**PETIKAN**

) 1 kait

**SURAT - KEPUTUSAN**

Nomor : SKEP/ / /1970

) 2 kait  
)

tentang

) 1 kait

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

) 1 kait

**MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA**

) 2 kait  
)

Membatja : d.s.l.

) 1 kait

Menimbang : d.s.l.

) 1 kait

Mengingat : d.s.l.

) 2 kait  
)  
/ **MEMUTUSKAN :**  
) min. 2 kait  
)







) 2 kait  
)

DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN

P E T I K A N

) 1 kait

LAMPIRAN; SURAT KEPUTUSAN MENHANKAM/PANGAB

NOMOR : SKEP/ / / 1970.

TANGGAL: 1 Djuli 1970.

) 2 kait  
) 5 ke-  
tukan

No. Urut	N A M A	PANGKAT	NRP	DJABATAN TETAP	DJABATAN DA- LAM SIDSIDA	TANGGAL PENGANGKATAN DALAM SIDSIDA	KETERANGAN
1. dan selanjut- nja.							
2. ANDI S.	LETKOL KKO	9987	PAMEN MABAL	ANGGAUTA	1 Djuli 1970		
3. s/d 4. dan se- landjutnja.							

) 1 kait

MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGlima ANGKATAN BERSENDIATA

Disesuaikan dengan besar  
ketjilnja tanda tangan

SOEHARTO

DJENDERAL TNI

Untuk PETIKAN

Sesuai dengan aselinja  
NAMA DJABATAN

PANGKAT LENGKAP  
NAMA PENDJABAT



) 2 kbit  
)

2 kalt



) 1 kalt

2 kart

6 ketukan

5 ke-  
rukan

```
: -----Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

2 kait

: 1. Surat Keputusan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xx

1 kalt

**2. Surat Keputusan xxxxxxxxxxxxxxxxx**

2 kait

**DIPERINTAHKAN**

2 korit

: 1. PANGKAT      Nama  
                                 DJABATAN

) 1 kait

2. PANGKAT      N a m a  
DJABATAN

2 kat'

/ Untuk : .....

) min. 2 kait





) 2 kalt  
)

6 ketukan

5 ke-  
tukam

: 1.---Tersebut no. 1 Menjerahkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX  
XX  
XX

1 kost

2. Tersebut no. 2 Menerima xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 kalt

Pelaksanaan xx  
 xx  
 xx  
 xx.

1 kalt

3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

) 2 kalt  
)

**S e l e s a i.**

) 2 kait

**Dikeluarkan di : Djakarta**

Pada tanggal : 17 Djuli 1970

1 kalt

**MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA**

sesuai dengan besar ketjiilnja  
tanda tangan

**Tembusan :**

1 kalt

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. XXXXXXXXXXXXXXX.
4. XXXXXXXXX.

# SOEHARTO

DJENDERAL TNI

As a result of the above, the following hypotheses were formulated:

1. The more the perceived social support is, the more the perceived stress is reduced.
2. The more the perceived social support is, the more the perceived life satisfaction is increased.
3. The more the perceived social support is, the more the perceived self-esteem is increased.
4. The more the perceived social support is, the more the perceived life satisfaction is increased, and the perceived self-esteem is increased.
5. The more the perceived social support is, the more the perceived life satisfaction is increased, and the perceived self-esteem is increased, and the perceived stress is reduced.

**DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN**

**SURAT - PERINTAH**  
Nomor : SPRIN/ / /1970

**DIPERINTAHKAN**

) 2 kalt  
)  
/ Untuk : .....  
)  
)  
min. 2 kalt







DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN

**LAMBANG  
HANKAM**

## PERINTAH - ADMINISTRASI

) 1 kait

Memperhatikan :  $\overset{6 \text{ ketukan}}{\underset{\text{tukan}}{1\text{---}XX}}$   
 $XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX$

2. XX  
XX.

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pertimbangan : 1. XX  
XX.

**2.** xxxxxxxxxxxXXXXXXXXX**X**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxx.

Dasar : XXX  
XX  
XX.

Digitized by Google





) 2 kait  
)

2

) 2 kait  
)

## DIPERINTAHKAN

) 2 kait  
)

15 ke-  
tukan Kepada

: 1. NAMA DJARATAN

) 1 kait

2. NAMA DJABATAN

) 2 kait  
)

Untuk

: 1. Tersebut no. 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 5 ke-  
tukan

XX.

) 1 kait

2. Tersebut no. 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX.

) 1 kait

3. XX

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) 1 kait

### Tjataan :

XX  
XX

) 2 kait  
)

Dikeluarkan di : Djakarta

Pada tanggal : 17 Diuli 1970

) 1 kait

MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA

Sesuai dengan besar ketjilnja  
tanda tangan

Kepada Jth. : \_\_\_\_\_ sebaris

SOEHARTO

) 1 kait

DJENDERAL TNI

XXXXXXXXXXXXXX.

) 1 kait

### Tembusan :

) 1 kait

1. XXXXXXXXXXXX.

2. XXXXXXXXXXXX.

1. *Staphylococcus aureus*

2. *Staphylococcus epidermidis*

3. *Staphylococcus saprophyticus*

4. *Staphylococcus*

5. *Staphylococcus aureus*

6. *Staphylococcus aureus*

7. *Staphylococcus*

8. *Staphylococcus*

9. *Staphylococcus aureus*

10. *Staphylococcus*

11. *Staphylococcus aureus*

12. *Staphylococcus aureus*

13. *Staphylococcus aureus*

14. *Staphylococcus aureus*

15. *Staphylococcus*

16. *Staphylococcus*

17. *Staphylococcus aureus*

) 2 kait  
)

2 kalt



No.: PRINTAP/ / /1970.

1 kalt

) 2 kalt  
)

) 2 kalt  
)

5 ke-  
tukan

) 2 kant  
)

) 2 kait

) 2 kalt  
)

) 2 kait

- ) 1 kait

- 2 kait

/ 3.---Xxxxx .....

) min. 2 kalt

1

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

) 2 kait  
)  
2  
) 2 kait  
)

6 ketukan

3.---Perintah tetap ini supaya dilaksanakan dengan sek- 5 ke-  
sama dan penuh tanggung djawab. tukan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) 1 kait

4. Perintah tetap ini berlaku sedjak dikeluarkannya.

) 2 kait  
)

Dikeluarkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 17 Djuli 1970.

) 1 kait

MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA

Sesuai dengan besar ketjilnja  
tanda tangan

15 ke-  
tukan

Kepada Jth : \_\_\_\_\_ sebaris

**SOEHARTO**  
**DJENDERAL TNI**

) 1 kait

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
5. XXXXXXXXXXXXXXXX.

) 1 kait

**Tembusan :**

) 1 kait

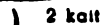
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. XXXXXXXXXXXX.



**2 kalt**

5 ke-  
tukan

2 kaw



1 kalt

2 kart

6 ketukan

) 1 kait

) 1 kait

6 ketukan

4 ketukan.

1 kalt

2 kalt

;





) 2 kait  
)

2

) 2 kalt

6 ketukan

3.---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)XX.

) 1 kait

[illegible]

) 1 kait

[illegible]

) 1 kait

[illegible]

) 1 kait

[illegible]

) 1 kat!

8.---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

) 1 kalt

**Perintah selesai.**

) 2 kait  
)

Djakarta, 5 Oktober 1970

) 1 kalt

MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGlima ANGKATAN BERSENDJATA

Sesuai dengan besar ketjilnja  
tanda tangan

# SOEHARTO

DJENDERAL TNI



) 2 kalt

2 kart



1 kalt

) 2 kait

4 ketukan

1 kalt

5 ke-  
tukan

) 1 kalt

2 kait

4 ketukan

) 1 kait

4 ketukan

1 kait

1 kalt

4 ketukan

) 1 kalt

1 kait

2 kait

min. 2 kait

















tukan **DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN**

;

;



Nomor : TARATAP/ / /1970

---

;

5 ke-  
tukan

1

6 ketukan

yy

23

1













) 2 kait  
)

4

) 2 kait  
)

b. ---XX : 5 ketukan

) 1 kait

1) ---XX  
XX.

) 1 kait

2) ---XX  
XX.

) 2 kait  
)

## **BAB IV**

) 1 kait

## **PENUTUP**

) 2 kait  
)

15 ketukan.

6 ketukan

4 ketukan

6. ---Lain-lain---XX  
XX.

) 1 kait

7. Saat berlakunja---XX  
XX.

) 2 kait  
)

Dikeluarkan di : Djakarta

Pada tanggal : 12 Djuni 1970

) 1 kait

**NAMA DJABATAN**

sesuai dengan besar ketjilnja  
tandatangan.

**Kepada Jth. :** \_\_\_\_\_ sebaris

) 1 kait

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) 1 kait

**Tembusan :**

) 1 kait

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

**NAMA PENDJABAT**

**PANGKAT LENGKAP**



**DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN**

**LAMBANG  
HANKAM**

**T A T A J A R A - T E T A P**

**MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA**

5 ka-  
tukan

) min. 2 kait



) 2 kalt  
)

**MENGELUARKAN TATATJARA TETAP SBB.:**

) 2 kalt  
)

15 ke-  
tukan

**6 kotukan**

5 ke-  
tukan

1.---XXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) 1 kalt

**2.** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

) 1 kait

[illegible]

) 2 kait  
)

Dikeluarkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 17 Djuli 1970

) 1 kart

**MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/  
PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA**

Sesuai dengan besar ketjilnja  
tanda tangan

**Kepada Jth. :** \_\_\_\_\_ Sebaris

1 kait

**SOEHARTO**

DJENDERAL TNI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1 kalt

**Tembusan :**

1 kait

1. XXXXXXXXXXXXXXX.

2. XXXXXXXXXXXXXXXX.

3. XXXXXXXXXXXX.

4. XXXXXXXXXXXX.



15 ke-  
tukan

) 2 kait

DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN

) 2 kait

LAMBANG

HANKAM

) 2 kait

# PETUNDJUK - PELAKSANAAN

No. : DJUKLAK/ / /1970.

) 2 kait

tentang

) 1 kait

XX  
XX

) 1 kait

) 2 kait

## I. PENDAHULUAN :

) 1 kait

1. XXX :

) 1 kait

a. XXX.

b. XXX.

) 1 kait

2. XXX  
XX.

) 1 kait

3. XXX  
XX.

) 2 kait

## II. DASAR-2 KEBIDJAKSANAAN :

) 1 kait

1. XXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) 1 kait

2. XXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :

) 1 kait

a. XXX.

b. XXX.

) 2 kait

/ 3. XXXXXXXX .....

) min. 2 kait









15 ke-  
tukam

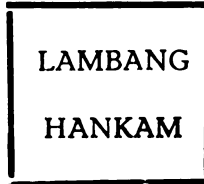
15 ke-  
tukan

Digitized by Google



**DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN**

) 2 kett  
)



) 2 kalt  
)

No. : MAK/ / /1970

) 2 kait

tentang  
1 kalt

XXXXXXXXXX

1 krit

2 kalt

5 ke-  
tukan

- [illegible]

) 1 kait:

- [illegible]

) 1 kait

- 3.---XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX \XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dst.

) 1 kalt

- [illegible]

) 2 kalt

/ 5.--(Sanksinja .....)

1 min. 2 kat<sup>2</sup>

1

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875



100

101

102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200

101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200



**DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN**

1 kalt:

**REFERENSI :** <https://www.researchgate.net/publication/353011106>

**LAMPIRAN :**

) 2 kait  
)

## LAPORAN

) 1 kalt

) 2 kait  
)

## PENDAHULUAN

2 kalt

15 ke-  
tukan  

---

6 ketukan

[illegible]

5 ko  
tukan

2 kait

U M U M

) 2 krit

2.-----XX  
XX.  
(uraian tentang keadaan permulaan tahun/bulan).

4 ketukan ) 1 kait

[illegible]

) 1 kalt

b. ---XX  
XX.  
(uraian tentang keadaan akhir tahun/bulan).

) 2 kalt

### KEGIATAN JANG DILAKSANAKAN

) 2 kait

3.-----XX  
XX.  
(uraian mengenai bidangnja menurut Organisasi)

2 kalt

## / KESIMPULAN

min. 2 kcal





5

1992-1993

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  
 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120  
 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180  
 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210  
 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240  
 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270  
 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300  
 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330  
 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360  
 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390  
 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420  
 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450  
 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480  
 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510  
 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540  
 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570  
 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600  
 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630  
 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660  
 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690  
 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720  
 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750  
 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780  
 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810  
 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840  
 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870  
 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900  
 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930  
 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960  
 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990  
 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1

• • • • •

42

7. 2011年12月31日，甲公司“应付账款”科目所属各明细科目期末贷方余额如下：应付账款——A公司100万元，应付账款——B公司200万元，应付账款——C公司150万元，应付账款——D公司100万元。甲公司2011年12月31日资产负债表“应付账款”项目期末余额为（ ）万元。  
 A. 550  
 B. 450  
 C. 350  
 D. 250

: 2

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 01-28-2001 BY 60322 UCBAW

• • • • •

*Journal of Management Inquiry* 18(6) 709-724  
© The Author(s) 2009  
Reprints and permissions:  
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

1

6. *Chlorophyll content* was determined by the method of Arar and Cook (1980). The optical density of the chlorophyll extract was measured at 663 nm and 665 nm. The chlorophyll content was calculated using the following formula:

(1) 1997-1998 年, 中国对日本出口货物中, 机电产品所占比重为 40.2%, 较上年提高 1.1 个百分点, 其中高新技术产品所占比重为 10.2%, 较上年提高 0.4 个百分点。

3

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 30 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1997).

[illegible]

1992年12月12日  
 1992年12月12日

*[Illegible handwritten notes]*

15 ke-  
tukan

) 2 kait

5 ke-  
tukan

DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN sebaris Djakarta, 8 Pebruari 1970.  
min. 6 ketukan

) 2 kait

Nomor : R/15/II/1970.

Sifat : Rahasia.

Lampiran : 3(tiga).

Perihal : XX.sebaris

Kepada

Jth. XXXXXXXXXXXXXX.

) 1 kait

) 1 kait

di

) 1 kait

D J A K A R T A

)

minimal 2 kait

U.p. XXXXXXXXX.

6 ketukan

) 1 kait

1.---XX  
XX.  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) 1 kait

2.---XX  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) 1 kait

3.---XX  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) 1 kait

4.---XX  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) 1 kait

5.---XX  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) 2 kait

/ 6.---XXXXXXXXXXXX

) min. 2 kait

)



)

1 2 kait

)

6.--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5 ko-  
tukan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) XXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)XXXXXXXXXXXXXXXXX.

1 kalt

XX

**XX.**

1. ? kait

)

sesuai dengan besar ketjilnja  
tanda tangan

**Tembusan :** \_\_\_\_\_ sebaris

) 1 katt

1. XXXXXXXXXXXXXXXX.

2. XXXXXXXXXXXXXXXX.

3. XXXXXXXXXXXXXXXX.

4. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**

**NAMA PENDJABAT**  
**PANGKAT LENGKAP**





15 ketukan ) 2 kait  
 DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN sebaris Djakarta.

1970

) 1 kait  
 Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) min. 2 kait  
 6 ketukan

-----XX  
 XX  
 XX  
 XX

) 1 kait  
 4 ketukan

1.-----XX  
 XXXXXXXX XXXXXXXX XX  
 XX

) 1 kait

2. XX  
 XX  
 XX

) 1 kait

XXX  
 XX  
 XX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

) min. 2 kait  
 )

NAMA DJABATAN

Kepada Jth. : sebaris

NAMA PENJABAT  
PANGKAT LENGKAP

) 1 kait

XXXXXXXXXXXXX.

) 1 kait

Tembusan :

) 1 kait

1. XXXXXXXXXXXXXXX.
2. XXXXXXXXXXXXXXX.
3. XXXXXXXXXXXXXXX.



**TJONTOH  
SURAT PRIBADI**

Lampiran "Q"

} 2 kait  
}

**LAMBANG  
ANGKATAN DARAT**

} 2 kait  
}

**KEPALA STAF ANGKATAN DARAT**

**Djakarta, 16 Nopember 1970**

} 1 kait

**NAMA DJABATAN**

**NAMA PENDJABAT  
PANGKAT LENGKAP**



) 2 kait  
)

2 kalt

No.: NOTA/ / /1970

No.: NOTA/ / /1970

2 kait

K e p a d a : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1 kgit

D a r i : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1 kalt

Perihal : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

5 ke  
tukan

1 kait

2 kait

;

**6 ketukan**

[illegible]

) 1 kalt

[illegible]

1 kalt

3. ---XXXXXXXXXXXXXXX~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
       XXXXXXXXXXXXXX~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
       XXXXXXXXXXXXXX~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~.

) 1 kalt

4.---XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX  
XX

1 kalt

[illegible]

) 1 kalt

```
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
```

2 kalt

/ XXXXXXX .....  
 ) min. 2 kait  
 )



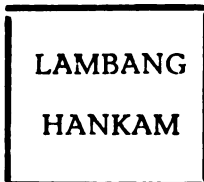
Digitized by Google





) 2 kali  
)  
DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN

) 2 kalt



) 2 kalt  
)

No.: SE/ / /1970

) 2 kalt  
)

tentang  
1 kalt

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 ,XXXXXXXXXXXXXXXXX

)	1 kalt
)	2 kalt

[illegible]

5 ke-  
tukan

4 ketukan

1 kalt

- [illegible]

2 kalt

/ 2.---Xxxxxxx .....  
       ) min. 2 kalt  
       )

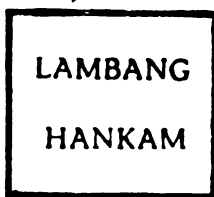


Digitized by Google



DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN

1 2 kalt



2 kalt

## PENGUMUMAN

No. : PENG/ / /1970

2 kait

tentang

1 kait

XX  
XX

1 kait

2 kalt

6 ketukan

5 ke-  
tukan

[illegible]

) 1 kait

[illegible]

) 1 kart

[illegible]

1 kai

[illegible]

1 kait

2.---XX  
 XX  
 XXXXXXXXXX XXX.

2 kalt

/ 3. **Xxxxxxx** .....  
       ) min. 2 kait

) min. 2 kait



15 ke-  
tukan

) 2 kait  
)  
2  
) 2 kait  
)

3.---XX  
XX :

) 1 kait

a) XXX  
XX  
XX.

) 1 kait

b) XXX  
XX  
XX.

) 1 kait

c) XXX 5 ke-  
XX tukan

) 1 kait

XX  
XX.

) 2 kait

)

Dikeluarkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 17 Djuli 1970

) 1 kait

NAMA DJABATAN

Sesuai dengan besar ketjilnja  
tanda tangan

Kepada Jth : \_\_\_\_\_ sebaris

) 1 kait

DISTRIBUSI "B".

) 1 kait

Tembusan :

) 1 kait

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

NAMA PENDJABAT

PANGKAT LENGKAP





## Lampiran "U"

tukan DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN

5 ke-  
tukan

[illegible]



**DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN**

) 2 kait

**MASAALAH/PERSOALAN:** .....

5 ke-  
tukan

No. Urut	No. Urut Buku Harian	Tindakan Penyelesaian		Keterangan
		Waktu	Tgl. .... 19 .....	







15 ke-  
tukan

) 2 kait

DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN

) 2 kait

SURAT - TILGRAM

) 2 kait

D a r i : XXXXXXXXXXXX DERADJAT : KILAT

) 1 kait

K e p a d a : 1. XXXXXXXXXXXX KLASIFIKASI : RAHASIA  
2. XXXXXXXXXXXX  
3. XXXXXXXXXXXX

) 1 kait

Tembusan : 1. XXXXXXXXXXXX  
2. XXXXXXXXXXXX  
3. XXXXXXXXXXXX  
4. XXXXXXXXXXXX

) min. 1 kait

N O M O R : STR/SHK/xxx/xxxx

) 1 kait

TGL. 16-11-1970

) min. 1 kait

AAA TTK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX TTK

) 1 kait

BBB TTK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TTK

) 1 kait

CCC TTK XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TTK

) 1 kait

SATU TTK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TTK

) 2 kait

/ DUA .....

) min. 2 kait

)

5 ke-  
tukan





5 ke-  
tukan

) 2 kait  
)

2.

) 2 kait  
)

DUA

TTK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TTK

5 ke-  
tukan

) 1 kait

TIGA

TTK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TTK

) 1 kait

EMPAT TTK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TTK

) 1 kait

DDD TTK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TTK

) 1 kait

EEE TTK

UMP TTK HBS

) 1 kait

AN MENHANKAM/PANGAB

WAPANGAB

**M. PANGGABEAN**

DJENDERAL TNI



15 ke-  
tukan

) 2 kait  
)  
DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN sebar.s  
Djakarta.

1971

) 1 kait  
Nomor :  
) 1 kait  
Sifat :

) 2 kait  
)  
Kepada  
) 1 kait

Jth. XXXXXXXXXXXXXXXX  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

) 2 kait  
)

SURAT - PENGANTAR

) 1 kait

5 ke-  
tukan

Nomor	Isi surat	Banjaknja	Keterangan
	BUKU MODERNISASI DESA	2 (dua) ex.	Dikirim dengan hormat untuk mendjadikan pe- riksa.

) 2 kait  
)  
NAMA DJABATAN

Tembusan : sebaris  
) 1 kait

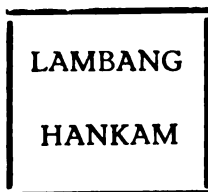
NAMA PENDJABAT  
PANGKAT LENGKAP

1. XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. XXXXXXXXXXXXXXXX.
4. XXXXXXXXXXXX.



) 2 kait

) 2 kalt  
)



) 2 kalt  
)

1 kalt

## ) : kalt

2 kart

) 1 kalt

(Kepala Tengah)

) 2 kait

6 ketukan                      1 kait

[illegible]

2.---Fasal.---XX  
XX.

1100

3. Fasal.....XX  
XX :

[illegible]

/ b. --- Sub Fasal. ....  
 } min. 2 kait



5 ke-  
tukan

) 2 kait

)

2.

) 2 kait

)

DUA

TTK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TTK

5 ke-  
tukan

) 1 kait

TIGA

TTK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TTK

) 1 kait

EMPAT TTK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TTK

) 1 kait

DDD TTK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX TTK

) 1 kait

EEE TTK UMP TTK HBS

) 1 kait

AN MENHANKAM/PANGAB

WAPANGAB

M. PANGGABEAN

DJENDERAL TNI





**SANGAT RAHASIA**

15 k-  
tukan **NAMA INSTANSI**

**LAMBANG  
ANGKATAN**

## DJUDUL KARANGAN

## REFERENSI

: PETA/NASKAH (diisi nomor, judul skala dlsb).

) 1 Zeit

## LAMPIRAN

: "A"  
"B"

## Б А В И

1 kart

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Kepala Samping

6 kotukom ) 1 katt

[illegible]

2 kait

/ 2. XXXXXXXXXXXXXXXX  
2 kolt

1

**SANGAT RAHASIA**

) min. 2 kJ:l  
)



) 2 kart  
)

2 kait



) 1 kalt

## ) : kalt

2 kalt

) 1 kalt

**(Kepala Tengah)**

) 2 kalt

6 ketukan ) 1 korit

5 ke-  
tukan

1 kost

) 2 kait

\_\_\_\_\_ ) 1 kzt

1 kait 4 ketukan

) 2 kait  
 / b.---Sub Fasal.....  
 ) min. 2 kait  
 )













15 ke-  
tukan ) 2 kait  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX

) 2 kait  
.....  
(Deradjad Keamanan)

LEMBARAN-TJATATAN

) 2 kait  
)  
) 2 kait  
)

Lembaran No. : .....

TAKAH No. : .....  
) 1 kait

5 ke-  
tukan

Kepada	Tjatatan/Nota Tindakan	Nomor Naskah

) 2 kait  
)  
.....  
(Deradjad Keamanan)  
) min. 2 kait  
)

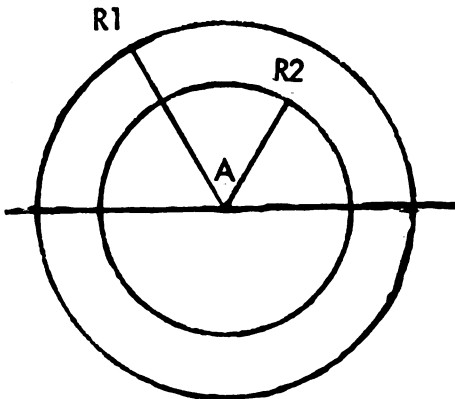






**KETENTUAN-2**  
**BENTUK DAN UKURAN TJAP DJABATAN**

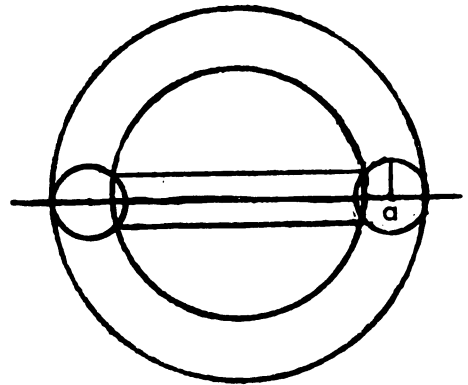
1) Berbentuk bundar.



**KETERANGAN**

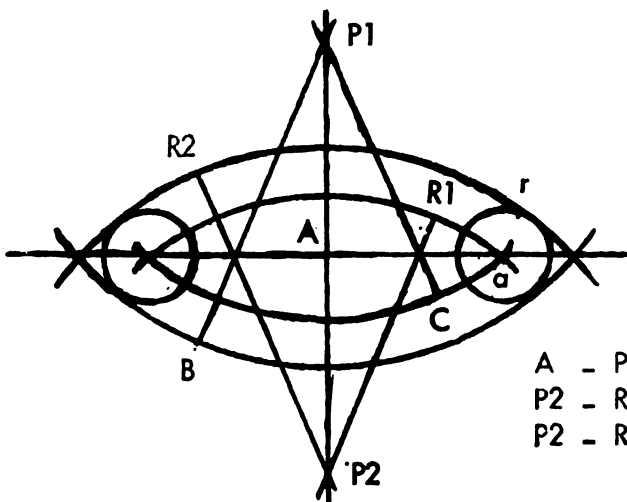
A - R1 = 2,50 cm

A - R2 = 1,70 cm



$a - r = 0,50 \text{ cm}$

2) Berbentuk lonjong.



**KETERANGAN**

A - P1 = A - P2 = 3,00 cm


P2 - R2 = P1 - B = 4,40 cm

P2 - R1 = P1 - C = 3,80 cm

$a - r = 0,50 \text{ cm}$



## 3) Berbentuk persegi.

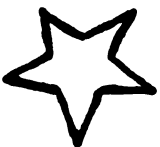
6 cm <b>MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT</b>  <b>PERWIRA PIKET</b>	3 cm 3 cm	6 cm <b>ANGDIM 0618</b> <b>POS ANGKUTAN DARAT</b> <b>KOTA BESAR SURABAJA</b>
--	--------------	---

2 cm	<b>KOMANDO DISTRIK MILITER 0618</b> <b>KOTA BESAR SURABAJA</b> <b>URUSAN PENDAFTARAN</b>												
1 ½ cm	<b>NOMOR PENDAFTARAN...../</b> .....												
1 cm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>BERANGKAT</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>DATANG/KEMBALI</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">TGL.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">DJAM</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">TGL.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">DJAM</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<b>BERANGKAT</b>	<b>DATANG/KEMBALI</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">TGL.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">DJAM</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	TGL.	DJAM			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">TGL.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">DJAM</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	TGL.	DJAM		
<b>BERANGKAT</b>	<b>DATANG/KEMBALI</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">TGL.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">DJAM</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	TGL.	DJAM			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">TGL.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">DJAM</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	TGL.	DJAM						
TGL.	DJAM												
TGL.	DJAM												
2 cm	<b>BERMALAM DI:</b> <b>KELUARGA/LOSMEN/HOTEL....</b> ..... <b>ALAMAT.....</b>												

LAMBANG TIAP-2 ANGKATAN PADA TJAP DJABATAN

AD



AL



AU



POLRI







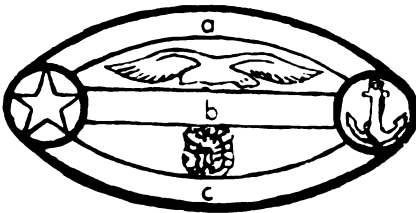
TJONTOH TJAP DJABATAN UNTUK  
PENDJABAT\_2 STAF HANKAM.



- a. MENTERI PERTAHANAN\_KEAMANAN.
- b. LAMBANG.
- c. PANGlima ANGKATAN BERSENDJATA.



- a. DEPARTEMEN PERTAHANAN\_KEAMANAN.
- b. LAMBANG.
- c. WAKIL PANGlima ANGKATAN BERSENDJATA.



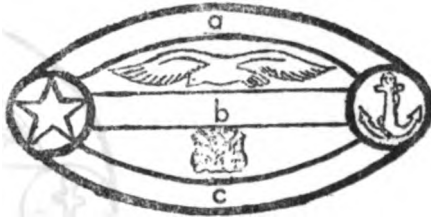
- a. DEPARTEMEN.
- b. STAF HANKAM
- c. PERTAHANAN\_KEAMANAN.



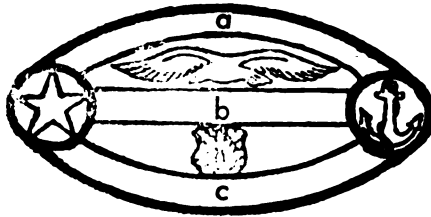
- a. DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN.
- b. KOMANDAN.
- c. KORPS MARKAS.



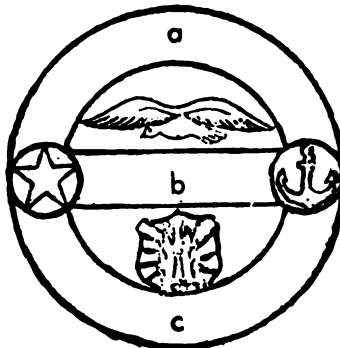
TJONTOH TJAP DJABATAN UNTUK  
PENDJABAT-2 BADAN PELAKSANA PUSAT HANKAM.



- a. DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
- b. KEPALA.
- c. PUSAT INTELIDJEN STRATEGIS.



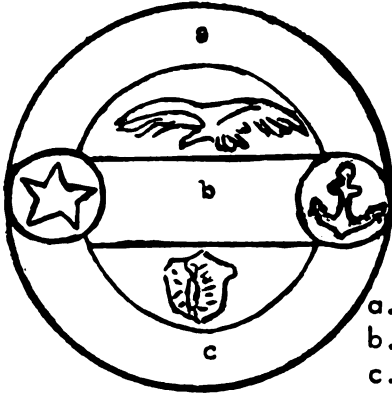
- a. DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
- b. KEPALA.
- c. PUSAT TJADANGAN NASIONAL.



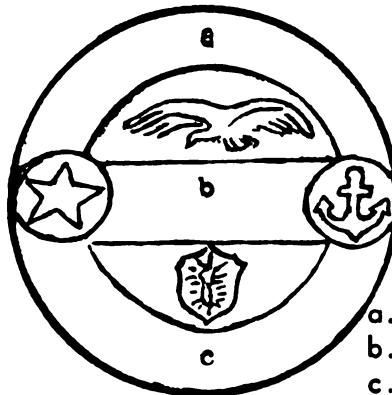
- a. DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
- b. GUBERNUR.
- c. LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL.



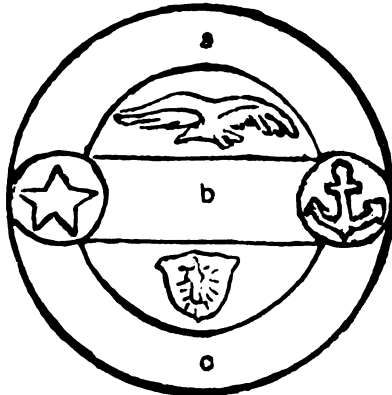
TJONTOH TJAP DJABATAN UNTUK PENDJABAT-2  
KOMANDO UTAMA OPERASIONAL HANKAM/ABRI.



- a. DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
- b. PANGlima.
- c. KOMANDO STRATEGI NASIONAL.



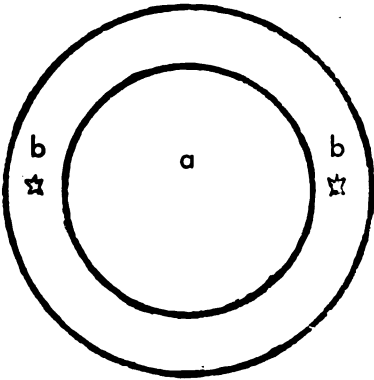
- a. DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
- b. PANGlima.
- c. KOWILHAN 1/SUMATERA.



- a. KOWILHAN 1/SUMATERA.
- b. PANGlima.
- c. DAERAH MILITER 111/17 AGUSTUS.



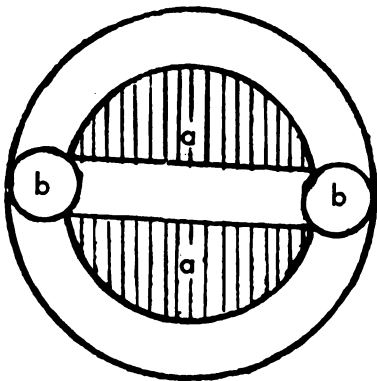
**BENTUK TJAP DJABATAN UNTUK PENDJABAT\_2 DILINGKUNGAN**  
**ANGKATAN/POLRI.**



**KETERANGAN:**

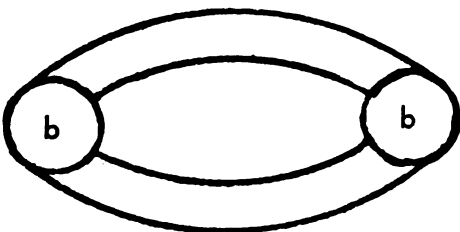
Tjap djabatn KEPALA STAF ANGKATAN/  
KAPOLRI.

- a. - gambar lambang AD untuk tjap jabatan KASAD.
- gambar lambang AL untuk tjap jabatan KASAL.
- gambar lambang AU untuk tjap jabatan KSAU.
- gambar lambang POLRI untuk tjap jabatan KAPOLRI.



Tiap jabatan untuk Pendjabat-2 yang ber-  
sifat Komando Kesatuan /Pendidikan.

- a. 17 buah Garis-2 didalam lingkaran besar.
- b. - gambar Bintang bersudut lima untuk AD.  
- gambar Djangkar untuk AL.  
- gambar Garuda untuk AU.  
- gambar Tribrata untuk POLRI.



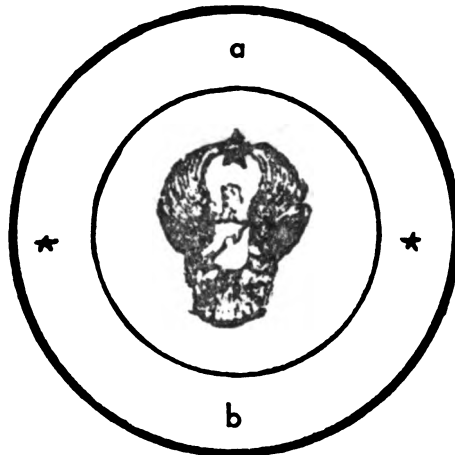
Tiap jabatan untuk Pendjabat-2. Staf/  
Badan/Dinas dan Instalasi perawatan.

- b. idem tjap dijabatkan untuk  
Komando Kesatuan/Pendidikan.



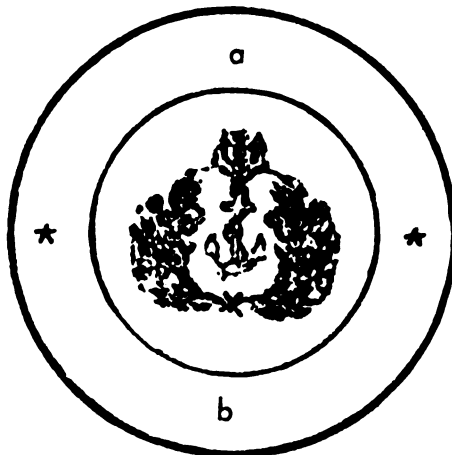


TJONTOH TJAP\_2 DJABATAN UNTUK  
KEPALA STAF ANGKATAN/KAPOLRI.



Tjap djabatan KASAD.

- a. DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
- b. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT.



Tjap djabatan KASAL.

- a. DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.
- b. KEPALA STAF ANGKATAN LAUT.

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

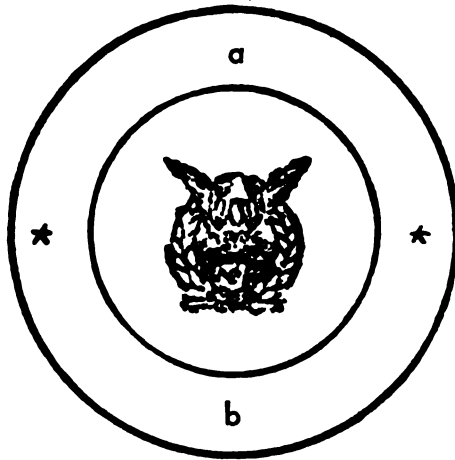
1926

1927

1928

1929

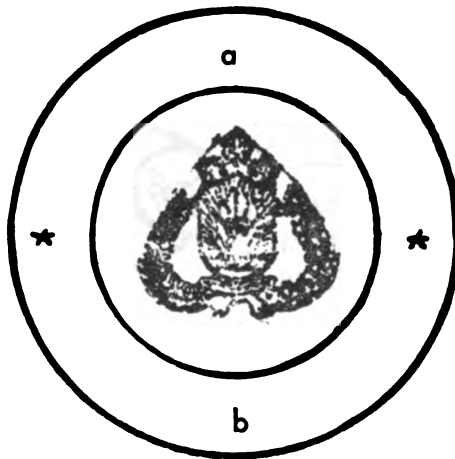
2



Tiap jabatan KSAU.

a. DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.

b. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA.



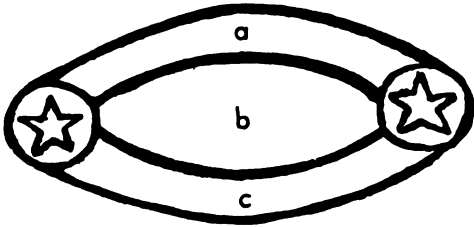
Tiap jabatan KAPOLRI.

a. DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.

b. KEPALA KEPOLISIAN R.I.

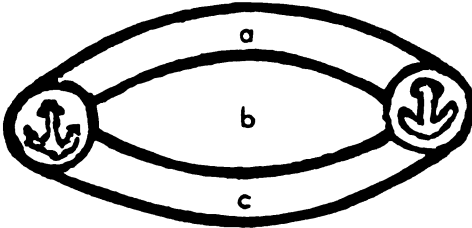


TJONTOH TJAP DJABATAN UNTUK PENDJABAT\_2  
STAF/BADAN\_2/DINAS\_2/ dan INSTALASI  
PERAWATAN ANGKATAN/POLRI



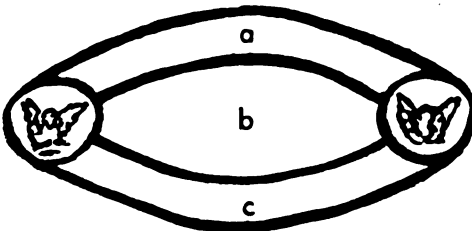
Tjap djabatan untuk Kepala Sekretariat  
Staf Angkatan Darat :

- a. MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT.
- b. KEPALA.
- c. SEKRETARIAT.



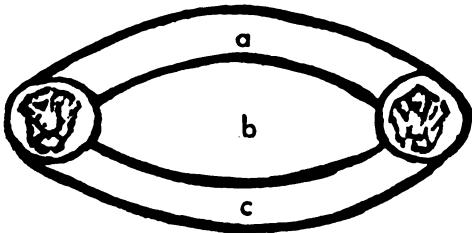
Tjap djabatan untuk Kepala Dinas  
Penerangan Staf Angkatan Laut :

- a. MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT.
- b. KEPALA.
- c. DINAS PENERANGAN.



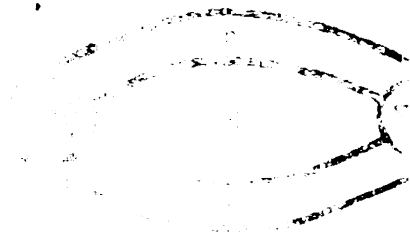
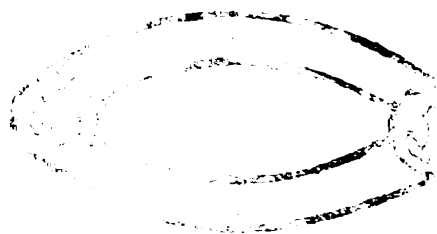
Tjap djabatan untuk Inspektur Pengawas  
Kuangan Angkatan Udara :

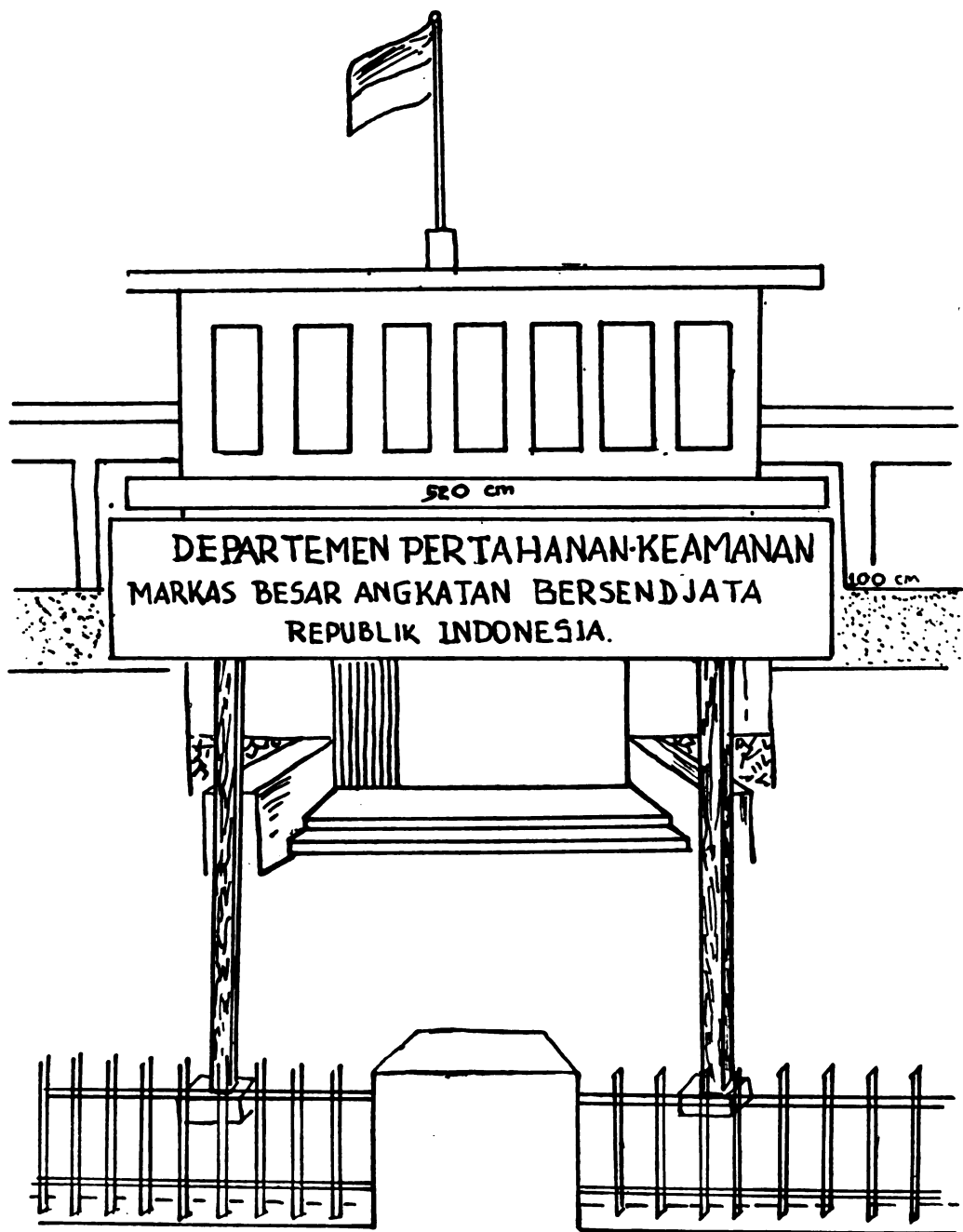
- a. MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA.
- b. INSPEKTUR.
- c. PENGAWAS KEUANGAN.

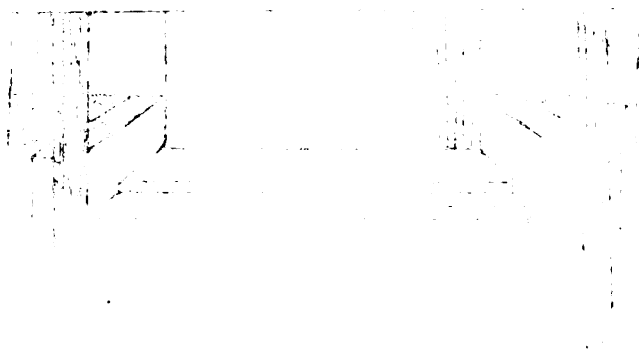


Tjap djabatan untuk Dinas Hukum  
Kepolisian R.I. :

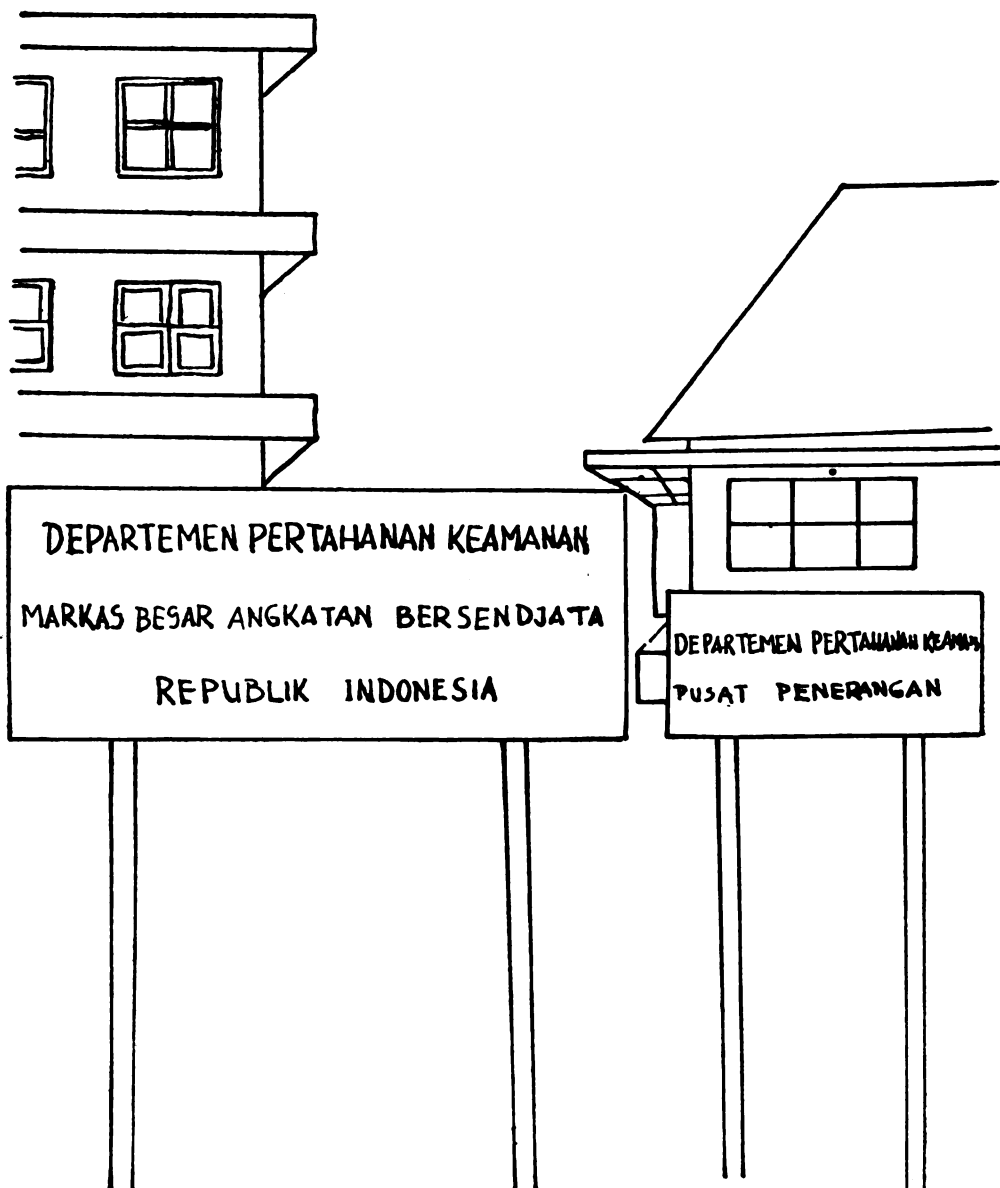
- a. MARKAS BESAR KEPOLISIAN R.I.
- b. KEPALA.
- c. DINAS HUKUM.











1875

1875

1875

1875

1875

1875

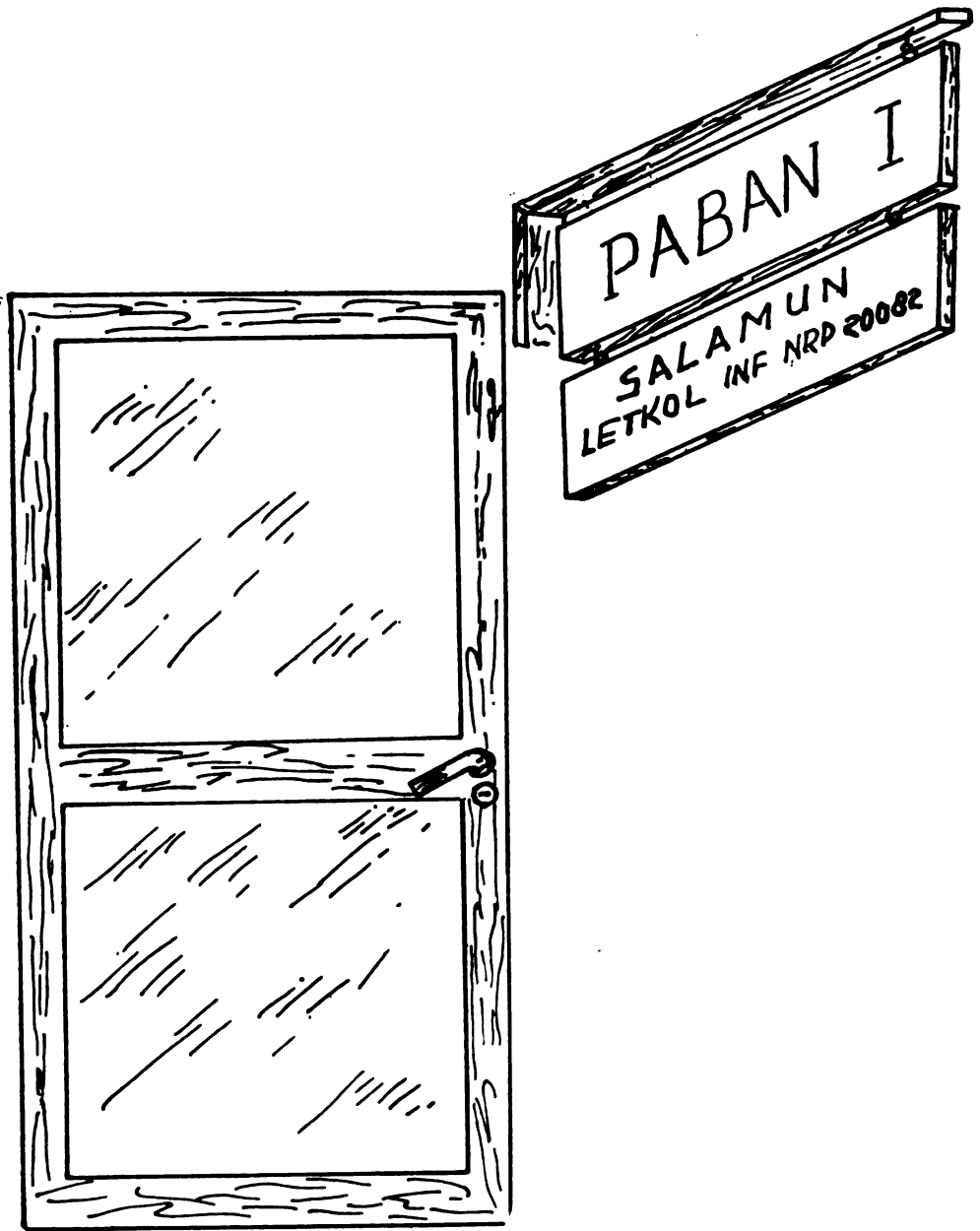
1875

1875

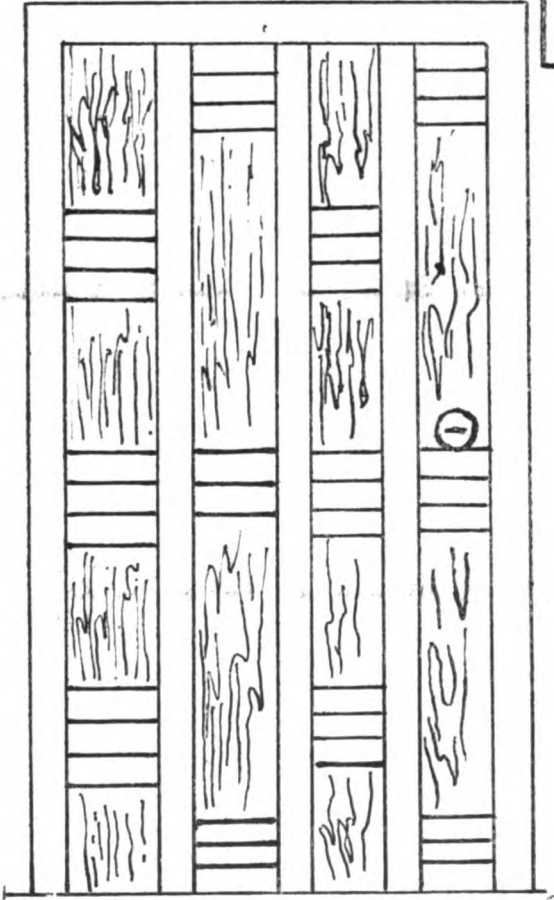
1875

1875

1875







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

















